



P U T U S A N

Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUNARKO alias YUSUF SUPENDI alias MAHFUT alias IWAN SETIAWAN
2. Tempat lahir : Cilacap
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /28 September 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat KTP. Kp. Melayu Besar No. 18 RT.003 RW.002 Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Rumah Kontrakan Jalan Raya Cilincing, Kelapa Dua (samping Mesjid Al Barkah) Jakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa SUNARKO alias YUSUF SUPENDI alias MAHFUT alias IWAN SETIAWAN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 15 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 15 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARKO Als. YUSUF SUPENDI Als. MAHFUT Als. IWAN SETIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perpajakan sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa SUNARKO Als. YUSUF SUPENDI Als. MAHFUT Als. IWAN SETIAWAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan di Rutan;
3. Membayar denda sebesar 2 X Rp. 31.172.283.560,- dengan total Rp. 62.344.567.120,00,- (enam puluh dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh tujuh seratus dua puluh rupiah), jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti :
 1. Telah disita barang bukti dari saudara SUNARKO alias YUSUF SUPENDI alias MAHFUT, selaku WIRASWASTA :
 1. Kendaraan Merk Daihatsu Siga Nopol B 2781 SYP tahun registrasi 2018 warna putih, sebanyak 1 (satu) unit.

Halaman 2 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Dirampas untuk negara

Barang Bukti pada angka 2 sampai dengan angka 18 dan barangbukti tambahan angka 1 sampai dengan angka 17 sebagaimana tersebut dalam Daftar Barang Bukti diatas dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain yaitu *Dipergunakan dalam perkara lain An.*

Terdakwa SUHERLAN;

5. Menetapkan agar Terdakwa SUNARKO Als. YUSUF SUPENDI Als. MAHFUT Als. IWAN SETIAWAN membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan putusan yang seringannya dikarenakan Terdakwa sangat menyesal dan mengakui kesalahan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SUNARKO alias MAHPUT Alias YUSUF SUPENDI Alias IWAN SETIAWAN (selanjutnya ditulis SUNARKO) bersama-sama dengan SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI (selanjutnya ditulis SEPI MUHARAM), DENI SUHERMAN alias OBAY, dan ELAN SUHERLAN Als. ELAN begitu juga para perantara LUKMANUL HAKIM, AGUS SUPRIYANTO, SANSAN SURYANA, RR.CANDRA W. YUNARTIAS (masing-masing diproses hukum dalam berkas perkara terpisah), pada waktu tertentu dari Bulan Agustus 2017 sampai dengan Bulan Mei 2019 atau pada waktu lain setidaknya antara bulan Agustus tahun 2017 sampai dengan bulan Julitahun 2019, bertempat di Kantor PT. GEMA PULAU INTAN, PT CAKRA ABDI CEMERLANG, PT. LAKSANA MEKAR SENTOSA, PT. BIMA BUMI MANDIRI, PT. MENTARI CAHAYA NUSANTARA, PT. GEMINDOTAMA PERKASA, PT. SINAR ARTNO ASIA, PT. ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA, PT. PUSPA INDAH KARYA yang beralamat di Kp Ujung Harapan No. 17 RT 006 RW 002, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi Jawa Barat, dan / atau dikantor KPP tempat perusahaan Terdakwa tersebut terdaftar yaitu di Kantor KPP Pratama Cibitung yang beralamat di Telaga Asih, Kec. Cikarang Barat

Halaman 3 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, atau ditempat lain setidaknya-tidaknya berada di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, *berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada pertengahan tahun 2015 Terdakwa SUNARKO alias MAHPUT Alias YUSUF SUPENDI Alias IWAN SETIAWAN (selanjutnya ditulis SUNARKO) ditarik atau diajak oleh saksi SEPI MUHARAM untuk menjadi supirnya, selama Terdakwa menjadi sopir tersebut Terdakwa sering diminta bantu bantu saksi SEPI MUHARAM termasuk meminjamkan rekening BCA Terdakwa nomor 2721774599 untuk penampungan hasil penjualan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (selanjutnya disingkat faktur pajak TBTS) dan Terdakwa juga diminta oleh saksi SEPI MUHARAM untuk dijadikan sebagai Direktur di perusahaan penerbit faktur pajak TBTS yang akan saksi SEPI MUHARAM buat yaitu PT CAKRA ABDI CEMERLANG, dimana dalam pendirian Perusahaan tersebut dengan menggunakan Identitas KTP milik orang lain yang fotonya ditempel foto Terdakwa . dan pada saat berurusan ke Kantor Pajakpun Terdakwa diminta oleh saksi SEPI MUHARAM untuk maju menggunakan identitas KTP palsu tersebut, dimana saksi SEPI MUHARAM pernah membuat menempel foto Terdakwa di KTP orang lain atas nama MAHFUT dan apabila ada nama MAHFUT didalam perusahaan yang digunakan untuk menerbitkan Faktur tidak Berdasarkan transaksi yang Sebenarnya (Faktur TBTS) adalah nama lain dari Terdakwa.
- Terdakwa SUNARKO alias MAHPUT Alias YUSUF SUPENDI Alias IWAN SETIAWAN (selanjutnya ditulis SUNARKO) juga pernah diminta oleh saksi SEPI MUHARAM untuk membuat rekening di BCA atas nama YUSUP SUPENDI (nama lain dari Terdakwa) untuk penampungan hasil penjualan faktur pajak TBTS dari perusahaan-perusahaan yang dibuatnya,atas pemakaian rekening BCA atas nama Terdakwa SUNARKO dan rekening

Halaman 4 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA atas nama YUSUP SUPENDI dengan rekening nomor 2721774599 Terdakwa akan dikasih imbalan sebesar 0,5% dari nilai faktur pajak TBTS dan khusus kalau order faktur pajak dari perusahaan-perusahaan dengan Direktur atas nama atas nama Direkturnya MAHFUT (nama lain dari Terdakwa) perjanjiannya akan diberi komisi sebesar 1% dari nilai PPN, dimana saksi SEPI kemudian mendirikan perusahaan diantaranya PT CAKRA ABDI CEMERLANG dimana Terdakwa SUNARKO Als MAHPUT menjadi Direktur PT CAKRA ABDI CEMERLANG tidak pernah mengurus perusahaan tersebut melainkan Terdakwa hanya dipakai namanya saja oleh saksi SEPI MUHARAM, atas keberadaan Terdakwa sebagai Direktur pada perusahaan-perusahaan yang dibuat oleh saksi SEPI MUHARAM, Terdakwa hanya diberi uang sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa pada tahun 2017 sampai dengan 2018 sebelum Terdakwa mendirikan perusahaan PT CAKRA ABDI CEMERLANG dimana Terdakwa sebagai Direkturnya, Terdakwa SUNARKO alias MAHPUT Alias YUSUF SUPENDI Alias IWAN SETIAWAN (selanjutnya ditulis SUNARKO) bersama sama saksi ELAN SUHERLAN telah mendirikan perusahaan untuk digunakan oleh Terdakwa bersama sama dengan saksi SEPI MUHARAM dengan tujuan sebagai perusahaan penerbit Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Taransaksi yang Sebenarnya (Faktur TBTS), adapun perusahaan didirikan oleh Terdakwa bersama sama dengan saksi ELAN SUHERLAN adalah sebagai berikut:
 1. PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA, terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Kemayoran, sejak tanggal 24 Agustus 2017; yang didirikan dan dijalankan oleh SUHERLAN alias ELAN dan Terdakwa SUNARKO
 2. PT GAMINDOTAMA PERKASA, terdaftar di KPP Pratama Cibinong, sejak tanggal 22 September 2017; yang didirikan oleh SUHERLAN alias ELAN dan Terdakwa SUNARKO
 3. PT SINAR ARTNO ASIA, terdaftar di KPP Pratama Depok Sawangan, sejak tanggal 12 Maret 2018; yang didirikan oleh Terdakwa SUNARKO
 4. PT BIMA BUMI MANDIRI, terdaftar di KPP Pratama Cibitung, sejak tanggal 20 September 2018; yang didirikan oleh ELAN SUHERLAN
- Bahwa pada tahun 2017 sampai dengan 2018 perusahaan yang didirikan Terdakwa SUNARKO alias MAHPUT Alias YUSUF SUPENDI Alias IWAN SETIAWAN (selanjutnya ditulis SUNARKO) bersama sama saksi ELAN SUHERLAN telah dibeli oleh saksi SEPI MUHARAM, dimana

Halaman 5 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaandimaksud untuk digunakan oleh saksi SEPI MUHARAM untuk tujuan sebagai perusahaan penerbit Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Taransaksi yang Sebenarnya (Faktur TBTS), adapun perusahaan perusahaan didirikan oleh Terdakwa bersama sama dengan saksi ELAN SUHERLAN yang dibeli oleh saksi SEPI MUHARAM adalah sebagai berikut :

a. Perusahaan yang dibeli oleh saksi SEPI MUHARAM

1. PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA, terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Kemayoran, sejak tanggal 24 Agustus 2017; yang didirikan dan dijalankan oleh SUHERLAN alias ELAN dan Terdakwa SUNARKO
2. PT GAMINDOTAMA PERKASA, terdaftar di KPP Pratama Cibinong, sejak tanggal 22 September 2017; yang didirikan oleh SUHERLAN alias ELAN dan Terdakwa SUNARKO
3. PT SINAR ARTNO ASIA, terdaftar di KPP Pratama Depok Sawangan, sejak tanggal 12 Maret 2018; yang didirikan oleh Terdakwa SUNARKO
4. PT BIMA BUMI MANDIRI, terdaftar di KPP Pratama Cibitung, sejak tanggal 20 September 2018; yang didirikan oleh ELAN SUHERLAN

b. sedangkan Perusahaan yang didirikan oleh saksi SEPI MUHARAM melalui Terdakwa SUNARKO dan saksi SUBUR AHMAD adalah :

1. PT GEMA PULAU INTAN, terdaftar di KPP Pratama Cibitung, sejak tanggal 3 Oktober 2018;
2. PT CAKRA ABDI CEMERLANG, terdaftar di KPP Pratama Cibitung, sejak tanggal 3 Oktober 2018;; dan
3. PT LAKSANA MEKAR SENTOSA, terdaftar di KPP Pratama Cibitung, sejak tanggal 6 November 2018.

- Bahwa Kronologis saksi SEPI MUHARAM dalam mendirikan PT GEMA PULAU INTAN, NPWP: 86.122.861.7-435.000; PT CAKRA ABDI CEMERLANG, NPWP: 86.122.698.3-435.000; PT LAKSANA MEKAR SANTOSA, NPWP: 86.443.244.8-435.000 pada tahun 2018 melalui Terdakwa SUNARKO adalah sebagai berikut :

- a. Dalam hal ini saksi SEPI MUHARAM meminta tolong kepada TerdakwaSUNARKO alias MAHPUT untuk dicarikan orang yang dapat mendirikan perusahaan,kemudian Terdakwa SUNARKO mencarikannya dan melakukan negoisasi terkait pendirian perusahaan kepada seseorang yang bernama saksi SUBUR AHMAD ,lalu diadakan kesepakatan harga
- b. Setelah sudah setuju dengan harganya, Terdakwa SUNARKO menyampaikan kepada saksi SEPI MUHARAM dankemudian saksi SEPI

Halaman 6 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHARAM memberikan dana terkait dengan persiapan pendirian perusahaan tersebut kepada Terdakwa SUNARKO

- c. Bahwa harga yang disepakati untuk persiapan pendirian ke dua perusahaan tersebut sebesar Rp. 60.000.000,00 per perusahaan.
 - d. Terkait data pendirian perusahaan semuanya diurus oleh Terdakwa SUNARKO, saksi SEPI MUHARAM hanya tinggal terima bersih dengan menyerahkan uang sebesar Rp120.000.000,- untuk 2 (dua) perusahaan tersebut yaitu PT GEMA PULAU INTAN, NPWP: 86.122.861.7-435.000 dan PT CAKRA ABDI CEMERLANG, NPWP: 86.122.698.3-435.000
 - e. Kemudian Terkait data pendirian satu perusahaan lagi yaitu PT LAKSANA MEKAR SANTOSA, NPWP: 86.443.244.8-435.000 semuanya diurus oleh Terdakwa SUNARKO, juga saksi SEPI MUHARAM hanya terima bersih dengan menyerahkan uang sebesar Rp40.000.000,-
- Bahwa pada proses pendirian perusahaan yang dilakukan oleh saksi SEPI MUHARAM yang pengurusannya dilakukan melalui Terdakwa SUNARKO juga atas proses penerimaan Sertifikat Elektronik dan Kode Aktivasi (password), terkait dengan proses penerbitan Faktur Pajak TBTS dari perusahaan yang saksi SEPI MUHARAM dirikan, dimana saksi SEPI MUHARAM tidak mengetahui bagaimana prosesnya karena sudah dipercayakan sepenuhnya kepada Terdakwa SUNARKO dengan rincian sebagai berikut :
- a. Bahwa saksi SEPI MUHARAM pernah menerima Sertifikat Elektronik dan Kode Aktivasi (password) tersebut;
 - b. Jadi begitu proses pendaftaran Wajib Pajak di Kantor Pajak selesai, oleh saksi SUBUR, Sertifikat Elektronik dan Kode Aktivasi (password) diserahkan kepada Terdakwa SUNARKO dan oleh Terdakwa SUNARKO diserahkan kepada saksi SEPI MUHARAM
 - c. Kemudian oleh saksi SEPI MUHARAM, Sertifikat Elektronik dan Kode Aktivasi (password) tersebut diserahkan kepada saksi SUHERLAN Als.ELAN
 - d. Selain itu juga, sebenarnya saksi SUHERLAN sudah mengetahui mengenai kombinasi password dan kode aktivasi tersebut, yaitu dari email yang masuk ke email perusahaan yang dibuat oleh saksi SEPI MUHARAM dan saksi SUHERLAN. Jadi ada email dari kantor pajak ke email tersebut yang isinya adalah kode aktivasi dan username-nya.
- Bahwa kemudian pada tahun 2017 tersebut Terdakwa SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT, saksi DENI SUHERMAN alias OBAY,

Halaman 7 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUHERLAN alias ELAN alias EKI, mengetahui bahwa saksi SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI memiliki pekerjaan sebagai penerbit Faktur Pajak Tidak Berdsarkan Transaksi yang Sebenarnya (Faktur (TBTS), yaitu dengan cara membeli dan/atau mendirikan beberapa perusahaan (PT) yang digunakan sebagai sarana untuk menerbitkan Faktur Pajak Tidak Berdsarkan Transaksi yang Sebenarnya (Faktur TBTS), dimana Perusahaan tersebut hanya menerbitkan Faktur Pajak saja, tidak pernah melakukan penjualan, tidak ada barang yang dijual, tidak pernah ada pembayaran sebesar harga barang dan PPN dari pembeli.

- Bahwa kemudian dimulai sejak tahun 2017 s.d tahun 2019, Terdakwa SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT bersama sama dengan saksi SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI bersama-sama DENI SUHERMAN alias OBAY, SUHERLAN alias ELAN alias EKI, telah mengadakan kesepakatan untuk turut kerjasama dalam melakukan perbuatan penerbitan Faktur Pajak TBTS, dengan pembagian tugas sebagai berikut:
 - a. Saksi SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI selaku leader atau pimpinan, bertugas untuk mencari atau menerima pesanan Faktur Pajak TBTS dari para pengguna langsung maupun melalui sales sales dan juga bertugas membagi komisi atau keuntungan kepada saksi DENI SUHERMAN alias OBAY, saksi SUHERLAN alias ELAN, dan Terdakwa SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT;
 - b. Terdakwa SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT, bertugas untuk mencari orang-orang yang bisa membuat perusahaan, menyediakan rekening penampungan hasil penjualan Faktur Pajak TBTS yaitu rekening atas nama saksi SUNARKO dan rekening atas nama saksi YUSUP SUPENDI, serta Terdakwa SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT juga dijadikan oleh saksi SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI untuk menduduki jabatan sebagai Direktur Utama di PT CAKRA ABDI CEMERLANG (menggunakan nama MAHPUT) dan PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA (menggunakan nama YUSUP SUPENDI).
 - c. Saksi DENI SUHERMAN alias OBAY, bertugas untuk membuat Invoice dan Surat Jalan, sebagai dokumen pelengkap dari Faktur Pajak TBTS;

Halaman 8 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Saksi SUHERLAN alias ELAN alias EKI, bertugas untuk mengupload Faktur Pajak (e-faktur) secara elektronik, membuat laporan SPT PPN, dan melaporkan SPT PPN tersebut secara online atau e-SPT, serta SUHERLAN alias ELAN alias EKI dijadikan oleh saksi SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI untuk menduduki jabatan sebagai Direktur Utama di PT LAKSANA MEKAR SENTOSA (menggunakan nama EKI); dan;

- Bahwa saksi SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI dalam menerbitkan Faktur Pajak TBTS sehingga dapat digunakan oleh perusahaan pengguna (pembeli Faktur Pajak TBTS) tersebut tidak dilakukan sendirian, yaitu selain bersama sama dengan saksi DENI SUHERMAN alias OBAY, saksi SUHERLAN alias ELAN alias EKI, dan terdakwa SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT juga dalam penjualannya melalui para perantara atau sales Faktur Pajak TBTS, yaitu beberapa orang sebagai berikut:

- a. LUKMANUL HAKIM, dengan harga/nilai jual Faktur Pajak TBTS sebesar 12,5% dari nilai PPN; dan/atau
- b. AGUS SUPRIYANTO, dengan harga/nilai jual Faktur Pajak TBTS sebesar 17% s.d. 18% dari nilai PPN; dan/atau
- c. SANSAN SURYANA, dengan harga/nilai jual Faktur Pajak TBTS sebesar 18% s.d. 20% dari nilai PPN; dan/atau
- d. HENDRIK ABDUL ROHMAN, dengan harga/nilai jual Faktur Pajak TBTS sebesar 7% dari nilai PPN.
- e. RR. CANDRA W. YUNARTIAS dengan harga/nilai jual Faktur Pajak TBTS sebesar 7% dari nilai PPN.
- f. WALMINDAR dengan harga/nilai jual Faktur Pajak TBTS sebesar 7% dari nilai PPN.
- g. RIDWAN E. BATUBARA dengan harga/nilai jual Faktur Pajak TBTS sebesar 7% dari nilai PPN.

Adapun Perusahaan para pengguna Faktur Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (Faktur TBTS) ,baik pemesanannya maupun penjualannya melalui para sales tersebut adalah sebagai berikut antara lain :

1. PT. CAHAYA UTAMA BERLIAN
2. PT. PETRO ANDRAHA ARTHA
3. PT. SAMUDRA ETAM
4. PT. INDAH TIGA SAUDARA

Halaman 9 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PT. OCEAN PETRO ENERGY
6. PT. LAROS PETROLIUM
7. PT. ANGKASA KARYA ENERGY
8. PT. SINAR BACHAN KHATULISTIWA
9. PT. ANUGERAH FASA SAKTI
10. PT. BAYU PUTRA ENERGY
11. PT. ALFA BRANITAMA
12. PT. BERKAH SOLO
13. PT. SAMUDERA JAYA ENERGY
14. PT. JAMBI TULO
15. PT. MITRA CENTRAL NIAGA
16. PT. MULTITALLY INDONESIA
17. PT. PHILIA CITRA SEJAHTERA
18. PT. BENDINASHA NIAGA INDUSTRI
19. PT. BERSUJUD BARA BESI
20. PT. MULIA BERKAH MAHABBAH
21. D L L .

- Bahwa proses penerbitan, dalam hal ini, yaitu proses jual beli antara saksi SEPI MUHARAM bersama sama dengan SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI alias IWAN dengan para perantara atau sales Faktur Pajak TBTS, dalam menerbitkan Faktur Pajak TBTS sehingga dapat digunakan oleh perusahaan pengguna (pembeli Faktur Pajak TBTS) tersebut, dilakukan dengan rangkaian sebagai berikut:
 - a) Para perusahaan pengguna (pembeli Faktur Pajak TBTS) memesan Faktur Pajak kepada para perantara atau sales Faktur Pajak TBTS, melalui email dan/atau Whatsapp, dan kemudian oleh para perantara atau sales Faktur Pajak TBTS, pesanan tersebut diteruskan/forward kepadasaksi SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI melalui Whatsapp;

Halaman 10 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	WAJIB PAJAK PENGGUNA	NOMOR FAKTUR PAJAK	TGL FAKTUR	PPN PENERBIT
1	ADITYA ARYAPRAWIRA	0100201774420452	03-Nov-17	39,600,000
2	ADITYA ARYAPRAWIRA	0100201774420453	05-Nov-17	32,850,000
3	ADITYA ARYAPRAWIRA	0100201774420454	06-Nov-17	48,750,000
4	ADITYA ARYAPRAWIRA	0100201774420455	08-Nov-17	28,800,000
5	ADITYA ARYAPRAWIRA	0100201774420456	13-Nov-17	25,550,000
6	ADITYA ARYAPRAWIRA	0100201774420457	16-Nov-17	32,400,000
7	ADITYA ARYAPRAWIRA	0100201774420458	18-Nov-17	64,800,000
8	ADITYA ARYAPRAWIRA	0100201774420459	20-Nov-17	37,000,000
9	ADITYA ARYAPRAWIRA	0100201774420460	24-Nov-17	39,600,000
10	ADITYA ARYAPRAWIRA	0100201774420461	25-Nov-17	25,200,000
11	ADITYA ARYAPRAWIRA	0100201774420462	27-Nov-17	25,550,000
12	ADITYA ARYAPRAWIRA	0100201774420463	30-Nov-17	40,700,000
13	ADITYA ARYAPRAWIRA	0100201774420464	05-Des-17	26,000,000
14	ADITYA ARYAPRAWIRA	0100201774420465	08-Des-17	13,600,000
15	ADITYA ARYAPRAWIRA	0100201774420466	13-Des-17	13,800,000
16	ADITYA ARYAPRAWIRA	0100201774420467	15-Des-17	31,500,000
17	ADITYA ARYAPRAWIRA	0100201774420468	18-Des-17	17,500,000
18	ADITYA ARYAPRAWIRA	0100201774420469	19-Des-17	9,600,000
19	ADITYA ARYAPRAWIRA	0100201774420470	20-Des-17	14,200,000
20	ADITYA ARYAPRAWIRA	0100201776962034	21-Des-17	13,000,000
21	ADITYA ARYAPRAWIRA	0100201776962035	23-Des-17	23,800,000
22	ADITYA ARYAPRAWIRA	0100201776962036	27-Des-17	9,300,000
23	ADITYA ARYAPRAWIRA	0100201776962037	29-Des-17	10,200,000
	ADITYA ARYAPRAWIRA Total			623,300,000
24	CV. AGUNG WIJAYA PUTRA	0100201774420447	07-Nov-17	10,000,000
25	CV. AGUNG WIJAYA PUTRA	0100201774420448	03-Des-17	10,036,364
	CV. AGUNG WIJAYA PUTRA Total			20,036,364
26	DINAR PUTRA MANDIRI	0100201776962038	03-Nov-17	79,709,056
27	DINAR PUTRA MANDIRI	0100201776962039	06-Nov-17	62,272,700
28	DINAR PUTRA MANDIRI	0100201776962040	09-Nov-17	79,709,056
29	DINAR PUTRA MANDIRI	0100201776962041	14-Nov-17	59,781,792
30	DINAR PUTRA MANDIRI	0100201776962042	17-Nov-17	62,272,700
31	DINAR PUTRA MANDIRI	0100201776962043	20-Nov-17	79,709,056
32	DINAR PUTRA MANDIRI	0100201776962044	23-Nov-17	39,854,528
33	DINAR PUTRA MANDIRI	0100201776962045	28-Nov-17	41,099,982
34	DINAR PUTRA MANDIRI	0100201776962046	04-Des-17	65,454,500
35	DINAR PUTRA MANDIRI	0100201776962047	07-Des-17	83,781,760

Halaman 11 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	DINAR PUTRA MANDIRI	0100201776962048	11-Des-17	83,781,760
37	DINAR PUTRA MANDIRI	0100201776962049	13-Des-17	83,781,760
38	DINAR PUTRA MANDIRI	0100201776962050	15-Des-17	65,454,500
39	DINAR PUTRA MANDIRI	0100201776962051	18-Des-17	62,836,320
40	DINAR PUTRA MANDIRI	0100201776962052	20-Des-17	41,890,880
41	DINAR PUTRA MANDIRI	0100201776962053	22-Des-17	20,945,440
42	DINAR PUTRA MANDIRI	0100201776962054	26-Des-17	45,818,150
43	DINAR PUTRA MANDIRI	0100201776962055	28-Des-17	20,945,440
44	DINAR PUTRA MANDIRI	0100201776962056	30-Des-17	49,745,420
45	DINAR PUTRA MANDIRI	0100201776962057	27-Des-17	19,636,350
	DINAR PUTRA MANDIRI Total			1,148,481,150
46	OCEAN PETRO ENERGY	0100201774420450	13-Nov-17	93,000,000
47	OCEAN PETRO ENERGY	0100201774420451	19-Des-17	124,000,000
	OCEAN PETRO ENERGY Total			217,000,000
48	MAULANA SAMUDERA GEMILANG	0110201774420449	04-Des-17	101,460,000
	MAULANA SAMUDERA GEMILANG Total			101,460,000
49	MITRA SARANA SEJATI	0100201774420446	08-Nov-17	122,000,000
	MITRA SARANA SEJATI Total			122,000,000
50	KARIMATA ENERGI PERSADA	0100201776962058	06-Nov-17	61,000,000
51	KARIMATA ENERGI PERSADA	0100201776962059	09-Nov-17	48,800,000
52	KARIMATA ENERGI PERSADA	0100201776962060	13-Nov-17	39,040,000
53	KARIMATA ENERGI PERSADA	0100201776962061	15-Nov-17	61,000,000
54	KARIMATA ENERGI PERSADA	0100201776962062	20-Nov-17	39,040,000
55	KARIMATA ENERGI PERSADA	0100201776962063	24-Nov-17	17,690,000
56	KARIMATA ENERGI PERSADA	0100201776962064	04-Des-17	64,000,000
57	KARIMATA ENERGI PERSADA	0100201776962066	11-Des-17	40,960,000
58	KARIMATA ENERGI PERSADA	0100201776962067	14-Des-17	51,200,000
59	KARIMATA ENERGI PERSADA	0100201776962068	20-Des-17	21,760,000
60	KARIMATA ENERGI PERSADA	0110201776962065	07-Des-17	51,200,000
	KARIMATA ENERGI PERSADA Total			495,690,000
61	AGUNG WIJAYA PUTRA	0100021842801732	08-Jan-18	12,350,000
62	AGUNG WIJAYA PUTRA	0100021842801751	12-Feb-18	6,819,000
	AGUNG WIJAYA PUTRA Total			19,169,000
63	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100021842801752	02-Feb-18	51,950,000
64	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100021842801753	05-Feb-18	49,045,494
65	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100021842801754	09-Feb-18	50,825,000

Halaman 12 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100021842801755	12-Feb-18	54,200,000
67	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100021842801756	15-Feb-18	52,750,000
68	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100021842801757	19-Feb-18	56,700,000
69	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100021842801758	21-Feb-18	53,550,000
70	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100021842801759	23-Feb-18	49,225,000
71	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100021842801760	26-Feb-18	52,050,000
72	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100021842801761	28-Feb-18	47,875,000
	PHILIA CITRA SEJAHTERA Total			518,170,494
73	DINAR PUTRA MANDIRI	0100021842801736	08-Jan-18	38,760,000
74	DINAR PUTRA MANDIRI	0100021842801737	10-Jan-18	16,320,000
75	DINAR PUTRA MANDIRI	0100021842801738	12-Jan-18	21,760,000
76	DINAR PUTRA MANDIRI	0100021842801739	16-Jan-18	16,320,000
77	DINAR PUTRA MANDIRI	0100021842801740	17-Jan-18	6,800,000
78	DINAR PUTRA MANDIRI	0100021842801741	18-Jan-18	42,240,000
79	DINAR PUTRA MANDIRI	0100021842801742	20-Jan-18	21,120,000
80	DINAR PUTRA MANDIRI	0100021842801743	22-Jan-18	15,840,000
81	DINAR PUTRA MANDIRI	0100021842801744	23-Jan-18	15,840,000
82	DINAR PUTRA MANDIRI	0100021842801745	24-Jan-18	21,120,000
83	DINAR PUTRA MANDIRI	0100021842801746	25-Jan-18	10,560,000
84	DINAR PUTRA MANDIRI	0100021842801747	26-Jan-18	15,840,000
85	DINAR PUTRA MANDIRI	0100021842801748	29-Jan-18	6,600,000
86	DINAR PUTRA MANDIRI	0100021842801749	30-Jan-18	12,210,000
	DINAR PUTRA MANDIRI Total			261,330,000
87	OCEAN PETRO ENERGY	0100021842801762	08-Jan-18	68,400,000
88	OCEAN PETRO ENERGY	0100021842801763	15-Jan-18	60,800,000
89	OCEAN PETRO ENERGY	0100021842801783	24-Jan-18	26,000,000
90	OCEAN PETRO ENERGY	0100021842801784	26-Jan-18	52,000,000
91	OCEAN PETRO ENERGY	0100021842801785	29-Jan-18	26,000,000
92	OCEAN PETRO ENERGY	0100021842801786	08-Jan-18	52,000,000
93	OCEAN PETRO ENERGY	0100021842801787	09-Jan-18	26,000,000
94	OCEAN PETRO ENERGY	0100021842801788	10-Jan-18	22,000,000
95	OCEAN PETRO ENERGY	0100021842801789	11-Jan-18	26,000,000
96	OCEAN PETRO ENERGY	0100021842801790	12-Jan-18	52,000,000
97	OCEAN PETRO ENERGY	0100021842801791	13-Jan-18	52,000,000
98	OCEAN PETRO ENERGY	0100021842801792	15-Jan-18	26,000,000
99	OCEAN PETRO ENERGY	0100021842801793	16-Jan-18	52,000,000
100	OCEAN PETRO ENERGY	0100021842801794	17-Jan-18	22,000,000
101	OCEAN PETRO ENERGY	0100021842801795	20-Jan-18	44,000,000

Halaman 13 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102	OCEAN PETRO ENERGY	0100021842801796	22-Jan-18	22,000,000
103	OCEAN PETRO ENERGY	0100021842801801	08-Jan-18	30,387,500
104	OCEAN PETRO ENERGY	0100021842801802	10-Jan-18	30,387,500
105	OCEAN PETRO ENERGY	0100021842860106	12-Jan-18	30,387,500
106	OCEAN PETRO ENERGY	0100021842860107	15-Jan-18	30,560,000
107	OCEAN PETRO ENERGY	0100021842860109	18-Jan-18	30,560,000
108	OCEAN PETRO ENERGY	0110021842860108	17-Jan-18	32,660,000
	OCEAN PETRO ENERGY Total			814,142,500
109	JAYA ENERGI PRIMA	0100021842801750	08-Jan-18	120,413,300
	JAYA ENERGI PRIMA Total			120,413,300
110	FAUZAN PUTRA PERKASA	0100021842801731	30-Jan-18	5,744,800
	FAUZAN PUTRA PERKASA Total			5,744,800
111	GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI	0100021842801764	08-Jan-18	88,128,000
112	GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI	0100021842801765	09-Jan-18	88,128,000
113	GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI	0100021842801766	10-Jan-18	53,703,000
114	GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI	0100021842801767	12-Jan-18	58,522,500
115	GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI	0100021842801768	13-Jan-18	61,965,000
116	GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI	0100021842801769	15-Jan-18	55,080,000
117	GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI	0100021842801770	16-Jan-18	48,195,000
118	GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI	0100021842801771	17-Jan-18	53,703,000
119	GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI	0100021842801772	19-Jan-18	55,080,000
120	GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI	0100021842801773	20-Jan-18	61,965,000
121	GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI	0100021842801774	22-Jan-18	65,407,500
122	GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI	0100021842801775	23-Jan-18	61,965,000
123	GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI	0100021842801776	24-Jan-18	58,522,500
124	GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI	0100021842801777	25-Jan-18	53,703,000
125	GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI	0100021842801778	26-Jan-18	98,455,500
126	GANANI INDONESIA	0100021842801779	29-Jan-18	89,505,000

Halaman 14 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



b) K e m u d i a n o l e h s a k k		PETROLEUM ENERGI			
		GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI Total			1,052,028,000
	127	BAYU PATRA ENERGY	0100021842801735	09-Jan-18	23,863,636
	128	BAYU PATRA ENERGY	0100021842801781	07-Feb-18	29,475,000
		BAYU PATRA ENERGY Total			53,338,636
	129	ARSA MEGA ENERGI	0100021842801728	09-Jan-18	31,450,002
	130	ARSA MEGA ENERGI	0100021842801729	27-Jan-18	33,696,431
	131	ARSA MEGA ENERGI	0100021842801730	12-Feb-18	35,454,545
		ARSA MEGA ENERGI Total			100,600,978
	132	SUMBER KETAPANG MAKMUR ABADI	0100021842801733	26-Jan-18	5,968,000
		SUMBER KETAPANG MAKMUR ABADI Total			5,968,000
	133	GAPURA OCEAN LINE PALABUHANRATU	0100021842801734	15-Feb-18	5,968,000
		GAPURA OCEAN LINE PALABUHANRATU Total			5,968,000
		Grand Total			5,684,841,222

siSEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI, pesanan Faktur Pajak TBTS tersebut diteruskan/*forward* kepada saksi SUHERLAN alias ELAN alias EKI, untuk dibuatkan atau diupload Faktur Pajaknya;

c) Setelah Faktur Pajak selesai dibuat atau diupload, maka oleh SUHERLAN alias ELAN alias EKI, dikirim kepada TerdakwaSEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI melalui Whatsapp, untuk kemudian diteruskan/*forward* kepada para perantara atau sales Faktur Pajak TBTS, untuk diteruskan/*forward* lagi kepada para perusahaan pengguna (pembeli Faktur Pajak TBTS) tersebut.

d) Kemudian saksiSEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI meminta saksi DENI SUHERMAN alias OBAY untuk membuat Invoice dan/atau Surat Jalan, sebagai pelengkap dokumen dari Faktur Pajak TBTS, untuk kemudian dikirimkan kepada para perusahaan pengguna (pembeli Faktur Pajak TBTS) tersebut.

- Bahwa rincian Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan oleh TerdakwaSUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT bersama-sama dengan SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI saksi DENI SUHERMAN alias OBAY, saksi SUHERLAN alias ELAN alias EKI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAVIES, melalui perusahaan PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA; PT GAMINDOTAMA PERKASA; PT SINAR ARTNO ASIA; PT BIMA BUMI MANDIRI; PT GEMA PULAU INTAN; PT CAKRA ABDI CEMERLANG; dan PT LAKSANA MEKAR SENTOSA;, dengan melauai perantara LUKMANUL HAKIM, AGUS SUPRIYANTO , SANSAN SURYANA , RR. CANDRA W. YUNARTIAS, , MALWINDAR dan RIDWAN E BATUBARA pada kurun waktu masa Agustus 2017 s.d. Juli 2019, adalah sebagai berikut:

- 1). Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA tahun 2017;

IKHTISAR :

NO.	WAJIB PAJAK PENGGUNA	NPWP PENGGUNA	TOTAL
1	ADITYA ARYAPRAWIRA	013703558048000	623,300,000
2	AGUNG WIJAYA PUTRA	015951288517000	19,169,000
3	ARSA MEGA ENERGI	706663937734000	100,600,978
4	BAYU PATRA ENERGY	669067332503000	53,338,636
5	CV. AGUNG WIJAYA PUTRA	015951288517000	20,036,364
6	DINAR PUTRA MANDIRI	022929459009000	1,409,811,150
7	FAUZAN PUTRA PERKASA	211230909443000	5,744,800
8	GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI	315121251416000	1,052,028,000
9	GAPURA OCEAN LINE PALABUHANRATU	751202078405000	5,968,000
10	JAYA ENERGI PRIMA	033519224047000	120,413,300
11	KARIMATA ENERGI PERSADA	712064757012000	495,690,000
12	MAULANA SAMUDERA GEMILANG	315600361401000	101,460,000
13	MITRA SARANA SEJATI	711473793307000	122,000,000
14	OCEAN PETRO ENERGY	028697829012000	1,031,142,500
15	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	518,170,494
16	SUMBER KETAPANG MAKMUR ABADI	710542721703000	5,968,000
	TOTAL		5,684,841,222

- 2). Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT GAMINDOTAMA PERKASA tahun 2017;

NO.	WAJIB PAJAK PENGGUNA	NOMOR FAKTUR PAJAK	TGL FAKTUR	PPN PENERBIT
1	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100201776562342	06-Nov-17	59,100,000
2	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100201776562343	10-Nov-17	

Halaman 16 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				51,184,312
3	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100201776562344	13-Nov-17	43,450,000
4	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100201776562345	15-Nov-17	59,450,000
5	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100201776562346	17-Nov-17	67,500,000
6	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100201776562347	21-Nov-17	63,500,000
7	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100201776562348	24-Nov-17	64,850,000
8	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100201776562349	27-Nov-17	56,750,000
9	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100201776562350	30-Nov-17	61,500,000
10	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100201776562354	01-Dec-17	53,700,000
11	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100201776562355	05-Dec-17	51,283,009
12	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100201776562356	08-Dec-17	50,000,000
13	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100201776562357	12-Dec-17	55,875,000
14	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100201776562358	15-Dec-17	57,000,000
15	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100201776562359	18-Dec-17	63,500,000
16	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100201776562360	22-Dec-17	61,600,000
17	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100201776562361	26-Dec-17	56,750,000
18	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100201776562362	29-Dec-17	61,900,000
	PHILIA CITRA SEJAHTERA Total			1,038,892,321
19	HARINCO KARYA SEJAHTERA	0100201776562363	01-Dec-17	49,875,000
20	HARINCO KARYA SEJAHTERA	0100201776562364	06-Dec-17	50,507,649
21	HARINCO KARYA SEJAHTERA	0100201776562365	11-Dec-17	49,645,000
22	HARINCO KARYA SEJAHTERA	0100201776562366	15-Dec-17	49,052,000
23	HARINCO KARYA SEJAHTERA	0100201776562367	21-Dec-17	45,300,000

Halaman 17 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	HARINCO KARYA SEJAHTERA	0100201776562368	28-Dec-17	43,870,000
25	HARINCO KARYA SEJAHTERA	0110201776562351	03-Nov-17	55,801,700
26	HARINCO KARYA SEJAHTERA	0110201776562352	08-Nov-17	67,752,500
27	HARINCO KARYA SEJAHTERA	0110201776562353	15-Nov-17	65,285,000
	HARINCO KARYA SEJAHTERA Total			477,088,849
28	DUA SAHABAT BAJA	0100201776562369	08-Nov-17	88,573,022
29	DUA SAHABAT BAJA	0100201776562370	11-Dec-17	13,100,000
	DUA SAHABAT BAJA Total			101,673,022
30	ELECOMINDO JAYAPRATAMA	0100021836286681	19-Feb-18	40,240,000
	ELECOMINDO JAYAPRATAMA Total			40,240,000
31	MULTITALLY INDONESIA	0100021836286682	01-Feb-18	48,500,000
32	MULTITALLY INDONESIA	0100021836286683	05-Feb-18	52,075,000
33	MULTITALLY INDONESIA	0100021836286684	07-Feb-18	49,957,597
34	MULTITALLY INDONESIA	0100021836286685	09-Feb-18	53,125,000
35	MULTITALLY INDONESIA	0100021836286686	12-Feb-18	47,500,000
36	MULTITALLY INDONESIA	0100021836286687	14-Feb-18	50,750,000
37	MULTITALLY INDONESIA	0100021836286688	16-Feb-18	53,500,000
38	MULTITALLY INDONESIA	0100021836286689	19-Feb-18	52,500,000
39	MULTITALLY INDONESIA	0100021836286690	22-Feb-18	52,500,000
40	MULTITALLY INDONESIA	0100021836286691	26-Feb-18	50,000,000
	MULTITALLY INDONESIA Total			510,407,597
	Grand Total			2,168,301,789

Halaman 18 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



IKHTISAR :

NO.	WAJIB PAJAK PENGGUNA	NPWP PENGGUNA	Total
1	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	1,038,892,321
2	HARINCO KARYA SEJAHTERA	025808890432000	477,088,849
3	DUA SAHABAT BAJA	028999704031000	101,673,022
4	ELECOMINDO JAYAPRATAMA	015656713036000	40,240,000
5	MULTITALLY INDONESIA	025936881027000	510,407,597
			2,168,301,789

3). Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT SINAR ARTNO ASIA Tahun 2018;

NO.	WAJIB PAJAK PENGGUNA	NOMOR FAKTUR PAJAK	TGL FAKTUR	PPN PENERBIT
1	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100031803045737	15-Mar-18	59,100,000
2	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100031803045738	16-Mar-18	43,450,000
3	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100031803045739	19-Mar-18	59,450,000
4	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100031803045740	21-Mar-18	56,250,000
5	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100031803045741	23-Mar-18	59,500,000
6	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100031803045742	27-Mar-18	57,600,000
7	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100031803045744	29-Mar-18	47,203,215
8	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100031803045745	02-Apr-18	60,750,000
9	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100031803045746	06-Apr-18	51,756,385
10	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100031803045747	09-Apr-18	59,625,000
11	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100031803045748	12-Apr-18	60,650,000
12	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100031803045749	16-Apr-18	54,750,000
13	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100031803045750	18-Apr-18	63,225,000
14	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100031803045751	20-Apr-18	53,550,000
15	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100031803045752	23-Apr-18	55,875,000
16	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100031803045753	25-Apr-18	62,125,000
17	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100031803045754	27-Apr-18	63,125,000
18	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100031803045755	30-Apr-18	54,375,000
19	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100031803045756	28-Apr-18	61,669,721
20	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100031803045761	01-Mei-18	51,950,000
21	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100031803045762	04-Mei-18	49,093,590
22	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100031803045763	07-Mei-18	50,825,000
23	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100031803045764	09-Mei-18	54,200,000
24	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100031803045765	11-Mei-18	52,750,000
25	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100031803045766	14-Mei-18	53,050,000
26	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100031803045767	18-Mei-18	49,700,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100031803045768	21-Mei-18	49,225,000
28	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100031803045769	24-Mei-18	52,050,000
29	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100031803045770	28-Mei-18	45,625,000
30	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100031803045771	31-Mei-18	43,075,000
	PHILIA CITRA SEJAHTERA Total			1,635,572,911
31	CV. SURYA MITRA BUANA	0100031803045774	15-Mar-18	15,792,125
32	CV. SURYA MITRA BUANA	0100031803045775	22-Mar-18	35,930,000
33	CV. SURYA MITRA BUANA	0100031803045776	04-Apr-18	35,373,000
34	CV. SURYA MITRA BUANA	0100031803045777	16-Apr-18	31,694,374
35	CV. SURYA MITRA BUANA	0100031803045803	01-Mei-18	10,411,069
36	CV. SURYA MITRA BUANA	0100031803045804	07-Mei-18	12,175,500
37	CV. SURYA MITRA BUANA	0100031803045805	11-Mei-18	8,682,750
38	CV. SURYA MITRA BUANA	0100031803045806	16-Mei-18	11,742,400
39	CV. SURYA MITRA BUANA	0100031803045807	21-Mei-18	16,466,155
40	CV. SURYA MITRA BUANA	0100031803045808	25-Mei-18	22,829,360
	CV. SURYA MITRA BUANA Total			201,096,733
41	DINAR PUTRA MANDIRI	0100031803045786	15-Mar-18	53,669,000
42	DINAR PUTRA MANDIRI	0100031803045787	19-Mar-18	41,888,000
43	DINAR PUTRA MANDIRI	0100031803045788	21-Mar-18	41,888,000
44	DINAR PUTRA MANDIRI	0100031803045789	23-Mar-18	41,888,000
45	DINAR PUTRA MANDIRI	0100031803045790	26-Mar-18	62,832,000
46	DINAR PUTRA MANDIRI	0100031803045791	28-Mar-18	41,888,000
47	DINAR PUTRA MANDIRI	0100031803045792	31-Mar-18	51,051,000
	DINAR PUTRA MANDIRI Total			335,104,000
48	CATUR MANUNGGA JAYA AGUNG	0100031803045800	27-Mei-18	52,181,780
49	CATUR MANUNGGA JAYA AGUNG	0100031803045801	28-Mei-18	52,181,780
50	CATUR MANUNGGA JAYA AGUNG	0100031803045802	30-Mei-18	52,181,780
	CATUR MANUNGGA JAYA AGUNG Total			156,545,340
51	ANUGRAH ABADI BARU	0100031803045772	09-Apr-18	49,137,500
52	ANUGRAH ABADI BARU	0100031803045773	16-Apr-18	50,862,500
	ANUGRAH ABADI BARU Total			100,000,000
53	OCEAN PETRO ENERGY	0100031803045809	15-Mar-18	145,454,000
54	OCEAN PETRO ENERGY	0100031803045810	21-Mar-18	145,454,000
55	OCEAN PETRO ENERGY	0100031803045811	27-Mar-18	218,181,000

Halaman 20 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	OCEAN PETRO ENERGY Total			509,089,000
56	INDAH TIGA SAUDARA	0100031803045778	05-Apr-18	54,490,909
57	INDAH TIGA SAUDARA	0100031803045779	10-Apr-18	14,836,363
58	INDAH TIGA SAUDARA	0100031803045780	11-Apr-18	14,836,363
59	INDAH TIGA SAUDARA	0100031803045781	15-Apr-18	54,490,909
60	INDAH TIGA SAUDARA	0100031803045782	16-Apr-18	3,090,909
61	INDAH TIGA SAUDARA	0100031803045783	17-Apr-18	15,472,727
62	INDAH TIGA SAUDARA	0100031803045784	19-Apr-18	13,454,545
63	INDAH TIGA SAUDARA	0100031803045785	29-Apr-18	55,963,636
	INDAH TIGA SAUDARA Total			226,636,361
64	MECHATAMA SINAR MULIA	0100031803045757	05-Apr-18	62,386,364
65	MECHATAMA SINAR MULIA	0100031803045758	06-Apr-18	60,800,000
66	MECHATAMA SINAR MULIA	0100031803045759	11-Apr-18	66,950,000
67	MECHATAMA SINAR MULIA	0100031803045760	13-Apr-18	63,883,636
68	MECHATAMA SINAR MULIA	0100031803045796	03-Mei-18	69,545,455
69	MECHATAMA SINAR MULIA	0100031803045797	05-Mei-18	69,545,455
70	MECHATAMA SINAR MULIA	0100031803045798	07-Mei-18	69,363,636
71	MECHATAMA SINAR MULIA	0100031803045799	11-Mei-18	69,454,545
	MECHATAMA SINAR MULIA Total			531,929,091
	Grand Total			3,695,973,436

IKHTISAR :

NO.	WAJIB PAJAK PENGGUNA	NPWP PENGGUNA	Total
1	ANUGRAH ABADI BARU	025665142027000	100,000,000
2	CATUR MANUNGGA JAYA AGUNG	024020638504000	156,545,340
3	CV. SURYA MITRA BUANA	022675136445000	201,096,733
4	DINAR PUTRA MANDIRI	022929459009000	335,104,000
5	INDAH TIGA SAUDARA	313153942445000	226,636,361
6	MECHATAMA SINAR MULIA	734594930503000	531,929,091
7	OCEAN PETRO ENERGY	028697829012000	509,089,000
8	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	1,635,572,91

Halaman 21 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			1
			3,695,973.43 6

4). Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT BIMA BUMI MANDIRI tahun 2018;

NO.	WAJIB PAJAK PENGGUNA	NOMOR FAKTUR PAJAK	TGL FAKTUR	PPN PENERBIT
1	CATUR MUKTI	0100051876870372	30-Des-18	39,090,909
	CATUR MUKTI Total			39,090,909
2	AGUNG WIJAYA PUTRA	0100051876870330	04-Nov-18	30,400,000
	AGUNG WIJAYA PUTRA Total			30,400,000
3	SARANA	0100051876870339	01-Okt-18	38,908,000
4	SARANA	0100051876870340	08-Okt-18	38,908,000
5	SARANA	0100051876870341	16-Okt-18	38,908,000
6	SARANA	0100051876870342	24-Okt-18	38,908,000
	SARANA Total			155,632,000
7	LAROS PETROLEUM	0100051876870317	05-Okt-18	15,800,000
8	LAROS PETROLEUM	0100051876870318	09-Okt-18	14,250,000
9	LAROS PETROLEUM	0100051876870319	15-Okt-18	69,000,000
10	LAROS PETROLEUM	0100051876870320	22-Okt-18	29,750,000
11	LAROS PETROLEUM	0100051876870321	26-Okt-18	52,500,000
12	LAROS PETROLEUM	0100051876870325	08-Okt-18	122,727,273
13	LAROS PETROLEUM	0100051876870326	29-Okt-18	86,318,182
14	LAROS PETROLEUM	0100051876870354	17-Okt-18	96,000,000

Halaman 22 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

15	LAROS PETROLEUM	0100051876870355	19-Okt-18	144,000,000
16	LAROS PETROLEUM	0100051876870356	03-Nov-18	92,000,000
17	LAROS PETROLEUM	0100051876870357	06-Nov-18	92,000,000
18	LAROS PETROLEUM	0100051876870358	07-Nov-18	92,000,000
19	LAROS PETROLEUM	0100051876870359	10-Nov-18	92,000,000
20	LAROS PETROLEUM	0100051876870360	11-Nov-18	92,000,000
21	LAROS PETROLEUM	0100051876870361	19-Nov-18	88,000,000
22	LAROS PETROLEUM	0100051876870362	22-Nov-18	88,000,000
23	LAROS PETROLEUM	0100051876870363	29-Nov-18	44,000,000
24	LAROS PETROLEUM	0100051876870373	16-Des-18	72,500,000
25	LAROS PETROLEUM	0100051876870374	20-Des-18	72,500,000
26	LAROS PETROLEUM	0100051876870375	25-Des-18	72,500,000
27	LAROS PETROLEUM	0100051876870376	29-Des-18	72,500,000
28	LAROS PETROLEUM	0100051876870377	31-Des-18	72,500,000
29	LAROS PETROLEUM	0100051876870378	03-Des-18	79,500,000
30	LAROS PETROLEUM	0100051876870379	06-Des-18	79,500,000
31	LAROS PETROLEUM	0100051876870380	10-Des-18	119,250,000
32	LAROS PETROLEUM	0100061851350073	14-Des-18	119,250,000
	LAROS PETROLEUM Total			2,070,345,455
33	SINAR BACAN KHATULISTIWA	0100051876870332	10-Okt-18	133,263,636
34	SINAR BACAN KHATULISTIWA	0100051876870333	13-Okt-18	47,663,636
35	SINAR BACAN KHATULISTIWA	0100051876870334	26-Okt-18	182,000,000

Halaman 23 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	SINAR BACAN KHATULISTIWA	0100051876870367	05-Des-18	109,318,182
37	SINAR BACAN KHATULISTIWA	0100051876870368	10-Des-18	87,454,545
38	SINAR BACAN KHATULISTIWA	0100051876870369	16-Des-18	105,113,636
39	SINAR BACAN KHATULISTIWA	0100051876870370	22-Des-18	104,727,273
40	SINAR BACAN KHATULISTIWA	0100051876870371	28-Des-18	130,909,091
	SINAR BACAN KHATULISTIWA Total			900,449,999
41	INDAH TIGA SAUDARA	0100051876870313	02-Okt-18	47,854,545
42	INDAH TIGA SAUDARA	0100051876870314	06-Okt-18	47,854,545
43	INDAH TIGA SAUDARA	0100051876870315	10-Okt-18	54,690,909
44	INDAH TIGA SAUDARA	0100051876870316	13-Okt-18	47,854,545
	INDAH TIGA SAUDARA Total			198,254,544
45	ANUGRAH SEJAHTERA SENTOSA	0100051876870327	05-Okt-18	358,750,000
46	ANUGRAH SEJAHTERA SENTOSA	0100051876870328	10-Okt-18	98,125,000
47	ANUGRAH SEJAHTERA SENTOSA	0100051876870329	24-Okt-18	64,000,000
	ANUGRAH SEJAHTERA SENTOSA Total			520,875,000
48	MUDAH SARANA ENERGI	0100051876870331	21-Nov-18	6,036,364
49	MUDAH SARANA ENERGI	0100051876870336	28-Nov-18	5,963,636
	MUDAH SARANA ENERGI Total			12,000,000
50	BAYU PATRA ENERGY	0100051876870309	18-Okt-18	53,181,818
51	BAYU PATRA ENERGY	0100051876870310	19-Okt-18	49,636,364
52	BAYU PATRA ENERGY	0100051876870311	30-Okt-18	30,490,909
53	BAYU PATRA ENERGY	0100051876870312	31-Okt-18	58,854,545
	BAYU PATRA ENERGY Total			

Halaman 24 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				192,163,636
54	CAHAYA UTAMA BERLIAN	0100051876870306	06-Okt-18	146,475,000
55	CAHAYA UTAMA BERLIAN	0100051876870307	10-Okt-18	138,000,000
	CAHAYA UTAMA BERLIAN Total			284,475,000
56	ALISHA KARUNIA PERDANA	0100051876870343	15-Nov-18	164,000,000
57	ALISHA KARUNIA PERDANA	0100051876870344	20-Nov-18	164,000,000
58	ALISHA KARUNIA PERDANA	0100051876870345	25-Nov-18	82,000,000
59	ALISHA KARUNIA PERDANA	0100051876870346	04-Des-18	120,000,000
60	ALISHA KARUNIA PERDANA	0100051876870347	05-Des-18	120,000,000
	ALISHA KARUNIA PERDANA Total			650,000,000
61	ANGKASA KARYA ENERGI	0100051876870364	03-Des-18	55,440,000
62	ANGKASA KARYA ENERGI	0100051876870365	18-Des-18	50,400,000
	ANGKASA KARYA ENERGI Total			105,840,000
63	ANUGRAH FASHA SAKTI	0100051876870337	04-Nov-18	40,950,000
64	ANUGRAH FASHA SAKTI	0100051876870338	22-Nov-18	39,600,000
	ANUGRAH FASHA SAKTI Total			80,550,000
65	MANGGALA SURYA ENERGI	0100051876870308	10-Okt-18	17,400,000
	MANGGALA SURYA ENERGI Total			17,400,000
66	SENDANG AGUNG MANDIRI	0100051876870366	30-Des-18	24,000,000
	SENDANG AGUNG MANDIRI Total			24,000,000
67	ENERGI MITRA SEJAHTERA	0100051876870322	09-Okt-18	15,200,000
68	ENERGI MITRA SEJAHTERA	0100051876870323	13-Okt-18	7,600,000
69	ENERGI MITRA SEJAHTERA	0100051876870324	21-Okt-18	7,600,000

Halaman 25 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ENERGI MITRA SEJAHTERA Total			30,400,000
70	CATUR MUKTI	0100021986344168	03-Jan-19	39,090,909
71	CATUR MUKTI	0100021986344173	15-Jan-19	51,200,000
	CATUR MUKTI Total			90,290,909
72	VIAN RAMA PRATAMA	0100021986344174	12-Jan-19	13,400,000
73	VIAN RAMA PRATAMA	0100021986344175	14-Jan-19	13,400,000
74	VIAN RAMA PRATAMA	0100021986344176	15-Jan-19	6,700,000
75	VIAN RAMA PRATAMA	0100021986344177	22-Jan-19	33,500,000
	VIAN RAMA PRATAMA Total			67,000,000
76	LAROS PETROLEUM	0100021986344188	03-Jan-19	137,000,000
77	LAROS PETROLEUM	0100021986344189	05-Jan-19	137,000,000
78	LAROS PETROLEUM	0100021986344190	07-Jan-19	137,000,000
79	LAROS PETROLEUM	0100021986344191	09-Jan-19	137,000,000
80	LAROS PETROLEUM	0100021986344192	11-Jan-19	171,250,000
81	LAROS PETROLEUM	0100021986344193	13-Jan-19	171,250,000
	LAROS PETROLEUM Total			890,500,000
82	ALISHA KARUNIA PERDANA	0100021986344169	06-Jan-19	216,000,000
	ALISHA KARUNIA PERDANA Total			216,000,000
83	ANGKASA KARYA ENERGI	0100021986344186	03-Jan-19	29,050,000
84	ANGKASA KARYA ENERGI	0100021986344187	07-Jan-19	25,398,000
	ANGKASA KARYA ENERGI Total			54,448,000
85	BUMI GATAH PERMAI	0100021986344172	11-Jan-19	3,936,170
	BUMI GATAH PERMAI Total			

Halaman 26 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				3,936,170
				6,634,051,62
	Grand Total			2

IKHTISAR :

No.	WAJIB PAJAK PENGGUNA	NPWP PENGGUNA	PPN
1	AGUNG WIJAYA PUTRA	015951288517000	30,400,000
2	ALISHA KARUNIA PERDANA	769926726721000	866,000,000
3	ANGKASA KARYA ENERGI	829224385505000	160,288,000
4	ANUGRAH FASHA SAKTI	832690010728000	80,550,000
5	ANUGRAH SEJAHTERA SENTOSA	315681775613000	520,875,000
6	BAYU PATRA ENERGY	669067332503000	192,163,636
7	BUMI GATAH PERMAI	863521100728000	3,936,170
8	CAHAYA UTAMA BERLIAN	750425977307000	284,475,000
9	CATUR MUKTI	013208657017000	129,381,818
10	ENERGI MITRA SEJAHTERA	859060139517000	30,400,000
11	INDAH TIGA SAUDARA	313153942445000	198,254,544
12	LAROS PETROLEUM	033292095419000	630,345,455
13	MANGGALA SURYA ENERGI	833190614005000	17,400,000
14	MUDAH SARANA ENERGI	663075422411000	12,000,000
15	SARANA	032867020733000	155,632,000
16	SENDANG AGUNG MANDIRI	858072739517000	24,000,000
17	SINAR BACAN KHATULISTIWA	312479538607000	900,449,999
18	VIAN RAMA PRATAMA	017972274016000	67,000,000

Halaman 27 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			6,634,051,62 2
--	--	--	-------------------

5). Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT GEMA PULAU INTAN Tahun 2018;

NO.	NAMA WAJIB PAJAK PENGGUNA	NOMOR FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK	PPN PENGGUNA
1	CV. AGUNG WIJAYA PUTRA	01000518867290 78	10/10/2018	33,818,182
	CV. AGUNG WIJAYA PUTRA Total			33,818,182
2	CV. SARANA	01100618367490 59	19/11/2018	54,732,000
3	CV. SARANA	01100618367490 60	26/11/2018	54,732,000
	CV. SARANA Total			109,464,000
4	DWI PRIMA REZEKY	01100219866050 28	21/01/2019	3,863,635
	DWI PRIMA REZEKY Total			3,863,635
5	PETRO MULYA ABADI	01000219866050 32	29/01/2019	90,000,000
	PETRO MULYA ABADI Total			90,000,000
6	PT. ALFA GRANITAMA	01000618367490 55	26/11/2018	6,646,182
	PT. ALFA GRANITAMA Total			6,646,182
7	PT. ANDALAN PRATAMA INDONESIA	01000518867291 38	12/11/2018	12,800,000
	PT. ANDALAN PRATAMA INDONESIA Total			12,800,000
8	PT. ANGKASA KARYA ENERGI	01000518867291 02	11/10/2018	29,440,000
9	PT. ANGKASA KARYA ENERGI	01000518867291 03	18/10/2018	30,360,000
10	PT. ANGKASA KARYA ENERGI	01000518867291 04	26/10/2018	30,129,080
	PT. ANGKASA KARYA ENERGI Total			89,929,080
11	PT. ANUGRAH FASHA SAKTI	01000518867291 06	12/10/2018	49,000,000
12	PT. ANUGRAH FASHA SAKTI	01000518867291 07	25/10/2018	30,000,000
13	PT. ANUGRAH FASHA SAKTI	01000518867291 08	27/10/2018	50,000,000

Halaman 28 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	PT. ANUGRAH FASHA SAKTI	01000618367490 87	12/12/2018	34,800,000
15	PT. ANUGRAH FASHA SAKTI	01000618367490 88	30/12/2018	28,000,000
	PT. ANUGRAH FASHA SAKTI Total			191,800,000
16	PT. BAYU PATRA ENERGY	01000518867290 76	20/10/2018	51,763,636
17	PT. BAYU PATRA ENERGY	01000518867290 80	30/10/2018	31,909,091
18	PT. BAYU PATRA ENERGY	01000518867290 92	30/10/2018	28,363,636
19	PT. BAYU PATRA ENERGY	01000518867290 82	31/10/2018	60,272,727
20	PT. BAYU PATRA ENERGY	01000518867290 93	31/10/2018	32,618,182
	PT. BAYU PATRA ENERGY Total			204,927,272
21	PT. CAHAYA UTAMA BERLIAN	01000518867290 84	25/10/2018	15,870,000
	PT. CAHAYA UTAMA BERLIAN Total			15,870,000
22	PT. CATUR MUKTI	01000518867291 46	10/12/2018	40,909,091
	PT. CATUR MUKTI Total			40,909,091
23	PT. INDAH TIGA SAUDARA	01000518867291 13	16/10/2018	47,854,545
24	PT. INDAH TIGA SAUDARA	01000518867291 14	20/10/2018	54,690,909
25	PT. INDAH TIGA SAUDARA	01000518867291 15	23/10/2018	54,690,909
26	PT. INDAH TIGA SAUDARA	01000518867291 16	26/10/2018	54,690,909
27	PT. INDAH TIGA SAUDARA	01000518867291 17	30/10/2018	54,690,909
	PT. INDAH TIGA SAUDARA Total			266,618,181
28	PT. IRSANI MANDIRI	01000518867291 39	27/11/2018	7,200,000
29	PT. IRSANI MANDIRI	01000518867291 40	08/12/2018	4,050,000
	PT. IRSANI MANDIRI Total			11,250,000
30	PT. LANA BUANA JAYA	01000518867290 90	11/10/2018	35,200,000
31	PT. LANA BUANA JAYA	01000518867290 91	16/10/2018	37,500,000
32	PT. LANA BUANA JAYA	01000518867291 05	16/10/2018	63,750,000

Halaman 29 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PT. LANA BUANA JAYA Total			136,450,000
33	PT. MITRA CENTRAL NIAGA	01000518867290 86	28/10/2018	59,200,000
34	PT. MITRA CENTRAL NIAGA	01000518867290 87	29/10/2018	47,360,000
35	PT. MITRA CENTRAL NIAGA	01000518867291 21	01/11/2018	74,000,000
36	PT. MITRA CENTRAL NIAGA	01000518867291 22	05/11/2018	74,000,000
37	PT. MITRA CENTRAL NIAGA	01000518867291 23	08/11/2018	74,000,000
38	PT. MITRA CENTRAL NIAGA	01000518867291 41	12/11/2018	88,800,000
39	PT. MITRA CENTRAL NIAGA	01000518867291 24	13/11/2018	44,400,000
40	PT. MITRA CENTRAL NIAGA	01000518867291 42	19/11/2018	59,200,000
41	PT. MITRA CENTRAL NIAGA	01000518867291 43	26/11/2018	47,360,000
42	PT. MITRA CENTRAL NIAGA	01000518867291 50	29/11/2018	11,840,000
43	PT. MITRA CENTRAL NIAGA	01000618367490 48	03/12/2018	74,000,000
44	PT. MITRA CENTRAL NIAGA	01000618367490 49	07/12/2018	74,000,000
45	PT. MITRA CENTRAL NIAGA	01000618367490 50	12/12/2018	74,000,000
46	PT. MITRA CENTRAL NIAGA	01000618367490 62	17/12/2018	44,400,000
47	PT. MITRA CENTRAL NIAGA	01000618367490 63	20/12/2018	53,280,000
48	PT. MITRA CENTRAL NIAGA	01000219866050 30	03/01/2019	22,400,000
49	PT. MITRA CENTRAL NIAGA	01000219866050 31	07/01/2019	22,400,000
	PT. MITRA CENTRAL NIAGA Total			944,640,000
50	PT. NAMIRA SELARAS MANDIRI	01000518867291 47	20/11/2018	29,000,000
51	PT. NAMIRA SELARAS MANDIRI	01000518867291 48	23/11/2018	26,100,000
52	PT. NAMIRA SELARAS MANDIRI	01000618367490 76	03/12/2018	15,330,000
53	PT. NAMIRA SELARAS MANDIRI	01000618367490 77	12/12/2018	13,840,000
54	PT. NAMIRA SELARAS MANDIRI	01000618367490	20/12/2018	30,660,000

Halaman 30 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		78		
55	PT. NAMIRA SELARAS MANDIRI	01000219866050 35	03/01/2019	18,750,000
56	PT. NAMIRA SELARAS MANDIRI	01000219866050 36	16/01/2019	18,750,000
57	PT. NAMIRA SELARAS MANDIRI	01000219866050 37	27/01/2019	21,750,000
	PT. NAMIRA SELARAS MANDIRI Total			174,180,000
58	PT. OCEAN PETRO ENERGY	01000618367490 51	19/11/2018	296,250,000
59	PT. OCEAN PETRO ENERGY	01000618367490 52	23/11/2018	88,000,000
60	PT. OCEAN PETRO ENERGY	01000618367490 53	26/11/2018	93,500,000
61	PT. OCEAN PETRO ENERGY	01000618367490 54	29/11/2018	80,750,000
	PT. OCEAN PETRO ENERGY Total			558,500,000
62	PT. PATRA ALAM RAYA	01100618367490 58	17/12/2018	41,600,000
	PT. PATRA ALAM RAYA Total			41,600,000
63	PT. PELITA PETROLIUM INDOASIA	01000518867290 83	17/10/2018	153,400,000
64	PT. PELITA PETROLIUM INDOASIA	01000518867290 88	02/11/2018	105,000,000
	PT. PELITA PETROLIUM INDOASIA Total			258,400,000
65	PT. PETRO ANDHARA ARTHA	01000518867291 32	11/10/2018	9,600,000
66	PT. PETRO ANDHARA ARTHA	01000518867291 33	15/10/2018	61,440,000
67	PT. PETRO ANDHARA ARTHA	01000518867291 35	18/10/2018	15,360,000
68	PT. PETRO ANDHARA ARTHA	01000518867291 34	24/10/2018	61,440,000
69	PT. PETRO ANDHARA ARTHA	01000518867291 29	31/10/2018	92,160,000
70	PT. PETRO ANDHARA ARTHA	01000618367490 66	19/11/2018	28,800,000
71	PT. PETRO ANDHARA ARTHA	01000618367490 80	20/11/2018	27,680,000
72	PT. PETRO ANDHARA ARTHA	01000618367490 81	21/11/2018	55,360,000
73	PT. PETRO ANDHARA ARTHA	01000618367490 67	22/11/2018	21,600,000

Halaman 31 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74	PT. PETRO ANDHARA ARTHA	01000618367490 68	23/11/2018	28,800,000
75	PT. PETRO ANDHARA ARTHA	01000618367490 82	26/11/2018	20,760,000
76	PT. PETRO ANDHARA ARTHA	01000618367490 69	27/11/2018	13,500,000
77	PT. PETRO ANDHARA ARTHA	01000618367490 70	29/11/2018	14,400,000
78	PT. PETRO ANDHARA ARTHA	01100618367490 84	30/11/2018	19,895,000
	PT. PETRO ANDHARA ARTHA Total			470,795,000
79	PT. RAKHA PANCA MANDIRI	01000618367490 85	17/11/2018	56,160,000
	PT. RAKHA PANCA MANDIRI Total			56,160,000
80	PT. SAHABAT SETIA JAYA	01000518867291 19	15/10/2018	282,112,000
81	PT. SAHABAT SETIA JAYA	01000518867291 20	22/10/2018	306,460,000
	PT. SAHABAT SETIA JAYA Total			588,572,000
82	PT. SAMUDRA ETAM ENERGI	01000518867290 77	10/10/2018	80,960,000
83	PT. SAMUDRA ETAM ENERGI	01000518867290 79	23/10/2018	70,545,455
84	PT. SAMUDRA ETAM ENERGI	01000518867291 09	05/11/2018	44,909,091
85	PT. SAMUDRA ETAM ENERGI	01000518867291 26	05/11/2018	43,181,818
86	PT. SAMUDRA ETAM ENERGI	01000518867291 27	13/11/2018	43,181,818
87	PT. SAMUDRA ETAM ENERGI	01000518867291 28	19/11/2018	30,227,273
88	PT. SAMUDRA ETAM ENERGI	01000618367490 61	22/11/2018	28,055,283
89	PT. SAMUDRA ETAM ENERGI	01000518867291 30	26/11/2018	12,954,545
90	PT. SAMUDRA ETAM ENERGI	01000518867291 49	03/12/2018	84,000,000
91	PT. SAMUDRA ETAM ENERGI	01000618367490 71	12/12/2018	133,636,364
92	PT. SAMUDRA ETAM ENERGI	01000618367490 47	15/12/2018	42,000,000
93	PT. SAMUDRA ETAM ENERGI	01000618367490 75	26/12/2018	20,909,091
94	PT. SAMUDRA ETAM ENERGI	01000219866050 26	03/01/2019	125,454,546

Halaman 32 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PT. SAMUDRA ETAM ENERGI Total			760,015,284
95	PT. SEKAR DJATI SELARAS	01000618367490 89	19/11/2018	20,618,182
	PT. SEKAR DJATI SELARAS Total			20,618,182
96	PT. SENDANG AGUNG MANDIRI	01000618367490 72	26/12/2018	12,800,000
97	PT. SENDANG AGUNG MANDIRI	01000618367490 73	29/12/2018	12,800,000
	PT. SENDANG AGUNG MANDIRI Total			25,600,000
98	PT. SINYUN KARYA ANUGRAH	01000518867290 81	15/10/2018	25,000,000
99	PT. SINYUN KARYA ANUGRAH	01000518867290 94	22/10/2018	49,090,909
	PT. SINYUN KARYA ANUGRAH Total			74,090,909
100	PT. TELADAN MAKMUR JAYA	01000518867290 95	02/11/2018	22,560,000
101	PT. TELADAN MAKMUR JAYA	01000518867290 96	03/11/2018	15,040,000
102	PT. TELADAN MAKMUR JAYA	01000518867290 97	05/11/2018	22,560,000
103	PT. TELADAN MAKMUR JAYA	01000518867290 98	06/11/2018	22,560,000
104	PT. TELADAN MAKMUR JAYA	01000518867290 99	07/11/2018	15,040,000
105	PT. TELADAN MAKMUR JAYA	01000518867291 00	08/11/2018	15,040,000
106	PT. TELADAN MAKMUR JAYA	01100518867291 10	11/11/2018	27,840,000
107	PT. TELADAN MAKMUR JAYA	01100518867291 11	12/11/2018	27,840,000
108	PT. TELADAN MAKMUR JAYA	01100518867291 12	13/11/2018	41,760,000
	PT. TELADAN MAKMUR JAYA Total			210,240,000
109	PT. WADI INTI KENCANA	01000618367490 64	19/11/2018	47,418,240
110	PT. WADI INTI KENCANA	01000618367490 65	27/11/2018	45,672,960
	PT. WADI INTI KENCANA Total			93,091,200
111	PT. YAVINDO SUMBER PERSADA	01000518867291 25	29/10/2018	52,545,640
	PT. YAVINDO SUMBER PERSADA Total			52,545,640

Halaman 33 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Grand Total		5,543,393,838
--	-------------	--	---------------

IKHTISAR :

No.	NAMA WAJIB PAJAK PENGGUNA	NPWP PENGGUNA	Total
1	CV. AGUNG WIJAYA PUTRA	015951288517000	33,818,182
2	CV. SARANA	032867020733000	109,464,000
3	DWI PRIMA REZEKY	022685994403000	3,863,635
4	PETRO MULYA ABADI	862645439517000	90,000,000
5	PT. ALFA GRANITAMA	032786139012000	6,646,182
6	PT. ANDALAN PRATAMA INDONESIA	849877030416000	12,800,000
7	PT. ANGKASA KARYA ENERGI	829224385505000	89,929,080
8	PT. ANUGRAH FASHA SAKTI	832690010728000	191,800,000
9	PT. BAYU PATRA ENERGY	669067332503000	204,927,272
10	PT. CAHAYA UTAMA BERLIAN	750425977307000	15,870,000
11	PT. CATUR MUKTI	013208657017000	40,909,091
12	PT. INDAH TIGA SAUDARA	313153942445000	266,618,181
13	PT. IRSANI MANDIRI	025005372112000	11,250,000
14	PT. LANA BUANA JAYA	018459628027000	136,450,000
15	PT. MITRA CENTRAL NIAGA	724131388624000	944,640,000
16	PT. NAMIRA SELARAS MANDIRI	840951198446000	174,180,000
17	PT. OCEAN PETRO ENERGY	028697829012000	558,500,000
18	PT. PATRA ALAM RAYA	025855107411000	41,600,000
19	PT. PELITA PETROLIUM INDOASIA	023429459734000	258,400,000
20	PT. PETRO ANDHARA ARTHA	747754463112000	470,795,000
21	PT. RAKHA PANCA MANDIRI	828034249601000	56,160,000
22	PT. SAHABAT SETIA JAYA	030015705607000	588,572,000
23	PT. SAMUDRA ETAM ENERGI	022138614437001	325,960,000
24	PT. SAMUDRA ETAM ENERGI	022138614501001	28,055,283
25	PT. SAMUDRA ETAM ENERGI	022138614724000	406,000,001
26	PT. SEKAR DJATI SELARAS	825087851453000	20,618,182
27	PT. SENDANG AGUNG MANDIRI	858072739517000	25,600,000
28	PT. SINYUN KARYA ANUGRAH	763403433951000	74,090,909
29	PT. TELADAN MAKMUR JAYA	024897191731000	210,240,000
30	PT. WADI INTI KENCANA	769141524643000	93,091,200
31	PT. YAVINDO SUMBER PERSADA	026504480517001	52,545,640
			5,543,393,838

Halaman 34 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



6). Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT CAKRA ABDI CEMERLANG tahun 2018;

NO.	NAMA WAJIB PAJAK PENGGUNA	NPWP PENGGUNA	NOMOR FAKTUR PAJAK	TANGGA L FAKTUR PAJAK	PPN PENGGUN A
1	BERSUJUD BARA BESI	81038974273400 0	010005188675178 7	03/12/201 8	17,090,909
2	BERSUJUD BARA BESI	81038974273400 0	010005188675178 8	06/12/201 8	17,090,909
3	BERSUJUD BARA BESI	81038974273400 0	010005188675178 9	08/12/201 8	17,090,909
4	BERSUJUD BARA BESI	81038974273400 0	010005188675179 0	11/12/201 8	17,090,909
5	BERSUJUD BARA BESI	81038974273400 0	010005188675179 1	13/12/201 8	17,090,909
	BERSUJUD BARA BESI Total				85,454,545
6	CV. MEGAH JAYA ABADI	73498081672200 0	010005188675173 0	15/10/201 8	53,400,000
7	CV. MEGAH JAYA ABADI	73498081672200 0	010005188675173 1	22/10/201 8	76,000,000
	CV. MEGAH JAYA ABADI Total				129,400,00 0
8	CV. SARANA	03286702073300 0	011005188675174 8	05/11/201 8	45,895,500
9	CV. SARANA	03286702073300 0	011005188675174 9	12/11/201 8	45,895,500
10	CV. SARANA	03286702073300 0	010005188675176 2	03/12/201 8	43,800,000
11	CV. SARANA	03286702073300 0	010005188675176 3	11/12/201 8	43,800,000
12	CV. SARANA	03286702073300 0	010005188675176 4	17/12/201 8	47,304,000
13	CV. SARANA	03286702073300 0	010005188675176 5	27/12/201 8	47,304,000
	CV. SARANA Total				273,999,00 0
14	MULIA BERKAH MAHABBAH	83771725573200 0	010005188675178 3	12/12/201 8	7,727,273
15	MULIA BERKAH MAHABBAH	83771725573200 0	010005188675178 4	27/12/201 8	7,727,273
	MULIA BERKAH				15,454,546

Halaman 35 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MAHABBAH Total				
16	PT. ADRIAN JAYA MANDIRI	711333724731000	0100051886751729	16/10/2018	42,750,000
17	PT. ADRIAN JAYA MANDIRI	711333724731000	0100051886751760	02/11/2018	38,520,000
18	PT. ADRIAN JAYA MANDIRI	711333724731000	0100051886751761	17/11/2018	46,500,000
	PT. ADRIAN JAYA MANDIRI Total				127,770,000
19	PT. ANGKASA KARYA ENERGI	829224385505000	0100051886751727	05/11/2018	41,000,000
20	PT. ANGKASA KARYA ENERGI	829224385505000	0100051886751728	12/11/2018	42,829,420
21	PT. ANGKASA KARYA ENERGI	829224385505000	0100051886751733	21/11/2018	42,250,000
22	PT. ANGKASA KARYA ENERGI	829224385505000	0100051886751734	28/11/2018	44,325,320
	PT. ANGKASA KARYA ENERGI Total				170,404,740
23	PT. BAYU PATRA ENERGY	669067332503000	0100051886751725	29/11/2018	244,281,818
24	PT. BAYU PATRA ENERGY	669067332503000	0100051886751732	30/11/2018	107,072,727
25	PT. BAYU PATRA ENERGY	669067332503000	0100051886751758	28/12/2018	216,981,818
26	PT. BAYU PATRA ENERGY	669067332503000	0100051886751759	31/12/2018	16,663,636
	PT. BAYU PATRA ENERGY Total				584,999,999
27	PT. ENERGI MITRA SEJAHTERA	859060139517000	0100051886751738	19/11/2018	24,000,000
	PT. ENERGI MITRA SEJAHTERA Total				24,000,000
28	PT. INDAH TIGA SAUDARA	313153942445000	0100051886751739	05/11/2018	47,854,545
29	PT. INDAH TIGA SAUDARA	313153942445000	0100051886751740	08/11/2018	47,854,545
30	PT. INDAH TIGA SAUDARA	313153942445000	0100051886751741	12/11/2018	47,854,545
31	PT. INDAH TIGA SAUDARA	313153942445000	0100051886751742	15/11/2018	44,436,364
32	PT. INDAH TIGA SAUDARA	313153942445000	0100051886751743	19/11/2018	32,727,273
33	PT. INDAH TIGA SAUDARA	313153942445000	0100051886751744	22/11/2018	32,727,273

Halaman 36 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	PT. INDAH TIGA SAUDARA	31315394244500 0	010005188675174 5	24/11/201 8	32,727,273
35	PT. INDAH TIGA SAUDARA	31315394244500 0	010005188675174 6	27/11/201 8	32,727,273
36	PT. INDAH TIGA SAUDARA	31315394244500 0	010005188675174 7	30/11/201 8	32,727,273
37	PT. INDAH TIGA SAUDARA	31315394244500 0	010005188675176 8	03/12/201 8	34,181,818
38	PT. INDAH TIGA SAUDARA	31315394244500 0	010005188675176 9	06/12/201 8	34,181,818
39	PT. INDAH TIGA SAUDARA	31315394244500 0	010005188675177 0	08/12/201 8	34,181,818
40	PT. INDAH TIGA SAUDARA	31315394244500 0	010005188675177 1	12/12/201 8	34,181,818
41	PT. INDAH TIGA SAUDARA	31315394244500 0	010005188675177 2	15/12/201 8	34,181,818
42	PT. INDAH TIGA SAUDARA	31315394244500 0	010005188675177 3	18/12/201 8	34,181,818
43	PT. INDAH TIGA SAUDARA	31315394244500 0	010005188675177 4	21/12/201 8	34,181,818
44	PT. INDAH TIGA SAUDARA	31315394244500 0	010005188675177 5	26/12/201 8	34,181,818
45	PT. INDAH TIGA SAUDARA	31315394244500 0	010005188675177 6	29/12/201 8	38,454,545
	PT. INDAH TIGA SAUDARA Total				663,545,45 3
46	PT. LAROS PETROLEUM	03329209573200 2	010003191930568 8	17/01/201 9	128,000,00 0
47	PT. LAROS PETROLEUM	03329209573200 2	010003191930568 9	20/01/201 9	128,000,00 0
48	PT. LAROS PETROLEUM	03329209573200 2	010003191930569 0	22/01/201 9	128,000,00 0
49	PT. LAROS PETROLEUM	03329209573200 2	010003191930569 1	25/01/201 9	128,000,00 0
50	PT. LAROS PETROLEUM	03329209573200 2	010003191930569 2	29/01/201 9	128,000,00 0
	PT. LAROS PETROLEUM Total				640,000,00 0
51	PT. MITRA CENTRAL NIAGA	72413138862400 0	010003191930567 6	21/01/201 9	29,600,000
52	PT. MITRA CENTRAL NIAGA	72413138862400 0	010003191930567 7	25/01/201 9	29,600,000
53	PT. MITRA CENTRAL NIAGA	72413138862400 0	010003191930567 8	29/01/201 9	29,600,000
	PT. MITRA CENTRAL				88,800,000

Halaman 37 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	NIAGA Total				
54	PT. MUDAH SARANA ENERGI	663075422411000	0100031919305680	16/01/2019	24,890,909
55	PT. MUDAH SARANA ENERGI	663075422411000	0100031919305674	28/01/2019	5,890,909
	PT. MUDAH SARANA ENERGI Total				30,781,818
56	PT. NAMIRA SELARAS MANDIRI	840951198446000	0100051886751736	31/10/2018	26,250,000
57	PT. NAMIRA SELARAS MANDIRI	840951198446000	0100051886751737	14/11/2018	25,575,000
	PT. NAMIRA SELARAS MANDIRI Total				51,825,000
58	PT. OCEAN PETRO ENERGY	028697829012000	0100051886751750	12/10/2018	197,500,000
59	PT. OCEAN PETRO ENERGY	028697829012000	0100051886751751	15/10/2018	27,000,000
60	PT. OCEAN PETRO ENERGY	028697829012000	0100051886751752	18/10/2018	52,250,000
61	PT. OCEAN PETRO ENERGY	028697829012000	0100051886751753	23/10/2018	180,000,000
62	PT. OCEAN PETRO ENERGY	028697829012000	0100051886751754	26/10/2018	77,000,000
63	PT. OCEAN PETRO ENERGY	028697829012000	0100051886751755	30/10/2018	126,500,000
	PT. OCEAN PETRO ENERGY Total				660,250,000
64	PT. SAMUDRA ETAM ENERGI	022138614724000	0100031919305670	10/01/2019	70,000,000
65	PT. SAMUDRA ETAM ENERGI	022138614724000	0100031919305672	28/01/2019	35,000,000
66	PT. SAMUDRA ETAM ENERGI	022138614724000	0100031919305673	29/01/2019	35,000,000
	PT. SAMUDRA ETAM ENERGI Total				140,000,000
67	PT. SEKAR DJATI SELARAS	825087851453000	0100051886751785	16/12/2018	13,381,818
	PT. SEKAR DJATI SELARAS Total				13,381,818
68	PT. SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA	315921536615000	0100051886751735	16/10/2018	101,000,000
	PT. SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA Total				101,000,000

Halaman 38 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69	PT. SINYUN KARYA ANUGRAH	763403433951000	0100051886751726	26/11/2018	26,136,364
	PT. SINYUN KARYA ANUGRAH Total				26,136,364
70	PT. SUPERCHEM PRIMA LESTARI	743951170422000	0100031919305669	09/01/2019	6,048,000
71	PT. SUPERCHEM PRIMA LESTARI	743951170422000	0100031919305671	14/01/2019	6,048,000
	PT. SUPERCHEM PRIMA LESTARI Total				12,096,000
72	PT. WADI INTI KENCANA	769141524643000	0100051886751756	10/10/2018	45,381,760
73	PT. WADI INTI KENCANA	769141524643000	0100051886751757	23/10/2018	22,981,760
	PT. WADI INTI KENCANA Total				68,363,520
	Grand Total				3,907,662,803

IKHTISAR :

No.	NAMA WAJIB PAJAK PENGGUNA	NPWP PENGGUNA	Total
1	BERSUJUD BARA BESI	810389742734000	85,454,545
2	CV. MEGAH JAYA ABADI	734980816722000	129,400,000
3	CV. SARANA	032867020733000	273,999,000
4	MULIA BERKAH MAHABBAH	837717255732000	15,454,546
5	PT. ADRIAN JAYA MANDIRI	711333724731000	127,770,000
6	PT. ANGKASA KARYA ENERGI	829224385505000	170,404,740
7	PT. BAYU PATRA ENERGY	669067332503000	584,999,999
8	PT. ENERGI MITRA SEJAHTERA	859060139517000	24,000,000
9	PT. INDAH TIGA SAUDARA	313153942445000	663,545,453
10	PT. LAROS PETROLEUM	033292095732002	640,000,000
11	PT. MITRA CENTRAL NIAGA	724131388624000	88,800,000
12	PT. MUDAH SARANA ENERGI	663075422411000	30,781,818
13	PT. NAMIRA SELARAS MANDIRI	840951198446000	51,825,000
14	PT. OCEAN PETRO ENERGY	028697829012000	660,250,000
15	PT. SAMUDRA ETAM ENERGI	022138614724000	140,000,000
16	PT. SEKAR DJATI SELARAS	825087851453000	13,381,818
17	PT. SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA	315921536615000	101,000,000
18	PT. SINYUN KARYA ANUGRAH	763403433951000	26,136,364
19	PT. SUPERCHEM PRIMA LESTARI	743951170422000	12,096,000

Halaman 39 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	PT. WADIINTI KENCANA	769141524643000	68,363,520
			3,907,662,803

7). Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT LAKSANA MEKAR SENTOSA Tahun 2018 ;

NO.	NAMA WAJIB PAJAK PENGGUNA	NOMOR FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK	PPN PENGGUNA
1	BENDI NASHA NIAGA INDUSTRI	0100061837820430	21/11/2018	49,472,000
2	BENDI NASHA NIAGA INDUSTRI	0100061837820431	27/11/2018	49,472,000
	BENDI NASHA NIAGA INDUSTRI Total			98,944,000
3	BERSUJUD BARA BESI	0100061837820419	15/12/2018	15,636,364
4	BERSUJUD BARA BESI	0100061837820420	17/12/2018	15,636,364
5	BERSUJUD BARA BESI	0100061837820421	19/12/2018	15,636,364
6	BERSUJUD BARA BESI	0100061837820422	22/12/2018	15,636,364
7	BERSUJUD BARA BESI	0100061837820423	25/12/2018	15,636,364
8	BERSUJUD BARA BESI	0100061837820424	27/12/2018	15,636,364
9	BERSUJUD BARA BESI	0100061837820425	30/12/2018	15,636,364
	BERSUJUD BARA BESI Total			109,454,548
10	CIPTA SARANA SINERGI	0100061837820426	09/12/2018	158,000,000
11	CIPTA SARANA SINERGI	0100061837820427	11/12/2018	118,500,000
12	CIPTA SARANA SINERGI	0100061837820428	14/12/2018	39,500,000
	CIPTA SARANA SINERGI Total			316,000,000
13	PT. ADRIAN JAYA MANDIRI	0100061837820429	20/12/2018	45,980,000
	PT. ADRIAN JAYA MANDIRI Total			45,980,000
14	PT. LAROS PETROLEUM	0100061837820418	21/12/2018	360,000,000
	PT. LAROS PETROLEUM Total			

Halaman 40 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



				360,000,000
15	PT. PETRO ANDHARA ARTHA	0100061837820434	15/12/2018	51,776,000
16	PT. PETRO ANDHARA ARTHA	0100061837820435	19/12/2018	29,720,000
17	PT. PETRO ANDHARA ARTHA	0100061837820436	23/12/2018	47,552,000
18	PT. PETRO ANDHARA ARTHA	0100061837820437	27/12/2018	47,552,000
19	PT. PETRO ANDHARA ARTHA	0110061837820438	28/12/2018	35,664,000
	PT. PETRO ANDHARA ARTHA Total			212,264,000
	Grand Total			1,142,642,548

IKHTISAR :

No.	NAMA WAJIB PAJAK PENGGUNA	NPWP PENGGUNA	Total
1	BENDI NASHA NIAGA INDUSTRI	829521756401000	98,944,000
2	BERSUJUD BARA BESI	810389742734000	109,454,548
3	CIPTA SARANA SINERGI	726857444721000	316,000,000
4	PT. ADRIAN JAYA MANDIRI	711333724731000	45,980,000
5	PT. LAROS PETROLEUM	033292095419000	360,000,000
6	PT. PETRO ANDHARA ARTHA	747754463112000	212,264,000
			1,142,642,548

- Bahwa SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI, bersama-sama dengan timnya Terdakwa SUNARKO alias YUSUF SUPENDI alias MAHPUT juga berperan sebagai pihak lain atau orang yang turut serta dengan HENDRIK ABDUL ROHMAN alias HENDRIK ABD ROHMAN alias HENDRIK dalam menerbitkan Faktur Pajak TBTS sebagai perantara, yaitu dengan cara membeli Faktur Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya atau Faktur Pajak TBTS dibeli dari HENDRIK ABDUL ROHMAN alias HENDRIK SUTISNA dan dari ARIS SUDIRMAN, yaitu dari perusahaan penerbit sebagai berikut:
1. PT ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA (didirikan oleh HENDRIK ABDUL ROHMAN alias HENDRIK SUTISNA dan Haji ARIS alias ARIS SUDIRMAN).
 2. PT PUSPA INDAH KARYA (didirikan oleh Haji ARIS alias ARIS SUDIRMAN).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Faktur Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya atau Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan PT. ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA dan PT. PUSPA INDAH KARYA yang dijukan oleh SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI bersama-sama dengan timnya termasuk Terdakwa SUNARKO alias YUSUF SUPENDI alias MAHPUT dengan rincian adalah sebagai berikut :

- a) Faktur Pajak yang diterbitkan melalui PT ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA, dimana SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI bersama-sama dengan timnya termasuk Terdakwa SUNARKO alias YUSUF SUPENDI alias MAHPUT bertindak sebagai perantara atau sales sejak bulan Agustus s/d Oktober 2018 sebagai berikut :

NO.	WAJIB PAJAK PENGGUNA	NOMOR FAKTUR PAJAK	TGL FAKTUR	PPN PENERBIT
1	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100051831618800	22-Agu-18	57,317,500
2	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100051831618801	22-Agu-18	51,157,909
3	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100051831618802	23-Agu-18	52,325,000
4	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100051831618803	24-Agu-18	54,525,000
5	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100051831618804	25-Agu-18	58,000,000
6	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100051831618805	25-Agu-18	52,900,000
7	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100051831618806	27-Agu-18	53,500,000
8	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100051831618807	28-Agu-18	51,725,000
9	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100051831618808	29-Agu-18	53,850,000
10	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100051831618809	30-Agu-18	59,750,000
11	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100051831618810	31-Agu-18	58,300,000
12	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100051864277273	25-Sep-18	38,750,000
13	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100051864277274	26-Sep-18	32,212,767
14	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100051864277275	27-Sep-18	42,550,000

Halaman 42 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100051864277276	28-Sep-18	42,037,500
16	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100051864277277	29-Sep-18	39,750,000
17	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0100051864277278	24-Sep-18	37,000,000
18	MULTITALLY INDONESIA	0100051831618811	22-Agu-18	54,950,000
19	MULTITALLY INDONESIA	0100051831618812	23-Agu-18	58,850,000
20	MULTITALLY INDONESIA	0100051831618813	24-Agu-18	51,508,172
21	MULTITALLY INDONESIA	0100051831618814	25-Agu-18	56,250,000
22	MULTITALLY INDONESIA	0100051831618815	27-Agu-18	54,500,000
23	MULTITALLY INDONESIA	0100051831618816	28-Agu-18	56,000,000
24	MULTITALLY INDONESIA	0100051831618817	29-Agu-18	54,600,000
25	MULTITALLY INDONESIA	0100051831618818	31-Agu-18	55,000,000
26	MULTITALLY INDONESIA	0100051864277268	24-Sep-18	51,350,000
27	MULTITALLY INDONESIA	0100051864277269	25-Sep-18	49,981,460
28	MULTITALLY INDONESIA	0100051864277270	26-Sep-18	50,125,000
29	MULTITALLY INDONESIA	0100051864277271	27-Sep-18	49,625,000
30	MULTITALLY INDONESIA	0100051864277272	28-Sep-18	52,125,000
31	MULTITALLY INDONESIA	0100051889448056	15-Okt-18	46,450,000
32	MULTITALLY INDONESIA	0100051889448057	17-Okt-18	46,119,994
33	MULTITALLY INDONESIA	0100051889448058	19-Okt-18	44,000,000
34	MULTITALLY INDONESIA	0100051889448059	22-Okt-18	42,600,000
35	MULTITALLY INDONESIA	0100051889448060	24-Okt-18	45,000,000
				1,754,685,302

IKHTISAR :

Halaman 43 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	NAMA WAJIB PAJAK PENGGUNA	NPWP PENGGUNA	Total
1	PHILIA CITRA SEJAHTERA	025936881027000	919.034.626
2	MULTITALLY INDONESIA	018712711045000	835.650.676
			1.754.685.302

b) Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT PUSPA INDAH KARYA, dimana SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI bersama-sama dengan timnya termasuk Terdakwa SUNARKO alias YUSUF SUPENDI alias MAHPUT bertindak sebagai perantara atau sales sejak bulan Maret s/d Mei 2019 :

NO.	WAJIB PAJAK PENGGUNA	NOMOR FAKTUR PAJAK	TGL FAKTUR	PPN PENERBIT
1	MITRA CENTRAL NIAGA	0100031936540924	12-Mar-19	74,000,000
2	MITRA CENTRAL NIAGA	0100031936540925	13-Mar-19	74,000,000
3	MITRA CENTRAL NIAGA	0100031936540926	14-Mar-19	74,000,000
4	MITRA CENTRAL NIAGA	0100031936540927	15-Mar-19	37,000,000
5	MITRA CENTRAL NIAGA	0100031936541997	01-Apr-19	71,000,000
6	MITRA CENTRAL NIAGA	0100031936541999	05-Apr-19	71,000,000
7	MITRA CENTRAL NIAGA	0100031936542000	09-Apr-19	71,000,000
8	MITRA CENTRAL NIAGA	0100031936542001	15-Apr-19	71,000,000
	MITRA CENTRAL NIAGA Total			543,000,000
1	ANGKASA KARYA ENERGI	0100031936540922	19-Feb-19	34,440,000
2	ANGKASA KARYA ENERGI	0100041907282650	06-Mei-19	63,291,000
	ANGKASA KARYA ENERGI Total			97,731,000
	Grand Total			640,731,000

IKHTISAR :

NO.	WAJIB PAJAK PENGGUNA	NPWP PENGGUNA	Total
1	ANGKASA KARYA ENERGI	829224385505000	97,731,000

Halaman 44 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



2	MITRA CENTRAL NIAGA	724131388624000	543,000,000
			640.731.000

- Bahwa perbuatan menerbitkan Faktur pajak TBTS baik yang yang diterbitkan /dijual yang dilakukan Terdakwa SUNARKO alias MAHPUT bersama-sama dengan saksi SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI, , saksi, saksi DENI SUHERMAN alias OBAY, saksi ELAN SUHERLAN Als. ELAN dan DAVIS, begitu juga para perantarayaitusaksiLUKMANUL HAKIM, saksi AGUS SUPRIYANTO, saksi SANSAN SURYANA, saksi RR.CANDRA W. YUNARTIAS.(masing-masing diproses hukum dalam berkas perkara terpisah),dengan menggunakan perusahaan PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA; PT GAMINDOTAMA PERKASA; PT SINAR ARTNO ASIA; PT BIMA BUMI MANDIRI; PT GEMA PULAU INTAN; PT CAKRA ABDI CEMERLANG; PT LAKSANA MEKAR SENTOSA, PT ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA; dan PT PUSPA INDAH KARYA, yang telah dijual oleh para perantara dan telah digunakan oleh para pengguna adalah merupakan *Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (Faktur Pajak TBTS)* karena tidak ada transaksi dan pembayaran yang menyertainya atau dengan kata lain hanya jual beli PPN saja.
- Bahwa dalam melakukan perbuatan penerbitan Faktur Pajak TBTS oleh Terdakwa SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT bersama-sama dengan SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI saksi DENI SUHERMAN alias OBAY, saksi SUHERLAN alias ELAN alias EKI, dimana disepakati pembagian komisi atau keuntungan sebagai berikut:
 - a. Saksi SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI mendapatkan komisi sekurang-kurangnya sebesar selisih dari harga jual Faktur Pajak TBTS dikurangi dengan bagian atau jatah milik saksi DENI SUHERMAN alias OBAY dan saksi SUHERLAN alias ELAN dan Terdakwa SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT;
 - b. Saksi DENI SUHERMAN alias OBAY, mendapatkan komisi atau keuntungan sekurang-kurangnya sebesar 1% s.d. 2% dari nilai PPN dalam Faktur Pajak, untuk setiap Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan;
 - c. Saksi SUHERLAN alias ELAN alias EKI, mendapatkan komisi atau keuntungan sekurang-kurangnya sebesar sebagai berikut:
 - 1) sebesar 1,5% dari nilai PPN dalam Faktur Pajak atas tugas menginput atau mengupload Faktur Pajak; dan/atau

Halaman 45 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



- 2) sebesar 1,5% dari nilai PPN dalam Faktur Pajak atas penerbitan Faktur Pajak TBTS melalui PT BIMA BUMI MANDIRI, untuk setiap Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan;
- d. Terdakwa SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT, mendapatkan komisi atau keuntungan sekurang-kurangnya sebesar sebagai berikut:
 - 1) Sebesar 0,5% dari nilai PPN dalam Faktur Pajak, untuk setiap Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan; dan
 - 2) sebesar 0,5% s.d. 1% dari uang yang masuk di rekening, sebagai komisi atas jasa peminjaman rekening milik milik Terdakwa SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT, yang digunakan untuk menampung uang hasil penjualan Faktur Pajak TBTS, yaitu di rekening Bank BCA, Nomor Rekening: 2721774599, atas nama SUNARKO dan rekening Bank BCA, atas nama YUSUP SUPENDI; dan
 - 3) sebesar 1,5% s.d 2% dari nilai PPN dalam Faktur Pajak atas peran Terdakwa SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT sebagai Direktur Utama perusahaan di PT CAKRA ABDI CEMERLANG (menggunakan nama MAHPUT) dan PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA (menggunakan nama YUSUP SUPENDI).
- Bahwa atas penerbitan Faktur Pajak TBTS, yaitu atas proses jual beli Faktur Pajak TBTS antarasaksi SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI dengan para perantara atau sales Faktur Pajak TBTS, cara pembayaran atas jual beli Faktur Pajak TBTS tersebut dilakukan dengan rangkaian sebagai berikut:
 - a) Para perusahaan pengguna (pembeli Faktur Pajak TBTS) akan mentransfer atau membayar secara cash (tunai) kepada para perantara atau sales Faktur Pajak TBTS;
 - b) Kemudian setelah para perantara atau sales Faktur Pajak TBTS mengambil keuntungan (fee) bagian mereka masing-masing, maka para perantara atau sales Faktur Pajak TBTS ini akan membayar atau menyerahkan uang penjualan Faktur Pajak TBTS kepada saksi SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI yang dilakukan dengan cara mentransfer langsung atau menyetor tunai ke rekening yang diberikan oleh saksi SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI, yaitu ke rekening atas nama sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Rekening atas nama Terdakwa SUNARKO, di Bank BCA, nomor rekening: 2721774599; dan
 - 2) Rekening atas nama saksi YUSUP SUPENDI (SUNARKO) di Bank BCA, nomor rekening: 4140348398; dan
 - 3) Rekening atas nama saksi DENI SUHERMAN, di Bank BCA, nomor rekening: 3760377367; dan/atau
 - 4) Rekening atas nama saksi SUHAERI, di Bank BCA, nomor rekening: 2831675472; dan/atau
 - 5) Rekening atas nama SEPI MUHARAM, di Bank Mandiri, nomor rekening: 1310011580000; atas nama SEPI MUHARAM
- c) Kemudian setelah uang hasil penjualan Faktur Pajak TBTS yang merupakan satu rangkaian dari penerbitan Faktur Pajak TBTS tersebut masuk di beberapa rekening tersebut, maka saksi SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI kemudian melakukan penarikan atau pentransferan ke rekening milik saksi SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI sendiri, yaitu di Bank BCA, Nomor Rekening: 03760484716 atas nama saksi SEPI MUHARAM. Hal mana dilakukan oleh saksi SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI untuk menghindari adanya kecurigaan dari pihak Bank dan untuk menghindari adanya pelacakan dan penghindaran pengenaan pajak dan sebagai penanggung jawab pidana atas kasus penerbitan Faktur Pajak TBTS ini.
- Bahwa kemudian, setelah adanya uang masuk dari hasil penjualan Faktur Pajak TBTS yang merupakan satu kesatuan dari rangkaian proses penerbitan Faktur Pajak TBTS, saksi SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI kemudian membagi hasil uang penerbitan Faktur Pajak TBTS ini, kepada pihak-pihak yang turut serta dalam proses penerbitan Faktur Pajak TBTS, yaitu kepada saksi DENI SUHERMAN alias OBAY, saksi SUHERLAN alias ELAN alias EKI, dan saksi SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT, yaitu dengan cara sebagai berikut:
- a. Untuk komisi atau keuntungan milik DENI SUHERMAN alias OBAY, diberikan dalam bentuk cash tunai atau ditransfer ke rekening Bank BCA, Nomor Rekening: 3760377367, atas nama DENI SUHERMAN;

Halaman 47 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



- b. Untuk komisi atau keuntungan milik SUHERLAN alias ELAN alias EKI, diberikan dalam bentuk cash tunai atau transfer ke rekening Bank BCA, Nomor Rekening: 2831583284, atas nama SUHERLAN; dan
- c. Untuk komisi atau keuntungan milik Terdakwa SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT, diberikan dalam bentuk cash tunai.
- Bahwa Terdakwa SUNARKO alias MAHPUT bersama-sama dengan SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI, saksi DENI SUHERMAN alias OBAY, saksi ELAN SUHERLAN Als. ELAN dan DAVIS begitu juga para perantara yaitu saksi LUKMANUL HAKIM, saksi AGUS SUPRIYANTO, saksi SANSAN SURYANA, saksi RR.CANDRAW. YUNARTIAS (masing-masing diproses hukum dalam berkas perkara terpisah), dalam melakukan penerbitan dan penjualan Faktur Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (Faktur TBTS) yang telah digunakan oleh Perusahaan para pengguna tersebut dilakukan secara berturut-turut sebagai perbuatan yang diteruskan yang dimulai pada bulan Agustus 2017 sampai dengan sekitar Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2017 dan 2019, bertempat antara lain di alamat perusahaan yaitu diantaranya di alamat perusahaan yaitu di Jl. Ujung Harapan, RT.06/RW.02, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi,
- Bahwa perbuatan Terdakwa SUNARKO alias MAHPUT bersama-sama dengan SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI, yaitu sebagai berikut:
 - 1. Mendirikan dan membeli perusahaan dengan tujuan untuk menerbitkan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (Faktur TBTS) ;
 - 2. Bahwa Terdakwa SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT diminta bantuannya oleh saksi SEPI MUHARAM dalam proses pendirian perusahaan, yang kemudian menjadikan Terdakwa SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT untuk menduduki jabatan sebagai Direktur Utama di PT CAKRA ABDI CEMERLANG, dengan menggunakan KTP atas nama MAHPUT
 - 3. Mengadakan kesepakatan dan bekerjasama dengan saksi DENI SUHERMAN alias OBAY, saksi SUHERLAN alias ELAN alias EKI, dan Terdakwa SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT untuk bersama-sama, turut serta dalam proses penerbitan Faktur Pajak TBTS;
 - 4. Menerima pesanan Faktur Pajak TBTS dari para perantara atau sales Faktur Pajak TBTS;



5. Meminta bantuan kepada saksi SUHERLAN alias ELAN untuk membuat/mengupload dan/atau menerbitkan Faktur Pajak TBTS, serta menerima Faktur Pajak TBTS yang telah dibuat/diupload oleh SUHERLAN alias ELAN;
6. Meminta bantuan kepada saksi DENI SUHERMAN alias OBAY untuk membuat invoice sebagai dokumen pelengkap dari Faktur Pajak TBTS;
7. Mengirim atau menyerahkan Faktur Pajak TBTS kepada para perantara atau sales Faktur Pajak TBTS;
8. Menerima pembayaran atas penerbitan dan/atau penjualan Faktur Pajak TBTS;
9. Sengaja menggunakan banyak rekening yang digunakan sebagai rekening penampungan uang hasil penjualan Faktur Pajak TBTS yang merupakan rangkaian dari menerbitkan Faktur Pajak TBTS;
10. Membagi uang keuntungan hasil penjualan Faktur Pajak TBTS; dan
11. Menikmati keuntungan atas penerbitan dan/atau penjualan Faktur Pajak TBTS tersebut;

Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT bersama sama dengan SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI juga dengan para perantara dan para sales Faktur Pajak TBTS berupa menerbitkan maupun menjual-belikan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya (Faktur Pajak TBTS) telah menimbulkan Kerugian pada Pendapatan Negara dari Sektor Perpajakan yaitu sekurang-kurangnya sebesar Faktur Pajak TBTS yang telah diterbitkan dan/atau dijual melalui setidaknya-tidaknya perusahaan PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA; PT GAMINDOTAMA PERKASA; PT SINAR ARTNO ASIA; PT BIMA BUMI MANDIRI; PT GEMA PULAU INTAN; PT CAKRA ABDI CEMERLANG; PT LAKSANA MEKAR SENTOSA, PT ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA; dan PT PUSPA INDAH KARYA, yaitu sekurang-kurangnya sebesar Rp 31.172.283.560,- (tiga puluh satu milyar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA WP PENERBIT	PPN (Rp)
1	PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA	5.684.841.222
2	PT GAMINDOTAMA PERKASA	2.168.301.789
3	PT SINAR ARTNO ASIA	3.695.973.436



4	PT BIMA BUMI MANDIRI	6.634.051.622
5	PT GEMA PULAU INTAN	5.543.393.838
6	PT CAKRA ABDI CEMERLANG	3.907.662.803
7	PT LAKSANA MEKAR SENTOSA	1.142.642.548
8	PT ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA	1.754.685.302
9	PT PUSPA INDAH KARYA	640.731.000
JUMLAH PPN		31.172.283.560

- Bahwa Terdakwa SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT Als. IWAN SETIYAWAN telah menerbitkan dan/atau menjual Faktur Pajak TBTS tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT yaitu untuk keperluan hidup sehari-hari juga diantaranya yaitu membeli *mobil*, *DAIHATSU SIGRA NOPOL. B 2781 SYP warna Putih*;

Perbuatan Terdakwa SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT Als. IWAN SETIYAWAN tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Menyatakan telah mengerti dan baik itu Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DEDDY INDRA NURTJAJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
 - Bahwa semua keterangan saksi benar di Berita Acara pemeriksaan di kepolisian;
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan terkait penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Seksi di Pelayanan KPP Pratama Jakarta Kemayoran sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku kepala seksi adalah Antara lain menatausahakan surat-surat permohonan dari wajib pajak dan surat lainnya serta menyelesaikan registrasi wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak dan menerbitkan surat penghapusan nomor pokok wajib pajak atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak dan melaksanakan penerimaan dan penatausahaan SP Tahunan dan SPT masa ;
- Bahwa di KPP Jakarta Kemayoran ada menerima laporan terkait spt pajak dari PT. Mentari Cahaya Nusantara tersebut;
- Bahwa PT. Mentari Cahaya Nusantara terdaftar di KPP Pratama Jakarta kemayoran;
- Bahwa PT. Mentari Cahaya Nusantara terdaftar di KPP Pratama Cibinong sejak tanggal 24 Agustus 2017;
- Bahwa Berdasarkan Data SIDJP Nilai PPn PT. Mentari Cahaya Nusantara sejak tahun 2017 sampai 2018 sekitar Rp, 5,684.841.222,00;
- Bahwa Jumlah fakturnya ada 133 faktur dan terdiri dari 16 perusahaan wajib pajak yang menjadi rekanan dari PT. Mentari Cahaya Nusantara;
- Bahwa dari 16 wajib pajak tersebut, penerbitnya adalah PT. Mentari Cahaya Nusantara;
- Bahwa 16 perusahaan wajib pajak tersebut adalah PT Aditya Aryaprawira, PT Agung Wijaya Putra, PT Arsa Mega Energi, PT Bayu Patra Energy, CV Agung Wijaya Putra, PT Dinar Putra Mandiri, PT Fauzan Putra Perkasa, PT Ganani Indonesia Petroleum Energi, PT Gapura Ocean Line Palabbuhanratu, PT Jaya Energi Prima, PT Karimata Energi Persada, PT Maulana Samudera Gemilang, PT Mitra Sarana Sejati, PT Ocean Petro Energy, PT Philia Citra Sejahtera, PT Sumber Ketapang Makmur Abadi;
- Bahwa saksi tahu bahwa PT. Mentari Cahaya Nusantara telah menerbitkan faktur pajak terhadap 16 wajib pajak tersebut dari penyidik lalu disinkronkan dengan data yang ada di SIDJP;
- Bahwa direktur PT Mentari Cahaya Nusantara Sukses adalah Yusup Supendi;
- Bahwa PT. Mentari Cahaya Nusantara dikukuhkan pada tanggal 23 Oktober 2017
- Bahwa Pada awalnya penyidik meminta untuk dibukakan data di SIDJP untuk PT. Mentari Cahaya Nusantara, ada berapa faktur yang diterbitkan

Halaman 51 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT Mentari Cahaya Nusantara terkait transaksi yang tidak sebenarnya;

- Bahwa jika membuka data di SIDJP saksi tidak tahu ada transaksi yang mencurigikan;
- Bahwa yang bisa membuka akses SIDJP adalah setiap pegawai dimana wajib pajak terdaftar yang diberikan login, termasuk salah satunya saksi;
- Bahwa jika ada indikasi sesuatu dan diminta oleh penyidik maka data SIDJP bisa dibuka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

2. **KIRYATMI, SE, MA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan saksi benar di Berita Acara pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan terkait perbuatan Terdakwa yang menerbitkan faktur pajak bukan transaksi yang sebenarnya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan jabatan saksi Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Cibitung;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi sebagai Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Cibitung adalah menatausahakan surat-surat permohonan dari wajib pajak dan surat lainnya serta menyelesaikan registrasi wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak dan menerbitkan surat penghapusan nomor pokok wajib pajak atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak dan melaksanakan penerimaan dan penatausahaan SP Tahunan dan SPT masa;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Direktorat Penegakan Hukum sedang melakukan penyidikan terhadap beberapa wajib pajak atau pengusaha kena pajak;
- Bahwa setelah saksi mengecek profile wajib pajak dalam SIDJP dan Portal DJP, benar PT Gema Pulau Intan, PT Cakra Abadi Cemerlang, PT Laksana Mekar Sentosa terdaftar di KPP Pratama Cibitung;
- Bahwa PT Gema Pulau Intan dan PT Cakra Abadi Cemerlang terdaftar di KPP Pratama Cibitung sejak tanggal 3 Oktober 2018, sedangkan PT Laksana Mekar Sentosa terdaftar sebagai PKP di KPP Pratama Cibitung sejak tanggal 6 Nopember 2018;

Halaman 52 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Gema Pulau Intan dan PT Cakra Abadi Cemerlang berdomisili di Ujung Harapan Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi sedangkan PT Laksana Mekar Sentosa berdomisili di Kampung Muara Rt 019/009 Muara Bakti, Babelan, Jawa Barat;
- Bahwa berdasarkan data SIDJP dalam kurun waktu tahun 2018 dan 2019, Rincian faktur pajak yang diterbitkan PKP-PKP Penerbit kepada para PKP Pengguna tersebut sebagai berikut:
 - 1. Nama PKP Penerbit : PT Gema Pulau Intan

NO.	NPWP PENGGUNA	NAMA WAJIB PAJAK PENGGUNA	NILAI PPN
1	02.869.782-9-012.000	PT. OCEAN PETRO ENERGY	558,500,000
2	31.315.394-2-445.000	PT. INDAH TIGA SAKSI	266,618,181
3	66.906.733-2-503.000	PT. BAYU PATRA ENERGY	204,927,272
4	72.413.138-8-624.000	PT. MITRA CENTRAL NIAGA	944,640,000
5	03.001.570-5-607.000	PT. SAHABAT SETIA JAYA	588,572,000
6	74.775.446-3-112.000	PT. PETRO ANDHARA ARTHA	470,795,000
7	02.213.861-4-437.001	PT. SAMUDRA ETAM ENERGI	406,000,001
8	82.922.438-5-505.000	PT. ANGKASA KARYA ENERGI	89,929,080
9	03.286.702-0-733.000	CV. SARANA	109,464,000
10	02.489.719-1-731.000	PT. TELADAN MAKMUR JAYA	210,240,000
11	01.845.962.8-027.000	PT. LANA BUANA JAYA	136,450,000
12	02.213.861-4-437.001	PT. SAMUDRA ETAM ENERGI	325,960,000
13	83.269.001-0-728.000	PT. ANUGRAH FASHA SAKTI	191,800,000
14	75.042.597-7-307.000	PT. CAHAYA UTAMA BERLIAN	15,870,000
15	02.342.945-9-734.000	PT. PELITA PETROLIUM INDOASIA	258,400,000

Halaman 53 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	84.095.119-8-446.000	PT. NAMIRA SELARAS MANDIRI	174,180,000
17	76.914.152-4-643.000	PT. WADI INTI KENCANA	93,091,200
18	76.340.343-3-951.000	PT. SINYUN KARYA ANUGRAH	74,090,909
19	86.264.543-9-517.000	PETRO MULYA ABADI	90,000,000
20	01.320.865.7-017.000	PT. CATUR MUKTI	40,909,091
21	82.803.424-9-601.000	PT. RAKHA PANCA MANDIRI	56,160,000
22	02.650.448-0-517.001	PT. YAVINDO SUMBER PERSADA	52,545,640
23	85.807.273-9-517.000	PT. SENDANG AGUNG MANDIRI	25,600,000
24	02.585.510-7-411.000	PT. PATRA ALAM RAYA	41,600,000
25	82.508.785-1-453.000	PT. SEKAR DJATI SELARAS	20,618,182
26	01.595.128.8-517.000	CV. AGUNG WIJAYA PUTRA	33,818,182
27	02.213.861-4-724.000	PT. SAMUDRA ETAM ENERGI	28,055,283
28	84.987.703-0-416.000	PT. ANDALAN PRATAMA INDONESIA	12,800,000
29	02.500.537-2-112.000	PT. IRSANI MANDIRI	11,250,000
30	03.278.613-9-012.000	PT. ALFA GRANITAMA	6,646,182
31	02.268.599-4-403.000	DWI PRIMA REZEKY	3,863,635
	JUMLAH		5,543,393,838

2. Nama PKP Penerbit : PT Cakra Abdi Cemerlang

NO.	NPWP PENGGUNA	NAMA WAJIB PAJAK PENGGUNA	NILAI PPN
1	03.329.209-5-732.002	PT. LAROS PETROLEUM	640,000,000

Halaman 54 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	02.869.782-9-012.000	PT. OCEAN PETRO ENERGY	660,250,000
3	31.315.394-2-445.000	PT. INDAH TIGA SAKSI	663,545,453
4	66.906.733-2-503.000	PT. BAYU PATRA ENERGY	584,999,999
5	72.413.138-8-624.000	PT. MITRA CENTRAL NIAGA	88,800,000
6	02.213.861-4-724.000	PT. SAMUDRA ETAM ENERGI	140,000,000
7	82.922.438-5-505.000	PT. ANGKASA KARYA ENERGI	170,404,740
8	03.286.702-0-733.000	CV. SARANA	273,999,000
9	84.095.119-8-446.000	PT. NAMIRA SELARAS MANDIRI	51,825,000
10	81.038.974-2-734.000	BERSUJUD BARA BESI	85,454,545
11	71.133.372-4-731.000	PT. ADRIAN JAYA MANDIRI	127,770,000
12	76.914.152-4-643.000	PT. WADI INTI KENCANA	68,363,520
13	76.340.343-3-951.000	PT. SINYUN KARYA ANUGRAH	26,136,364
14	73.498.081-6-722.000	CV. MEGAH JAYA ABADI	129,400,000
15	31.592.153-6-615.000	PT. SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA	101,000,000
16	85.906.013-9-517.000	PT. ENERGI MITRA SEJAHTERA	24,000,000
17	74.395.117-0-422.000	PT. SUPERCHEM PRIMA LESTARI	12,096,000
18	66.307.542-2-411.000	PT. MUDAH SARANA ENERGI	30,781,818
19	82.508.785-1-453.000	PT. SEKAR DJATI SELARAS	13,381,818
20	83.771.725-5-732.000	MULIA BERKAH MAHABBAH	15,454,546
		JUMLAH	3,907,662,803

Halaman 55 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



3. Nama PKP Penerbit : PT Laksana Mekar Sentosa

NO.	NPWP PENGGUNA	NAMA WAJIB PAJAK PENGGUNA	NILAI PPN
1	74.775.446-3- 112.000	PT. PETRO ANDHARA ARTHA	212,264,000
2	03.329.209.5- 419.000	PT. LAROS PETROLEUM	360,000,000
3	72.685.744-4- 721.000	CIPTA SARANA SINERGI	316,000,000
4	81.038.974-2- 734.000	BERSUJUD BARA BESI	109,454,548
5	71.133.372.4- 731.000	PT. ADRIAN JAYA MANDIRI	45,980,000
6	82.952.175-6- 401.000	BENDI NASHA NIAGA INDUSTRI	98,944,000
		JUMLAH	1,142,642,548

- Bahwa secara keseluruhan rekapitulasi penerbitan faktur pajak oleh PKP=PKP tersebut adalah sebagai berikut :

NO.	NPWP PENERBIT	NAMA WAJIB PAJAK PENERBIT	NILAI PPN
1	86.122.861.7- 435.000;	PT Gema Pulau Intan	5.543.393.838
2	86.122.698.3- 435.000;	PT Cakra Abdi Cemerlang	3.907.662.803
3	86.443.244.8- 435.000;	PT Laksana Mekar Sentosa	1.142.642.548
		JUMLAH	10.593.699.189

- Bahwa selain PT Gema Pulau Intan, PT Cakra Abdi Cemerlang dan PT Laksana Mekar Sentosa, Terdakwa juga menerbitkan faktur pajak yang diduga TBTS melalui wajib pajak atau PKP yaitu PT Cahaya Tiga Gemilang Indonesia, PT Alam Sejahtera Indah Asia, PT Ilhamindo Putra Mandiri, PT Bahtera Sukes Jaya Mandiri, PT Bima Bumi Mandiri;
- Bahwa PT Cahaya Tiga Gemilang Indonesia, PT Alam Sejahtera Indah Asia, PT Ilhamindo Putra Mandiri, PT Bahtera Sukes Jaya Mandiri, PT Bima Bumi Mandiri terdaftar di KPP PRatama Cibitung;
- Bahwa PT Cahaya Tiga Gemilang Indonesia terdaftar di KPP Pratama Cibitung sejak tanggal 8 Oktober 2018, PT Alam Sejahtera Indah Asia

Halaman 56 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 10 Juni 2014, PT Ilhamindo Putra Mandiri sejak tanggal 13 September 2018, PT Bahtera Sukes Jaya Mandiri sejak 7 Agustus 2018, dan PT Bima Bumi Mandiri terdaftar di KPP Pratama Cibitung sejak 3 September 2018;

- Bahwa setelah dikukuhkan dan memperoleh Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena (NPPKP), Wajib Pajak berkewajiban melaporkan kegiatan usahanya dengan menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar;
- Bahwa Prosedur permintaan nomor seri faktur pajak (NSFP) elektronik sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 tanggal 01 Juli 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran dan tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak dapat dilakukan melalui dua cara yaitu sebagai berikut:
 - a. Secara manual/melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan, yaitu :
 - 1) PKP menyampaikan surat permintaan NSFP ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan;
 - 2) Surat Permintaan NSFP harus diisi secara lengkap dan disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan;
 - 3) Atas surat permintaan Nomor Seri Faktur Pajak yang disampaikan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak dan memenuhi syarat sebagai berikut:
 - Telah memiliki Kode Aktivasi dan Password;
 - Telah melakukan aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak;
 - Telah melaporkan SPT Masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir yang telah jatuh tempo secara berturut-turut pada tanggal PKP mengajukan permintaan Nomor Seri Faktur Pajak.
 - 4) Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak ke PKP.
 - b. Prosedur permintaan NSFP secara online/melalui laman (website) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut :
 - 1) Untuk PKP yang telah memiliki sertifikat elektronik;

Halaman 57 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Mengikuti petunjuk pengisian (manual user) yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
 - 3) Atas permintaan Nomor Seri Faktur Pajak yang disampaikan melalui laman (website) yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan memenuhi syarat, PKP akan menerima surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dalam bentuk elektronik ke PKP.
- Dalam hal Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak hilang, rusak, atau tidak tercetak dengan jelas, PKP dapat :
 - a. Meminta surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak tersebut ke Kantor Pelayanan;
 - b. Melakukan cetak ulang surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak melalui laman.
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara kerja Terdakwa menerbitkan faktur pajak tersebut;
 - Bahwa berdasarkan data di SIDJP perusahaan tersebut benar ada;
 - Bahwa saksi bekerja di KPP Clbitung sejak februari 2019;
 - Bahwa berdasarkan data SIDJP dalam kurun waktu tahun 2018, Rekapitulasi faktur pajak yang diterbitkan PT Alam Sejahtera Indah Asia kepada para PKP Pengguna tersebut dengan rincian sebagai berikut:

NO.	WAJIB PAJAK PENGGUNA	NPWP PENGGUNA	PPN
1	MULTITALLY INDONESIA	025936881027000	919,034,626
2	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	835,650,676
			1,754,685,302

- Bahwa berdasarkan data SIDJP dalam kurun waktu tahun 2018, Rekapitulasi faktur pajak yang diterbitkan PT Bima Bumi Mandiri kepada para PKP Pengguna tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No.	WAJIB PAJAK PENGGUNA	NPWP PENGGUNA	PPN
1	AGUNG WIJAYA PUTRA	015951288517000	30,400,000
2	ALISHA KARUNIA PERDANA	769926726721000	866,000,000
3	ANGKASA KARYA ENERGI	829224385505000	160,288,000
4	ANUGRAH FASHA SAKTI	832690010728000	80,550,000
5	ANUGRAH SEJAHTERA SENTOSA	315681775613000	520,875,000
6	BAYU PATRA ENERGY	669067332503000	192,163,636
7	BUMI GATAH PERMAI	863521100728000	3,936,170
8	CAHAYA UTAMA BERLIAN	750425977307000	284,475,000

Halaman 58 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



9	CATUR MUKTI	013208657017000	129,381,818
10	ENERGI MITRA SEJAHTERA	859060139517000	30,400,000
11	INDAH TIGA SAUDARA	313153942445000	198,254,544
12	LAROS PETROLEUM	033292095419000	630,345,455
13	MANGGALA SURYA ENERGI	833190614005000	17,400,000
14	MUDAH SARANA ENERGI	663075422411000	12,000,000
15	SARANA	032867020733000	155,632,000
16	SENDANG AGUNG MANDIRI	858072739517000	24,000,000
17	SINAR BACAN KHATULISTIWA	312479538607000	900,449,999
18	VIAN RAMA PRATAMA	017972274016000	67,000,000
			6,634,051,622

- Bahwa saksi tahu 8 perusahaan tersebut milik Terdakwa dari penyidik, karena saksi diinformasikan bahwa ada transaksi yang tidak sebenarnya;
- Bahwa sampai saksi diperiksa sebagai saksi dikepolisian belum ada pembetulan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

3. **MUHAMAD IDRIS**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan saksi benar di Berita Acara pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan terkait penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Seksi di Pelayanan KPP Pratama Cibinong sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku kepala seksi adalah Antara lain menatausahakan surat-surat permohonan dari wajib pajak dan surat lainnya serta menyelesaikan registrasi wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak dan menerbitkan surat penghapusan nomor pokok wajib pajak atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak dan melaksanakan penerimaan dan penatausahaan SP Tahunan dan SPT masa ;
- Bahwa di KPP Cibinong ada menerima laporan terkait spt pajak dari PT. Gamindotama Sukses tersebut;

Halaman 59 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Gamindotama Sukses terdaftar di KPP Pratama Cibinong;
- Bahwa PT. Gamindotama Sukses terdaftar di KPP Pratama Cibinong sejak tanggal 22 September 2017;
- Bahwa berdasarkan Data SIDJP Nilai PPn PT. Gamindotama Sukses sejak tahun 2017 sampai 2018 sekitar Rp, 2,168.301.789,00;
- Bahwa setahu saksi jumlah fakturnya ada 40 faktur dan jumlah wajib pajaknya ada 5 wajib pajak yang menjadi rekanan dari PT. Gamindotama Sukses ;
- Bahwa dari 5 wajib pajak tersebut, penerbitnya adalah PT. Gamindotama Sukses ;
- Bahwa 5 wajib pajak tersebut adalah PT Philia Citra Sejahtera, PT Harinco Karya Sejahtera, PT Dua Sahabat Baja, PT Elecomindo Jaapratama dan PT Multitaly Indonesia;
- Bahwa saksi tahu bahwa PT. Gamindotama Sukses telah menerbitkan faktur pajak terhadap 5 wajib pajak tersebut dari penyidik lalu disinkronkan dengan data yang ada di SIDJP;
- Bahwa direktur PT Gamindotama Sukses adalah Abie Rohaendi;
- PT. Gamindotama Sukses dikukuhkan pada tanggal 25 Oktober 2017
- Bahwa dari 40 faktur tersebut ditunjukkan ke 5 perusahaan;
- Bahwa 5 wajib pajak tersebut adalah PT Philia Citra Sejahtera, PT Harinco Karya Sejahtera, PT Dua Sahabat Baja, PT Elecomindo Jaapratama dan PT Multitaly Indonesia;
- Bahwa saksi tidak tahu dari 5 perusahaan tersebut ada nama Terdakwa selaku pendiri perusahaan atau tidak;
- Bahwa setahu saksi tidak ada nama Terdakwa Di PT Gamindotama Sukses;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

4. **DEFANA M NUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan saksi benar di Berita Acara pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan terkait penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;

Halaman 60 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Seksi di Kanwil Jawa Barat III (Depok) sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi selaku kepala seksi adalah Antara lain menatausahakan surat-surat permohonan dari wajib pajak dan surat lainnya serta menyelesaikan registrasi wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak dan menerbitkan surat penghapusan nomor pokok wajib pajak atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak dan melaksanakan penerimaan dan penatausahaan SP Tahunan dan SPT masa I
- Bahwa di KPP Depok ada menerima laporan terkait spt pajak dari PT. Sinar Artno Asia tersebut;
- Bahwa PT Sinar Artno Asia terdaftar di KPP Depok sawangan;
- Bahwa PT Sinar Artno Asia terdaftar di KPP Depok sawangan sejak tanggal 12 Maret 2018;
- Bahwa berdasarkan Data SIDJP Nilai PPn PT. Sinar Artno Asia sejak tahun 2018 sampai 2019 sekitar Rp, 3,6 milyar;
- Bahwa jumlah fakturnya saksi lupa tetapi untuk wajib pajaknya ada 8 wajib pajak yang menjadi rekanan dari PT Sinar Artno Asia;
- Bahwa dari 8 wajib pajak tersebut, penerbitnya adalah PT Sinar Artno Asia;
- Bahwa 8 wajib pajak tersebut adalah PT Anugrah Abadi Baru, PT Catur Manunggal Jaya Agung, CV Surya Mitra Buana, PT Dinar Putra Mandiri, PT Indah Tiga Saudara, PT Mechatama Sinar Mulia, PT Ocean Petro Energy, PT Pila Citra Sejahtera;
- Bahwa saksi tahu bahwa PT Sinar Artno Asia telah menerbitkan faktur pajak terhadap 8 wajib pajak tersebut dari penyidik lalu disinkronkan dengan data yang ada di SIDJP;
- Bahwa direktur PT Sinar Artno Asia adalah Samsudin;
- Bahwa PT. Sinar Artno Asia dikukuhkan pada tanggal 13 Maret 2018 ;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungannya PT Sinar Artno Asia dengan Terdakwa, apakah dari 8 wajib pajak tersebut ada nama Terdakwa atau tidak;
- Bahwa saksi dimintakan keterangan oleh penyidik terkait PT Sinar Artno Asia, lalu penyidik memiliki data dan data yang dimiliki penyidik disinkronkan dengan data yang ada di SIDJP kami;
- Bahwa saksi tidak tahu dari 8 perusahaan wajib pajak, apakah ada nama Terdakwa atau tidak;

Halaman 61 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pekerjaan saksi adalah jika ada wajib pajak memasukkan SPT atau ada surat permohonan perpanjangan dari wajib pajak, maka saksi menatausahakan termasuk dari PT Sinar Artno Asia;
- Bahwa setahu saksi PT Sinar Artno Asia sudah mendaftarkan sebagai wajib pajak;
- Bahwa berdasarkan data di SIDJP PT Sinar Artno Asia hanya melakukan transaksi 3 (tiga) bulan saja dengan nilai PPN sekitar Rp, 3,6 milyar dan setelah itu tidak ada transaksi sama sekali;
- Bahwa faktur pajak bisa dikeluarkan oleh perorangan atau badan hukum yang sudah mempunyai PKP;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

5. ROBERTUS CAHYA K.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa semua keterangan saksi benar di Berita Acara pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah saksi mengecek profile WP dalam SIDJP dan Portal DJP, benar bahwa PT PUSPA INDAH KARYA NPWP 86.687.458.9-421.000 adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Cimahi.
- Bahwa PT PUSPA INDAH KARYA NPWP 86.687.458.9-421.000 beralamat di Kampung Kiara Tengah Rt 004 Rw 004 Cipatat Kab. Bandung Barat Jawa Barat.
- Bahwa berdasarkan data SIDJP dalam kurun waktu tahun 2017 dan 2018, Rincian faktur pajak yang diterbitkan oleh PT PUSPA INDAH KARYA NPWP 86.687.458.9-421.000 kepada para PKP Pengguna tersebut dengan rincian sebagai berikut:

NO.	WAJIB PAJAK PENGGUNA	NPWP PENGGUNA	NOMOR FAKTUR PAJAK	TGL FAKTUR	PPN PENERBIT
1	MITRA CENTRAL NIAGA	724131388624000	0100031936540924	12-Mar-19	74,000,000
2	MITRA CENTRAL	724131388624000	0100031936540925	13-Mar-19	74,000,000

Halaman 62 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



	NIAGA				
3	MITRA CENTRAL NIAGA	724131388624000	0100031936540926	14-Mar-19	74,000,000
4	MITRA CENTRAL NIAGA	724131388624000	0100031936540927	15-Mar-19	37,000,000
5	MITRA CENTRAL NIAGA	724131388624000	0100031936541997	01-Apr-19	71,000,000
6	MITRA CENTRAL NIAGA	724131388624000	0100031936541999	05-Apr-19	71,000,000
7	MITRA CENTRAL NIAGA	724131388624000	0100031936542000	09-Apr-19	71,000,000
8	MITRA CENTRAL NIAGA	724131388624000	0100031936542001	15-Apr-19	71,000,000
	MITRA CENTRAL NIAGA Total				543,000,000
1	ANGKASA KARYA ENERGI	829224385505000	0100031936540922	19-Feb-19	34,440,000
2	ANGKASA KARYA ENERGI	829224385505000	0100041907282650	06-Mei-19	63,291,000
	ANGKASA KARYA ENERGI Total				97,731,000

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang dituangkan didalam berita acara pemeriksaan saksi dan tidak merasa mendapat paksaan dan atau tekanan oleh Penyidik.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

6. **ELIS SUSYANTHI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan saksi diberita acara penyidikan benar semua;
- Bahwa saksi selaku Komisaris PT Lana Buana Jaya;
- Bahwa PT. Lana Buana Jaya pernah mengkreditkan faktur pajak dari PT Bahtera Sukses Jaya Mandiri, PT Alam Sejahtera Indah Asia;
- Bahwa PT Lana Buana Jaya mengkreditkan faktur pajak dari PT Bahtera Sukses Jaya Mandiri, PT Alam Sejahtera Indah Asia sekitar tahun 2018 sampai dengan 2019;
- Bahwa Nilai PPNna yaitu sekitar Rp. 440.150.000,00 (empat ratus empat puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Lana Buana Jaya memperoleh faktur pajak dari PT Bahtera Sukses Jaya Mandiri, PT Alam Sejahtera Indah Asia dari seseorang yang bernama DODY datang bersama temannya untuk menawarkan solar kepada saksi dan Dody yang mengatur semua dokumennya;
- Bahwa saksi mengirimkan data berupa NPWP, PO maupun kuantitas minyak yang dibutuhkan PT Lana Buana Jaya. Setelah itu barang dikirim kurang lebih seminggu langsung ke lokasi klien;
- Bahwa Terkait pembayaran, PT Lana Buana Jaya memang benar-benar membayar sebesar harga minyak ditambah dengan PPN 10%. Pembayaran dilakukan secara tunai sesuai permintaan DODY di saat serah terima barang di site klien;
- Bahwa Pembayaran dilakukan secara tunai sesuai permintaan DODY di saat serah terima barang di site klien;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

7. **DEBY MARDIANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan saksi diberita acara penyidikan benar semua;
- Bahwa saksi bekerja sebagai broker atau freelance khusus BBM sampai dengan sekarang, dan tugas dan pekerjaan saksi adalah melakukan handling untuk pemasaran dan pembelian BBM (solar Indsutri) untuk beberapa perusahaan klien saksi;
- Bahwa saksi mengenal PT catur Mukti. Perusahaan tersebut merupakan klien saksi dimana saksi mencari BBM untuk perusahaan tersebut. Orang saksi kenal dari PT Catur Mukti adalah Pak AGUNG. Sepengetahuan saksi PT Catur Mukti bergerak di bidang usaha Jasa Bunker BBM
- Bahwa PT. Catur Mukti pernah mengkreditkan faktur pajak dari PT Gema Pulau Intan dan PT Blma Bumi Mandiri;
- Bahwa PT Catur Mukti mengkreditkan faktur pajak dari PT Gema Pulau Intan dan PT Blma Bumi Mandiri sekitar tahun 2018 sampai dengan 2019;
- Bahwa Nilai PPNna yaitu sekitar Rp. 387.381.818
- Bahwa awalnya Pak AGUNG selaku Direktur Utama PT Catur Mukti meminta untuk dicarikan sumber BBM untuk PO dari PT Chemindo

Halaman 64 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gemilang dengan harga bersaing. Lalu saksi mencoba menghubungi Sdr. GUNTUR untuk menanyakan tawaran BBM tersebut. Dalam hal ini Sdr. GUNTUR menjamin bahwa BBM resmi tersebut dilengkapi dengan dokumen lengkap dan resmi yang lengkap sehingga saksi percaya untuk membeli barang HSD melalui Sdr. GUNTUR. Terkait negosiasi harga terhadap barang HSD saksi berkomunikasi dengan Sdr. GUNTUR via telepon. Selanjutnya untuk pembayaran atas transaksi pembelian solar tersebut, saksi mulanya dibayar melalui proses transfer dari PT Catur Mukti untuk pembelian HSD Solar atas permintaan klien kami PT CEMINDO GEMILANG berdasarkan PO. Setelah itu saksi meminta solar tersebut dari Sdr. GUNTUR berupa minyak resmi tanpa beresiko atau minyak yang mempunyai ijin resmi. Lalu Sdr. GUNTUR merekomendasikan minyak tersebut agar di-supply ke PT CEMINDO GEMILANG dengan menggunakan Mini tanker (SPOB), dimana pembayaran dilakukan tersebut dilakukan setelah pengisian dan dokumen lengkap beserta tanda terima barang. Seingat saksi pembayaran dilakukan secara tunai pada saat kurir saksi menerima dokumen pembelian tersebut. Setelah dokumen diterima oleh kurir langsung diteruskan ke PT Catur Mukti.

- Bahwa Saksi tidak mendapatkan fee dari Sdr. GUNTUR karena saksi memang sudah mendapatkan fee berupa sharing profit dengan PT Catur Mukti;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Pak AGUNG dari PT CATUR MUKTI bahwa mereka telah melakukan pembetulan termasuk melunasi kekurangan PPN yang disetor ke kantor pajak terkait kasus ini;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui PT Gema Pulau Intan dan PT Blma Bumi Mandiri;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima barang maupun melakukan pembelian BBM dari PT Gema PULAU Indan dan PT Blma Bumi Mandiri tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembayaran atas transaksi pembelian BBM maupun faktur pajak sebesar 10% kepada perusahaan yang tercantum dalam dokumen tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan nama yang tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut;

Halaman 65 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut

8. **SUBUR AHMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan saksi benar di Berita Acara pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan terkait pembuatan/pendirian perusahaan/PT;
- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini terkait saksi buat tiga perusahaan;
- Bahwa Ketiga PT yang saksi buat/dirikan tersebut adalah PT Cakra Abadi Cemerlang, PT Gema Pulau Intan, dan PT Laksana Mekar Sentosa;
- Awalnya sdr. Jalaludin mengenalkan saksi lewat telepon kepada sdr. MAHPUT dan sdr. BUDI (atasan MAHPUT) dan saat itu sdr Jalaludin menyuruh saksi untuk menelpon dan bertemu dengan mereka. Kemudian saksi telpon sdr. MAHPUT dan kami bertemu di Cibubur Junction, dimana pada pertemuan tersebut yang hadir adalah saksi, bapak MAHPUT, dan bapak BUDI;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa saksi akan membantu dalam pengurusan perusahaan atas nama PT Cakra Abadi Cemerlang dan PT Gema Pulau Intan, dan bapak MAHPUT memberikan fotocopy KTP atas nama EKI, IKIN TASIKIN, dan MAHPUT;
- Bahwa harga yang disepakati yaitu Rp 45.000.000,- (per perusahaan) dengan bagian sdr. Jalaludin sebesar Rp 10.000.000,- dan sdr. MAHPUT Rp 4.000.000,- sisanya buat saksi atas jasa saksi mendirikan perusahaan tersebut;
- Bahwa setelah itu proses pendaftaran di Kantor Pajak selesai, semua dokumen saksi serahkan ke bapak MAHPUT di Bank BJB Cabang Cikarang, dan pada saat itu saksi juga bertemu dengan IKIN TASIKIN;
- Bahwa saat itu sdr MAHPUT menghubungi saksi untuk membuat lagi 1 perusahaan, yaitu PT Laksana Mekar Sentosa, dengan menentukan posisi direktur utama adalah EKI. Setelah dokumen jadi, saksi serahkan semua kepada bapak MAHPUT di Bekasi daerah depan Pemda Bekasi.

Halaman 66 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga yang disepakati adalah Rp 40.000.000,- dengan pembagian buat sdr. MAHPUT sebesar Rp 5.000.000,- sisanya buat saksi atas jasa pengurusan pendirian perusahaan;
- Bahwa Struktur organisasi PT Cakra Abadi Cemerlang, PT Gema Pulau Intan, dan PT Laksana Mekar Sentosa, saksi memasukan nama istri dan kakak ipar sebagai pengurus agar domisili PT tersebut sesuai dengan domisili dari KTP istri dan Kakak Ipar saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang faktur pajak karena saksi hanya mengetahui dan saksi yang mendirikan perusahaan tersebut karena memang itu adalah pekerjaan sampingan saksi;
- Bahwa saksi mulai membuat perusahaan sejak tahun 2012 lalu di tahun 2018 saksi diminta untuk membuat PT oleh sdr Mahfud;
- Bahwa setiap pembuatan PT saksi meminta harga Rp. 40.000.000,00;
- Bahwa pembayarannya dilakukan secara diangsur, dan setelah semua dokumen selesai saksi baru minta pelunasannya;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan untuk apa membuat PT, saksi hanya mendapatkan jatah upah saja;
- Bahwa saksi tahu dari penyidik bahwa ternyata Perusahaan/PT yang saksi dirikan bermasalah tentang faktur pajak;
- Bahwa saksi tidak tahu apa peran Terdakwa;
- Bahwa PT. Alam Sejahtera Indah Asia Bergerak di bidang perdagangan besar kontruksi;
- Bahwa sdr. Mahfud tidak mengatakan bikin Perusahaan/PT untuk Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapat keuntungan dari Terdakwa dalam pembuatan perusahaan tersebut sekitar Rp. 80.000.000,00 ;
- Bahwa saksi memasukan nama keluarga saksi seperti isteri dan adik ipar saksi karena berdasarkan domisili perusahaan;
- Bahwa isteri saksi tidak digaji masuk dalam kepengurusan oranganisasi perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu bergerak dibidang apa perusahaan tersebut;
- Bahwa setelah saksi selesai membuat PT saksi menyerahkan semua dokumen termasuk sertifikat elektronik yang dari KPP ke Terdakwa melalui pak Mahfud;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pak Mahfud itu sama dengan orang yang bernama sunarko atau Yusuf Suspendi;
- Bahwa saksi tidak tahu PT. Mentari milik siapa;

Halaman 67 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan pak Dera, dalam rangka pembuatan PT/perusahaan;
- Bahwa awalnya pesan dibuatkan dua PT;
- Bahwa saat saksi diminta untuk membuat PT, saksi tanyakan tujuan pembuatan PT lalu kata pak Dera untuk kontruksi perumahan;
- Bahwa pada saat pembuatan akta pendirian di notaris, Direktur dan komisaris tidak dihadirkan di kantor notaris;
- Bahwa dari 6 perusahaan yang saksi dirikan tidak ada nama Terdakwa;
- Bahwa saat saksi disuruh membuat PT lalu saudara langsung menyanggupinya karena sebelumnya saksi pernah membuat PT juga;
- Bahwa komunikasi saksi untuk pembuatan PT adalah selalu dengan sdr. Mahfud, dan saksi tidak mengetahui nama Terdakwa ada didalam perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

9. **SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan saksi diberita acara penyidikan benar semua
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2017 s.d. 2019, dalam menerbitkan Faktur pajak TBTS, setidaknya-tidaknya, perusahaan yang saksi buat atau dirikan dan perusahaan yang saksi beli yaitu sebagai berikut:
 - a. PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA, terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Kemayoran, sejak tanggal 24 Agustus 2017;
 - b. PT GAMINDOTAMA PERKASA, terdaftar di KPP Pratama Cibinong, sejak tanggal 22 September 2017;
 - c. PT SINAR ARTNO ASIA, terdaftar di KPP Pratama Depok Sawangan, sejak tanggal 12 Maret 2018;
 - d. PT BIMA BUMI MANDIRI, terdaftar di KPP Pratama Cibitung, sejak tanggal 20 September 2018;
 - e. PT GEMA PULAU INTAN, terdaftar di KPP Pratama Cibitung, sejak tanggal 3 Oktober 2018;
 - f. PT CAKRA ABDI CEMERLANG, terdaftar di KPP Pratama Cibitung, sejak tanggal 3 Oktober 2018; dan -
 - g. PT LAKSANA MEKAR SENTOSA, terdaftar di KPP Pratama Cibitung, sejak tanggal 6 November 2018.

Halaman 68 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai perusahaan PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA; PT GAMINDOTAMA PERKASA; PT SINAR ARTNO ASIA; PT BIMA BUMI MANDIRI; PT GEMA PULAU INTAN; PT CAKRA ABDI CEMERLANG; dan PT LAKSANA MEKAR SENTOSA dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 - a. Untuk PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA, dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 - 1) PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA dibuat oleh saksi melalui SUNARKO, dan untuk posisi Direktur Utama PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA, saksi menyuruh SUNARKO untuk menjadi direkturnya, dengan nama YUSUP SUPENDI;
 - 2) Saksi bertugas mencari klien atau pembeli Faktur Pajak TBTS, ELAN yang mengupload Faktur Pajak, Obay yang membuat Invoice-nya;
 - 3) Atas penerbitan Faktur Pajak TBTS yang menggunakan PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA, ELAN mendapatkan komisi kisaran 0,5% s.d 1% dari nilai PPN yang tertera dalam faktur pajak, OBAY kisaran 1% s.d 2%, SUNARKO karena menjabat Direktur mendapatkan komisi 1% dan saksi mendapatkan sekitar 8% dari nilai PPN.
 - b. Untuk PT GAMINDOTAMA PERKASA, dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa PT GAMINDO PERKASA adalah perusahaan yang saksi tahu adalah milik dari ELAN;
 - 2) Saksi bersama dengan tim, memang pernah menerbitkan Faktur Pajak melalui perusahaan PT GAMINDO PERKASA;
 - c. Untuk PT BIMA BUMI MANDIRI, dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 - 1) PT BIMA BUMI MANDIRI merupakan perusahaan yang dibuat ELAN bekerja sama dengan SUNARKO;
 - 2) Kemudian apabila ada order Faktur Pajak TBTS yang masuk ke saksi, maka kemudian saksi membagi-bagi perusahaan-perusahaan yang akan digunakan untuk menerbitkan faktur pajak TBTS, termasuk ke PT BIMA BUMI MANDIRI;
 - 3) Bahwa atas Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan menggunakan perusahaan PT BUMI BIMA MANDIRI, maka ELAN dan SUNARKO akan saksi beri komisi sebesar masing-masing 1,5%

Halaman 69 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari nilai PPN, sedangkan untuk OBAY saksi beri sebesar 0,5% dari nilai PPN yang tertera dalam faktur pajak.

d. Untuk PT GEMA PULAU INTAN; PT CAKRA ABDI CEMERLANG; dan PT LAKSANA MEKAR SENTOSA, dapat saksi jelaskan sebagai berikut: -

- 1) Saksi membuat PT GEMA PULAU INTAN, NPWP: 86.122.861.7-435.000; PT CAKRA ABDI CEMERLANG, NPWP: 86.122.698.3-435.000; PT LAKSANA MEKAR SENTOSA, NPWP: 86.443.244.8-435.000 sekitar tahun 2018 melalui sdr SUBUR lewat perantara SUNARKO; -
- 2) Untuk pembuatan perusahaan tersebut saksi mengeluarkan biaya sebesar lebih kurang Rp. 30.000.000.- per masing-masing perusahaan; -
- 3) Setelah perusahaan jadi saksi mendapatkan sertifikat elektronik untuk menerbitkan faktur pajak dari sdr SUBUR lewat perantara SUNARKO, untuk kemudian saksi serahkan kepada ELAN, yaitu orang yang mengupload Faktur Pajak;
- 4) Untuk penampungan hasil penjualan Faktur Pajak, saksi menggunakan beberapa rekening teman saksi, diantaranya seperti SUNARKO. Biasanya kalau ada uang hasil penjualan faktur pajak TBTS yang masuk ke rekening dia, saksi minta dia untuk mengambil uang tersebut dari rekening dia kemudian saksi minta dia untuk menyerahkan uang tersebut kepada saksi secara cash atau transfer ke rekening saksi. Atas jasa penitipan transfer uang hasil penjualan faktur pajak TBTS tersebut saksi memberi komisi kepada SUNARKO sebesar 0,5% s.d 1% tergantung dari nilai uang yang masuk ke rekening atas nama SUNARKO dan/atau atas nama YUSUP SUPENDI. -

- Saksi menerbitkan Faktur Pajak TBTS sejak tahun 2017, bersama-sama dengan tim saksi, yaitu OBAY, ELAN, dan SUNARKO. Untuk pembagian tugasnya, yaitu sebagai berikut:
 - a. Saksi selaku leader atau pimpinan, bertugas untuk mencari atau menerima pesanan Faktur Pajak TBTS dan membagi komisi atau keuntungan kepada OBAY, ELAN, dan SUNARKO; -
 - b. OBAY, bertugas untuk membuat Invoice dan Surat Jalan, sebagai dokumen pelengkap dari Faktur Pajak;

Halaman 70 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



- c. ELAN, bertugas untuk mengupload Faktur Pajak (e-faktur) secara elektronik, membuat laporan SPT PPN, dan melaporkan SPT PPN tersebut secara online atau e-SPT, serta saksi pernah menyuruh ELAN untuk menjadi menduduki jabatan sebagai Direktur Utama di PT LAKSANA MEKAR SENTOSA dengan menggunakan KTP atas nama EKI; dan -
- d. SUNARKO, bertugas untuk mencari orang-orang yang bisa membuat perusahaan, menyediakan rekening penampungan hasil penjualan Faktur Pajak TBTS atas nama rekening SUNARKO dan rekening atas nama YUSUP SUPENDI, serta SUNARKO pernah saksi suruh untuk menjadi menduduki jabatan sebagai Direktur Utama di PT CAKRA ABDI CEMERLANG (menggunakan nama MAHPUT) dan PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA (menggunakan nama YUSUP SUPENDI). -
- Untuk pembagian keuntungan atau komisi atas perbuatan saksi bersama-sama dengan OBAY, ELAN, dan SUNARKO, secara garis besar yaitu sebagai berikut:
 - a. Saksi mendapatkan komisi sekurang-kurangnya sebesar selisih dari harga jual Faktur Pajak TBTS dikurangi dengan bagian atau jatah milik OBAY dan ELAN dan SUNARKO;
 - b. OBAY, mendapatkan komisi atau keuntungan sekurang-kurangnya sebesar 1% s.d. 2% dari nilai PPN dalam Faktur Pajak, untuk setiap Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan; -
 - c. ELAN, mendapatkan komisi atau keuntungan sekurang-kurangnya sebesar sebagai berikut: -
 - 1) sebesar 1,5% dari nilai PPN dalam Faktur Pajak atas tugas menginput atau mengupload Faktur Pajak; dan/atau
 - 2) sebesar 1,5% dari nilai PPN dalam Faktur Pajak atas penerbitan Faktur Pajak TBTS melalui PT BIMA BUMI MANDIRI, untuk setiap Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan; -
 - d. SUNARKO, mendapatkan komisi atau keuntungan sekurang-kurangnya sebesar sebagai berikut: -
 - 1) Sebesar 0,5% dari nilai PPN dalam Faktur Pajak, untuk setiap Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan; dan/atau -
 - 2) sebesar 0,5% s.d. 1% dari uang yang masuk di rekening, sebagai komisi atas jasa peminjaman rekening milik milik SUNARKO, yang digunakan untuk menampung uang hasil penjualan Faktur Pajak



TBTS, yaitu di rekening Bank BCA, Nomor Rekening: 2721774599, atas nama SUNARKO dan rekening Bank BCA, atas nama YUSUP SUPENDI; dan/atau

3) sebesar 1,5% s.d 2% dari nilai PPN dalam Faktur Pajak atas peran SUNARKO sebagai direktur di perusahaan.

- Proses jual beli atau penerbitan Faktur Pajak TBTS yang Saksi lakukan dapat saksi jelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa Faktur Pajak yang saksi terbitkan bersama-sama dengan OBAY, ELAN, dan SUNARKO tersebut merupakan pesanan atau perder dari para perantara atas sales Faktur Pajak;
- b. Bahwa para perantara atau sales yang saksi ingat yaitu diantaranya yaitu:
 - 1) LUKMANUL HAKIM, dengan harga/nilai jual Faktur Pajak TBTS sebesar 12,5% dari nilai PPN; dan/atau
 - 2) AGUS SUPRIYANTO, dengan harga/nilai jual Faktur Pajak TBTS sebesar 17% s.d. 18% dari nilai PPN; dan/atau
 - 3) SANSAN SURYANA, dengan harga/nilai jual Faktur Pajak TBTS sebesar 18% s.d. 20% dari nilai PPN
- c. Untuk proses penerbitan, dalam hal ini, yaitu proses jual beli antara saksi dengan para perantara atau sales Faktur Pajak TBTS, dalam menerbitkan Faktur Pajak TBTS sehingga dapat digunakan oleh perusahaan pengguna (pembeli Faktur Pajak TBTS) tersebut, yaitu dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Para perusahaan pengguna (pembeli Faktur Pajak TBTS) memesan Faktur Pajak kepada para perantara atau sales Faktur Pajak TBTS, melalui email dan/atau Whatsapp, dan kemudian oleh para perantara atau sales Faktur Pajak TBTS, pesanan tersebut diteruskan/forward kepada saksi melalui Whatsapp; -
 - 2) Kemudian oleh saksi, pesanan Faktur Pajak TBTS tersebut diteruskan/forward kepada ELAN, untuk dibuatkan atau diupload Faktur Pajaknya;
 - 3) Setelah Faktur Pajak selesai dibuat atau diupload, maka oleh ELAN, dikirim kepada saksi melalui Whatsapp, untuk kemudian diteruskan/forward kepada para perantara atau sales Faktur Pajak TBTS, untuk diteruskan/forward lagi kepada para perusahaan pengguna (pembeli Faktur Pajak TBTS) tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Kemudian saksi menyuruh OBAY untuk membuat Invoice dan/atau Surat Jalan, sebagai pelengkap dokumen dari Faktur Pajak TBTS, untuk kemudian dikirimkan kepada para perusahaan pengguna (pembeli Faktur Pajak TBTS) tersebut.
- d. Sedangkan untuk proses pembayaran atas jual beli Faktur Pajak TBTS tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) Para perusahaan pengguna (pembeli Faktur Pajak TBTS) akan mentransfer atau membayar secara cash (tunai) kepada para perantara atau sales Faktur Pajak TBTS;
 - 2) Kemudian setelah para perantara atau sales Faktur Pajak TBTS mengambil keuntungan (fee) bagian mereka masing-masing, maka para perantara atau sales Faktur Pajak TBTS ini akan membayar atau menyerahkan uang penjualan Faktur Pajak TBTS kepada saksi yang dilakukan dengan cara mentransfer langsung atau menyeter tunai ke rekening yang diberikan oleh saksi, yaitu ke rekening sebagai berikut:
 - 1) Rekening atas nama SUNARKO, di Bank BCA, nomor rekening: 2721774599;
 - 2) Rekening atas nama YUSUP SUPENDI, di Bank BCA, nomor rekening: 4140348398;
 - 3) Rekening atas nama DENI SUHERMAN, di Bank BCA, nomor rekening: 3760377367;
 - 4) Rekening atas nama SUHAERI, di Bank BCA, nomor rekening: 2831675472; dan/atau;
 - 5) Rekening atas nama SEPI MUHARAM, di Bank Mandiri, nomor rekening: 1310011580000; atas nama SEPI MUHARAM.
 - 3) Kemudian setelah uang hasil penjualan Faktur Pajak TBTS yang merupakan satu rangkaian dari penerbitan Faktur Pajak TBTS tersebut masuk di beberapa rekening tersebut, maka saksi lakukan penarikan atau pentransferan ke rekening milik saksi sendiri, yaitu di Bank BCA, Nomor Rekening: 03760484716 atas nama SEPI MUHARAM.
 - 4) Untuk komisi atau keuntungan milik OBAY, diberikan dalam bentuk cash tunai atau ditransfer ke rekening Bank BCA, Nomor Rekening: 3760377367, atas nama DENI SUHERMAN;

Halaman 73 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Untuk komisi atau keuntungan milik ELAN, diberikan dalam bentuk cash tunai atau transfer ke rekening Bank BCA, Nomor Rekening: 2831583284, atas nama SUHERLAN; dan
 - 6) Untuk komisi atau keuntungan milik SUNARKO, diberikan dalam bentuk cash tunai.
- Sesuai dengan keterangan Saksi sebelumnya, bahwa saksi menerbitkan Faktur Pajak TBTS melalui PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA; PT GAMINDOTAMA PERKASA; PT SINAR ARTNO ASIA; PT BIMA BUMI MANDIRI; PT GEMA PULAU INTAN; PT CAKRA ABDI CEMERLANG; dan PT LAKSANA MEKAR SENTOSA. Saksi pernah menerbitkan atau menjual Faktur Pajak TBTS selain dari perusahaan tersebut dan atas hal tersebut dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
- a) Bahwa selain dari perusahaan PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA; PT GAMINDOTAMA PERKASA; PT SINAR ARTNO ASIA; PT BIMA BUMI MANDIRI; PT GEMA PULAU INTAN; PT CAKRA ABDI CEMERLANG; dan PT LAKSANA MEKAR SENTOSA, saksi memang pernah bertindak atau menjadi sales atau perantara Faktur Pajak TBTS;-
 - b) Biasa hal tersebut saksi lakukan ketika ada pesana atau order Faktur Pajak, saksi sedang kehabisan stok atau tidak ada perusahaan yang bisa saksi gunakan untuk menerbitkan Faktur Pajak TBTS;-
 - c) Maka saksi memesan atau membeli Faktur Pajak TBTS tersebut untuk memenuhi pesanan dari para perantara atau sales Faktur Pajak TBTS;-
 - d) Bahwa saksi pernah menjadi perantara atau menjualkan Faktur Pajak TBTS, yaitu menggunakan nama perusahaan penerbit sebagai berikut:
 - a. PT ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA; dan/atau
 - b. PT PUSPA INDAH KARYA.-
- Bahwa cara saksi dalam membeli atau menjadi perantara penerbitan Faktur Pajak melalui perusahaan penerbit PT ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA dan PT PUSPA INDAH KARYA, dapat saksi jelaskan sebagai berikut:-
- a. Untuk Faktur Pajak dari perusahaan penerbit PT ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA, dapat saksi jelaskan sebagai berikut:-
 - 1) Bahwa Faktur Pajak dari perusahaan penerbit PT ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA, dibeli oleh Tim saksi, melalui ELAN

Halaman 74 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



membeli Faktur Pajak tersebut kepada HENDRIK ABDUL ROHMAN;

2) HENDRIK ABDUL ROHMAN menjual Faktur Pajak atas nama PT ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA kepada ELAN dan TIM saksi, sebesar 6% dari nilai PPN; -

3) Cara pemesanan Faktur Pajak kepada HENDRIK ABDUL ROHMAN yaitu melalui Whatsapp;

b. Untuk Faktur Pajak dari perusahaan penerbit PT PUSPA INDAH KARYA, dapat saksi jelaskan sebagai berikut:

1) Bahwa Faktur Pajak dari perusahaan penerbit PT PUSPA INDAH KARYA, dibeli oleh Tim saksi, melalui ELAN membeli Faktur Pajak tersebut kepada Haji ARIS alias ARIS SUDIRMAN;

2) Saksi tidak tahu dengan pasti berapa harga beli Faktur Pajaknya, setahu saksi sekitar 6% dari nilai PPN; -

3) Cara pemesanan Faktur Pajak kepada Haji ARIS alias ARIS SUDIRMAN setahu saksi melalui Whatsapp. -

- Kepada Saksi diperlihatkan rincian Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan oleh Saksi bersama-sama dengan DENI SUHERMAN alias OBAY, SUHERLAN alias ELAN alias EKI, dan SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT, melalui setidaknya-tidaknya perusahaan PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA; PT GAMINDOTAMA PERKASA; PT SINAR ARTNO ASIA; PT BIMA BUMI MANDIRI; PT GEMA PULAU INTAN; PT CAKRA ABDI CEMERLANG; dan PT LAKSANA MEKAR SENTOSA,; pada kurun waktu masa Agustus 2017 s.d. Juli 2019, adalah sebagai berikut:

a) Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA;-

NO.	WAJIB PAJAK PENGGUNA	NPWP PENGGUNA	TOTAL
1	ADITYA ARYAPRAWIRA	013703558048000	623,300,000
2	AGUNG WIJAYA PUTRA	015951288517000	19,169,000
3	ARSA MEGA ENERGI	706663937734000	100,600,978
4	BAYU PATRA ENERGY	669067332503000	53,338,636
5	CV. AGUNG WIJAYA PUTRA	015951288517000	

Halaman 75 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



			20,036,364
6	DINAR PUTRA MANDIRI	022929459009000	1,409,811,150
7	FAUZAN PUTRA PERKASA	211230909443000	5,744,800
8	GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI	315121251416000	1,052,028,000
9	GAPURA OCEAN LINE PALABUHANRATU	751202078405000	5,968,000
10	JAYA ENERGI PRIMA	033519224047000	120,413,300
11	KARIMATA ENERGI PERSADA	712064757012000	495,690,000
12	MAULANA SAMUDERA GEMILANG	315600361401000	101,460,000
13	MITRA SARANA SEJATI	711473793307000	122,000,000
14	OCEAN PETRO ENERGY	028697829012000	1,031,142,500
15	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	518,170,494
16	SUMBER KETAPANG MAKMUR ABADI	710542721703000	5,968,000
	TOTAL		5,684,841,222

b) Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT GAMINDOTAMA PERKASA; -

NO.	WAJIB PAJAK PENGGUNA	NPWP PENGGUNA	Total
1	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	1,038,892,321
2	HARINCO KARYA SEJAHTERA	025808890432000	477,088,849
3	DUA SAHABAT BAJA	028999704031000	101,673,022
4	ELECOMINDO	015656713036000	40,240,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JAYAPRATAMA		
5	MULTITALLY INDONESIA	025936881027000	510,407,597
			2,168,301,789

c) Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT SINAR ARTNO ASIA;

NO	WAJIB PAJAK PENGGUNA	NPWP PENGGUNA	Total
1	ANUGRAH ABADI BARU	025665142027000	100,000,000
2	CATUR MANUNGAL JAYA AGUNG	024020638504000	156,545,340
3	CV. SURYA MITRA BUANA	022675136445000	201,096,733
4	DINAR PUTRA MANDIRI	022929459009000	335,104,000
5	INDAH TIGA SAUDARA	313153942445000	226,636,361
6	MECHATAMA SINAR MULIA	734594930503000	531,929,091
7	OCEAN PETRO ENERGY	028697829012000	509,089,000
8	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	1,635,572,911
			3,695,973,436

d) Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT BIMA BUMI MANDIRI;

No.	WAJIB PAJAK PENGGUNA	NPWP PENGGUNA	PPN
1	AGUNG WIJAYA PUTRA	015951288517000	30,400,000
2	ALISHA KARUNIA PERDANA	769926726721000	866,000,000
3	ANGKASA KARYA ENERGI	829224385505000	160,288,000
4	ANUGRAH FASHA SAKTI	832690010728000	80,550,000
5	ANUGRAH SEJAHTERA SENTOSA	315681775613000	520,875,000
6	BAYU PATRA ENERGY	669067332503000	192,163,636
7	BUMI GATAH PERMAI	863521100728000	3,936,170
8	CAHAYA UTAMA BERLIAN	750425977307000	284,475,000
9	CATUR MUKTI	013208657017000	129,381,818
10	ENERGI MITRA SEJAHTERA	859060139517000	30,400,000
11	INDAH TIGA SAUDARA	313153942445000	198,254,544
12	LAROS PETROLEUM	033292095419000	630,345,455

Halaman 77 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



13	MANGGALA SURYA ENERGI	833190614005000	17,400,000
14	MUDAH SARANA ENERGI	663075422411000	12,000,000
15	SARANA	032867020733000	155,632,000
16	SENDANG AGUNG MANDIRI	858072739517000	24,000,000
17	SINAR BACAN KHATULISTIWA	312479538607000	900,449,999
18	VIAN RAMA PRATAMA	017972274016000	67,000,000
			6,634,051,622

e. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT GEMA PULAU INTAN;

NO.	NPWP PENGGUNA	NAMA WAJIB PAJAK PENGGUNA	NILAI PPN
1	02.869.782-9- 012.000	PT. OCEAN PETRO ENERGY	558,500,000
2	31.315.394-2- 445.000	PT. INDAH TIGA SAUDARA	266,618,181
3	66.906.733-2- 503.000	PT. BAYU PATRA ENERGY	204,927,272
4	72.413.138-8- 624.000	PT. MITRA CENTRAL NIAGA	944,640,000
5	03.001.570-5- 607.000	PT. SAHABAT SETIA JAYA	588,572,000
6	74.775.446-3- 112.000	PT. PETRO ANDHARA ARTHA	470,795,000
7	02.213.861-4- 437.001	PT. SAMUDRA ETAM ENERGI	406,000,001
8	82.922.438-5- 505.000	PT. ANGKASA KARYA ENERGI	89,929,080
9	03.286.702-0- 733.000	CV. SARANA	109,464,000
10	02.489.719-1- 731.000	PT. TELADAN MAKMUR JAYA	210,240,000
11	01.845.962.8- 027.000	PT. LANA BUANA JAYA	136,450,000
12	02.213.861-4-	PT. SAMUDRA ETAM	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	437.001	ENERGI	325,960,000
13	83.269.001-0-728.000	PT. ANUGRAH FASHA SAKTI	191,800,000
14	75.042.597-7-307.000	PT. CAHAYA UTAMA BERLIAN	15,870,000
15	02.342.945-9-734.000	PT. PELITA PETROLIUM INDOASIA	258,400,000
16	84.095.119-8-446.000	PT. NAMIRA SELARAS MANDIRI	174,180,000
17	76.914.152-4-643.000	PT. WADI INTI KENCANA	93,091,200
18	76.340.343-3-951.000	PT. SINYUN KARYA ANUGRAH	74,090,909
19	86.264.543-9-517.000	PETRO MULYA ABADI	90,000,000
20	01.320.865.7-017.000	PT. CATUR MUKTI	40,909,091
21	82.803.424-9-601.000	PT. RAKHA PANCA MANDIRI	56,160,000
22	02.650.448-0-517.001	PT. YAVINDO SUMBER PERSADA	52,545,640
23	85.807.273-9-517.000	PT. SENDANG AGUNG MANDIRI	25,600,000
24	02.585.510-7-411.000	PT. PATRA ALAM RAYA	41,600,000
25	82.508.785-1-453.000	PT. SEKAR DJATI SELARAS	20,618,182
26	01.595.128.8-517.000	CV. AGUNG WIJAYA PUTRA	33,818,182
27	02.213.861-4-724.000	PT. SAMUDRA ETAM ENERGI	28,055,283
28	84.987.703-0-416.000	PT. ANDALAN PRATAMA INDONESIA	12,800,000
29	02.500.537-2-112.000	PT. IRSANI MANDIRI	11,250,000
30	03.278.613-9-012.000	PT. ALFA GRANITAMA	6,646,182

Halaman 79 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



31	02.268.599-4- 403.000	DWI PRIMA REZEKY	3,863,635
	JUMLAH		5,543,393,838

f. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT CAKRA ABDI CEMERLANG; dan

NO.	NPWP PENGGUNA	NAMA WAJIB PAJAK PENGGUNA	NILAI PPN
1	03.329.209-5- 732.002	PT. LAROS PETROLEUM	640,000,000
2	02.869.782-9- 012.000	PT. OCEAN PETRO ENERGY	660,250,000
3	31.315.394-2- 445.000	PT. INDAH TIGA SAUDARA	663,545,453
4	66.906.733-2- 503.000	PT. BAYU PATRA ENERGY	584,999,999
5	72.413.138-8- 624.000	PT. MITRA CENTRAL NIAGA	88,800,000
6	02.213.861-4- 724.000	PT. SAMUDRA ETAM ENERGI	140,000,000
7	82.922.438-5- 505.000	PT. ANGKASA KARYA ENERGI	170,404,740
8	03.286.702-0- 733.000	CV. SARANA	273,999,000
9	84.095.119-8- 446.000	PT. NAMIRA SELARAS MANDIRI	51,825,000
10	81.038.974-2- 734.000	BERSUJUD BARA BESI	85,454,545
11	71.133.372-4- 731.000	PT. ADRIAN JAYA MANDIRI	127,770,000
12	76.914.152-4- 643.000	PT. WADI INTI KENCANA	68,363,520
13	76.340.343-3- 951.000	PT. SINYUN KARYA ANUGRAH	26,136,364
14	73.498.081-6- 722.000	CV. MEGAH JAYA ABADI	129,400,000

Halaman 80 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



15	31.592.153-6- 615.000	PT. SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA	101,000,000
16	85.906.013-9- 517.000	PT. ENERGI MITRA SEJAHTERA	24,000,000
17	74.395.117-0- 422.000	PT. SUPERCHEM PRIMA LESTARI	12,096,000
18	66.307.542-2- 411.000	PT. MUDAH SARANA ENERGI	30,781,818
19	82.508.785-1- 453.000	PT. SEKAR DJATI SELARAS	13,381,818
20	83.771.725-5- 732.000	MULIA BERKAH MAHABBAH	15,454,546
JUMLAH			3,907,662,803

e) Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT LAKSANA MEKAR SENTOSA-

NO.	NPWP PENGGUNA	NAMA WAJIB PAJAK PENGGUNA	NILAI PPN
1	74.775.446-3- 112.000	PT. PETRO ANDHARA ARTHA	212,264,000
2	03.329.209.5- 419.000	PT. LAROS PETROLEUM	360,000,000
3	72.685.744-4- 721.000	CIPTA SARANA SINERGI	316,000,000
4	81.038.974-2- 734.000	BERSUJUD BARA BESI	109,454,548
5	71.133.372.4- 731.000	PT. ADRIAN JAYA MANDIRI	45,980,000
6	82.952.175-6- 401.000	BENDI NASHA NIAGA INDUSTRI	98,944,000
JUMLAH			1,142,642,548

- Kepada Saksi diperlihatkan rincian Faktur Pajak TBTS yang dijualkan oleh Saksi, melalui setidaknya-tidaknya perusahaan PT ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA; dan/atau PT PUSPA INDAH KARYA, pada kurun waktu masa Agustus 2018 s.d. Mei 2019, adalah sebagai berikut:



c) Faktur Pajak yang diterbitkan melalui PT ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA, dengan peran Saksi sebagai perantara (bertindak sebagai sales):

NO	WAJIB PAJAK PENGGUNA	NPWP PENGGUN A	NOMOR FAKTUR PAJAK	TGL FAKTUR	PPN PENERBIT
1	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0187127110 45000	0100051831 618800	22-Agu-18	57,317,500
2	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0187127110 45000	0100051831 618801	22-Agu-18	51,157,909
3	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0187127110 45000	0100051831 618802	23-Agu-18	52,325,000
4	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0187127110 45000	0100051831 618803	24-Agu-18	54,525,000
5	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0187127110 45000	0100051831 618804	25-Agu-18	58,000,000
6	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0187127110 45000	0100051831 618805	25-Agu-18	52,900,000
7	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0187127110 45000	0100051831 618806	27-Agu-18	53,500,000
8	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0187127110 45000	0100051831 618807	28-Agu-18	51,725,000
9	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0187127110 45000	0100051831 618808	29-Agu-18	53,850,000
10	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0187127110 45000	0100051831 618809	30-Agu-18	59,750,000
11	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0187127110 45000	0100051831 618810	31-Agu-18	58,300,000
12	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0187127110 45000	0100051864 277273	25-Sep-18	38,750,000
13	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0187127110 45000	0100051864 277274	26-Sep-18	32,212,767
14	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0187127110 45000	0100051864 277275	27-Sep-18	42,550,000
15	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0187127110 45000	0100051864 277276	28-Sep-18	42,037,500
16	PHILIA CITRA	0187127110	0100051864	29-Sep-18	39,750,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SEJAHTERA	45000	277277		
17	PHILIA CITRA SEJAHTERA	0187127110 45000	0100051864 277278	24-Sep-18	37,000,000
	PHILIA CITRA SEJAHTERA Total				835,650,676
18	MULTITALLY INDONESIA	0259368810 27000	0100051831 618811	22-Agu-18	54,950,000
19	MULTITALLY INDONESIA	0259368810 27000	0100051831 618812	23-Agu-18	58,850,000
20	MULTITALLY INDONESIA	0259368810 27000	0100051831 618813	24-Agu-18	51,508,172
21	MULTITALLY INDONESIA	0259368810 27000	0100051831 618814	25-Agu-18	56,250,000
22	MULTITALLY INDONESIA	0259368810 27000	0100051831 618815	27-Agu-18	54,500,000
23	MULTITALLY INDONESIA	0259368810 27000	0100051831 618816	28-Agu-18	56,000,000
24	MULTITALLY INDONESIA	0259368810 27000	0100051831 618817	29-Agu-18	54,600,000
25	MULTITALLY INDONESIA	0259368810 27000	0100051831 618818	31-Agu-18	55,000,000
26	MULTITALLY INDONESIA	0259368810 27000	0100051864 277268	24-Sep-18	51,350,000
27	MULTITALLY INDONESIA	0259368810 27000	0100051864 277269	25-Sep-18	49,981,460
28	MULTITALLY INDONESIA	0259368810 27000	0100051864 277270	26-Sep-18	50,125,000
29	MULTITALLY INDONESIA	0259368810 27000	0100051864 277271	27-Sep-18	49,625,000
30	MULTITALLY INDONESIA	0259368810 27000	0100051864 277272	28-Sep-18	52,125,000
31	MULTITALLY INDONESIA	0259368810 27000	0100051889 448056	15-Okt-18	46,450,000
32	MULTITALLY INDONESIA	0259368810 27000	0100051889 448057	17-Okt-18	46,119,994
33	MULTITALLY INDONESIA	0259368810 27000	0100051889 448058	19-Okt-18	44,000,000

Halaman 83 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

34	MULTITALLY INDONESIA	0259368810 27000	0100051889 448059	22-Okt-18	42,600,000
35	MULTITALLY INDONESIA	0259368810 27000	0100051889 448060	24-Okt-18	45,000,000
	MULTITALLY INDONESIA Total				919,034,626
	Grand Total				1,754,685,302

- d. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT PUSPA INDAH KARYA, dengan peran Saksi sebagai perantara (bertindak sebagai sales):-

NO	WAJIB PAJAK PENGGUNA	NPWP PENGGUN A	NOMOR FAKTUR PAJAK	TGL FAKTUR	PPN PENERBIT
1	MITRA CENTRAL NIAGA	724131388 624000	01000319365 40924	12-Mar-19	74,000,000
2	MITRA CENTRAL NIAGA	724131388 624000	01000319365 40925	13-Mar-19	74,000,000
3	MITRA CENTRAL NIAGA	724131388 624000	01000319365 40926	14-Mar-19	74,000,000
4	MITRA CENTRAL NIAGA	724131388 624000	01000319365 40927	15-Mar-19	37,000,000
5	MITRA CENTRAL NIAGA	724131388 624000	01000319365 41997	01-Apr-19	71,000,000
6	MITRA CENTRAL NIAGA	724131388 624000	01000319365 41999	05-Apr-19	71,000,000
7	MITRA CENTRAL NIAGA	724131388 624000	01000319365 42000	09-Apr-19	71,000,000
8	MITRA CENTRAL NIAGA	724131388 624000	01000319365 42001	15-Apr-19	71,000,000

Halaman 84 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



	MITRA CENTRAL NIAGA Total				543,000,000
1	ANGKASA KARYA ENERGI	829224385 505000	01000319365 40922	19-Feb-19	34,440,000
2	ANGKASA KARYA ENERGI	829224385 505000	01000419072 82650	06-Mei-19	63,291,000
	ANGKASA KARYA ENERGI Total				97,731,000
	Grand Total				640,731,000

- Bahwa Saksi membenarkan pernah menerbitkan dan menjual Faktur Pajak TBTS dari perusahaan PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA; PT GAMINDOTAMA PERKASA; PT SINAR ARTNO ASIA; PT BIMA BUMI MANDIRI; PT GEMA PULAU INTAN; PT CAKRA ABDI CEMERLANG; PT LAKSANA MEKAR SENTOSA, PT ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA; dan PT PUSPA INDAH KARYA tersebut ke beberapa perusahaan pengguna melalui para perantara atau sales Faktur Pajak TBTS dalam kurun waktu di tahun 2017 s.d. 2019.
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Faktur Pajak yang saksi jual/terbitkan melalui setidaknya-tidaknya perusahaan PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA; PT GAMINDOTAMA PERKASA; PT SINAR ARTNO ASIA; PT BIMA BUMI MANDIRI; PT GEMA PULAU INTAN; PT CAKRA ABDI CEMERLANG; PT LAKSANA MEKAR SENTOSA, PT ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA; dan PT PUSPA INDAH KARYA tersebut merupakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (Faktur Pajak TBTS) karena tidak ada transaksi dan pembayaran yang menyertainya atau dengan kata lain hanya jual beli PPN saja.
- Bahwa Tempat penampungan hasil penjualan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (selanjutnya disingkat dengan faktur pajak TBTS), Saksi menggunakan rekening antara lain :
 - Rekening BCA saksi a.n. SEPI MUHARAM;
 - Rekening SUNARKO nomor 2721774599 (ATM saksi pegang);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening BCA atas nama YUSUP SUPENDI (nama samaran SUNARKO) (ATM saksi pegang);
- Rekening BCA DENI SUHERMAN alias OBAY (kakak kandung saksi) (ATM saksi pegang);
- Rekening dan ATM BCA SUHAERI (ATM saksi pegang sekitar tahun 2019).
- Kepada Saksi diperlihatkan mutasi uang masuk (Kredit/CR) ke rekening :
 - a. BCA nomor 03760484716 a.n. SEPI MUHARAM dalam kurun waktu November 2017 s.d September 2019 dengan rincian sebagai berikut:

TANGGAL	DB/CR	PENGIRIM	NOMINAL
2/1/2018	K	HENDRIK ABDUL ROHM	850,000
3/9/2018	K	HENDRIK ABDUL ROHM	2,500,000
6/10/2018	K	HENDRIK ABDUL ROHM	750,000
6/29/2018	K	HENDRIK ABDUL ROHM	20,000,000
7/3/2018	K	HENDRIK ABDUL ROHM	4,000,000
7/4/2018	K	HENDRIK ABDUL ROHM	500,000
7/6/2018	K	HENDRIK ABDUL ROHM	2,000,000
7/18/2018	K	HENDRIK ABDUL ROHM	4,000,000
8/7/2018	K	HENDRIK ABDUL ROHM	1,000,000
8/21/2018	K	HENDRIK ABDUL ROHM	10,000,000
8/22/2018	K	HENDRIK ABDUL ROHM	2,500,000
11/9/2017	K	LUKMANUL HAKIM	5,000,000
12/30/2017	K	LUKMANUL HAKIM	23,605,000
6/5/2018	K	LUKMANUL HAKIM	5,000,000
6/8/2018	K	LUKMANUL HAKIM	10,000,000
7/2/2018	K	LUKMANUL HAKIM	9,000,000
9/21/2018	K	LUKMANUL HAKIM	1,200,000
11/11/2017	K	SUHERLAN	6,550,000
10/23/2018	K	SUHERLAN	1,600,000
12/12/2018	K	SUHERLAN	4,300,000

- b. Rekening BCA nomor 2721774599 a.n SUNARKO :

TANGGAL	DB/CR	PENGIRIM		NOMINAL
7/30/2018	K	0678050442	AGUS	

Halaman 86 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		IDR	SUPRIYANTO	30,000,000
8/2/2018	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	12,000,000
8/6/2018	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	6,000,000
8/15/2018	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	30,000,000
9/19/2018	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	13,367,500
9/19/2018	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	25,000,000
9/19/2018	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	2,333,000
9/20/2018	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	26,291,475
9/20/2018	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	1,125,000
9/21/2018	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	45,000,000
9/24/2018	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	5,000,000
9/26/2018	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	25,000,000
10/5/2018	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	40,000,000
10/8/2018	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	11,171,000
10/11/2018	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	10,000,000
10/12/2018	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	4,025,000
10/12/2018	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	25,000,000
10/24/2018	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	50,000,000
11/7/2018	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	8,000,000

Halaman 87 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/7/2018	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	6,100,000
11/22/2018	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	42,000,000
11/23/2018	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	13,000,000
12/4/2018	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	5,137,500
12/10/2018	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	45,000,000
12/10/2018	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	25,212,000
12/20/2018	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	40,000,000
12/21/2018	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	21,200,000
12/21/2018	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	10,000,000
12/26/2018	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	45,000,000
12/26/2018	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	15,000,000
1/7/2019	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	26,775,000
1/8/2019	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	15,700,000
1/8/2019	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	1,662,500
1/8/2019	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	10,562,500
1/8/2019	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	10,000,000
1/24/2019	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	40,000,000
3/11/2019	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	37,900,000
12/28/2017	K		HENDRIK ABD	

Halaman 88 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			ROHMAN	2,000,000
1/9/2018	K		HENDRIK ABD ROHMAN	2,000,000
2/21/2018	K		HENDRIK ABD ROHMAN	1,000,000
11/15/2017	K	6825116153 IDR	HENDRIK ABDUL ROHM	40,000
12/21/2017	K	6825116153 IDR	HENDRIK ABDUL ROHM	200,000
12/28/2017	K	6825116153 IDR	HENDRIK ABDUL ROHM	100,000
1/16/2018	K	6825116153 IDR	HENDRIK ABDUL ROHM	100,000
1/22/2018	K	6825116153 IDR	HENDRIK ABDUL ROHM	70,000
2/19/2018	K	6825116153 IDR	HENDRIK ABDUL ROHM	50,000
5/2/2018	K	6825116153 IDR	HENDRIK ABDUL ROHM	2,000,000
6/8/2018	K	6825116153 IDR	HENDRIK ABDUL ROHM	5,000,000
6/13/2018	K	6825116153 IDR	HENDRIK ABDUL ROHM	2,900,000
6/29/2018	K	6825116153 IDR	HENDRIK ABDUL ROHM	5,000,000
7/5/2018	K	6825116153 IDR	HENDRIK ABDUL ROHM	1,000,000
7/16/2018	K	6825116153 IDR	HENDRIK ABDUL ROHM	1,000,000
7/16/2018	K	6825116153 IDR	HENDRIK ABDUL ROHM	1,000,000
7/16/2018	K	6825116153 IDR	HENDRIK ABDUL ROHM	500,000
7/16/2018	K	6825116153 IDR	HENDRIK ABDUL ROHM	2,000,000
7/20/2018	K	6825116153 IDR	HENDRIK ABDUL ROHM	2,500,000

Halaman 89 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7/31/2018	K	6825116153 IDR	HENDRIK ABDUL ROHM	2,000,000
7/31/2018	K	6825116153 IDR	HENDRIK ABDUL ROHM	200,000
8/9/2018	K	6825116153 IDR	HENDRIK ABDUL ROHM	4,500,000
8/30/2018	K	6825116153 IDR	HENDRIK ABDUL ROHM	2,000,000
9/7/2018	K	6825116153 IDR	HENDRIK ABDUL ROHM	300,000
9/25/2018	K	6825116153 IDR	HENDRIK ABDUL ROHM	10,000,000
7/25/2018	K	7030055815 IDR	LUKMANUL HAKIM	6,500,000
8/1/2018	K		SANSAN SURYANA	9,353,600
8/1/2018	K		SANSAN SURYANA	10,000,000
8/28/2018	K		SANSAN SURYANA	10,000,000
8/28/2018	K		SANSAN SURYANA	10,000,000
8/28/2018	K		SANSAN SURYANA	1,678,555
9/7/2018	K	7550270751 IDR	SANSAN SURYANA	12,491,037
9/27/2018	K		SANSAN SURYANA	4,069,224
9/28/2018	K		SANSAN SURYANA	2,666,061
10/3/2018	K		SANSAN SURYANA	10,000,000
10/3/2018	K		SANSAN SURYANA	9,664,918
10/8/2018	K	7550270751 IDR	SANSAN SURYANA	10,000,000
10/9/2018	K		SANSAN	

Halaman 90 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			SURYANA	10,000,000
10/9/2018	K		SANSAN SURYANA	4,030,000
12/28/2018	K	7550270751 IDR	SANSAN SURYANA	29,061,850
1/15/2019	K		SANSAN SURYANA	12,600,000
1/18/2019	K		SANSAN SURYANA	38,429,100
1/18/2019	K		SANSAN SURYANA	1,088,640
1/28/2019	K		SANSAN SURYANA	11,073,600
1/28/2019	K		SANSAN SURYANA	1,080,000
1/28/2019	K		SANSAN SURYANA	688,500
2/8/2019	K		SANSAN SURYANA	32,337,091
2/13/2019	K		SANSAN SURYANA	6,375,000
3/4/2019	K		SANSAN SURYANA	2,108,000
3/5/2019	K		SANSAN SURYANA	5,100,000
3/8/2019	K		SANSAN SURYANA	36,084,880
3/8/2019	K		SANSAN SURYANA	34,508,300
10/23/2018	K	2831583284 IDR	SUHERLAN	2,600,000
10/24/2018	K	2831583284 IDR	SUHERLAN	1,000,000
11/7/2018	K	2831583284 IDR	SUHERLAN	7,100,000
1/28/2019	K	2831583284 IDR	SUHERLAN	38,550,000

Halaman 91 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



2/7/2019	K	2831583284 IDR	SUHERLAN	10,000,000
3/5/2019	K	2831583284 IDR	SUHERLAN	1,250,000
3/5/2019	K	2831583284 IDR	SUHERLAN	6,950,000

c. Rekening BCA 4140348398 a.n. YUSUP SUPENDI : -

TANGGAL	DB/CR	PENGIRIM		NOMINAL
11/14/2017	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	12,827,400
2/15/2018	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	1,450,000
2/20/2018	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	2,000,000
2/21/2018	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	2,500,000
3/12/2018	K	/008 /CENDRAWASIH	AGUS SUPRIYANTO	4,000,000
3/20/2018	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	5,000,000
3/21/2018	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	2,369,000
3/23/2018	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	8,800,000
3/23/2018	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	15,000,000
3/28/2018	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	8,280,000
3/28/2018	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	20,000,000
3/29/2018	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	7,550,000
3/29/2018	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	20,000,000
4/5/2018	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	20,000,000
4/6/2018	K	0678050442 IDR	AGUS	

Halaman 92 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			SUPRIYANTO	4,000,000
4/11/2018	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	11,900,000
4/11/2018	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	10,000,000
4/11/2018	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	10,000,000
4/20/2018	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	10,000,000
4/26/2018	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	1,300,000
4/30/2018	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	15,000,000
5/8/2018	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	7,045,000
5/8/2018	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	4,062,000
5/21/2018	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	2,700,000
5/28/2018	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	7,000,000
6/6/2018	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	25,000,000
6/13/2018	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	7,400,000
6/27/2018	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	40,000,000
7/4/2018	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	30,000,000
7/13/2018	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	40,000,000
7/23/2018	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	12,818,200
7/6/2018	K	/008 /PLAZA MANDI	SANSAN SURYANA	10,000,000
7/6/2018	K	/008 /PLAZA MANDI	SANSAN SURYANA	9,358,181

Halaman 93 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



d. Rekening BCA 3760377367 a.n. DENI SUHERMAN :

TANGGAL	DB/CR	PENGIRIM		NOMINAL
8/20/2018	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	50,000,000
1/15/2018	K		HENDRIK ABD ROHMAN	5,000,000
6/13/2018	K		HENDRIK ABD ROHMAN	2,000,000
5/30/2018	K	6825116153 IDR	HENDRIK ABDUL ROHM	6,000,000
6/6/2018	K	6825116153 IDR	HENDRIK ABDUL ROHM	5,000,000
6/8/2018	K	6825116153 IDR	HENDRIK ABDUL ROHM	20,000,000
6/13/2018	K	6825116153 IDR	HENDRIK ABDUL ROHM	4,500,000
6/29/2018	K	6825116153 IDR	HENDRIK ABDUL ROHM	300,000
7/16/2018	K	6825116153 IDR	HENDRIK ABDUL ROHM	20,000,000
7/18/2018	K	6825116153 IDR	HENDRIK ABDUL ROHM	20,000,000
7/23/2018	K	6825116153 IDR	HENDRIK ABDUL ROHM	10,000,000
8/10/2018	K	6825116153 IDR	HENDRIK ABDUL ROHM	4,000,000
9/5/2018	K	6825116153 IDR	HENDRIK ABDUL ROHM	1,000,000
10/4/2018	K	6825116153 IDR	HENDRIK ABDUL ROHM	35,000,000
10/5/2018	K	6825116153 IDR	HENDRIK ABDUL ROHM	20,000,000
10/5/2018	K	6825116153 IDR	HENDRIK ABDUL ROHM	20,000,000

Halaman 94 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/30/2018	K	6825116153 IDR	HENDRIK ABDUL ROHM	1,000,000
11/5/2018	K	6825116153 IDR	HENDRIK ABDUL ROHM	5,500,000
11/16/2018	K	6825116153 IDR	HENDRIK ABDUL ROHM	200,000
11/19/2018	K	6825116153 IDR	HENDRIK ABDUL ROHM	2,500,000
11/26/2018	K	6825116153 IDR	HENDRIK ABDUL ROHM	1,200,000
11/26/2018	K		HENDRIK ABDUL ROHM	1,250,000
12/26/2018	K	6825116153 IDR	HENDRIK ABDUL ROHM	700,000
1/21/2019	K		HENDRIK ABDUL ROHM	800,000
1/23/2019	K	6825116153 IDR	HENDRIK ABDUL ROHM	700,000
7/1/2019	K	6825116153 IDR	HENDRIK ABDUL ROHM	10,000,000
3/16/2018	K	/002 /NIAGA SHOPP	RIDWAN TAUFAN	200,000
12/17/2018	K	3760282641 IDR	RIDWAN TAUFAN	100,000
2/19/2019	K	3760282641 IDR	RIDWAN TAUFAN	14,000,000
2/20/2019	K	3760282641 IDR	RIDWAN TAUFAN	500,000
2/20/2019	K	3760282641 IDR	RIDWAN TAUFAN	500,000
3/26/2019	K	3760282641 IDR	RIDWAN TAUFAN	100,000
3/18/2019	K		SANSAN SURYANA	4,983,550

Halaman 95 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11/28/2018	K		BPK SUHERLAN	10,000,000
11/13/2017	K	2830821859 IDR	SUHERLAN	4,800,000
10/24/2018	K	2831583284 IDR	SUHERLAN	10,000
10/30/2018	K	2831583284 IDR	SUHERLAN	1,000,000
10/30/2018	K	2831583284 IDR	SUHERLAN	1,000,000
11/8/2018	K	2831583284 IDR	SUHERLAN	4,400,000
12/6/2018	K	2831583284 IDR	SUHERLAN	950,000
12/7/2018	K	2831583284 IDR	SUHERLAN	8,000,000
12/12/2018	K	2831583284 IDR	SUHERLAN	3,800,000
12/18/2018	K	2831583284 IDR	SUHERLAN	1,000,000
1/14/2019	K	2831583284 IDR	SUHERLAN	300,000
1/23/2019	K	2831583284 IDR	SUHERLAN	400,000
1/30/2019	K	2831583284 IDR	SUHERLAN	300,000
2/18/2019	K	2831583284 IDR	SUHERLAN	500,000
2/27/2019	K	2831583284 IDR	SUHERLAN	3,800,000
3/5/2019	K	2831583284 IDR	SUHERLAN	2,650,000
3/5/2019	K	2831583284 IDR	SUHERLAN	1,750,000

Halaman 96 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3/25/2019	K	2831583284 IDR	SUHERLAN	10,500,000
3/27/2019	K	2831583284 IDR	SUHERLAN	10,000,000
4/1/2019	K	2831583284 IDR	SUHERLAN	11,000,000
4/9/2019	K	2831583284 IDR	SUHERLAN	3,500,000
4/9/2019	K	2831583284 IDR	SUHERLAN	12,100,000
4/22/2019	K	2831583284 IDR	SUHERLAN	24,200,000
4/26/2019	K	2831583284 IDR	SUHERLAN	1,000,000
5/6/2019	K	2831583284 IDR	SUHERLAN	11,200,000
5/8/2019	K	2831583284 IDR	SUHERLAN	1,000,000

e. Rekening BCA 02831675472 a.n. SUHAERI:

TANGGAL	DB/CR	PENGIRIM		NOMINAL
09/04/2019	K	2831583284 IDR	SUHERLAN	Rp 5,000,000
26/04/2019	K	2831583284 IDR	SUHERLAN	Rp 8,000,000
20/05/2019	K	2831583284 IDR	SUHERLAN	Rp 10,000,000
10/05/2019	K	6800763141 IDR	SEKAR DJATI SELARA	Rp 100,884,317
02/05/2019	K	4730258777 IDR	RR CANDRA W YUNART	Rp 9,818,175
28/06/2019	K	4730258777 IDR	RR CANDRA W YUNART	Rp 12,444,000
13/06/2019	K	6090777881 IDR	RIDWAN E BATUBARA	Rp 5,000,000
08/07/2019	K	/008 /PLAZA	CANDRA W.	Rp

Halaman 97 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



		MANDI	YUNARTIA	9,384,000
24/07/2019	K	/008 /PLAZA MANDI	CANDRA W. YUNARTIA	Rp 17,544,000
15/04/2019	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	Rp 9,050,000
18/04/2019	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	Rp 50,000,000
22/04/2019	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	Rp 50,000,000
22/04/2019	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	Rp 13,025,000
14/05/2019	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	Rp 50,000,000
21/05/2019	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	Rp 35,000,000
03/06/2019	K	0678050442 IDR	AGUS SUPRIYANTO	Rp 2,500,000

Dari table yang diperlihatkan Penyidik diatas, mutasi uang masuk ke rekening atas nama :

- BCA nomor 03760484716 a.n. SEPI MUHARAM;
- Rekening BCA nomor 2721774599 a.n SUNARKO
- Rekening BCA 4140348398 a.n. YUSUP SUPENDI
- Rekening BCA 3760377367 a.n. DENI SUHERMAN
- Rekening BCA 02831675472 a.n. SUHAERI

tersebut diatas penjelasannya adalah sebagai berikut:

- Uang masuk dari AGUS SUPRIYANTO adalah uang hasil penjualan faktur pajak TBTS. Saksi sering menjual faktur pajak kepada perusahaan pengguna faktur pajak melalui perantara AGUS SUPRIYANTO;
- Uang masuk dari SANSAN SURYANA adalah uang hasil penjualan faktur pajak TBTS . Saksi sering menjual faktur pajak kepada perusahaan pengguna faktur pajak melalui perantara SANSAN SURYANA; -
- Uang masuk dari HENDRIK ABDUL ROHMAN adalah uang hasil penjualan faktur pajak TBTS. Saksi sering menjual faktur pajak kepada perusahaan pengguna faktur pajak melalui perantara HENDRIK ABDUL ROHMAN;



- d. Uang masuk dari LUKMANUL HAKIM adalah uang hasil penjualan faktur pajak TBTS. Saksi sering menjual faktur pajak kepada perusahaan pengguna faktur pajak melalui perantara LUKMANUL HAKIM
- e. Uang masuk dari SUHERLAN alias ELAN adalah uang hasil penjualan faktur pajak TBTS . Bahwa SUHERLAN alias ELAN adalah bagian dari tim saksi. Selain itu dia juga memiliki beberapa perusahaan penerbit faktur pajak TBTS seperti PT Bumi Bima Mandiri . Apabila ada penerbitan faktur pajak melalui perusahaan milik SUHERLAN alias ELAN, maka saksi diberi komisi oleh SUHERLAN.
- f. Uang masuk dari RIDWAN TAUFAN adalah uang hasil penjualan faktur pajak TBTS. Saksi sering menjual faktur pajak kepada perusahaan pengguna faktur pajak melalui perantara HENDRIK ABDUL ROHMAN. Sepengetahuan saksi ATM RIDWAN TAUFAN dipegang oleh HENDRIK ABDUL ROHMAN. -
- g. Uang masuk dari RR CANDRA W YUNARTIA adalah uang hasil penjualan faktur pajak TBTS . Saksi sering menjual faktur pajak kepada perusahaan pengguna faktur pajak melalui perantara RR CANDRA W YUNARTIA;-
- h. Uang masuk dari RIDWAN E BATUBARA adalah uang hasil penjualan faktur pajak TBTS. Saksi sering menjual faktur pajak kepada perusahaan pengguna faktur pajak melalui perantara RIDWAN E BATUBARA.
- Bahwa atas proses penerimaan Sertifikat Elektronik dan Kode Aktivasi (password), terkait dengan proses penerbitan Faktur Pajak TBTS dari perusahaan yang saksi buat atau dirikan, dapat saksi jelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi pernah menerima Sertifikat Elektronik dan Kode Aktivasi (password) tersebut;
 - b. Jadi begitu proses pendaftaran Wajib Pajak di Kantor Pajak selesai, oleh bapak SUBUR, Sertifikat Elektronik dan Kode Aktivasi (password) diserahkan kepada SUNARKO dan oleh SUNARKO diserahkan kepada saksi;
 - c. Kemudian oleh saksi, Sertifikat Elektronik dan Kode Aktivasi (password) tersebut saksi serahkan kepada ELAN;



d. Selain itu, sebenarnya, ELAN sudah mengetahui kombinasi password dan kode aktivasi tersebut, yaitu dari email yang masuk ke email perusahaan yang dibuat oleh saksi dan ELAN. Jadi ada email dari kantor pajak ke email tersebut yang isinya adalah kode aktivasi dan username-nya.

e. Setelah semua dokumen tidak saksi perlukan lagi, maka semua dokumen saksi musnahkan dengan cara di sobek-sobek dan saksi buang.

- Saksi menyerahkan Sertifikat Elektronik dan Kode Aktivasi (password) kepada ELAN dengan cara melalui handphone, yaitu melalui aplikasi Whatsapp, tetapi terkadang tidak semuanya saksi serahkan kepada ELAN, karena ELAN sudah mengetahui kombinasi password dan kode aktivasi tersebut, yaitu dari email yang masuk ke email perusahaan yang dibuat oleh saksi dan ELAN. Jadi ada email dari kantor pajak ke email tersebut yang isinya adalah kode aktivasi dan username-nya. Bahwa dokumen perpajakan yang saksi terima dari SUNARKO dan saksi serahkan kepada ELAN atau saksi musnahkan, kebanyakan dilakukan di daerah Apartemen Sentra Cakung Timur, Jakarta, dan dulu pernah di Apartemen Sejahtera, Bekasi. -

- Terkait tempat dan cara ELAN mengupload Faktur Pajak dari setidaknya perusahaan PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA; PT GAMINDOTAMA PERKASA; PT SINAR ARTNO ASIA; PT BIMA BUMI MANDIRI; PT GEMA PULAU INTAN; PT CAKRA ABDI CEMERLANG; dan PT LAKSANA MEKAR SENTOSA dapat saksi jelaskan sebagai berikut: -

a. Saksi tidak mengetahui bagaimana cara ELAN dalam mengupload Faktur Pajak, yang saksi tahu hanya ELAN mengerjakan penerbitan Faktur Pajak yaitu dalam hal ini adalah proses penguploadan Faktur Pajak, dilakukan dengan menggunakan media laptop; -

b. Setahu saksi, ELAN mengerjakan proses penguploadan Faktur Pajak di beberapa lokasi, yaitu:

- 1) di daerah Apartemen Sentra Cakung Timur, Jakarta; dan/atau
- 2) dulu pernah di Apartemen Mutiara, Bekasi; dan/atau
- 3) waktu saksi menyewa apartemen The Suites Metro, Kota Bandung; dan/atau
- 4) terkadang juga pernah di rumah kontrakan saksi, di daerah Cileunyi, Kabupaten Bandung.

Halaman 100 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa pada sekitar bulan Februari 2019, pada saat kasus ini terbongkar, maka semua barang bukti saksi musnahkan. Untuk LAPTOP, saksi hapus semua datanya, saksi install ulang, dan kemudian saksi jual kepada orang yang jual beli laptop yang ada di daerah Kenari Mas Jakarta.
- Saksi membenarkan bahwa saksi pernah menjual Faktur Pajak TBTS kepada HENDRIK ABDUL ROHMAN, yaitu atas nama PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA. Faktur Pajak TBTS tersebut saksi jual kepada HENDRIK ABDUL ROHMAN seharga 7% dari nilai PPN. Setahu saksi, Faktur Pajak atas nama PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA digunakan oleh PT DINAR PUTRA MANDRI.
- Saksi tidak tahu dengan pasti berapa fee atau keuntungan yang saksi terima, saksi lupa dan tidak pernah saksi catat. Uang fee atau keuntungan tersebut habis saksi pergunakan untuk membiayai kehidupan saksi pribadi dan saksi belikan beberapa buah rumah, sawah, mobil, motor, ruko, dan villa. Kebanyakan saksi menghabiskan uang hasil jualan atau penerbitan Faktur Pajak TBTS tersebut di beberapa wilayah di Kabupaten Bandung, yaitu diantaranya di desa Mandalasari dan di desa Cikasungka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang dituangkan didalam berita acara pemeriksaan saksi dan tidak merasa mendapat paksaan dan atau tekanan oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

10. **DENI SUHERMAN als OBAY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan saksi diberita acara penyidikan benar semua;
- Bahwa Sekitar tahun 2014 s.d. 2015, saksi membuka percetakan reklame, stempel dan plat nomor di Parakan Muncang Kabupaten Bandung, karena jualan sepi, akhirnya saksi diajak oleh adik saksi yaitu Terdakwa ke Bekasi untuk bantu-bantu dia membuat dokumen invoice dengan cara melihat contoh invoice di internet;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah memiliki beberapa perusahaan yang tidak ada kegiatan usaha riil nya, hanya menerbitkan faktur pajak saja.

Halaman 101 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi tidak ada penjualan, tidak ada barang yang dijual, tidak ada pembayaran sebesar harga barang dari pembeli ke perusahaan-perusahaan yang dimiliki Terdakwa;

- Bahwa setahu saksi dikisaran tahun 2015 s.d 2017, Terdakwa memiliki tim diantaranya adalah DEVIS bertugas menerbitkan faktur pajak dengan cara e-faktur atau secara elektronik ditahun 2015 s.d pertengahan 2016, pertengahan 2016 s.d akhir 2016 saksi bersama-sama SUHERLAN alias ELAN menerbitkan faktur pajak dengan cara e-faktur atau secara elektronik dan mulai tahun 2017 s.d 2019 yang bertugas menerbitkan faktur pajak dengan cara e-faktur atau secara elektronik adalah SUHERLAN alias ELAN, dan SUNARKO alias YUSUP SUPENDI bertugas sebagai Direktur di beberapa perusahaan milik SEPI MUHARAM alias CEPI (nama perusahaan saksi lupa) dan menyediakan rekening penampungan hasil penjualan faktur pajak dan atas jasa membuat invoice tersebut saksi diberi komisi oleh Terdakwa sebesar 0,5% s.d 2% dari nilai PPN yang tertera dalam faktur pajak;
- Bahwa Terdakwa selaku leader atau pimpinan dimana tugasnya mencari/menerima order faktur pajak TBTS dan yang membagi komisi kepada Tim;
- Bahwa saksi bertugas membuat invoice ;
- Bahwa Sunarko Alias Yusup Supendi Alias Mahput Alias Mas selain menjadi Direktur di beberapa perusahaan Terdakwa, dia juga diberi tugas bertugas untuk mencari orang-orang yang 102nta buat bendera (perusahaan), menyediakan rekening penampungan hasil penjualan faktur pajak TBTS atas nama rekening SUNARKO dan rekening atas nama YUSUP SUPENDI;
- Bahwa tugas SUHERLAN alias ELAN adalah mengupload e-faktur secara elektronik, membuat laporan SPT PPN, dan melaporkan SPT PPN tersebut secara online atau e-SPT. Selama tahun 2017 s.d 2019 Faktur pajak diupload di markas tim kita di apartemen Sentra Timur Pulogebang Jakarta Timur;
- Bahwa Saksi mendapatkan komisi dari Terdakwa sebesar minimal 0,5 % s.d 2% dari nilai PPN yang tertera dalam faktur pajak;
- Bahwa Setahu saksi Suherlan Alias Elan mendapatkan komisi setengah dari bagian saksi kisaran ¼% s.d 1% dari nilai PPN yang tertera dalam faktur pajak;

Halaman 102 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Sunarko Alias Yusup Supendi Alias Mas mendapatkan komisi sebesar 0,5% dari nilai PPN yang tertera dalam faktur pajak, dan apabila faktur pajak yang diterbitkan atas nama perusahaan dimana dia selaku Direktur, maka dia dia ditambahkan lagi komisi oleh Terdakwa sebesar 1,5%;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa komisi yang didapatkan oleh Terdakwa dan saksi tidak tahu berapa Terdakwa menjual faktur pajak kepada perantara atau perusahaan pengguna faktur pajak;
- Bahwa setelah faktur pajak dijual oleh Terdakwa, baru ada transfer uang masuk hasil penjualan faktur pajak ke rekening BCA atas nama SUNARKO, rekening BCA atas nama YUSUP SUPENDI, rekening BCA atas nama Terdakwa, rekening Bank Mandiri milik saksi, dan apabila ada hasil penjualan faktur pajak yang diterima dalam bentuk tunai, Terdakwa akan setor tunai ke rekening milik Saksi. Apabila kena batasan limit per hari kalau ga salah maksimal setoran tunai sehari Rp. 20.000.000.-, maka sisanya saksi diminta oleh Terdakwa untuk menyetorkan tunai di mesin ATM ke rekening BCA milik saksi terlebih dahulu, kemudian setelah masuk saksi disuruh segera untuk transfer ke rekening BCA milik Terdakwa.
- Bahwa untuk komisi Suherlan Alias Elan, oleh Terdekwa diberikan dalam bentuk cash tunai atau transfer ke rekening BCA atas nama Suherlan sedangkan untuk komisi saksi, biasanya diberikan dalam bentuk cash tunai atau transfer ke rekening BCA dia, sedangkan untuk SUNARKO oleh Terdakwa diberikan dalam bentuk tunai atau ditransfer ke rekening dia (saksi lupa ATM Bank apa). Dan Untuk komisi Terdakwa sendiri ditransfer dari rekening penampung hasil faktur seperti yang saksi jelaskan diatas ke rekening BCA dia;
- Bahwa nama-nama perusahaan penerbit faktur pajak TBTS milik Terdakwa yang invoicennya saksi buat adalah 103ntara lain sebagai berikut: PT MUTIARA PERMAI SEJAHTERA, PT GEMA PULAU INTAN, PT CAKRA ABDI CEMERLANG, PT LAKSANA MEKAR SENTOSA dan PT BIMA BUMI MANDIRI.
- Bahwa saksi pernah melakukan transfer uang ke rekening bank mandiri milik Terdakwa sebagai uang hasil penjualan faktur TBTS.
- Bahwa dari rekening saksi ada mentransfer uang ke rekening Hendrik;
- Bahwa Saksi buat invoice untuk Terdakwa sejak tahun 2016;
- Bahwa Saksi bekerja atas perintah Terdakwa;

Halaman 103 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

11. **SUHERLAN als ELAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan saksi diberita acara penyidikan benar semua;
- Bahwa sekitar tahun 2014, waktu saksi jualan gorengan di Bandung saksi ditelepon Terdakwa dan diajak ke Jakarta untuk membantu Terdakwa, dimana awalnya saksi tinggal di kontrakan Terdakwa di daerah Kranggan untuk beres-beres kontrakan. Setelah itu saksi berinisiatif belajar mobil hingga saksi bisa menyetir. Karena saksi sudah bisa menyetir, kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk antar dia;
- Bahwa saat menjadi supir Terdakwa ditahun 2014 saksi baru tahu bahwa pekerjaan Terdakwa adalah menjual atau menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Dia membuat perusahaan-perusahaan ASPAL dalam rangka menerbitkan faktur pajak TBTS;
- Bahwa Terdakwa dalam rangka menerbitkan Faktur Pajak TBTS tidak bekerja sendiri. Setahu saksi dikisaran tahun 2014 s.d 2017, Terdakwa memiliki Tim diantaranya adalah DEVIS bertugas menerbitkan faktur pajak dengan cara e-faktur atau secara elektronik, DENI SUHERMAN alias OBAY (kakak kandung SEPI MUHARAM) bertugas membuat invoice dan SUNARKO alias YUSUP SUPENDI bertugas menyediakan rekening penampungan hasil penjualan faktur pajak TBTS;
- Bahwa saksi ada membantu Terdakwa yaitu mengupload faktur pajak;
- Bahwa saat DEVIS keluar ditahun 2017, pekerjaan menerbitkan faktur pajak dengan cara e-faktur atau secara elektronik dilanjutkan oleh Deni Suherman, lalu karena saksi sudah terbiasa melihat DAVIES dan Deni Suherman mengupload e-faktur, kemudian saksi memberanikan diri untuk belajar secara otodidak, terkadang saksi mempelajarinya dari Youtube;
- Bahwa atas jasa upload e-faktur secara elektronik tersebut saksi diberi komisi oleh Terdakwa sebesar 1% dari nilai PPN yang tertera dalam faktur pajak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan Terdakwa ada 5 yaitu PT Gema Pulau Intan, PT Cakra abdi Cemerlang, PT Bima Bumi Mandiri, PT Laksana Mekar Sentosa, PT. Biru Segara Brantas;
- Bahwa Terdakwa selaku leader atau pimpinan dimana tugasnya mencari/ menerima order faktur pajak TBTS dan yang membagi komisi kepada Tim, Deni Suherman alias Obay bertugas membuat invoice , Sunarko alias Yusup Supendi alias Mahput alias Mas bertugas untuk membuat KTP ASPAL, mencari orang dalam rangka membuat perusahaan, menyediakan rekening penampungan hasil penjualan faktur pajak TBTS atas nama rekening SUNARKO dan rekening atas nama YUSUP SUPENDI, disuruh-suruh Terdakwa kesana-sini, bersih-bersih base camp kita di apartemen Central Timur Bekasi, dan oleh Terdakwa pernah dijadikan direktur di beberapa perusahaan, antara lain PT CAKRA ABDI CEMERLANG, sementara saksi sendiri bertugas mengupload e-faktur secara elektronik, membuat laporan SPT PPN, dan melaporkan SPT PPN tersebut secara online atau e-SPT.
- Bahwa saksi mendapatkan komisi sebesar 0,5% s.d 1% dari nilai PPN yang tertera dalam faktur pajak, DENI SUHERMAN alias OBAY mendapatkan komisi sebesar 2% dari nilai PPN yang tertera dalam faktur pajak, SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAS mendapatkan komisi sebesar 0,5% dari nilai PPN yang tertera dalam faktur pajak, dan apabila faktur pajak yang diterbitkan atas nama perusahaan dimana dia selaku Direktur, maka dia mendapatkan komisi 1% , sedangkan Terdakwa saksi tidak tahu berapa komisi yang didapatkan, karena saksi tidak tahu berapa Terdakwa menjual faktur pajak kepada perantara atau perusahaan pengguna faktur pajak;
- Bahwa setahu saksi faktur pajak TBTS oleh Terdakwa dijual antara lain kepada AGUS SUPRIANTO, SAN-SAN SURYANA, dan lain-lain;
- Bahwa Setahu saksi setelah faktur pajak dijual oleh Terdakwa, baru ada transfer uang masuk hasil penjualan faktur pajak ke rekening BCA atas nama SUNARKO, rekening BCA atas nama YUSUP SUPENDI, rekening BCA atas nama Terdakwa dan rekening Bank Mandiri atas nama DENI SUHERMAN;
- Bahwa saksi diberi komisi oleh Terdakwa dalam bentuk tunai atau transfer ke rekening BCA saksi;
- Bahwa seingat saksi nama-nama perusahaan penerbit faktur pajak TBTS milik Terdakwa yang faktur pajaknya saksi upload secara elektronik atau

Halaman 105 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e-faktur adalah antara lain sebagai berikut: PT BIRU SEGARA BRANTAS, PT MUTIARA PERMAI SEJAHTERA, PT GEMA PULAU INTAN, PT CAKRA ABDI CEMERLANG, PT LAKSANA MEKAR SENTOSA dan PT BIMA BUMI MANDIRI.

- Bahwa Nama-nama perusahaan penerbit faktur pajak TBTS milik Terdakwa yang faktur pajaknya diupload secara elektronik oleh Deni Suherman als Obay adalah antara lain sebagai berikut: PT Teknik Catur Sukses, PT Yaya Guna Sukses, dan PT Duta Gading Makmur;
- Bahwa PT Bima Bumi Mandiri merupakan perusahaan yang saksi buat bekerjasama dengan SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT alias MAS karena Terdakwa pada saat itu menyampaikan kepada saksi kalau mau mendapatkan uang lebih, maka saksi harus buat bendera (perusahaan) sendiri. Lalu saksi bersama SUNARKO berinisiatif membuat perusahaan PT BUMI BIMA MANDIRI dan patungan biaya masing-masing Rp 10.000.000.- dalam rangka pembutan perusahaan. Jadi setelah itu kalau ada order faktur pajak yang masuk ke Terdakwa, kemudian dia membagi-bagi perusahaan-perusahaan yang akan digunakan untuk menerbitkan faktur pajak TBTS, termasuk perusahaan saksi dan SUNARKO yaitu PT BIMA BUMI MANDIRI.
- Bahwa Faktur pajak yang diterbitkan menggunakan PT BUMI BIMA MANDIRI maka saksi dan SUNARKO akan dikasih komisi oleh SEPI MUHAMMAD masing-masing 1,5%. Selain itu saksi juga tetap mendapatkan komisi atas jasa upload faktur pajak sebesar 1%. Sedangkan untuk DENI SUHERMAN alias OBAY tetap dapat komisi kisaran 1,5% s.d 2% dari nilai PPN yang tertera dalam faktur pajak.
- Bahwa Ya selain perusahaan PT Gema Pulau Intan, PT Cakra Abdi Cemerlang, PT Laksana Mekar Sentosa, PT Bima Bumi Mandiri, saksi juga mengupload e-faktur atas nama: PT Mentari Cahaya Nusantara, PT Sinar Artno Asia dan PT Biru Segara Brantas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

12. REZA WAHYU ARDIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan saksi diberita acara penyidikan benar semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Sendang Agung Mandiri dalam kurun waktu setidaknya-tidaknya tahun 2018 s.d. 2019, telah mengkreditkan faktur pajak masukan;
- Bahwa PT Sendang Agung Mandiri pernah menerima dan mengkreditkan faktur pajak dari PT GEMA PULAU INTAN, PT. BIMA BUMI MANDIRI;
- Bahwa saksi memperoleh faktur pajak tersebut dari bapak JONATHAN alias JO;
- Bahwa nilainya Rp. 49.600.000,00 (empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain PT Sendang Agung Mandiri ada CV AGUNG WIJAYA PUTRA yang mengkreditkan faktur pajak dari PT Gema Pulau Intan;
- Bahwa CV Agung Wijaya tidak pernah bertransaksi dengan PT Gema Pulau Intan;
- Bahwa saksi pesan solar kepada JONATHAN alias JO, kemudian barang/solar dikirim berikut DO dan surat jalan, sementara faktur dan invoice dikirim lewat email ke email kantor. Pembayaran atas transaksi tersebut dilakukan secara transfer langsung ke PT NUSANTARA PRIMA ENERGI, sedangkan untuk pembelian faktur saksi bayar secara cash, yaitu saksi minta tolong saudara saksi yang ada di Jakarta yang bernama ANGGI ANGGORO alias ANGGI untuk bertemu JONATHAN alias JO untuk memberikan uang pembayaran atas transaksi pembelian faktur yang saksi lakukan;
- Bahwa PT Sendang Agung Mandiri tidak pernah menerima barang, yaitu SOLAR dari PT Gema Pulau Intan tetapi PT Sendang Agung Mandiri mendapatkan solar dari Jonathan als JO;
- Bahwa PT Sendang Agung Mandiri tidak membayar sebesar nilai barang ditambah dengan PPN 10% atas pembelian kepada JONATHAN alias JO, yang dibayar hanya sebesar nilai barang ditambah dengan PPN sebesar 6%. Jadi PT SENDANG AGUNG MANDIRI membeli faktur pajak kepada JONATHAN sebesar 6%. Jadi sebenarnya JONATHAN alias JO ini adalah broker/makelar, saksi pernah ditawari untuk membeli faktur pajak karena menurut JONATHAN ada perusahaan yang menjual faktur pajak dari adanya kelebihan pajak keluaran;
- Bahwa cara pemesanan atau proses pembelian faktur pajak yaitu JONATHAN menceritakan bahwa dia mempunyai faktur pajak dari perusahaan yang kelebihan pajak keluarannya sehingga ditawarkan ke saksi, dengan harga 60% dari nilai PPN atas faktur tersebut. Atas

Halaman 107 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tawaran tersebut tidak semua saksi ambil, yang saksi ambil hanya faktur yang berasal dari PT. BIMA BUMI MANDIRI;

- Bahwa cara pembayaran atas transaksi pembelian SOLAR dari PT SENDANG AGUNG MANDIRI kepada JONATHAN, yaitu dibayar secara transfer langsung ke PT NUSANTARA PRIMA SINERGI, apabila barang atau solar pesanan saksi sudah datang, pembayaran tersebut adalah pembayaran barang, sedangkan untuk pembayaran fakturnya atau PPN yang 6% saksi lakukan secara cash ke JONATHAN alias JO lewat saudara saksi yaitu ANGGI ANGGITO;
- Bahwa terakhir kali saksi memesan solar ke JONATHAN yaitu bulan Desember 2018, sejak itu saksi tidak pernah melakukan transaksi pembelian lagi;
- Bahwa Saksi kenal dengan JONATHAN lewat teman saksi yaitu Pak ABU, sewaktu saksi ada transaksi dengan PT OCEAN PETRO. Pak ABU ini makelar solar juga seperti halnya dengan JONATHAN.
- Bahwa PT Sendang Agung Mandiri telah melakukan pembetulan SPT masa PPN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

13. **RR. CANDRA W YUNARTIAS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan saksi diberita acara penyidikan benar semua;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa semua keterangan saksi diberita acara penyidikan benar semua;
- Bahwa saksi marketing PT Superchem Prima Lestari;
- Bahwa awalnya saksi ada proyek pengisian solar dan harganya bersaing, lalu saksi berbicara dengan Pak Dani jika mau harga masuk maka ambil yang non PPN saja, lalu pak Dani bilang menginginkan harga pembelian solar di bawah harga pasar untuk dijual kepada customer PT Superchem Prima Lestari namun yang penting harus rapi, maksudnya sudah termasuk pajak, lalu saksi diskusi dengan pak Sansan Suryana untuk pinjam perusahaan, lalu setelah berbicara dengan pak Sansan Suryana

Halaman 108 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mendapatkan faktur pajak dari Terdakwa yang saksi kenal dari pak Sansan Suryana, saat itu saksi Tanya ke Pak Sansan Suryana apakah faktur pajak ini aman, lalu dijawab oleh Pak sansan Suryana bahwa faktur pajak tersebut aman, lalu akhirnya saksi selalu pesan faktur pajak melalui Pak Sansan Suryana;

- Bahwa Faktur pajak yang dikreditkan PTSUPERCHEM PRIMA LESTARI tidak disertai dengan penyerahan barang dan pembayaran harga ditambah PPN 10%, hanya berupa penerbitan faktur pajaknya saja;
- Bahwa Saksi lupa berapa faktur yang diterbitkan;
- Bahwa Faktur Pajak tersebut diterbitkan oleh PT. Bahtera Suksesjaya Mandiri dan PT Cakra Abdi Cemerlang;
- Bahwa Harga jual faktur pajak yang dikreditkan PTSUPERCHEM PRIMA LESTARI dari para penerbit faktur tersebut adalah sebesar 40% dari PPN;
- Bahwa Mekanisme pembayaran Harga Faktur Pajak atas pembelian yang dilakukan oleh PT SUPERCHEM PRIMA LESTARI adalah sebesar 35-40% dari PPN yang saksi bayarkan secara uang tunai. Namun ada juga yang saksi bayarkan secara transfer ke rekening milik Pak SANSAN. Terakhir-terakhir saksi transfer sendiri ke rekening atas nama SUHERI atas perintah dari IWAN.
- Bahwa Saksi mengenal PT SUPERCHEM PRIMA LESTARI karena saksi bekerja sebagai freelance marketing BBM salah di PT SUPERCHEM PRIMA LESTARI.
- Bahwa kronologis cara PTSUPERCHEM PRIMA LESTARI mengkreditkan faktur pajak yang diterbitkan para penerbit tersebut dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a) Direktur PT SUPERCHEM PRIMA LESTARI menginginkan harga pembelian solar di bawah harga pasar untuk dijual kepada customer PT SUPERCHEM PRIMA LESTARI.
 - b) Selanjutnya saksi menghubungi Bapak YUZIRWAN di Lampung selaku pemilik BBM untuk melakukan pembelian BBM Solar Industri (HSD) tanpa PPN. BBM selanjutnya dikirimkan langsung kepada customer PT SUPERCHEM PRIMA LESTARI menggunakan Surat Jalan milik PT SUPERCHEM PRIMA LESTARI yang dikirimkan menggunakan email menggunakan armada milik Bapak YUSIRWAN.

Halaman 109 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Menurut cerita Bapak YUSIRWAN BBM tersebut berasal dari buangan laut atau BBM.

c) Faktur Pajak atas nama PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI dan PT CAKRA ABDI CEMERLANG saksi peroleh dari Saksi IWAN alias SEPPI yang saksi kenal dari Pak SANSAN. Selanjutnya saksi menyampaikan kepada IWAN alias SEPPI informasi yang harus dicantumkan dalam Faktur Pajak melalui Whatsapp diantaranya Nama, NPWP, Alamat lawan transaksi sebagaimana dalam Kartu NPWP. Selain itu saksi juga menyampaikan Kuantitas Penyerahan dan Harga Barang. Selanjutnya Faktur Pajak, Invoice, Surat Jalan, dan Kuitansi diserahkan kepada saksi di lokasi yang sudah dijanjikan sebelumnya atau dikirim menggunakan Go-Send.

- Faktur Pajak yang saksi peroleh dari IWAN atau SEPI antara lain PT CAHAYA UTAMA BERLIAN, PT ADISAKTI PERSADA ENERGY, dan PT NURBAKA.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Faktur pajak yang dikreditkan PTSUPERCHEM PRIMA LESTARI tidak disertai dengan penyerahan barang dan pembayaran harga ditambah PPN 10%, hanya berupa penerbitan faktur pajaknya saja.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Harga jual faktur pajak yang dikreditkan PTSUPERCHEM PRIMA LESTARI dari para penerbit faktur tersebut adalah sbb:

NO	NPWP_LWN	NAMA_LWN	Nama Pemasok FP	Harga FP
1	'851479907435000	'PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI	IWAN	40% x PPN
2	'861226983435000	'PT CAKRA ABDI CEMERLANG	IWAN	40% x PPN

- Saksi menjelaskan bahwa mekanisme pembayaran Harga Faktur Pajak atas pembelian yang dilakukan oleh PT SUPERCHEM PRIMA LESTARI adalah sebesar 35-40% dari PPN yang saksi bayarkan secara uang tunai. Namun ada juga yang saksi bayarkan secara transfer ke rekening milik Pak SANSAN. Terakhir-terakhir saksi transfer sendiri ke rekening atas nama SUHERI atas perintah dari IWAN.

Halaman 110 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang dituangkan didalam berita acara pemeriksaan saksi dan tidak merasa mendapat paksaan dan atau tekanan oleh Penyidik

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

14. **AHMAD SARIP ISKANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan saksi diberita acara penyidikan benar semua;
- Bahwa PT Indah Tiga Saudara pernah menerima dan mengkreditkan faktur pajak dari PT. Gema Pulau Intan, PT. Cakra Abadi Cemerlang, PT Bahtera Suksesjaya Mandiri, PT alam Sejahtera Indah Asia, PT Bima Bumi Mandiri dan PT Laksana Bumi Mandiri Sentosa, dalam SPT Masa PPN masa Agustus 2018 s.d. masa Januari 2019.
- Bahwa saksi mendapatkan faktur pajak dari PT. Gema Pulau Intan, PT. Cakra Abadi Cemerlang, PT Bahtera Suksesjaya Mandiri, PT alam Sejahtera Indah Asia, PT Bima Bumi Mandiri dan PT Laksana Bumi Mandiri Sentosa dari karyawan saksi bagian marketing yang sudah meninggal yaitu saudara WAWAN SETIAWAN alias IWAN;
- Bahwa menurut keterangan Almarhum dulu dia memperoleh faktur pajak tersebut dari bapak AGUS.
- Bahwa saksi pernah mengecek ke kantor pajak dengan adik saksi, saat itu memang keluar faktur dan beberapa bulan setelahnya saksi baru tahu jika faktur tersebut fiktif;
- Bahwa saksi tahu bahwa faktur tersebut fiktif setelah diperiksa oleh kepolisian;
- Bahwa PT Indah Tiga Saudara tidak pernah menerima barang, yaitu SOLAR dari PT. Gema Pulau Intan, PT. Cakra Abadi Cemerlang, PT Bahtera Suksesjaya Mandiri, PT alam Sejahtera Indah Asia, PT Bima Bumi Mandiri dan PT Laksana Bumi Mandiri Sentosa. Barang yang PT Indah Tiga Saudara terima tersebut berasal dari bapak Agus;
- Bahwa saksi sudah melakukan pembetulan terkait faktur pajak tersebut;

Halaman 111 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

15. **SANSAN SURYANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan saksi benar di Berita Acara pemeriksaan di kepolisian;
- Bahwa saksi bekerja di PT Wahana Petro Nusa;
- Bahwa Tanggung jawab saksi adalah mengatur keuangan dan pembukuan dan saksi bertanggung jawab kepada bapak Ridwan effendi batubara selaku komisaris PT Wahana Petro Nusa;
- Bahwa pada bulan Agustus tahun 2018 saksi dihubungi oleh seseorang yang bernama Nur kholis (broker minyak solar). Dia memberikan nomor HP pak MALWIN dan nomor HP REFFI. Dia minta saksi untuk bantu pesanin faktur pajak bpk MALWIN (PT Petro Adhara Artha dan PT Samudera Etam Energi) ke REFFI alias IWAN, lalu saksi telepon pak MALWIN dan menjelaskan bahaya penggunaan faktur pajak TBTS, namun dia tidak mengindahkan. Dia beralasan bahwa pada saat itu PT Petro Adhara Artha butuh uang untuk mengembalikan pajak ke Negara karena sebelumnya dia pernah bermasalah dengan pajak. Untuk pengembalian itu dia mau ngambil dari hasil faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (disingkat dengan faktur pajak TBTS. Akhirnya saksi mulai order faktur pajak pesanan bpk MALWINDAR untuk perusahaannya PT Petro Adhara Artha dan PT Samudera Etam Energi) ke REFFI alias IWAN. Diawal pemesanan, REFFI memberitahukan bahwa selanjutnya namanya diganti dari REFFI menjadi IWAN.
- Bahwa Saksi membeli faktur pajak dari Reffi als Iwan sebesar sebesar 18 % s.d 20% dari nilai PPN, lalu faktur tersebut saksi jual kepada bp MALWINDAR (PT Petro Adhara Artha dan PT Samudera Etam Energi) sebesar 27% dari nilai PPN.
- Bahwa Keuntungan sebesar 7% dari nilai PPN saksi bagi ke Nur Kholis sebesar 4,5% , sehingga saksi mendapatkan bagian sebesar 2,5% dari nilai PPN.
- Bahwa cara pembayarannya yaitu Bp MALWINDAR transfer uang ke rekening saksi di Bank Mandiri nomor 1640001562414 sebesar 27%.

Halaman 112 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian sebesar 18% s.d 20% saksi transfer ke rekening BCA atas nama SUNARKO atas permintaan REFFI alias IWAN. Pada saat itu saksi menanyakan kenapa tidak transfer langsung ke rekening REFFI alias IWAN, pada saat itu dia menyampaikan bahwa SUNARKO itu adalah anak buahnya. Selain ke rekening SUNARKO, saksi juga pernah disuruh mentransfer uang hasil penjualan faktur pajak TBTS ke rekening Mandiri HENDRIK ABDUL ROHMAN dan rekening Bank Mandiri DENI SUHERMAN.

- Bahwa Faktur pajak yang saksi terima dari REFFI alias IWAN atas nama PT GEMA PULAU INTAN, PT CAKRA ABDI CEMERLANG, PT LAKSANA MEKAR SENTOSA, PT. BIMA BUMI MANDIRI;
- Bahwa seingat saksi sekitar akhir Desember 2018 saksi tidak terima order faktur pajak lagi dari bp MALWINDAR ;
- Bahwa selain bp, MALWINDAR, saksi pernah mendapatkan order faktur pajak masukan TBTS dari ibu RR CHANDRA W YUNARTIAS. Dulu saksi pernah sekantor dengan dia di PT Purnaning Energy. Saksi dibagian acoounting dan ibu CHANDRA dibagian marketing. Kemudian setelah PT Purnaning Energy tutup ditahun 2016. Kita tidak pernah bertemu lagi;
- Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2018 ibu CHANDRA menghubungi saksi apakah punya kenalan supler faktur pajak TBTS yang mempunyai kelebihan faktur pajak. Pada saat itu saksi memberitahukan ke dia bahwa saksi punya kenalan, namun pada saat itu saksi menyampaikan bahaya dari penggunaan faktur pajak TBTS, namun dia bilang hanya mau membantu temannya yang bernama RIJAL (PT Cahaya Utama Berlian). Akhirnya saksi mulai terima order faktur pajak TBTS untuk PT Cahaya Utama Berlian ke REFFI alias IWAN.
- Bahwa harga faktur pajak saksi beli dari REFFI alias IWAN adalah sebesar 20% dari nilai PPN, lalu faktur tersebut saksi dan ibu Chandra jual kepada bp RIJAL (PT Cahaya Utama Berlian) kisaran 30 % sd 40% dari nilai PPN. Dan keuntungan dari nilai PPN tersebut kemudian saksi bagi dua dengan Ibu CHANDRA.
- Bahwa uang dari bp RIJAL saksi terima dari ibu CHANDRA dalam tansfer ke rekening saksi di Bank Mandiri nomor 1640001562414 sebesar 30 % sd 40%. Kemudian sebesar 20% saksi transfer ke rekening BCA atas nama SUNARKO atas permintaan REFFI alias IWAN.



- Bahwa faktur pajak TBTS tersebut saksi serahkan ke bp RIJAL melalui ibu CHANDRA untuk PT Cahaya Utama Berlian.
- Bahwa uang hasil penjualan faktur pajak TBTS saksi transfer dari rekening saksi di Bank Mandiri nomor 1640001562414 dan BCA nomor 7550270751 sebesar 18% s.d 20% dari nilai PPN ke rekening BCA atas nama SUNARKO atas permintaan REFFI alias IWAN. Pada saat itu saksi menanyakan kenapa tidak transfer langsung ke rekening REFFI alias IWAN, pada saat itu dia menyampaikan bahwa SUNARKO itu adalah anak buahnya. Selain ke rekening SUNARKO, saksi juga pernah disuruh mentransfer uang hasil penjualan faktur pajak TBTS ke rekening Mandiri HENDRIK ABDUL ROHMAN dan rekening Bank Mandiri DENI SUHERMAN;
- Bahwa Saksi diberikan nomor hp Terdakwa dari Pak Malwindar, karena Pak Malwindar temannya Pak Nur Cholis;
- Bahwa Saksi mendapatkan dari Pak Malwindar 27% lalu untuk pak Nur Cholis 4,5% , untuk Terdakwa 20% dan sisanya untuk saksi 2,5%;
- Bahwa pak Nurcholis menerangkan ke saksi bahwa faktur ini tidak ada masalah dan aman;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

16. RONNY ADRIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan saksi diberita acara penyidikan benar semua;
- Bahwa atas data SPT Masa PPN atas nama PT ANGKASA KARYA ENERGI, dalam kurun waktu setidaknya-tidaknya tahun 2018 s.d. 2019, PT ANGKASA KARYA ENERGI telah mengkreditkan faktur pajak masukan dari perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

NO.	WAJIB PAJAK PENERBIT	NPWP PENERBIT	NOMOR FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK	PPN PENGGUNA
1	GEMAPULAU INTAN	8612286174350 00	010005188672 9102	11/10/2018	29.440.000
2	GEMAPULAU INTAN	8612286174350 00	010005188672 9103	18/10/2018	30.360.000
3	GEMAPULAU INTAN	8612286174350 00	010005188672 9104	26/10/2018	30.129.080

Halaman 114 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



4	CAKRA ABDI CEMERLANG	8612269834350 00	010005188675 1727	05/11/2018	41.000.000
5	CAKRA ABDI CEMERLANG	8612269834350 00	010005188675 1728	12/11/2018	42.829.420
6	CAKRA ABDI CEMERLANG	8612269834350 00	010005188675 1733	21/11/2018	42.250.000
7	CAKRA ABDI CEMERLANG	8612269834350 00	010005188675 1734	28/11/2018	44.325.320
8	BIMA BUMI MANDIRI	8576936344350 00	010005187687 0364	03/12/2018	55.440.000
9	BIMA BUMI MANDIRI	8576936344350 00	010005187687 0365	18/12/2018	50.400.000
10	BIMA BUMI MANDIRI	8576936344350 00	010002198634 4186	03/01/2019	29.050.000
11	BIMA BUMI MANDIRI	8576936344350 00	010002198634 4187	07/01/2019	25.398.000
JUMLAH					420.621.820

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa benar, PT ANGKASA KARYA ENERGI pernah menerima dan mengkreditkan faktur pajak dari PT GEMA PULAU INTAN, NPWP: 86.122.861.7-435.000; PT CAKRA ABDI CEMERLANG, NPWP: 86.122.698.3-435.000; PT BIMA BUMI MANDIRI, NPWP: 85.769.363.4-435.000; tersebut kedalam SPT masa PPN a.n. PT ANGKASA KARYA ENERGI.
- Bahwa Faktur pajak atas nama PT GEMA PULAU INTAN, NPWP: 86.122.861.7-435.000; PT CAKRA ABDI CEMERLANG, NPWP: 86.122.698.3-435.000; PT BIMA BUMI MANDIRI, NPWP: 85.769.363.4-435.000; dan sebanyak 11 (sebelas) Faktur Pajak, dikirim ke kantor yang saksi peroleh faktur pajak tersebut dari bapak BAMBANG WAHYUDI. Awal mula saksi mengenal BAMBANG WAHYUDI adalah beliau menghubungi saksi, menawarkan adanya Faktur Pajak yang bias saksi pakai / gunakan untuk perusahaan saksi.
- Bahwa Saksi atau dalam hal ini PT ANGKASA KARYA ENERGI tidak pernah bertransaksi dengan PT GEMA PULAU INTAN, NPWP: 86.122.861.7-435.000; PT CAKRA ABDI CEMERLANG, NPWP: 86.122.698.3-435.000; PT BIMA BUMI MANDIRI, NPWP: 85.769.363.4-435.000. Saksi hanya bertransaksi/membeli Faktur Pajak dari BAMBANG WAHYUDI, sebesar 5 (lima) % dari Nilai Transaksi dari Faktur Pajak atau 50 (lima puluh)% dari nilai PPN yang ada di Faktur Pajak tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi atau dalam hal ini PT ANGKASA KARYA ENERGI tidak pernah menerima barang, yaitu SOLAR dari PT GEMA PULAU INTAN, NPWP: 86.122.861.7-435.000; PT CAKRA ABDI CEMERLANG, NPWP: 86.122.698.3-435.000; PT BIMA BUMI MANDIRI, NPWP: 85.769.363.4-435.000. Tidak ada pembelian barang yang dilakukan, melainkan hanya beli faktur pajak yang diperoleh dari BAMBANG WAHYUDI;
- Bahwa saksi atau dalam hal ini PT ANGKASA KARYA ENERGI tidak membayar PPN sebesar nilai barang yang ada dalam faktur pajak tersebut, tetapi kepada BAMBANG WAHYUDI, yang dibayar hanya sebesar 5 (lima) % dari nilai transaksi yang terdapat di faktur pajak atau 50 (lima puluh) % dari nilai PPN yang ada Faktur Pajak tersebut. Cara pemesanan atau proses pembelian faktur pajak yang saksi lakukan kepada BAMBANG WAHYUDI tersebut, yaitu BAMBANG WAHYUDI menceritakan bahwa dia mempunyai faktur pajak dari perusahaan yang kelebihan pajak keluarannya sehingga ditawarkan ke saksi, dengan harga 50% dari nilai PPN atas faktur tersebut;
- Bahwa faktur pajak dari PT GEMA PULAU INTAN, NPWP: 86.122.861.7-435.000; PT CAKRA ABDI CEMERLANG, NPWP: 86.122.698.3-435.000; PT BIMA BUMI MANDIRI, NPWP: 85.769.363.4-435.000 yang dikreditkan oleh PT ANGKASA KARYA ENERGI tersebut merupakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Hal ini dikarenakan PT ANGKASA KARYA ENERGI tidak ada transaksi dengan PT GEMA PULAU INTAN, NPWP: 86.122.861.7-435.000; PT CAKRA ABDI CEMERLANG, NPWP: 86.122.698.3-435.000; PT BIMA BUMI MANDIRI, NPWP: 85.769.363.4-435.000, yang ada hanya jual beli faktur pajak saja;
- Bahwa sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, PT ANGKASA KARYA ENERGI saksi akan melakukan pembetulan SPT Masa PPN, yaitu faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang berasal dari BAMBANG WAHYUDI yaitu faktur pajak atas nama PT GEMA PULAU INTAN, NPWP: 86.122.861.7-435.000; PT CAKRA ABDI CEMERLANG, NPWP: 86.122.698.3-435.000; PT BIMA BUMI MANDIRI, NPWP: 85.769.363.4-435.000;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang dituangkan didalam berita acara pemeriksaan saksi dan tidak merasa mendapat paksaan dan atau tekanan oleh Penyidik

Halaman 116 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

17. TRISTANTO AGUNG SUMBODO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan saksi diberita acara penyidikan benar semua;
- Bahwa menurut data SPT Masa PPN atas nama PT CATUR MUKTI, dalam kurun waktu setidaknya-tidaknya tahun 2018 s.d. 2019, PT CATUR MUKTI telah mengkreditkan faktur pajak masukan dari perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

NO.	WAJIB PAJAK PENERBIT	NPWP PENERBIT	NOMOR FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK	PPN PENGGUNA
1	GEMA PULAU INTAN	861228617435000	0100051886729146	10/12/2018	40,909,091
2	BIMA BUMI MANDIRI	857693634435000	0100051876870372	30/12/2018	39,090,909
3	BIMA BUMI MANDIRI	857693634435000	0100021986344168	03/01/2019	39,090,909
4	BIMA BUMI MANDIRI	857693634435000	0100021986344173	15/01/2019	51,200,000
5	GEMA PULAU INTAN	861228617435000	0100021986605042	05/02/2019	43,000,000
6	BIMA BUMI MANDIRI	857693634435000	0100021986344185	02/03/2019	65,454,545
7	BIMA BUMI MANDIRI	857693634435000	0100021986344194	03/03/2019	28,636,364
JUMLAH					387,381,818

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai Faktur Pajak dan PPN senilai Rp 387,381,818 tersebut. Faktur Pajak tersebut adalah faktur pajak yang saksi peroleh dari Ibu DEBY terkait dengan pembelian solar PT CATUR MUKTI untuk memenuhi kebutuhan BBM supplier utama PT CEMINDO GEMILANG.
- Bahwa Kronologis Saksi memperoleh Faktur Pajak atas nama PT GEMA PULAU INTAN, NPWP: 86.122.861.7-435.000 dan PT BIMA BUMI MANDIRI, NPWP: 85.769.363.4-435.000; dengan total jumlah Rp. 387.381.818. dapat saksi jelaskan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kronologis perolehan Faktur Pajak tersebut, yang saksi ketahui saksi pernah meminta tolong ibu DEBY untuk dicarikan sumber BBM untuk PO dari PT CHEMINDO GEMILANG dengan harga bersaing. Saksi sendiri tidak tahu ibu DEBY mendapatkan BBM dan faktur pajak tersebut darimana. -
- Bahwa Saksi hanya mentransfer dana untuk pembelian HSD Solar kepada Ibu DEBY. Selanjutnya yang bersangkutan sendiri yang mencari sumber BBM tersebut. Pembelian HSD solar tersebut untuk memenuhi permintaan klien saksi PT CEMINDO GEMILANG berdasarkan PO. -
- Bahwa Ibu DEBY sendiri mendapatkan keuntungan berupa sharing profit dari transaksi antara PT CATUR MUKTI dan PT CEMINDO GEMILANG. -
- Yang menangani pembelian pembelian PT CATUR MUKTI terkait transaksi dengan PT GEMA PULAU INTAN, NPWP: 86.122.861.7-435.000 dan PT BIMA BUMI MANDIRI, NPWP: 85.769.363.4-435.000 adalah ibu DEBY selaku freelance broker BBM yang biasa membantu PT CATUR MUKTI.
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti jika masih ada faktur pajak yang lain, selain faktur pajak dari yang berasal dari Sdr. DEBY yang terindikasi merupakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya karena melakukan transaksi adalah ibu DEBY. Namun, menurut penjelasan ibu DEBY masih ada faktur pajak lain yang terindikasi merupakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Faktur Pajak tersebut berasal dari PT BROJOLPERMATA SEJAHTERA, NPWP: 84.577.932.1-307.000 masing-masing dengan PPN sebesar Rp 30.000.000,- dan Rp 15.854.544,-. Atas kedua faktur pajak tersebut saksi telah dipanggil oleh penyidik dari Kanwil DJP Sumbagsel. Selain itu, Pihak PT CATUR MUKTI juga telah melakukan pembetulan terhadap SPT PPN Masa November 2018 di tanggal 18 Juni 2019 dengan nomor BPS : S-99069221/PPN1111/WPJ.30/KP.0703/2019 dan membayar atas kekurangan PPN yang harus disetorkan ke kas negara. -
- Kepada Saksi diperlihatkan salah satu dokumen faktur pajak dari PKP PENERBIT Faktur TBTS kepada Perusahaan Saksi sebagai berikut :
- hanya menerima dokumen dari Ibu DEBY, sedangkan atas nama perusahaan maupun nama orang yang tercantum dalam dokumen tersebut tidak ada satupun yang saksi kenal.

Halaman 118 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT CATUR MUKTI telah melakukan pembetulan atas Faktur Pajak yang diindikasikan Faktur Pajak TBTS tersebut dengan membayarkan kekurangan pajak sebesar pokok terkait dengan faktur pajak yang diterbitkan oleh PT GEMA PULAU INTAN dan PT BIMA BUMI MANDIRI.
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya yang dituangkan didalam berita acara pemeriksaan saksi dan tidak merasa mendapat paksaan dan atau tekanan oleh Penyidik.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

18. IVAN TRI HANDAYANO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan saksi diberita acara penyidikan benar semua;
- Bahwa saksi selaku direktur PT Rakha Panca Mandiri;
- Bahwa PT. Rakha Panca Mandiri pernah mengkreditkan faktur pajak dari PT Gema Pulau Intan;
- Bahwa PT Rakha Panca Mandiri mengkreditkan faktur pajak dari PT Gema Pulau Intan sekitar tahun 2018 sampai dengan 2019;
- Bahwa nilai PPNnya yaitu sekitar Rp. 56.160.000,00 (lima puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu darimana PT Rakha Panca Mandiri memperoleh faktur pajak dari PT. Gema Pulau Intan, karena manajemen sebelumnya adalah pak Slamet, dan saksi ambil alih manajemen tersebut serta mulai efektif mengambil alih perusahaan sejak Februari 2019.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT Rakha Panca Mandiri pada masa November 2019 saat itu melakukan dan/atau pemanfaatan JKP kepada PT Gema Pulau Intan, karena yang lebih mengetahui manajemen sebelumnya dipegang oleh Bapak Slamet;
- Bahwa PT Rakha Panda Mandiri sedang proses melakukan pembetulan SPT masa PPN yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

19. ADRIAN NOOR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 119 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan saksi diberita acara penyidikan benar semua;
- Bahwa atas data SPT Masa PPN atas nama PT BERSUJUD BARA BESI, dalam kurun waktu setidaknya-tidaknya tahun 2018 s.d. 2019, PT BERSUJUD BARA BESI telah mengkreditkan faktur pajak masukan dari perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

NO.	WAJIB PAJAK PENERBIT	NPWP PENERBIT	NOMOR FAKTUR PAJAK	TANGGAL FAKTUR PAJAK	PPN PENGGUNA
1	CAKRA ABDI CEMERLANG	861226983435000	0100051886751787	03/12/2018	17.090.909
2	CAKRA ABDI CEMERLANG	861226983435000	0100051886751788	06/12/2018	17.090.909
3	CAKRA ABDI CEMERLANG	861226983435000	0100051886751789	08/12/2018	17.090.909
4	CAKRA ABDI CEMERLANG	861226983435000	0100051886751790	11/12/2018	17.090.909
5	CAKRA ABDI CEMERLANG	861226983435000	0100051886751791	13/12/2018	17.090.909
6	LAKSANA MEKAR SENTOSA	864432448435000	0100061837820419	15/12/2018	15.636.364
7	LAKSANA MEKAR SENTOSA	864432448435000	0100061837820420	17/12/2018	15.636.364
8	LAKSANA MEKAR SENTOSA	864432448435000	0100061837820421	19/12/2018	15.636.364
9	LAKSANA MEKAR SENTOSA	864432448435000	0100061837820422	22/12/2018	15.636.364
10	LAKSANA MEKAR SENTOSA	864432448435000	0100061837820423	25/12/2018	15.636.364
11	LAKSANA MEKAR SENTOSA	864432448435000	0100061837820424	27/12/2018	15.636.364
12	LAKSANA MEKAR SENTOSA	864432448435000	0100061837820425	30/12/2018	15.636.364
13	LAKSANA MEKAR SENTOSA	864432448435000	0110.003-19.05466094	13/01/2019	28.278.000
JUMLAH					223.637.093

Halaman 120 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT BERSUJUD BARA BESI menerima dan mengkreditkan faktur pajak dari Wajib Pajak tersebut di atas dalam SPT Masa PPN Desember 2018 dan Januari 2019, yaitu CAKRA ABDI CEMERLANG, NPWP: 86.122.698.3-435.000 dan PT LAKSANA MEKAR SENTOSA, NPWP: 86.443.244.8-435.000; dengan total jumlah Rp. 223.637.093.00;
- Bahwa kronologis Saksi memperoleh Faktur Pajak atas nama PT CAKRA ABDI CEMERLANG, NPWP: 86.122.698.3-435.000 dan PT LAKSANA MEKAR SENTOSA, NPWP: 86.443.244.8-435.000; dengan total jumlah Rp. 223.637.093 saksi menjelaskan sebagai berikut:
 1. PT BERSUJUD BARA BESI bergerak di bidang jasa pengangkutan pertambangan di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu. Wilayah kerja kami berada di 2 (dua) site yaitu Sungai Dua dan Asam-asam;
 2. Atas pembelian solar kami gunakan untuk pemakaian sendiri, untuk wilayah Sungai Dua kami memiliki vendor tetap yaitu PT ANDIPA PERKASA ENERGI, sedangkan untuk wilayah Asam-asam kami menggunakan vendor PT LAROS PETROLEUM wilayah Banjarbaru.
 3. Kemudian atas pembelian dari PT LAROS PETROLEUM kami berhubungan dengan karyawan PT LAROS PETROLEUM yang bernama sdr. SOLIKHIN alias IKIN;
 4. Di sekitar bulan Desember 2018, saat kami membutuhkan stok lebih terkait jasa pengangkutan pertambangan, namun PT LAROS PETROLEUM tidak dapat menyanggupi dan menawarkan pembelian solar dari PT CAKRA ABDI CEMERLANG, NPWP: 86.122.698.3-435.000 dan PT LAKSANA MEKAR SENTOSA, NPWP: 86.443.244.8-435.000. Karena tawaran tersebut berasal dari PT LAROS PETROLEUM maka kami percaya atas transaksi solar tersebut.
 5. Bahwa setelah dikalrifikasi oleh ditjen pajak bahwa PT CAKRA ABDI CEMERLANG, dan PT LAKSANA MEKAR SENTOSA tidak ada transaksi nya dengan PT BERSUJUD BARA BESI.
 6. Barang tersebut memang dikirimkan ke site kami berdasarkan pengakuan fuelman kami yang bernama sdr. SUGANDA di Asam-asam dan atas pembayaran kami transfer langsung ke rekening PT LAROS PETROLEUM oleh admin umum yang bernama THYA SETIAWATI secara bertahap sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan. Saat ini saksi hanya membawa rekening koran untuk pembayaran di bulan Februari 2019 sebesar Rp 97.450.000,-.

Halaman 121 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Atas tagihan dari PT CAKRA ABDI CEMERLANG, NPWP: 86.122.698.3-435.000 dan PT LAKSANA MEKAR SENTOSA, NPWP: 86.443.244.8-435.000 belum kami bayarkan semuanya sehingga kami masih memiliki hutang untuk dibayarkan melalui PT LAROS PETROLEUM, namun atas tagihan tersebut belum dilakukan penagihan oleh PT LAROS PETROLEUM sampai dengan sekarang. Sehingga sampai saat ini kami masih tidak tahu harus membayar kemana sisa tagihan tersebut dimana menurut informasi sdr. H. JULIANSYAH, PT LAROS PETROLEUM sudah tidak ada dan tidak beroperasi karena surat niaga sudah habis;
8. Saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan perusahaan atas nama PT CAKRA ABDI CEMERLANG, NPWP: 86.122.698.3-435.000 dan PT LAKSANA MEKAR SENTOSA, NPWP: 86.443.244.8-435.000 yang mengurus terkait pembelian adalah direktur kami yaitu sdr. H. JULIANSYAH

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut:

PARLUHUTAN RAJAGUKGUK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa Ahli dimintai pendapat oleh penyidik sehubungan adanya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan;
- Bahwa Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- Bahwa Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, dimana Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material.
- Bahwa Pajak Pengeluaran adalah Seluruh faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP sebagai bukti pemungutan PPN yang telah dilakukannya

Halaman 122 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap pembeli BKP/Penerima JKP yang terutang atas penyerahan BKP/ JKP selama satu masa Pajak;

- Bahwa Pajak Masukan adalah seluruh PPN yang telah dibayarnya selama satu masa pajak yang dibuktikan dengan adanya bukti pungutan PPN berupa faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP Penjual, atas perolehan BKP/JKP. Selisih Antara pajak keluaran dengan pajak masukan dan jumlah yang didapat diperhitungkan, apabila pajak keluaran lebih besar maka selisinya merupakan PPN yang harus dibayar dan disetor ke kas Negara;
- Bahwa sesuai pasal 1 angka 6 Undang-undang KUP Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, dalam system Self Assessment wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Kantor Ditjen Pajak untuk dicatat dan sekaligus untuk mendapatkan NPWP;
- Bahwa pengusaha kena pajak adalah setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang PPN, wajib melaporkan usahanya pada kantor Ditjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi PKP (pasal 2 ayat 2 undang-undang KUP);
- Bahwa Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas dan benar serta informasi yang tertuang harus berdasarkan transaksi yang sebenarnya yaitu adanya aliran barang dan aliran uang sebagai pembayarannya, walaupun faktur Pajak telah terisi dengan data yang lengkap dan jelas namun ternyata dibuat tidak berdasarkan transaksi bisnis yang riil atau keadaan yang tidak sebenarnya maka dapat dikatakan bahwa faktur pajak tersebut tidak memenuhi syarat material;
- Bahwa yang dimaksud dengan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya adalah Faktur Pajak yang diterbitkan tanpa didasari transaksi ekonomis (underlying transaction) atau dengan kata lain penerbitannya tidak didasari dengan penyerahan barang dan/atau jasa dan pembayaran atas penyerahan barang dan/atau jasa tersebut. Faktur pajak tersebut tidak sah karena tidak memenuhi persyaratan

Halaman 123 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



material seperti dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN yang terjadi hanya jual beli kertas faktur pajak saja.

- Bahwa ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang tindak pidana di bidang perpajakan antara lain adalah sebagai berikut: Pasal 39A UU KUP menyatakan bahwa: "Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
- b. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak."

Pasal 43 UU KUP menyatakan bahwa : "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan".

- Bahwa unsur perbuatan menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya" tersebut TIDAK harus selalu disertai rangkaian perbuatan membuat dan melaporkan SPT Masa PPN para PKP Penerbitnya, hal ini dikarenakan perbuatan "menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya" tersebut merupakan perbuatan yang mandiri yang dengan diterimanya Faktur Pajak TBTS oleh PKP Penggunanya sudah dapat dikreditkan oleh PKP Pengguna, terlepas apakah Faktur Pajak TBTS tersebut dilaporkan atau tidak sebagai PPN Keluaran di SPT Masa PPN PKP Penerbitnya. Boleh jadi Pelaku penerbit Faktur Pajak TBTS melengkapi modus operandinya dengan rangkaian perbuatan membuat dan melaporkan SPT Masa PPN para PKP Penerbitnya dengan tujuan meyakinkan pembeli dan/atau dengan tujuan menyamarkan faktur pajak TBTS tersebut supaya dalam administrasi KPP terlihat sebagai faktur pajak yang normal.



- Bahwa yang dimaksud dengan “**menerbitkan**” dalam Pasal 39A huruf a Undang-Undang KUP mempunyai pengertian setiap perbuatan yang mengakibatkan faktur pajak, telah beredar keluar baik fisik maupun fungsinya sebagai sarana administrasi pelaksanaan ketentuan perpajakan secara melawan hukum dengan maksud untuk menyalahgunakan. Termasuk dalam perbuatan menerbitkan antara lain membuat, menyimpan, mengedarkan, menawarkan, menjual, dan/atau menyerahkan. Oleh karena itu, perbuatan berupa penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dikenai sanksi pidana.
- Bahwa sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat hokum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik sedangkan kegunaannya sebagai prasyarat untuk mendapatkan layanan perpajakan secara elektronik dalam melaksanakan ketentuan undang-undang pajak pertambahan nilai seperti penggunaan aplikasi e-faktur, permintaan nomor seri faktur pajak secara online dan layanan lainnya;
- Bahwa Syarat-syarat faktur pajak ada dua, persyaratan formal dan material, **Persyaratan Formal** apabila diisi secara lengkap, jelas, dan benar yaitu paling sedikit memuat :
 - 1) Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
 - 2) Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang pembeli atau penerima Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak ;
 - 3) Jenis Barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
 - 4) Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut ;
 - 5) Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
 - 6) Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
 - 7) Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Dalam hal alamat PKP yang sebenarnya atau sesungguhnya berbeda dengan alamat dalam Surat Keterangan Terdaftar atau Surat Pengukuhan PKP, maka PKP harus memberitahukan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan untuk meminta perubahan

Halaman 125 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



alamat dalam Surat Keterangan Terdaftar atau Surat Pengukuhan PKP agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Sedangkan **Persyaratan Material** apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan BKP dan/atau JKP. Dengan demikian, walaupun faktor pajak sudah memenuhi ketentuan formal dan sudah dibayar PPN-nya, apabila keterangan yang tercantum dalam faktor pajak tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya mengenai penyerahan BKP dan/atau JKP, faktor pajak tersebut tidak memenuhi syarat material (Pasal 13 ayat (9) Undang-Undang PPN).

- Bahwa sesuai pasal 13 peraturan direktur jenderal pajak nomor PER-24/PJ/2012 sebagaimana telah diubah dengan PER-17/PJ/2014 disebutkan bahwa PKP wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis nama pejabat yang berhak menandatangani faktor pajak disertai dengan contoh tanda angannya dengan melampirkan fotokopi kartu identitas pejabat/pegawai pendatangan faktor pajak yang sah yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) paling lama pada akhir bulan berikutnya sejak bulan pejabat/pegawai tersebut mulai melakukan penandatanganan faktor pajak. PKP dapat menunjuk lebih dari satu orang pejabat/pegawai untuk menandatangani faktor pajak tersebut;
- Bahwa bentuk e-faktur adalah berupa dokumen elektronik faktor pajak yang merupakan hasil keluaran dari aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak E-faktur tidak wajib untuk dicetak dalam bentuk kertas. E-faktur ditanda tangani secara elektronik sehingga tidak disyaratkan lagi untuk ditanda tangani secara basah;
- Bahwa benar, sekalipun faktor pajak tidak ditanda tangani oleh pengurus atau direksi, faktor pajak berbentuk elektronik tersebut tetap merupakan faktor pajak yang sah karena penerbitannya hanya dilakukan dengan menggunakan aplikasi elektronik direktorat jenderal pajak.
- Bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU KUP dijelaskan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Kemudian dalam penjelasan Pasal 43 ayat (1) UU KUP ditambahkan

Halaman 126 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



penjelasan bahwa yang dipidana karena melakukan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan **tidak terbatas** pada Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak, atau pegawai Wajib Pajak, namun juga terhadap mereka yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

- Dalam sistem PPN, pemerintah memberi kepercayaan penuh kepada pengusaha kena pajak (PKP) yang menjual barang kena pajak (BKP) untuk memungut PPN yang dikenakan terhadap pembeli BKP. Jadi pembeli BKP membayar harga beli barang ditambah PPN atas barang tersebut sebesar 10% dari harga barang. Penjual BKP yang menerima uang pembayaran termasuk PPNnya menerbitkan faktur pajak (FP) yang didalamnya tercantum nama barang, harga dan jumlah PPN yang dibayar sebagai tanda terima pemungutan PPN (Pajak keluaran bagi Penjual). Faktur pajak ini bagi pembeli merupakan bukti pembayaran PPN dimuka (pajak masukan bagi pembeli). Kemudian penjual melaporkan faktur pajak keluaran tersebut dalam SPT masa PPN pada bulan penerbitan faktur pajak dengan memperhitungkan pajak masukan yang telah dibayar saat perolehan BKP dan membayar pajak yang kurang dibayar apabila PKnya lebih besar daripada PMnya, demikian pula halnya dengan pembeli BKP, juga melaporkan faktur pajak masukan dalam SPT masa PPN pada bulan yang bersangkutan, PM ini akan mengurangi kewajiban pembayaran PPN yang telah dipungut oleh pembeli saat menjual BKP tadi, dengan demikian faktur pajak mempunyai nilai uang karena dalam mekanisme PPN, faktur pajak masukan akan mengurangi kewajiban penyetoran atas PPN yang dipungut saat menjual BKP (pajak keluaran);
- Bahwa dalam kasus pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, faktur pajak dibuat tanpa adanya transaksi jual beli BKP, penerbit faktur pajak hanya membuat faktur pajak atas nama pengguna. Atas penerbitan faktur pajak ini, pengguna membayar sejumlah uang (misal sebesar 30%-40% dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak kepada penerbit/sales faktur/pihak yang menyediakan faktur pajak). Uang yang dibayarkan ini tidak pernah disetorkan ke Negara. Pengguna memperoleh manfaat dari faktur pajak ini untuk mengurangi kewajiban pembayaran PPN yang telah dipungutnya. Dengan cara ini pengguna memperoleh keuntungan 60-7-% dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Disisi

Halaman 127 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



lain pemerintah kehilangan pendapatan dari PPN sebesar nilai yang tercantum dalam faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya karena PPN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut tidak pernah disetorkan. Oleh karena itu pemerintah mengalami kerugian pada pendapatan PPN atas penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;

- bahwa dalam delik pasal 39A huruf a UU KUP “kerugia pada pendapatan Negara” bukan merupakan unsur pidana oleh karenanya redaksi ancaman hukuman dalam pasal 39A tersebut adalah “...dipidana dengan penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahu serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak. Hal ini kemudian ditegaskan kembali dalam penjelasan pasal 62 ayat(2) Peraturan pemerintah RI nomor 74 tahun 2011 tentang Tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, dalam hal tindak pidana dibidang perpajakan yagn disangkakan terkait dengan pasal 39A UUKUP jumlah kerugian pada pendapatan Negara yang harus dilunasi sebesar jumlah pajak dalam faktur pajak. Dengan demikian pembetulan atas faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya oleh para PKP terlepas masalah adanya kerugian Negara yang secara nyata berkurang karena pembetulan tersebut namun tidak mempengaruhi ancaman pemindanaan dalam pasal 39A tersebut;
- Bahwa menurut saksi unsur dengan sengaja menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya adalah orang dimaksud harus menghendaki perbuatan sebagaimana dimaksud serta harus meninsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan sebagaimana dimaksud. Dengan mempertimbangkan keterangan saksi yang menyatakan adanya penawaran faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dari Terdakwa dengan membayar sejumlah dana sekitar 12,5% sampai dengan 20% dari nilai PPN yang tertera di faktur pajak dan dibuktikan kemudian dengan perbuatan melakukan pelaporan PT masa PPN dan juga adanya upaya penghindaran pertanggungjawaban hokum dengan menggunakan banyak rekening sebagai rekening tempat penampungan uang hasil penjualan faktur pajak TBTS maka unsur sengaja telah terbukti;
- Jika seseorang yang tidak pernah diberi kuasa oleh Direktur untuk mendantangani faktur pajak TBTS dan tidak ada namanya dalam akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendirian perusahaan, bisa dikenai pidana pasal 39A karena orang tersebut yang bertanggung jawab terhadap penerbitan faktur pajak TBTS tersebut;

- Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa didalam Berita Acara pemeriksaan benar semua;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dengan pasti apa usaha atau pekerjaan dari Terdakwa. Cuma setau saksi Terdakwa tidak pernah ke kantor atau ke lokasi usaha dia. Terdakwa tidak memiliki kantor, tidak memiliki usaha apapun. Setiap hari saksi menjemput Terdakwa di rumahnya yang di Harapan Mulya Regency, kemudian saksi antar ke Apartemen Central Timur Cakung dan/atau Apartemen Mutiara Bekasi.;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Sepi Muharam sejak sekitar tahun 2015;
- Bahwa awalnya Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek, saat itu Terdakwa pernah bertemu dan berkenalan dengan Hendrik, yang pada saat itu memakai jasa Terdakwa sebagai tukang ojek, kemudian Terdakwa disuruh menyupiri Hendrik kemana Hendrik pergi. Lalu selain sebagai supirnya, Terdakwa oleh Hendrik sering disuruh untuk mengantarkan dokumen dalam amplop coklat untuk dilaporkan atau diserahkan ke Kantor Pajak, kalo tidak salah di daerah Cakung, Jakarta. Dan pada saat ikut bekerja dengan Hendrik, Terdakwa berkenalan dengan saksi Sepi Muharam aram, rekan kerja Hendrik; lalu akhirnya Terdakwa sudah tidak lagi dipakai oleh Hendrik, dan Terdakwa ditawarkan kerja ikut dengan saksi Sepi Muharam;
- Bahwa selama bekerja dengan saksi Sepi Muharam, upah atau gaji Terdakwa tidak tentu, tidak ada perjanjian gaji tetapnya berapa. Terkadang Terdakwa diberi uang per minggu, antara Rp 1.000.000,- s.d. Rp 2.000.000. pernah juga Terdakwa tidak dikasih atau hanya dikasih sebesar Rp 100.000,- setiap minggunya. Terdakwa dikasih dengan cara diberi secara tunai;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya mengenai PT GEMA PULAU INTAN, PT CAKRA ABDI CEMERLANG, dan PT LAKSANA MEKAR SENTOSA,

Halaman 129 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa yang ikut mengurus proses pendirian perusahaan tersebut.

- Bahwa Terdakwa disuruh oleh saksi Sepi Muharam untuk mengurus pendirian perusahaan tersebut melalui bapak SUBUR;
- Bahwa Terdakwa dikenalkan oleh mang Atip kepada subur, lalu Terdakwa sering komunikasi dengan subur melalui telepon sampai akhirnya Terdakwa mengutarakan keinginan Terdakwa untuk membuka perusahaan;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu tujuan saksi Sepi Muharam mendirikan perusahaan tersebut, namun lama-lama Terdakwa baru tahu kalo perusahaan tersebut didirikan hanya untuk menerbitkan faktur pajak. Terdakwa sering mendengar pembicaraan antara saksi Sepi Muharam dengan HENDRIK, OBAY (nama aslinya DENI SUHERMAN), dan ELAN, dimana mereka membicarakan soal penerbitan Faktur Pajak.
- Bahwa harga yang disepakati yaitu Rp 45.000.000,- (per perusahaan) dengan bagian mang ATIP sebesar Rp 10.000.000,- dan Terdakwa sebesar Rp 4.000.000,- sisanya buat bapak SUBUR atas jasa mendirikan perusahaan;
- Bahwa setelah proses pendirian perusahaan jadi dan proses pendaftaran di Kantor Pajak selesai, semua dokumen oleh bapak SUBUR diserahkan ke Terdakwa di Bank BJB Cabang Cikarang kemudian dokumen tersebut semuanya Terdakwa serahkan ke bos REFI.
- Bahwa posisi Terdakwa sebagai direktur tidak pernah melakukan tugas atau pekerjaan apapun termasuk menandatangani dokumen perpajakan. Pada saat itu, di awal, Terdakwa hanya sekali saja menerima uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Sepi Muharam sebagai upah atau jasa Terdakwa karena foto Terdakwa dipakai dalam KTP atas nama MAHPUT untuk menjadi Direktur Utama, selanjutnya Terdakwa tidak pernah menerima uang apapun terkait dengan PT CAKRA ABDI CEMERLANG;
- Bahwa Terdakwa tahu ada uang masuk di rekening BCA atas nama Terdakwa ke Hendrik, Agus Supriyanto, Sansan Suryana dan lain-lain;
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2015 rekening saksi nomor 2721774599 dipinjam oleh saksi Sepi Muharam untuk penampungan hasil penjualan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Terdakwa waktu itu berfikir rekening Terdakwa dipinjam agar saksi Sepi Muharam bisa cuci tangan kalau ada apa-apa. Karena

Halaman 130 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijanjikan komisi 0,5% setiap uang yang masuk ke rekening Terdakwa, karena tergiur dengan komisi itu Terdakwa menyetujuinya.

- Bahwa setiap ada uang yang masuk saksi Sepi Muharam akan mengabarkan ke Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk tarik tunai atau suruh Terdakwa transfer ke rekening BCA dan Bank Mandiri milik dia; dan seingat Terdakwa dari awal saksi Sepi Muharam memberikan komisi kepada Terdakwa tidak sesuai dengan perjanjian awal sebesar 0,5% dari setiap uang yang masuk, dia memberikan komisi untuk Terdakwa sesuai dengan keinginan Terdakwa saja;
- Bahwa seingat saksi 3 bulan setelahnya Terdakwa meminta ATM Terdakwa agar dia yang pegang, karena dia merasa Terdakwa ambil uangnya. Akhirnya sejak itu Terdakwa ikhlaskan ATM BCA saksi di pegang Terdakwa, namun setiap ada uang masuk ke rekening saksi Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa. Dia membuat catatan tangan uang yang masuk dari hasil jual faktur pajak TBTS dan diberikan kepada Terdakwa. Terdakwa tidak melakukan pengecekan apakah yang disampaikan dia benar atau tidak, pada saat itu Terdakwa percaya saja sama saksi Sepi Muharam.
- Bahwa Agus Supriyanto adalah orang yang sering disebut saksi Sepi Muharam sebagai pemberi order faktur pajak TBTS ke dia, Deni Suherman Alias Obay adalah kakak kandung saksi Sepi Muharam, yang sepengetahuan Terdakwa dia yang bagian teknisi yaitu yang menginput faktur pajak, membuat invoice dan Surat Jalan. Suherlan Alias Elan adalah sepupu saksi Sepi Muharam yang sepengetahuan Terdakwa dia yang bagian teknisi yaitu yang menginput faktur pajak, membuat invoice dan Surat Jalan. Belakangan setahu Terdakwa dia juga membuat perusahaan penerbit faktur pajak TBTS yaitu PT Bima Bumi Mandiri dan PT Gamindotama Sukses. Haifa Ribdiah adalah adik kandung saksi Sepi Muharam. Hendrik Abd Rohman adalah kakak kandung saksi Sepi Muharam, RITA adalah kakak kandung Terdakw saksi Sepi Muharam, Muhamad Saman Alias Edi adalah kakak ipar saksi Sepi Muharam (suami dari RITA), Puja Ningsih alais CLARA adalah teman wanita dari saksi Sepi Muharam, Ropi adalah sama kayak Terdakwa, setau tewrdakwa dia yang sering disuruh-suruh oleh saksi Sepi Muharam. Yusup Supendi adalah nama samaran Terdakwa. Selain rekening BCA atas nama SUNARKO, saksi Sepi Muharam juga menggunakan rekening

Halaman 131 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 131



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampungan hasil jual faktur pajak TBTS atas nama rekening BCA Yusup Supendi, Erna Wati dan Sansan Suryana Terdakwa tidak tahu;

- Bahwa Terdakwa sering disuruh oleh saksi Sepi Muharam untuk melakukan setoran tunai ke ATM. Kalau saksi Sepi Muharam menerima uang hasil penjualan faktur pajak TBTS dalam bentuk kas tunai, saksi disuruh setor ke ATM. Terdakwa tidak tahu dari siapa saksi Sepi Muharam memperoleh uang dalam bentuk kas tunai tersebut;
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan 2019 Terdakwa mendirikan perusahaan sebagai berikut: PT. Mentari Cahaya Nusantara, Terdakwa sendiri yang membuat, terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Kemayoran sejak tanggal 24 Agustus 2017, PT. GAMINDOTAMA PERKASA, yang buat Suherlan als Elan, terdaftar di KPP Pratama Cibinong sejak tanggal 22 September 2017, PT. Sinar Artno Asia, dibuat oleh saksi Sepi Muharam dan terdaftar di KPP Pratama Depok Sawangan sejak tanggal 12 Maret 2018, PT Gema Pulau Intan dibuat oleh saksi Sepi Muharam dan terdaftar di KPP Pratama Cibitung sejak tanggal 3 Oktober 2018, PT Cakra Abadi Cemerlang, dibuat oleh saksi Sepi Muharam dan terdaftar di KPP Pratama Cibitung sejak tanggal 3 Oktober 2018, dan PT Laksana Mekar Senotsa dibuat oleh saksi Sepi Muharam dan terdaftar di KPP Pratama Cibitung sejak tanggal 6 November 2018;
- Bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa ATM saudara dipegang oleh saksi Sepi Muharam;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja dengan Hendrik dalam pembuatan Perusahaan/PT;
- Bahwa Atm Terdakwa dipegang oleh saksi Sepi Muharam, Terdakwa hanya disuruh buka rekening;
- Bahwa PT Mentari Cahaya Nusantara Terdakwa yang buat dan Terdakwa sebagai direktur, Terdakwa hanya disuruh mendirikan perusahaan oleh saksi Sepi Muharam, dan biaya ditanggung oleh saksi Sepi Muharam;
- Bahwa Terdakwa dapat komisi saat buat perusahaan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Sepi Muharam tahun 2015;
- Bahwa yang mengajak saksi Sepi Muharam untuk buat faktur pajak adalah H Lukman;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dengan password sertifikat elektronik karena setelah jadi PT, dokumen Terdakwa serahkan ke saksi Sepi Muharam;

Halaman 132 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang diserahkan subur ke Terdakwa adalah akta, NJOP, NPWP dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kendaraan Merk Daihatsu Sigras Nopol B 2781 SYP Tahun Registrasi 2018 warna putih;
- Fotocopy legalisir Faktur Pajak, Nomor: 010.005-18.44700973, tanggal 24 September 2018, dari PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI kepada PT SUPERCHEM PRIMA LESTARI, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy legalisir Faktur Pajak, Nomor: 010.005-18.44700974, tanggal 12 September 2018, dari PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI kepada PT SUPERCHEM PRIMA LESTARI, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy legalisir Faktur Pajak, Nomor: 010.003-19.19305669, tanggal 09 Januari 2019, dari PT CAKRA ABDI CEMERLANG kepada PT SUPERCHEM PRIMA LESTARI, sebanyak 1 (satu) set; dan
- Fotocopy legalisir Faktur Pajak, Nomor: 010.003-19.19305671, tanggal 14 Januari 2019, dari PT CAKRA ABDI CEMERLANG kepada PT SUPERCHEM PRIMA LESTARI, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, atas nama: PT INDAH TIGA SAUDARA, NPWP: 31315.394.2-445.000, Masa Agustus 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, atas nama: PT INDAH TIGA SAUDARA, NPWP: 31315.394.2-445.000, Masa September 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, atas nama: PT INDAH TIGA SAUDARA, NPWP: 31315.394.2-445.000, Masa Oktober 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, atas nama: PT INDAH TIGA SAUDARA, NPWP: 31315.394.2-445.000, Masa November 2018, sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 133 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy SPT Masa PPN, atas nama: PT INDAH TIGA SAUDARA, NPWP: 31315.394.2-445.000, Masa Desember 2018, sebanyak 1 (satu) set; dan
- Fotocopy SPT Masa PPN, atas nama: PT INDAH TIGA SAUDARA, NPWP: 31315.394.2-445.000, Masa Januari 2018, sebanyak 1 (satu) set.
- Fotocopy Faktur Pajak dari PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, NPWP: 85.147.990.7-435.000 kepada PT ANGKASA ENERGI, sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Fotocopy Faktur Pajak dari PT GEMA PULAU INTAN, NPWP: 86.122.861.7-435.000; kepada PT ANGKASA ENERGI, sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Fotocopy Faktur Pajak dari PT CAKRA ABDI CEMERLANG, NPWP: 86.122.698.3-435.000; kepada PT ANGKASA ENERGI, sebanyak 4 (empat) lembar;
- Fotocopy Faktur Pajak dari PT BIMA BUMI MANDIRI, NPWP: 85.769.363.4-435.000; kepada PT ANGKASA ENERGI, sebanyak 4 (empat) lembar;
- Fotocopy Kwitansi, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak Nomor: 010.005-18.86729078, tanggal 10 Oktober 2018, dari PT. GEMA PULAU INTAN kepada CV. AGUNG WIJAYA PUTRA, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Kwitansi, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak Nomor: 010.006-18.36749072, tanggal 26 Desember 2018, dari PT. GEMA PULAU INTAN kepada PT. SENDANG AGUNG MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Kwitansi, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak Nomor: 010.006-18.36749073, tanggal 29 Desember 2018, dari PT. GEMA PULAU INTAN kepada PT. SENDANG AGUNG MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Kwitansi, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak Nomor: 010.005-18.76870366, tanggal 30 Desember 2018, dari PT. BIMA BUMI MANDIRI kepada PT. SENDANG AGUNG MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 134 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir SPT Masa PPN, Pembetulan ke:2, atas nama: PT MITRA CENTRAL NIAGA, NPWP: 72.413.138-8-624.000, Masa Oktober 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy legalisir SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT MITRA CENTRAL NIAGA, NPWP: 72.413.138-8-624.000, Masa Oktober 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy legalisir dokumen dari PT GEMA PULAU INTAN kepada PT MITRA CENTRAL NIAGA, sebanyak 13 (tiga belas) set;
- Fotocopy legalisir dokumen dari PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI kepada PT MITRA CENTRAL NIAGA, sebanyak 4 (empat) set;
- Fotocopy legalisir Faktur Pajak dari PT GEMA PULAU INTAN, NPWP: 86.122.861.7-435.000 kepada PT MITRA CENTRAL NIAGA, NPWP: 72.413.138-8-624.000, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy legalisir Faktur Pajak dari PT LAKSANA MEKAR SENTOSA, NPWP: 86.443.244.8-435.000 kepada PT MITRA CENTRAL NIAGA, NPWP: 72.413.138-8-624.000, sebanyak 1 (satu) lembar;
- Fotocopy legalisir Faktur Pajak dari PT CAKRA ABDI CEMERLANG, NPWP: 86.122.698.3-435.000 kepada PT MITRA CENTRAL NIAGA, NPWP: 72.413.138-8-624.000, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy legalisir Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, dari KPP Pratama Pasuruan tanggal 27 Mei 2019, Surat Tanggapan atas Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dari PT MITRA CENTRAL NIAGA tanggal 20 Juni 2019, Surat Undangan Konseling Kewajiban Perpajakan dari KPP Pratama Pasuruan tanggal 25 Juni 2019, dan Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Kepada Wajib Pajak, tanggal 28 Juni 2019, sebanyak 1 (satu) set.
- Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa Januari 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa Februari 2018, sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 135 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa Maret 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa April 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan ke:2, atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa Mei 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan ke:2, atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa Juni 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan ke:1, atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa Juli 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa Agustus 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa September 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa Oktober 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa November 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa Desember 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT BERSUJUD BARA BESI, NPWP: 81.038.974.2-734.000, Masa Desember 2018, sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 136 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT BERSUJUD BARA BESI, NPWP: 81.038.974.2-734.000, Masa Januari 2019, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Kwitansi, Surat Jalan, Invoice, Faktur Pajak, Purchase Order, dari PT CAKRA ABDI CEMERLANG, NPWP: 86.122.698.3-435.000 kepada PT BERSUJUD BARA BESI, NPWP: 81.038.974.2-734.000, sebanyak 5 (lima) set;
- Fotocopy Kwitansi, Surat Jalan, Invoice, Faktur Pajak, Purchase Order, dari LAKSANA MEKAR SENTOSA, NPWP: 86.443.244.8-435.000 kepada PT BERSUJUD BARA BESI, NPWP: 81.038.974.2-734.000, sebanyak 8 (delapan) set;
- Fotocopy Rekening Koran, Bank Mandiri, Nomor Rekening: 0310077838384, atas nama PT BERSUJUD BARA BESI, sebanyak 1 (satu) lembar.
- Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA, NPWP: 31.592.153.6-615.000, Masa Oktober 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan ke:1, atas nama: PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA, NPWP: 31.592.153.6-615.000, Masa Oktober 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan ke:2, atas nama: PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA, NPWP: 31.592.153.6-615.000, Masa Oktober 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Kwitansi, Invoice, Faktur Pajak Nomor: 010.005-18.86751735 tanggal 16 Oktober 2019, dari PT CAKRA ABDI CEMERLANG, NPWP: 86.122.698.3-435.000, kepada PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA, NPWP: 31.592.153.6-615.000, dan Surat Jalan, sebanyak 1 (satu) set.
- Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
- Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PT ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA, sebanyak 1 (satu) set;
- Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PT. ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 137 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PT BIMA BUMI MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
- Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PT CAKRA ABDI CEMERLANG, sebanyak 1 (satu) set;
- Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PT GEMA PULAU INTAN, sebanyak 1 (satu) set;
- Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PT LAKSANA MEKAR SENTOSA, sebanyak 1 (satu) set;
- Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, Nomor:01, tanggal 3 Agustus 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA, Nomor:03, tanggal 5 Juni 2014, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI, Nomor:02, tanggal 3 September 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BIMA BUMI MANDIRI, Nomor:07, tanggal 13 Agustus 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. CAKRA ABDI CEMERLANG, Nomor:05, tanggal 28 September 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. GEMA PULAU INTAN, Nomor:04, tanggal 24 September 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. LAKSANA MEKAR SENTOSA, Nomor:04, tanggal 6 November 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, Nomor:32, tanggal 4 Oktober 2018, sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 138 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Print out (cetakan) legalisir Data Penerbitan Faktur Pajak (PKPM) dari Wajib Pajak PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, NPWP: 85.147.990.7-435.000; PT ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA, NPWP: 70.385.005.7-435.000; PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI, NPWP: 85.896.009.9-435.000; PT BIMA BUMI MANDIRI, NPWP: 85.769.363.4-435.000; PT CAKRA ABDI CEMERLANG, NPWP: 86.122.698.3-435.000; PT GEMA PULAU INTAN, NPWP: 86.122.861.7-435.000; PT LAKSANA MEKAR SENTOSA, NPWP: 86.443.244.8-435.000; PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, NPWP: 86.022.824.6-435.000.
- Fotocopy Bukti Penerimaan Elektronik dan Bukti Penerimaan Negara, atas nama PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 4 (empat) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan ke:1, Masa November 2018, atas nama PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan ke:1, Masa Desember 2018, atas nama PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan ke:1, Masa Januari 2019, atas nama PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan ke:1, Masa Februari 2019, atas nama PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan ke:1, Masa Maret 2019, atas nama PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) set;
- Printout Faktur Pajak, Nomor: 010.005-18.86729146, tanggal 10 Desember 2018, dari PT GEMA PULAU INTAN, NPWP: 86.122.861.7-435.000 kepada PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) lembar;
- Printout Faktur Pajak, Nomor: 010.005-18.76870372, tanggal 30 Desember 2018, dari PT. BIMA BUMI MANDIRI, NPWP:

Halaman 139 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85.769.363.4-435.000 kepada PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) lembar;

- Printout Faktur Pajak, Nomor: 010.002-19.86344168, tanggal 03 Januari 2019, dari PT. BIMA BUMI MANDIRI, NPWP: 85.769.363.4-435.000 kepada PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) lembar;
- Printout Faktur Pajak, Nomor: 010.002-19.86344173, tanggal 15 Januari 2019, dari PT. BIMA BUMI MANDIRI, NPWP: 85.769.363.4-435.000 kepada PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) lembar;
- Printout Faktur Pajak, Nomor: 010.002-19.86605042, tanggal 05 Februari 2019, dari PT GEMA PULAU INTAN, NPWP: 86.122.861.7-435.000 kepada PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) lembar;
- Printout Faktur Pajak, Nomor: 010.002-19.86344185, tanggal 02 Maret 2019, dari PT. BIMA BUMI MANDIRI, NPWP: 85.769.363.4-435.000 kepada PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) lembar;
- Printout Faktur Pajak, Nomor: 010.002-19.86344194, tanggal 03 Maret 2019, dari PT. BIMA BUMI MANDIRI, NPWP: 85.769.363.4-435.000 kepada PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) lembar;
- Fotocopy Faktur Pajak dari PT GEMA PULAU INTAN, NPWP: 86.122.861.7-435.000, sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Asli print-out PURCHASE ORDER, dari PT NURBAKA MEGAH kepada PT MULIA KARYA SINERGIA (Contact Person: Ibu CANDRA), sebanyak 5 (lima) lembar;
- Fotocopy print-out Rekening Koran PT NURBAKA MEGAH, No.rek: 1310015271796, Bank Mandiri, sebanyak 4 (empat) lembar;
- Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, Nomor:01, tanggal 3 Agustus 2018, sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 140 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA, Nomor:03, tanggal 5 Juni 2014, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI, Nomor:02, tanggal 3 September 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. CAKRA ABDI CEMERLANG, Nomor:05, tanggal 28 September 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. GEMA PULAU INTAN, Nomor:04, tanggal 24 September 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. LAKSANA MEKAR SENTOSA, Nomor:04, tanggal 6 November 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, Nomor:32, tanggal 4 Oktober 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Print out Mutasi Rekening, Bank BJB, Cabang: KCP Pemkab Bekasi, atas nama: PT CAKRA ABADI CEMERLANG, Nomor Rekening: 0090515713001, sebanyak 1 (satu) set;
- Print out Mutasi Rekening, Bank BJB, Cabang: KCP Pemkab Bekasi, atas nama: PT GEMA PULAU INTAN, Nomor Rekening: 0090539507001, sebanyak 1 (satu) set;
- Print out Mutasi Rekening, Bank BJB, Cabang: KCP Pemkab Bekasi, atas nama: BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, Nomor Rekening: 0089617529001, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Rekening Bank BRI, KCP Babelan, atas nama SUBUR A, Nomor Rekening: 079901036274533, sebanyak 1 (satu) set.
- Fotokopi Legalisir Akta Pendirian PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n MENTARI CAHAYA NUSANTARA, sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 141 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Printout SPT Masa PPN an PT GEMA PULAU INTAN, PT CAKRA ABADI CEMERLANG, PT ILHAMINDO PUTRA MANDIRI; PT CAHAY TIGA GEMILANG INDONESIA; PT BAHTERA SUKSEJAYA MANDIRI; PT ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA; PT BIMA BUMI MANDIRI sebanyak 7 (tujuh) set;
- Fotokopi Legalisir Akta Pendirian PT GAMINDOTAMA SUKSES, sebanyak 1 (satu) set; -
- Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PT GAMINDOTAMA SUKSES, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi Legalisir Akta Pendirian PT SINAR ARTNO ASIA, sebanyak 1 (satu) set;
- Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n SINAR ARTNO ASIA, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi Legalisir Akta Pendirian PT PUSPA INDAH KARYA, sebanyak 1 (satu) set;
- Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PT PUSPA INDAH KARYA, sebanyak 1 (satu) set;
- Asli Surat Jalan, Invoice dan Faktur Pajak dari PT GEMA PULAU INTAN kepada PT SAHABAT SETIA JAYA tanggal 215 Oktober 2018 dan 2 Oktober 2018 sebanyak 2 (dua) set;
- 2. Asli Surat Jalan, Invoice dan Faktur Pajak dari PT BIMA BUMI MANDIRI kepada PT SAHABAT SETIA JAYA tanggal 5 November 2018 sebanyak 1 (satu set ;
- 1 (satu) set print out validasi rekening Tabungan Mandiri dengan nomor rekening 1310011580000 atas nama SEPI MUHARAM, Periode 1 Januari 2013 s.d. 1 Juni 2019;
- 1 (satu) set print out validasi rekening Tabungan Mandiri dengan nomor rekening 1310011580000 atas nama SEPI MUHARAM, Periode 1 Januari 2019 s.d. 30 Juni 2019.
- Rekening BCA nomor 03760484716 a.n. SEPI MUHARAM periode tahun 2017 s.d 2019;
- Rekening BCA 2721774599 a.n. SUNARKO periode tahun 2017 s.d 2019
- Rekening BCA 4140348398 a.n. YUSUP SUPENDI periode tahun 2017 s.d 2019;

Halaman 142 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening BCA 3760377367 a.n. DENI SUHERMAN periode tahun 2017 s.d 2019;
- Rekening BCA 02831675472 a.n. SUHAERI periode tahun 2019;
- Rekening BCA nomor 06825116153 a.n. HENDRIK ABDUL ROHMAN periode tahun 2017 s.d 2019;
- Rekening BCA nomor 02830880863 a.n. R TONY SOPIAN periode tahun 2019;
- Rekening BCA nomor 03760282641 a.n. RIDWAN TAUFAN periode tahun 2018 s.d 2019

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Awalnya pada pertengahan tahun 2015 Terdakwa SUNARKO alias MAHPUT Alias YUSUF SUPENDI Alias IWAN SETIAWAN ditarik atau diajak oleh saksi SEPI MUHARAM untuk menjadi supirnya, selama Terdakwa menjadi sopir tersebut Terdakwa sering diminta bantu bantu saksi SEPI MUHARAM termasuk meminjamkan rekening BCA Terdakwa nomor 2721774599 untuk penampungan hasil penjualan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (selanjutnya disingkat faktur pajak TBTS) dan Terdakwa juga diminta oleh saksi SEPI MUHARAM untuk dijadikan sebagai Direktur di perusahaan penerbit faktur pajak TBTS yang akan saksi SEPI MUHARAM buat yaitu PT CAKRA ABDI CEMERLANG, dimana dalam pendirian Perusahaan tersebut dengan menggunakan identitas KTP milik orang lain yang fotonya ditempel foto Terdakwa . dan pada saat berurusan ke Kantor Pajakpun Terdakwa diminta oleh saksi SEPI MUHARAM untuk maju menggunakan identitas KTP palsu tersebut, dimana saksi SEPI MUHARAM pernah membuat menempel foto Terdakwa di KTP orang lain atas nama MAHFUT dan apabila ada nama MAHFUT didalam perusahaan yang digunakan untuk menerbitkan Faktur tidak Berdasarkan transaksi yang Sebenarnya (Faktur TBTS) adalah nama lain dari Terdakwa;
- Terdakwa SUNARKO alias MAHPUT Alias YUSUF SUPENDI Alias IWAN SETIAWAN juga pernah diminta oleh saksi SEPI MUHARAM untuk membuat rekening di BCA atas nama YUSUP SUPENDI (nama lain dari Terdakwa) untuk penampungan hasil penjualan faktur pajak TBTS dari perusahaan-perusahaan yang dibuatnya, atas pemakaian rekening BCA atas nama Terdakwa SUNARKO dan rekening BCA atas nama YUSUP SUPENDI dengan rekening nomor 2721774599 Terdakwa akan dikasih imbalan sebesar 0,5% dari nilai faktur pajak TBTS dan khusus kalau order faktur

Halaman 143 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak dari perusahaan-perusahaan dengan Direktur atas nama atas nama Direktornya MAHFUT (nama lain dari Terdakwa) perjanjiannya akan diberi komisi sebesar 1% dari nilai PPN, dimana saksi SEPI kemudian mendirikan perusahaan diantaranya PT CAKRA ABDI CEMERLANG dimana Terdakwa SUNARKO Als MAHPUT menjadi Direktur PT CAKRA ABDI CEMERLANG tidak pernah mengurus perusahaan tersebut melainkan Terdakwa hanya dipakai namanya saja oleh saksi SEPI MUHARAM, atas keberadaan Terdakwa sebagai Direktur pada perusahaan-perusahaan yang dibuat oleh saksi SEPI MUHARAM, Terdakwa hanya diberi uang sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa pada tahun 2017 sampai dengan 2018 sebelum Terdakwa mendirikan perusahaan PT CAKRA ABDI CEMERLANG dimana Terdakwa sebagai Direktornya , Terdakwa SUNARKO alias MAHPUT Alias YUSUF SUPENDI Alias IWAN SETIAWAN bersama saksi ELAN SUHERLAN telah mendirikan perusahaan untuk digunakan oleh Terdakwa bersama sama dengan saksi SEPI MUHARAM dengan tujuan sebagai perusahaan penerbit Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Taransaksi yang Sebenarnya (Faktur TBTS) , adapun perusahaan perusahaan didirikan oleh Terdakwa bersama sama dengan saksi ELAN SUHERLAN adalah sebagai berikut :
 1. PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA, terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Kemayoran, sejak tanggal 24 Agustus 2017; yang didirikan dan dijalankan oleh SUHERLAN alias ELAN dan Terdakwa SUNARKO
 2. PT GAMINDOTAMA PERKASA, terdaftar di KPP Pratama Cibinong, sejak tanggal 22 September 2017; yang didirikan oleh SUHERLAN alias ELAN dan Terdakwa SUNARKO
 3. PT SINAR ARTNO ASIA, terdaftar di KPP Pratama Depok Sawangan, sejak tanggal 12 Maret 2018; yang didirikan oleh Terdakwa SUNARKO
 4. PT BIMA BUMI MANDIRI, terdaftar di KPP Pratama Cibitung, sejak tanggal 20 September 2018; yang didirikan oleh ELAN SUHERLAN
- Bahwa pada tahun 2017 sampai dengan 2018 perusahaan yang didirikan Terdakwa SUNARKO alias MAHPUT Alias YUSUF SUPENDI Alias IWAN SETIAWAN bersama saksi ELAN SUHERLAN telah dibeli oleh saksi SEPI MUHARAM, dimana perusahaan dimaksud untuk digunakan oleh saksi SEPI MUHARAM untuk tujuan sebagai perusahaan penerbit Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Taransaksi yang Sebenarnya (Faktur TBTS) , adapun perusahaan perusahaan didirikan oleh Terdakwa bersama sama dengan

Halaman 144 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ELAN SUHERLAN yang dibeli oleh saksi SEPI MUHARAM adalah sebagai berikut :

- a. Perusahaan yang dibeli oleh saksi SEPI MUHARAM
 - PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA, terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Kemayoran, sejak tanggal 24 Agustus 2017; yang didirikan dan dijalankan oleh SUHERLAN alias ELAN dan Terdakwa SUNARKO
 - PT GAMINDOTAMA PERKASA, terdaftar di KPP Pratama Cibinong, sejak tanggal 22 September 2017; yang didirikan oleh SUHERLAN alias ELAN dan Terdakwa SUNARKO
 - PT SINAR ARTNO ASIA, terdaftar di KPP Pratama Depok Sawangan, sejak tanggal 12 Maret 2018; yang didirikan oleh Terdakwa SUNARKO
 - PT BIMA BUMI MANDIRI, terdaftar di KPP Pratama Cibitung, sejak tanggal 20 September 2018; yang didirikan oleh ELAN SUHERLAN
- b. sedangkan Perusahaan yang didirikan oleh saksi SEPI MUHARAM melalui Terdakwa SUNARKO dan saksi SUBUR AHMAD adalah :
 - a. PT GEMA PULAU INTAN, terdaftar di KPP Pratama Cibitung, sejak tanggal 3 Oktober 2018;
 - b. PT CAKRA ABDI CEMERLANG, terdaftar di KPP Pratama Cibitung, sejak tanggal 3 Oktober 2018;; dan
 - c. PT LAKSANA MEKAR SENTOSA, terdaftar di KPP Pratama Cibitung, sejak tanggal 6 November 2018.
- Bahwa Kronologis saksi SEPI MUHARAM dalam mendirikan PT GEMA PULAU INTAN, NPWP: 86.122.861.7-435.000; PT CAKRA ABDI CEMERLANG, NPWP: 86.122.698.3-435.000; PT LAKSANA MEKAR SANTOSA, NPWP: 86.443.244.8-435.000 pada tahun 2018 melalui Terdakwa SUNARKO adalah sebagai berikut :
 - a. Dalam hal ini saksi SEPI MUHARAM meminta tolong kepada Terdakwa SUNARKO alias MAHPUT untuk dicarikan orang yang dapat mendirikan perusahaan, kemudian Terdakwa SUNARKO mencarikannya dan melakukan negosiasi terkait pendirian perusahaan kepada seseorang yang bernama saksi SUBUR AHMAD, lalu diadakan kesepakatan harga
 - b. Setelah sudah setuju dengan harganya, Terdakwa SUNARKO menyampaikan kepada saksi SEPI MUHARAM dan kemudian saksi SEPI MUHARAM memberikan dana terkait dengan persiapan pendirian perusahaan tersebut kepada Terdakwa SUNARKO

Halaman 145 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa harga yang disepakati untuk persiapan pendirian ke dua perusahaan tersebut sebesar Rp. 60.000.000,00 per perusahaan.
- d. Terkait data pendirian perusahaan semuanya diurus oleh Terdakwa SUNARKO, saksi SEPI MUHARAM hanya tinggal terima bersih dengan menyerahkan uang sebesar Rp120.000.000,- untuk 2 (dua) perusahaan tersebut yaitu PT GEMA PULAU INTAN, NPWP: 86.122.861.7-435.000 dan PT CAKRA ABDI CEMERLANG, NPWP: 86.122.698.3-435.000
- e. Kemudian Terkait data pendirian satu perusahaan lagi yaitu PT LAKSANA MEKAR SANTOSA, NPWP: 86.443.244.8-435.000 semuanya diurus oleh Terdakwa SUNARKO, juga saksi SEPI MUHARAM hanya terima bersih dengan menyerahkan uang sebesar Rp40.000.000,-
- Bahwa pada proses pendirian perusahaan yang dilakukan oleh saksi SEPI MUHARAM yang pengurusannya dilakukan melalui Terdakwa SUNARKO juga atas proses penerimaan Sertifikat Elektronik dan Kode Aktivasi (password), terkait dengan proses penerbitan Faktur Pajak TBTS dari perusahaan yang saksi SEPI MUHARAM dirikan, dimana saksi SEPI MUHARAM tidak mengetahui bagaimana prosesnya karena sudah dipercayakan sepenuhnya kepada Terdakwa SUNARKO dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi SEPI MUHARAM pernah menerima Sertifikat Elektronik dan Kode Aktivasi (password) tersebut;
 - b. Jadi begitu proses pendaftaran Wajib Pajak di Kantor Pajak selesai, oleh saksi SUBUR, Sertifikat Elektronik dan Kode Aktivasi (password) diserahkan kepada Terdakwa SUNARKO dan oleh Terdakwa SUNARKO diserahkan kepada saksi SEPI MUHARAM
 - c. Kemudian oleh saksi SEPI MUHARAM, Sertifikat Elektronik dan Kode Aktivasi (password) tersebut diserahkan kepada saksi SUHERLAN Als.ELAN
 - d. Selain itu juga, sebenarnya saksi SUHERLAN sudah mengetahui mengenai kombinasi password dan kode aktivasi tersebut, yaitu dari email yang masuk ke email perusahaan yang dibuat oleh saksi SEPI MUHARAM dan saksi SUHERLAN. Jadi ada email dari kantor pajak ke email tersebut yang isinya adalah kode aktivasi dan username-nya.
- Bahwa kemudian pada tahun 2017 tersebut Terdakwa SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT, saksi DENI SUHERMAN alias OBAY, saksi SUHERLAN alias ELAN alias EKI, mengetahui bahwa saksi SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki pekerjaan sebagai penerbit Faktur Pajak Tidak Berdsarkan Transaksi yang Sebenarnya (Faktur (TBTS), yaitu dengan cara membeli dan/atau mendirikan beberapa perusahaan (PT) yang digunakan sebagai sarana untuk menerbitkan Faktur Pajak Tidak Berdsarkan Transaksi yang Sebenarnya (Faktur TBTS), dimana Perusahaan tersebut hanya menerbitkan Faktur Pajak saja, tidak pernah melakukan penjualan, tidak ada barang yang dijual, tidak pernah ada pembayaran sebesar harga barang dan PPN dari pembeli.

- Bahwa kemudian dimulai sejak tahun 2017 s.d tahun 2019, Terdakwa SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT bersama sama dengan saksi SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI bersama-sama DENI SUHERMAN alias OBAY, SUHERLAN alias ELAN alias EKI, telah mengadakan kesepakatan untuk turut kerjasama dalam melakukan perbuatan penerbitan Faktur Pajak TBTS, dengan pembagian tugas sebagai berikut:
 - a. Saksi SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI selaku leader atau pimpinan, bertugas untuk mencari atau menerima pesanan Faktur Pajak TBTS dari para pengguna langsung maupun melalui sales sales dan juga bertugas membagi komisi atau keuntungan kepada saksi DENI SUHERMAN alias OBAY, saksi SUHERLAN alias ELAN, dan Terdakwa SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT;
 - b. Terdakwa SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT, *bertugas* untuk mencari orang-orang yang bisa membuat perusahaan, menyediakan rekening penampungan hasil penjualan Faktur Pajak TBTS yaitu rekening atas nama saksi SUNARKO dan rekening atas nama saksi YUSUP SUPENDI, serta Terdakwa SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT juga dijadikan oleh saksi SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI untuk menduduki jabatan sebagai Direktur Utama di PT CAKRA ABDI CEMERLANG (menggunakan nama MAHPUT) dan PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA (menggunakan nama YUSUP SUPENDI).
 - c. Saksi DENI SUHERMAN alias OBAY, *bertugas* untuk membuat Invoice dan Surat Jalan, sebagai dokumen pelengkap dari Faktur Pajak TBTS;
 - d. Saksi SUHERLAN alias ELAN alias EKI, *bertugas* untuk mengupload Faktur Pajak (*e-faktur*) secara elektronik, membuat laporan SPT PPN, dan melaporkan SPT PPN tersebut secara online atau e-SPT, serta

Halaman 147 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHERLAN alias ELAN alias EKI dijadikan oleh saksi SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI untuk menduduki jabatan sebagai Direktur Utama di PT LAKSANA MEKAR SENTOSA (menggunakan nama EKI); dan

- Bahwa saksi SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI dalam menerbitkan Faktur Pajak TBTS sehingga dapat digunakan oleh perusahaan pengguna (pembeli Faktur Pajak TBTS) tersebut tidak dilakukan sendirian, yaitu selain bersama sama dengan saksi DENI SUHERMAN alias OBAY, saksi SUHERLAN alias ELAN alias EKI, dan terdakwa SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT juga dalam penjualannya melalui para perantara atau sales Faktur Pajak TBTS, yaitu beberapa orang sebagai berikut:
 - a. LUKMANUL HAKIM, dengan harga/nilai jual Faktur Pajak TBTS sebesar 12,5% dari nilai PPN; dan/atau
 - b. AGUS SUPRIYANTO, dengan harga/nilai jual Faktur Pajak TBTS sebesar 17% s.d. 18% dari nilai PPN; dan/atau
 - c. SANSAN SURYANA, dengan harga/nilai jual Faktur Pajak TBTS sebesar 18% s.d. 20% dari nilai PPN; dan/atau
 - d. HENDRIK ABDUL ROHMAN, dengan harga/nilai jual Faktur Pajak TBTS sebesar 7% dari nilai PPN.
 - e. RR. CANDRA W. YUNARTIAS dengan harga/nilai jual Faktur Pajak TBTS sebesar 7% dari nilai PPN.
 - f. WALMINDAR dengan harga/nilai jual Faktur Pajak TBTS sebesar 7% dari nilai PPN.
 - g. RIDWAN E. BATUBARA dengan harga/nilai jual Faktur Pajak TBTS sebesar 7% dari nilai PPN.

Adapun Perusahaan para pengguna Faktur Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (Faktur TBTS) ,baik pemesanannya maupun penjualannya melalui para sales tersebut adalah sebagai berikut antara lain :

1. PT. CAHAYA UTAMA BERLIAN
2. PT. PETRO ANDRAHA ARTHA
3. PT. SAMUDRA ETAM
4. PT. INDAH TIGA SAUDARA
5. PT. OCEAN PETRO ENERGY
6. PT. LAROS PETROLIUM
7. PT. ANGKASA KARYA ENERGY

Halaman 148 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. PT. SINAR BACHAN KHATULISTIWA
9. PT. ANUGERAH FASA SAKTI
10. PT. BAYU PUTRA ENERGY
11. PT. ALFA BRANITAMA
12. PT. BERKAH SOLO
13. PT. SAMUDERA JAYA ENERGY
14. PT. JAMBI TULO
15. PT. MITRA CENTRAL NIAGA
16. PT. MULTITALLY INDONESIA
17. PT. PHILIA CITRA SEJAHTERA
18. PT. BENDINASHA NIAGA INDUSTRI
19. PT. BERSUJUD BARA BESI
20. PT. MULIA BERKAH MAHABBAH
21. D L L .

- Bahwa proses penerbitan, dalam hal ini, yaitu proses jual beli antara saksi SEPI MUHARAM bersama sama dengan SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI alias IWAN dengan para perantara atau sales Faktur Pajak TBTS, dalam menerbitkan Faktur Pajak TBTS sehingga dapat digunakan oleh perusahaan pengguna (pembeli Faktur Pajak TBTS) tersebut, dilakukan dengan rangkaian sebagai berikut:
 - a. Para perusahaan pengguna (pembeli Faktur Pajak TBTS) memesan Faktur Pajak kepada para perantara atau sales Faktur Pajak TBTS, melalui email dan/atau Whatsapp, dan kemudian oleh para perantara atau sales Faktur Pajak TBTS, pesanan tersebut diteruskan/*forward* kepadasaksi SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI melalui Whatsapp;
 - b. Kemudian oleh saksi SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI, pesanan Faktur Pajak TBTS tersebut diteruskan/*forward* kepada saksi SUHERLAN alias ELAN alias EKI, untuk dibuatkan atau diupload Faktur Pajaknya;
 - c. Setelah Faktur Pajak selesai dibuat atau diupload, maka oleh SUHERLAN alias ELAN alias EKI, dikirim kepada Terdakwa SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI melalui Whatsapp, untuk kemudian diteruskan/*forward* kepada para perantara atau sales Faktur Pajak TBTS, untuk diteruskan/*forward* lagi kepada para perusahaan pengguna (pembeli Faktur Pajak TBTS) tersebut.



d. Kemudian saksi SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI meminta saksi DENI SUHERMAN alias OBAY untuk membuat Invoice dan/atau Surat Jalan, sebagai pelengkap dokumen dari Faktur Pajak TBTS, untuk kemudian dikirimkan kepada para perusahaan pengguna (pembeli Faktur Pajak TBTS) tersebut.

- Bahwa rincian Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan oleh Terdakwa SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT bersama-sama dengan SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI saksi DENI SUHERMAN alias OBAY, saksi SUHERLAN alias ELAN alias EKI, DAVIES, melalui perusahaan PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA; PT GAMINDOTAMA PERKASA; PT SINAR ARTNO ASIA; PT BIMA BUMI MANDIRI; PT GEMA PULAU INTAN; PT CAKRA ABDI CEMERLANG; dan PT LAKSANA MEKAR SENTOSA, dengan melalui perantara LUKMANUL HAKIM, AGUS SUPRIYANTO, SANSAN SURYANA, RR. CANDRA W. YUNARTIAS, MALWINDAR dan RIDWAN E BATUBARA pada kurun waktu masa Agustus 2017 s.d. Juli 2019, adalah sebagai berikut:

1). Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA tahun 2017;

NO.	WAJIB PAJAK PENGGUNA	NPWP PENGGUNA	TOTAL
1	ADITYA ARYAPRAWIRA	013703558048000	623,300,000
2	AGUNG WIJAYA PUTRA	015951288517000	19,169,000
3	ARSA MEGA ENERGI	706663937734000	100,600,978
4	BAYU PATRA ENERGY	669067332503000	53,338,636
5	CV. AGUNG WIJAYA PUTRA	015951288517000	20,036,364
6	DINAR PUTRA MANDIRI	022929459009000	1,409,811,150
7	FAUZAN PUTRA PERKASA	211230909443000	5,744,800
8	GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI	315121251416000	1,052,028,000
9	GAPURA OCEAN LINE PALABUHAN RATU	751202078405000	5,968,000
10	JAYA ENERGI PRIMA	033519224047000	120,413,300
11	KARIMATA ENERGI PERSADA	712064757012000	495,690,000
12	MAULANA SAMUDERA GEMILANG	315600361401000	101,460,000
13	MITRA SARANA SEJATI	711473793307000	122,000,000
14	OCEAN PETRO ENERGY	028697829012000	1,031,142,500
15	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	518,170,494
16	SUMBER KETAPANG MAKMUR ABADI	710542721703000	5,968,000
	TOTAL		5,684,841,222



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT GAMINDOTAMA PERKASA tahun 2017;

NO.	WAJIB PAJAK PENGGUNA	NPWP PENGGUNA	Total
1	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	1,038,892,321
2	HARINCO KARYA SEJAHTERA	025808890432000	477,088,849
3	DUA SAHABAT BAJA	028999704031000	101,673,022
4	ELECOMINDO JAYAPRATAMA	015656713036000	40,240,000
5	MULTITALLY INDONESIA	025936881027000	510,407,597
			2,168,301,789

PT SINAR ARTNO ASIA Tahun 2018;

NO.	WAJIB PAJAK PENGGUNA	NPWP PENGGUNA	Total
1	ANUGRAH ABADI BARU	025665142027000	100,000,000
2	CATUR MANUNGAL JAYA AGUNG	024020638504000	156,545,340
3	CV. SURYA MITRA BUANA	022675136445000	201,096,733
4	DINAR PUTRA MANDIRI	022929459009000	335,104,000
5	INDAH TIGA SAUDARA	313153942445000	226,636,361
6	MECHATAMA SINAR MULIA	734594930503000	531,929,091
7	OCEAN PETRO ENERGY	028697829012000	509,089,000
8	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	1,635,572,911
			3,695,973,436

PT BIMA BUMI MANDIRI tahun 2018;

No.	WAJIB PAJAK PENGGUNA	NPWP PENGGUNA	PPN
1	AGUNG WIJAYA PUTRA	015951288517000	30,400,000
2	ALISHA KARUNIA PERDANA	769926726721000	866,000,000
3	ANGKASA KARYA ENERGI	829224385505000	160,288,000
4	ANUGRAH FASHA SAKTI	832690010728000	80,550,000
5	ANUGRAH SEJAHTERA SENTOSA	315681775613000	520,875,000
6	BAYU PATRA ENERGY	669067332503000	192,163,636
7	BUMI GATAH PERMAI	863521100728000	3,936,170
8	CAHAYA UTAMA BERLIAN	750425977307000	284,475,000
9	CATUR MUKTI	013208657017000	129,381,818
10	ENERGI MITRA SEJAHTERA	859060139517000	30,400,000
11	INDAH TIGA SAUDARA	313153942445000	198,254,544
12	LAROS PETROLEUM	033292095419000	630,345,455
13	MANGGALA SURYA ENERGI	833190614005000	17,400,000
14	MUDAH SARANA ENERGI	663075422411000	12,000,000

Halaman 151 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	SARANA	032867020733000	155,632,000
16	SENDANG AGUNG MANDIRI	858072739517000	24,000,000
17	SINAR BACAN KHATULISTIWA	312479538607000	900,449,999
18	VIAN RAMA PRATAMA	017972274016000	67,000,000
			6,634,051,622

PT GEMA PULAU INTAN Tahun 2018;

NO.	NPWP PENGGUNA	NAMA WAJIB PAJAK PENGGUNA	NILAI PPN
1	02.869.782-9-012.000	PT. OCEAN PETRO ENERGY	558,500,000
2	31.315.394-2-445.000	PT. INDAH TIGA SAUDARA	266,618,181
3	66.906.733-2-503.000	PT. BAYU PATRA ENERGY	204,927,272
4	72.413.138-8-624.000	PT. MITRA CENTRAL NIAGA	944,640,000
5	03.001.570-5-607.000	PT. SAHABAT SETIA JAYA	588,572,000
6	74.775.446-3-112.000	PT. PETRO ANDHARA ARTHA	470,795,000
7	02.213.861-4-437.001	PT. SAMUDRA ETAM ENERGI	406,000,001
8	82.922.438-5-505.000	PT. ANGKASA KARYA ENERGI	89,929,080
9	03.286.702-0-733.000	CV. SARANA	109,464,000
10	02.489.719-1-731.000	PT. TELADAN MAKMUR JAYA	210,240,000
11	01.845.962-8-027.000	PT. LANA BUANA JAYA	136,450,000
12	02.213.861-4-437.001	PT. SAMUDRA ETAM ENERGI	325,960,000
13	83.269.001-0-728.000	PT. ANUGRAH FASHA SAKTI	191,800,000
14	75.042.597-7-307.000	PT. CAHAYA UTAMA BERLIAN	15,870,000
15	02.342.945-9-734.000	PT. PELITA PETROLIUM INDOASIA	258,400,000
16	84.095.119-8-446.000	PT. NAMIRA SELARAS MANDIRI	174,180,000
17	76.914.152-4-643.000	PT. WADI INTI KENCANA	93,091,200
18	76.340.343-3-951.000	PT. SINYUN KARYA ANUGRAH	74,090,909
19	86.264.543-9-517.000	PETRO MULYA ABADI	90,000,000
20	01.320.865-7-017.000	PT. CATUR MUKTI	40,909,091
21	82.803.424-9-601.000	PT. RAKHA PANCA MANDIRI	56,160,000
22	02.650.448-0-517.001	PT. YAVINDO SUMBER PERSADA	52,545,640
23	85.807.273-9-517.000	PT. SENDANG AGUNG MANDIRI	25,600,000
24	02.585.510-7-411.000	PT. PATRA ALAM RAYA	41,600,000
25	82.508.785-1-453.000	PT. SEKAR DJATI SELARAS	20,618,182
26	01.595.128-8-517.000	CV. AGUNG WIJAYA PUTRA	33,818,182
27	02.213.861-4-724.000	PT. SAMUDRA ETAM ENERGI	28,055,283
28	84.987.703-0-416.000	PT. ANDALAN PRATAMA INDONESIA	12,800,000

Halaman 152 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	02.500.537-2-112.000	PT. IRSANI MANDIRI	11,250,000
30	03.278.613-9-012.000	PT. ALFA GRANITAMA	6,646,182
31	02.268.599-4-403.000	DWI PRIMA REZEKY	3,863,635
JUMLAH			5,543,393,838

PT CAKRA ABDI CEMERLANG tahun 2018; dan

NO.	NPWP PENGGUNA	NAMA WAJIB PAJAK PENGGUNA	NILAI PPN
1	03.329.209-5-732.002	PT. LAROS PETROLEUM	640,000,000
2	02.869.782-9-012.000	PT. OCEAN PETRO ENERGY	660,250,000
3	31.315.394-2-445.000	PT. INDAH TIGA SAUDARA	663,545,453
4	66.906.733-2-503.000	PT. BAYU PATRA ENERGY	584,999,999
5	72.413.138-8-624.000	PT. MITRA CENTRAL NIAGA	88,800,000
6	02.213.861-4-724.000	PT. SAMUDRA ETAM ENERGI	140,000,000
7	82.922.438-5-505.000	PT. ANGKASA KARYA ENERGI	170,404,740
8	03.286.702-0-733.000	CV. SARANA	273,999,000
9	84.095.119-8-446.000	PT. NAMIRA SELARAS MANDIRI	51,825,000
10	81.038.974-2-734.000	BERSUJUD BARA BESI	85,454,545
11	71.133.372-4-731.000	PT. ADRIAN JAYA MANDIRI	127,770,000
12	76.914.152-4-643.000	PT. WADI INTI KENCANA	68,363,520
13	76.340.343-3-951.000	PT. SINYUN KARYA ANUGRAH	26,136,364
14	73.498.081-6-722.000	CV. MEGAH JAYA ABADI	129,400,000
15	31.592.153-6-615.000	PT. SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA	101,000,000
16	85.906.013-9-517.000	PT. ENERGI MITRA SEJAHTERA	24,000,000
17	74.395.117-0-422.000	PT. SUPERCHEM PRIMA LESTARI	12,096,000
18	66.307.542-2-411.000	PT. MUDAH SARANA ENERGI	30,781,818
19	82.508.785-1-453.000	PT. SEKAR DJATI SELARAS	13,381,818
20	83.771.725-5-732.000	MULIA BERKAH MAHABBAH	15,454,546
JUMLAH			3,907,662,803

PT LAKSANA MEKAR SENTOSA Tahun 2018

NO.	NPWP PENGGUNA	NAMA WAJIB PAJAK PENGGUNA	NILAI PPN
1	74.775.446-3-112.000	PT. PETRO ANDHARA ARTHA	212,264,000
2	03.329.209-5-419.000	PT. LAROS PETROLEUM	360,000,000

Halaman 153 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	72.685.744-4-721.000	CIPTA SARANA SINERGI	316,000,000
4	81.038.974-2-734.000	BERSUJUD BARA BESI	109,454,548
5	71.133.372.4-731.000	PT. ADRIAN JAYA MANDIRI	45,980,000
6	82.952.175-6-401.000	BENDI NASHA NIAGA INDUSTRI	98,944,000
JUMLAH			1,142,642,548

- Bahwa SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI, bersama-sama dengan timnya Terdakwa SUNARKO alias YUSUF SUPENDI alias MAHPUT juga berperan sebagai pihak lain atau orang yang turut serta dengan HENDRIK ABDUL ROHMAN alias HENDRIK ABD ROHMAN alias HENDRIK dalam menerbitkan Faktur Pajak TBTS sebagai perantara, yaitu dengan cara membeli Faktur Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya atau Faktur Pajak TBTS dibeli dari HENDRIK ABDUL ROHMAN alias HENDRIK SUTISNA dan dari ARIS SUDIRMAN, yaitu dari perusahaan penerbit sebagai berikut:

- PT ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA (didirikan oleh HENDRIK ABDUL ROHMAN alias HENDRIK SUTISNA dan Haji ARIS alias ARIS SUDIRMAN).
- PT PUSPA INDAH KARYA (didirikan oleh Haji ARIS alias ARIS SUDIRMAN).

Adapun Faktur Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya atau Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan PT. ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA dan PT. PUSPA INDAH KARYA yang diijukan oleh SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI bersama-sama dengan timnya termasuk Terdakwa SUNARKO alias YUSUF SUPENDI alias MAHPUT dengan rincian adalah sebagai berikut :

- Faktur Pajak yang diterbitkan melalui PT ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA, dimana SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI bersama-sama dengan timnya termasuk Terdakwa SUNARKO alias YUSUF SUPENDI alias MAHPUT bertindak sebagai perantara atau sales sejak bulan Agustus s/d Oktober 2018 sebagai berikut :

PT ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA

NO.	WAJIB PAJAK PENGGUNA	NPWP PENGGUNA	NOMOR FAKTUR PAJAK	TGL FAKTUR	PPN PENERBIT
1	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	0100051831618800	22-Agu- 18	57,317,500

Halaman 154 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	0100051831618801	22-Agu-18	51,157,909
3	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	0100051831618802	23-Agu-18	52,325,000
4	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	0100051831618803	24-Agu-18	54,525,000
5	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	0100051831618804	25-Agu-18	58,000,000
6	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	0100051831618805	25-Agu-18	52,900,000
7	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	0100051831618806	27-Agu-18	53,500,000
8	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	0100051831618807	28-Agu-18	51,725,000
9	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	0100051831618808	29-Agu-18	53,850,000
10	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	0100051831618809	30-Agu-18	59,750,000
11	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	0100051831618810	31-Agu-18	58,300,000
12	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	0100051864277273	25-Sep-18	38,750,000
13	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	0100051864277274	26-Sep-18	32,212,767
14	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	0100051864277275	27-Sep-18	42,550,000
15	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	0100051864277276	28-Sep-18	42,037,500
16	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	0100051864277277	29-Sep-18	39,750,000
17	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	0100051864277278	24-Sep-18	37,000,000
	PHILIA CITRA SEJAHTERA Total				835,650,676
18	MULTITALLY INDONESIA	025936881027000	0100051831618811	22-Agu-18	54,950,000
19	MULTITALLY INDONESIA	025936881027000	0100051831618812	23-Agu-18	58,850,000
20	MULTITALLY INDONESIA	025936881027000	0100051831618813	24-Agu-18	51,508,172
21	MULTITALLY INDONESIA	025936881027000	0100051831618814	25-Agu-18	56,250,000
22	MULTITALLY INDONESIA	025936881027000	0100051831618815	27-Agu-18	54,500,000
23	MULTITALLY INDONESIA	025936881027000	0100051831618816	28-Agu-	56,000,000

Halaman 155 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



				18	
24	MULTITALLY INDONESIA	025936881027000	0100051831618817	29-Agu-18	54,600,000
25	MULTITALLY INDONESIA	025936881027000	0100051831618818	31-Agu-18	55,000,000
26	MULTITALLY INDONESIA	025936881027000	0100051864277268	24-Sep-18	51,350,000
27	MULTITALLY INDONESIA	025936881027000	0100051864277269	25-Sep-18	49,981,460
28	MULTITALLY INDONESIA	025936881027000	0100051864277270	26-Sep-18	50,125,000
29	MULTITALLY INDONESIA	025936881027000	0100051864277271	27-Sep-18	49,625,000
30	MULTITALLY INDONESIA	025936881027000	0100051864277272	28-Sep-18	52,125,000
31	MULTITALLY INDONESIA	025936881027000	0100051889448056	15-Okt-18	46,450,000
32	MULTITALLY INDONESIA	025936881027000	0100051889448057	17-Okt-18	46,119,994
33	MULTITALLY INDONESIA	025936881027000	0100051889448058	19-Okt-18	44,000,000
34	MULTITALLY INDONESIA	025936881027000	0100051889448059	22-Okt-18	42,600,000
35	MULTITALLY INDONESIA	025936881027000	0100051889448060	24-Okt-18	45,000,000
	MULTITALLY INDONESIA Total				919,034,626
	Grand Total				1,754,685,302

- b. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT PUSPA INDAH KARYA, dimana SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI bersama-sama dengan timnya termasuk Terdakwa SUNARKO alias YUSUF SUPENDI alias MAHPUT bertindak sebagai perantara atau sales sejak bulan Maret s/d Mei 2019;

PT PUSPA INDAH KARYA

NO.	WAJIB PAJAK PENGGUNA	NPWP PENGGUNA	NOMOR FAKTUR PAJAK	TGL FAKTUR	PPN PENERBIT
1	MITRA CENTRAL NIAGA	724131388624000	0100031936540924	12-Mar-19	74,000,000
2	MITRA CENTRAL NIAGA	724131388624000	0100031936540925	13-Mar-19	74,000,000
3	MITRA CENTRAL NIAGA	724131388624000	0100031936540926	14-Mar-19	74,000,000
4	MITRA CENTRAL NIAGA	724131388624000	0100031936540927	15-Mar-19	37,000,000
5	MITRA CENTRAL NIAGA	724131388624000	0100031936541997	01-Apr-19	71,000,000
6	MITRA CENTRAL NIAGA	724131388624000	0100031936541999	05-Apr-19	71,000,000

Halaman 156 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



7	MITRA CENTRAL NIAGA	724131388624000	0100031936542000	09-Apr-19	71,000,000
8	MITRA CENTRAL NIAGA	724131388624000	0100031936542001	15-Apr-19	71,000,000
	MITRA CENTRAL NIAGA Total				543,000,000
1	ANGKASA KARYA ENERGI	829224385505000	0100031936540922	19-Feb-19	34,440,000
2	ANGKASA KARYA ENERGI	829224385505000	0100041907282650	06-Mei-19	63,291,000
	ANGKASA KARYA ENERGI Total				97,731,000
	Grand Total				640,731,000

- Bahwa perbuatan menerbitkan Faktur pajak TBTS baik yang yang diterbitkan /dijual yang dilakukan Terdakwa SUNARKO alias MAHPUT bersama-sama dengan saksi SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI, saksi, saksi DENI SUHERMAN alias OBAY, saksi ELAN SUHERLAN Als. ELAN dan DAVIS, begitu juga para perantarayaitusaksi LUKMANUL HAKIM, saksi AGUS SUPRIYANTO, saksi SANSAN SURYANA, saksi RR.CANDRA W. YUNARTIAS. (masing-masing diproses hukum dalam berkas perkara terpisah), dengan menggunakan perusahaan PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA; PT GAMINDOTAMA PERKASA; PT SINAR ARTNO ASIA; PT BIMA BUMI MANDIRI; PT GEMA PULAU INTAN; PT CAKRA ABDI CEMERLANG; PT LAKSANA MEKAR SENTOSA, PT ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA; dan PT PUSPA INDAH KARYA, yang telah dijual oleh para perantara dan telah digunakan oleh para pengguna adalah merupakan *Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (Faktur Pajak TBTS)* karena tidak ada transaksi dan pembayaran yang menyertainya atau dengan kata lain hanya jual beli PPN saja.
- Bahwa dalam melakukan perbuatan penerbitan Faktur Pajak TBTS oleh Terdakwa SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT bersama-sama dengan SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI saksi DENI SUHERMAN alias OBAY, saksi SUHERLAN alias ELAN alias EKI, dimana disepakati pembagian komisi atau keuntungan sebagai berikut:
- Saksi SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI mendapatkan komisi sekurang-kurangnya sebesar selisih dari harga jual Faktur Pajak TBTS dikurangi dengan bagian atau jatah milik saksi DENI SUHERMAN alias OBAY dan saksi SUHERLAN alias ELAN dan Terdakwa SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Saksi DENI SUHERMAN alias OBAY, mendapatkan komisi atau keuntungan sekurang-kurangnya sebesar 1% s.d. 2% dari nilai PPN dalam Faktur Pajak, untuk setiap Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan;
- c. Saksi SUHERLAN alias ELAN alias EKI, mendapatkan komisi atau keuntungan sekurang-kurangnya sebesar sebagai berikut:
 - 1) sebesar 1,5% dari nilai PPN dalam Faktur Pajak atas tugas menginput atau mengupload Faktur Pajak; dan/atau
 - 2) sebesar 1,5% dari nilai PPN dalam Faktur Pajak atas penerbitan Faktur Pajak TBTS melalui PT BIMA BUMI MANDIRI, untuk setiap Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan;
- d. Terdakwa SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT, mendapatkan komisi atau keuntungan sekurang-kurangnya sebesar sebagai berikut:
 - 1) Sebesar 0,5% dari nilai PPN dalam Faktur Pajak, untuk setiap Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan; dan
 - 2) sebesar 0,5% s.d. 1% dari uang yang masuk di rekening, sebagai komisi atas jasa peminjaman rekening milik milik Terdakwa SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT, yang digunakan untuk menampung uang hasil penjualan Faktur Pajak TBTS, yaitu di rekening Bank BCA, Nomor Rekening: 2721774599, atas nama SUNARKO dan rekening Bank BCA, atas nama YUSUP SUPENDI; dan
 - 3) sebesar 1,5% s.d 2% dari nilai PPN dalam Faktur Pajak atas peran Terdakwa SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT sebagai Direktur Utama perusahaan di PT CAKRA ABDI CEMERLANG (menggunakan nama MAHPUT) dan PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA (menggunakan nama YUSUP SUPENDI).
- Bahwa atas penerbitan Faktur Pajak TBTS, yaitu atas proses jual beli Faktur Pajak TBTS antarasaksi SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI dengan para perantara atau sales Faktur Pajak TBTS, cara pembayaran atas jual beli Faktur Pajak TBTS tersebut dilakukan dengan rangkaian sebagai berikut:
 - a) Para perusahaan pengguna (pembeli Faktur Pajak TBTS) akan mentransfer atau membayar secara cash (tunai) kepada para perantara atau sales Faktur Pajak TBTS;
 - b) Kemudian setelah para perantara atau sales Faktur Pajak TBTS mengambil keuntungan (fee) bagian mereka masing-masing, maka para

Halaman 158 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara atau sales Faktur Pajak TBTS ini akan membayar atau menyerahkan uang penjualan Faktur Pajak TBTS kepada saksi SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI yang dilakukan dengan cara mentransfer langsung atau menyetor tunai ke rekening yang diberikan oleh saksi SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI, yaitu ke rekening atas nama sebagai berikut:

- 1) Rekening atas nama Terdakwa SUNARKO, di Bank BCA, nomor rekening: 2721774599; dan
 - 2) Rekening atas nama saksi YUSUP SUPENDI (SUNARKO) di Bank BCA, nomor rekening: 4140348398; dan
 - 3) Rekening atas nama saksi DENI SUHERMAN, di Bank BCA, nomor rekening: 3760377367; dan/atau
 - 4) Rekening atas nama saksi SUHAERI, di Bank BCA, nomor rekening: 2831675472; dan/atau
 - 5) Rekening atas nama SEPI MUHARAM, di Bank Mandiri, nomor rekening: 1310011580000; atas nama SEPI MUHARAM
- c) Kemudian setelah uang hasil penjualan Faktur Pajak TBTS yang merupakan satu rangkaian dari penerbitan Faktur Pajak TBTS tersebut masuk di beberapa rekening tersebut, maka saksi SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI kemudian melakukan penarikan atau pentransferan ke rekening milik saksi SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI sendiri, yaitu di Bank BCA, Nomor Rekening: 03760484716 atas nama saksi SEPI MUHARAM. Hal mana dilakukan oleh saksi SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI untuk menghindari adanya kecurigaan dari pihak Bank dan untuk menghindari adanya pelacakan dan penghindaran pengenaan pajak dan sebagai penanggung jawab pidana atas kasus penerbitan Faktur Pajak TBTS ini.
- Bahwa kemudian, setelah adanya uang masuk dari hasil penjualan Faktur Pajak TBTS yang merupakan satu kesatuan dari rangkaian proses penerbitan Faktur Pajak TBTS, saksi SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI kemudian membagi hasil uang penerbitan Faktur Pajak TBTS ini, kepada pihak-pihak yang turut serta dalam proses penerbitan Faktur Pajak TBTS, yaitu kepada saksi DENI

Halaman 159 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHERMAN alias OBAY, saksi SUHERLAN alias ELAN alias EKI, dan saksi SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT, yaitu dengan cara sebagai berikut:

- a. Untuk komisi atau keuntungan milik DENI SUHERMAN alias OBAY, diberikan dalam bentuk cash tunai atau ditransfer ke rekening Bank BCA, Nomor Rekening: 3760377367, atas nama DENI SUHERMAN;
 - b. Untuk komisi atau keuntungan milik SUHERLAN alias ELAN alias EKI, diberikan dalam bentuk cash tunai atau transfer ke rekening Bank BCA, Nomor Rekening: 2831583284, atas nama SUHERLAN; dan
 - c. Untuk komisi atau keuntungan milik Terdakwa SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT, diberikan dalam bentuk cash tunai;
- Bahwa Terdakwa SUNARKO alias MAHPUT bersama-sama dengan SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI, saksi DENI SUHERMAN alias OBAY, saksi ELAN SUHERLAN Als. ELAN dan DAVIS begitu juga para perantara yaitu saksi LUKMANUL HAKIM, saksi AGUS SUPRIYANTO, saksi SANSAN SURYANA, saksi RR.CANDRAW. YUNARTIAS (masing-masing diproses hukum dalam berkas perkara terpisah), dalam melakukan penerbitan dan penjualan Faktur Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (Faktur TBTS) yang telah digunakan oleh Perusahaan para pengguna tersebut dilakukan secara berturut-turut sebagai perbuatan yang diteruskan yang dimulai pada bulan Agustus 2017 sampai dengan sekitar Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2017 dan 2019, bertempat antara lain di alamat perusahaan yaitu diantaranya di alamat perusahaan yaitu di Jl. Ujung Harapan, RT.06/RW.02, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi,
- Bahwa perbuatan Terdakwa SUNARKO alias MAHPUT bersama-sama dengan SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI, yaitu sebagai berikut:
1. Mendirikan dan membeli perusahaan dengan tujuan untuk menerbitkan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (Faktur TBTS) ;
 2. Bahwa Terdakwa SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT diminta bantuannya oleh saksi SEPI MUHARAM dalam proses pendirian perusahaan, yang kemudian menjadikan Terdakwa SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT untuk menduduki jabatan sebagai Direktur Utama di PT CAKRA ABDI CEMERLANG, dengan menggunakan KTP atas nama MAHPUT

Halaman 160 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mengadakan kesepakatan dan bekerjasama dengan saksi DENI SUHERMAN alias OBAY, saksi SUHERLAN alias ELAN alias EKI, dan Terdakwa SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT untuk bersama-sama, turut serta dalam proses penerbitan Faktur Pajak TBTS;
 4. Menerima pesanan Faktur Pajak TBTS dari para perantara atau sales Faktur Pajak TBTS;
 5. Meminta bantuan kepada saksi SUHERLAN alias ELAN untuk membuat/mengupload dan/atau menerbitkan Faktur Pajak TBTS, serta menerima Faktur Pajak TBTS yang telah dibuat/diupload oleh SUHERLAN alias ELAN;
 6. Meminta bantuan kepada saksi DENI SUHERMAN alias OBAY untuk membuat invoice sebagai dokumen pelengkap dari Faktur Pajak TBTS;
 7. Mengirim atau menyerahkan Faktur Pajak TBTS kepada para perantara atau sales Faktur Pajak TBTS;
 8. Menerima pembayaran atas penerbitan dan/atau penjualan Faktur Pajak TBTS;
 9. Sengaja menggunakan banyak rekening yang digunakan sebagai rekening penampungan uang hasil penjualan Faktur Pajak TBTS yang merupakan rangkaian dari menerbitkan Faktur Pajak TBTS;
 10. Membagi uang keuntungan hasil penjualan Faktur Pajak TBTS; dan
- Menikmati keuntungan atas penerbitan dan/atau penjualan Faktur Pajak TBTS tersebut;
- Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT bersama sama dengan SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI juga dengan para perantara dan para sales Faktur Pajak TBTS berupa menerbitkan maupun menjual-belian Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya (Faktur Pajak TBTS) telah menimbulkan Kerugian pada Pendapatan Negara dari Sektor Perpajakan yaitu sekurang-kurangnya sebesar Faktur Pajak TBTS yang telah diterbitkan dan/atau dijual melalui setidaknya perusahaan PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA; PT GAMINDOTAMA PERKASA; PT SINAR ARTNO ASIA; PT BIMA BUMI MANDIRI; PT GEMA PULAU INTAN; PT CAKRA ABDI CEMERLANG; PT LAKSANA MEKAR SENTOSA, PT ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA; dan PT PUSPA INDAH KARYA, yaitu sekurang-kurangnya sebesar Rp 31.172.283.560,- (tiga puluh satu milyar seratus tujuh puluh dua juta dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA WP PENERBIT	PPN (Rp)
1	PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA	5.684.841.222
2	PT GAMINDOTAMA PERKASA	2.168.301.789
3	PT SINAR ARTNO ASIA	3.695.973.436
4	PT BIMA BUMI MANDIRI	6.634.051.622
5	PT GEMA PULAU INTAN	5.543.393.838
6	PT CAKRA ABDICEMERLANG	3.907.662.803
7	PT LAKSANA MEKAR SENTOSA	1.142.642.548
8	PT ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA	1.754.685.302
9	PT PUSPA INDAH KARYA	640.731.000
JUMLAH		31.172.283.560

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 39 A huruf a Jo Pasal 43 ayat (1) Undang Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2009 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG Jo Pasal 64 KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya ;

Halaman 162 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



3. Sebagai wakil kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan ;
4. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum, pendukung hak dan kewajiban, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT), bahwa setiap orang secara Historis Kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang Terdakwa bernama **Sunarko alias Yusuf Supendi alias Mahfut alias Iwan Setiawan** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Tersangka, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan juga Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat beberapa sub unsur dimana apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur ini juga akan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Awalnya pada pertengahan tahun 2015 Terdakwa SUNARKO alias MAHPUT Alias YUSUF SUPENDI Alias IWAN SETIAWAN ditarik atau diajak oleh saksi SEPI MUHARAM untuk menjadi supirnya, selama Terdakwa menjadi sopir tersebut Terdakwa sering diminta bantu bantu saksi SEPI MUHARAM termasuk meminjamkan rekening BCA Terdakwa nomor 2721774599 untuk penampungan hasil penjualan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (selanjutnya disingkat faktur pajak TBTS) dan Terdakwa juga diminta oleh saksi SEPI MUHARAM untuk dijadikan sebagai Direktur di perusahaan penerbit faktur pajak TBTS yang akan saksi SEPI MUHARAM buat yaitu PT CAKRA ABDI CEMERLANG, dimana dalam pendirian Perusahaan tersebut dengan menggunakan Identitas KTP milik orang lain yang fotonya ditempel foto Terdakwa . dan pada saat berurusan ke Kantor Pajakpun Terdakwa diminta oleh saksi SEPI MUHARAM untuk maju menggunakan identitas KTP palsu tersebut, dimana saksi SEPI MUHARAM pernah membuat menempel foto Terdakwa di KTP orang lain atas nama MAHFUT dan apabila ada nama MAHFUT didalam perusahaan yang digunakan untuk menerbitkan Faktur tidak Berdasarkan transaksi yang Sebenarnya (Faktur TBTS) adalah nama lain dari Terdakwa;
- Terdakwa SUNARKO alias MAHPUT Alias YUSUF SUPENDI Alias IWAN SETIAWAN juga pernah diminta oleh saksi SEPI MUHARAM untuk membuat rekening di BCA atas nama YUSUP SUPENDI (nama lain dari Terdakwa) untuk penampungan hasil penjualan faktur pajak TBTS dari perusahaan-perusahaan yang dibuatnya, atas pemakaian rekening BCA atas nama Terdakwa SUNARKO dan rekening BCA atas nama YUSUP SUPENDI dengan rekening nomor 2721774599 Terdakwa akan dikasih imbalan sebesar 0,5% dari nilai faktur pajak TBTS dan khusus kalau order faktur pajak dari perusahaan-perusahaan dengan Direktur atas nama atas nama Direkturny MAHFUT (nama lain dari Terdakwa) perjanjiannya akan diberi komisi sebesar 1% dari nilai PPN, dimana saksi SEPI kemudian mendirikan perusahaan diantaranya PT CAKRA ABDI CEMERLANG dimana Terdakwa SUNARKO Als MAHPUT menjadi Direktur PT CAKRA ABDI CEMERLANG

Halaman 164 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah mengurus perusahaan tersebut melainkan Terdakwa hanya dipakai namanya saja oleh saksi SEPI MUHARAM, atas keberadaan Terdakwa sebagai Direktur pada perusahaan-perusahaan yang dibuat oleh saksi SEPI MUHARAM, Terdakwa hanya diberi uang sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa pada tahun 2017 sampai dengan 2018 sebelum Terdakwa mendirikan perusahaan PTCAKRA ABDI CEMERLANG dimana Terdakwa sebagai Direkturnya, Terdakwa SUNARKO alias MAHPUT Alias YUSUF SUPENDI Alias IWAN SETIAWAN bersama sama saksi ELAN SUHERLAN telah mendirikan perusahaan untuk digunakan oleh Terdakwa bersama sama dengan saksi SEPI MUHARAM dengan tujuan sebagai perusahaan penerbit Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Taransaksi yang Sebenarnya (Faktur TBTS), adapun perusahaan perusahaan didirikan oleh Terdakwa bersama sama dengan saksi ELAN SUHERLAN adalah sebagai berikut :
 1. PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA, terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Kemayoran, sejak tanggal 24 Agustus 2017; yang didirikan dan dijalankan oleh SUHERLAN alias ELAN dan Terdakwa SUNARKO
 2. PT GAMINDOTAMA PERKASA, terdaftar di KPP Pratama Cibinong, sejak tanggal 22 September 2017; yang didirikan oleh SUHERLAN alias ELAN dan Terdakwa SUNARKO
 3. PT SINAR ARTNO ASIA, terdaftar di KPP Pratama Depok Sawangan, sejak tanggal 12 Maret 2018; yang didirikan oleh Terdakwa SUNARKO
 4. PT BIMA BUMI MANDIRI, terdaftar di KPP Pratama Cibitung, sejak tanggal 20 September 2018; yang didirikan oleh ELAN SUHERLAN
- Bahwa pada tahun 2017 sampai dengan 2018 perusahaan yang didirikan Terdakwa SUNARKO alias MAHPUT Alias YUSUF SUPENDI Alias IWAN SETIAWAN bersama sama saksi ELAN SUHERLAN telah dibeli oleh saksi SEPI MUHARAM, dimana perusahaandimaksud untuk digunakan oleh saksi SEPI MUHARAM untuk tujuan sebagai perusahaan penerbit Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Taransaksi yang Sebenarnya (Faktur TBTS), adapun perusahaan perusahaan didirikan oleh Terdakwa bersama sama dengan saksi ELAN SUHERLAN yang dibeli oleh saksi SEPI MUHARAM adalah sebagai berikut :
 - a. Perusahaan yang dibeli oleh saksi SEPI MUHARAM
 - PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA, terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Kemayoran, sejak tanggal 24 Agustus 2017;

Halaman 165 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang didirikan dan dijalankan oleh SUHERLAN alias ELAN dan Terdakwa SUNARKO
- PT GAMINDOTAMA PERKASA, terdaftar di KPP Pratama Cibinong, sejak tanggal 22 September 2017; yang didirikan oleh SUHERLAN alias ELAN dan Terdakwa SUNARKO
 - PT SINAR ARTNO ASIA, terdaftar di KPP Pratama Depok Sawangan, sejak tanggal 12 Maret 2018; yang didirikan oleh Terdakwa SUNARKO
 - PT BIMA BUMI MANDIRI, terdaftar di KPP Pratama Cibitung, sejak tanggal 20 September 2018; yang didirikan oleh ELAN SUHERLAN
- b. sedangkan Perusahaan yang didirikan oleh saksi SEPI MUHARAM melalui Terdakwa SUNARKO dan saksi SUBUR AHMAD adalah :
- a. PT GEMA PULAU INTAN, terdaftar di KPP Pratama Cibitung, sejak tanggal 3 Oktober 2018;
 - b. PT CAKRA ABDI CEMERLANG, terdaftar di KPP Pratama Cibitung, sejak tanggal 3 Oktober 2018;; dan
 - c. PT LAKSANA MEKAR SENTOSA, terdaftar di KPP Pratama Cibitung, sejak tanggal 6 November 2018.
- Bahwa Kronologis saksi SEPI MUHARAM dalam mendirikan PT GEMA PULAU INTAN, NPWP: 86.122.861.7-435.000; PT CAKRA ABDI CEMERLANG, NPWP: 86.122.698.3-435.000; PT LAKSANA MEKAR SANTOSA, NPWP: 86.443.244.8-435.000 pada tahun 2018 melalui Terdakwa SUNARKO adalah sebagai berikut :
- a. Dalam hal ini saksi SEPI MUHARAM meminta tolong kepada TerdakwaSUNARKO alias MAHPUT untuk dicarikan orang yang dapat mendirikan perusahaan, kemudian Terdakwa SUNARKO mencarikannya dan melakukan negosiasi terkait pendirian perusahaan kepada seseorang yang bernama saksi SUBUR AHMAD , lalu diadakan kesepakatan harga
 - b. Setelah sudah setuju dengan harganya, Terdakwa SUNARKO menyampaikan kepada saksi SEPI MUHARAM dan kemudian saksi SEPI MUHARAM memberikan dana terkait dengan persiapan pendirian perusahaan tersebut kepada Terdakwa SUNARKO
 - c. Bahwa harga yang disepakati untuk persiapan pendirian ke dua perusahaan tersebut sebesar Rp. 60.000.000,00 per perusahaan.
 - d. Terkait data pendirian perusahaan semuanya diurus oleh Terdakwa SUNARKO, saksi SEPI MUHARAM hanya tinggal terima bersih dengan menyerahkan uang sebesar Rp120.000.000,- untuk 2 (dua) perusahaan

Halaman 166 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



tersebut yaitu PT GEMA PULAU INTAN, NPWP: 86.122.861.7-435.000 dan PT CAKRA ABDI CEMERLANG, NPWP: 86.122.698.3-435.000

e. Kemudian Terkait data pendirian satu perusahaan lagi yaitu PT LAKSANA MEKAR SANTOSA, NPWP: 86.443.244.8-435.000 semuanya diurus oleh Terdakwa SUNARKO, juga saksi SEPI MUHARAM hanya terima bersih dengan menyerahkan uang sebesar Rp40.000.000,-

- Bahwa pada proses pendirian perusahaan yang dilakukan oleh saksi SEPI MUHARAM yang pengurusannya dilakukan melalui Terdakwa SUNARKO juga atas proses penerimaan Sertifikat Elektronik dan Kode Aktivasi (password), terkait dengan proses penerbitan Faktur Pajak TBTS dari perusahaan yang saksi SEPI MUHARAM dirikan, dimana saksi SEPI MUHARAM tidak mengetahui bagaimana prosesnya karena sudah dipercayakan sepenuhnya kepada Terdakwa SUNARKO dengan rincian sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi SEPI MUHARAM pernah menerima Sertifikat Elektronik dan Kode Aktivasi (password) tersebut;
- b. Jadi begitu proses pendaftaran Wajib Pajak di Kantor Pajak selesai, oleh saksi SUBUR, Sertifikat Elektronik dan Kode Aktivasi (password) diserahkan kepada Terdakwa SUNARKO dan oleh Terdakwa SUNARKO diserahkan kepada saksi SEPI MUHARAM
- c. Kemudian oleh saksi SEPI MUHARAM, Sertifikat Elektronik dan Kode Aktivasi (password) tersebut diserahkan kepada saksi SUHERLAN Als.ELAN
- d. Selain itu juga, sebenarnya saksi SUHERLAN sudah mengetahui mengenai kombinasi password dan kode aktivasi tersebut, yaitu dari email yang masuk ke email perusahaan yang dibuat oleh saksi SEPI MUHARAM dan saksi SUHERLAN. Jadi ada email dari kantor pajak ke email tersebut yang isinya adalah kode aktivasi dan username-nya.

- Bahwa kemudian pada tahun 2017 tersebut Terdakwa SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT, saksi DENI SUHERMAN alias OBAY, saksi SUHERLAN alias ELAN alias EKI, mengetahui bahwa saksi SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI memiliki pekerjaan sebagai penerbit Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (Faktur (TBTS), yaitu dengan cara membeli dan/atau mendirikan beberapa perusahaan (PT) yang digunakan sebagai sarana untuk menerbitkan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (Faktur TBTS), dimana Perusahaan tersebut hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Faktur Pajak saja, tidak pernah melakukan penjualan, tidak ada barang yang dijual, tidak pernah ada pembayaran sebesar harga barang dan PPN dari pembeli.

- Bahwa kemudian dimulai sejak tahun 2017 s.d tahun 2019, Terdakwa SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT bersama sama dengan saksi SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI bersama-sama DENI SUHERMAN alias OBAY, SUHERLAN alias ELAN alias EKI, telah mengadakan kesepakatan untuk turut kerjasama dalam melakukan perbuatan penerbitan Faktur Pajak TBTS, dengan pembagian tugas sebagai berikut:
 - a. Saksi SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI selaku leader atau pimpinan, bertugas untuk mencari atau menerima pesanan Faktur Pajak TBTS dari para pengguna langsung maupun melalui sales sales dan juga bertugas membagi komisi atau keuntungan kepada saksi DENI SUHERMAN alias OBAY, saksi SUHERLAN alias ELAN, dan Terdakwa SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT;
 - b. Terdakwa SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT, *bertugas* untuk mencari orang-orang yang bisa membuat perusahaan, menyediakan rekening penampungan hasil penjualan Faktur Pajak TBTS yaitu rekening atas nama saksi SUNARKO dan rekening atas nama saksi YUSUP SUPENDI, serta Terdakwa SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT juga dijadikan oleh saksi SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI untuk menduduki jabatan sebagai Direktur Utama di PT CAKRA ABDI CEMERLANG (menggunakan nama MAHPUT) dan PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA (menggunakan nama YUSUP SUPENDI).
 - c. Saksi DENI SUHERMAN alias OBAY, *bertugas* untuk membuat Invoice dan Surat Jalan, sebagai dokumen pelengkap dari Faktur Pajak TBTS;
 - d. Saksi SUHERLAN alias ELAN alias EKI, *bertugas* untuk mengupload Faktur Pajak (*e-faktur*) secara elektronik, membuat laporan SPT PPN, dan melaporkan SPT PPN tersebut secara online atau e-SPT, serta SUHERLAN alias ELAN alias EKI dijadikan oleh saksi SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI untuk menduduki jabatan sebagai Direktur Utama di PT LAKSANA MEKAR SENTOSA (menggunakan nama EKI); dan

Halaman 168 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI dalam menerbitkan Faktur Pajak TBTS sehingga dapat digunakan oleh perusahaan pengguna (pembeli Faktur Pajak TBTS) tersebut tidak dilakukan sendirian, yaitu selain bersama sama dengan saksi DENI SUHERMAN alias OBAY, saksi SUHERLAN alias ELAN alias EKI, dan terdakwa SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT juga dalam penjualannya melalui para perantara atau sales Faktur Pajak TBTS, yaitu beberapa orang sebagai berikut:
 - a. LUKMANUL HAKIM, dengan harga/nilai jual Faktur Pajak TBTS sebesar 12,5% dari nilai PPN; dan/atau
 - b. AGUS SUPRIYANTO, dengan harga/nilai jual Faktur Pajak TBTS sebesar 17% s.d. 18% dari nilai PPN; dan/atau
 - c. SANSAN SURYANA, dengan harga/nilai jual Faktur Pajak TBTS sebesar 18% s.d. 20% dari nilai PPN; dan/atau
 - d. HENDRIK ABDUL ROHMAN, dengan harga/nilai jual Faktur Pajak TBTS sebesar 7% dari nilai PPN.
 - e. RR. CANDRA W. YUNARTIAS dengan harga/nilai jual Faktur Pajak TBTS sebesar 7% dari nilai PPN.
 - f. WALMINDAR dengan harga/nilai jual Faktur Pajak TBTS sebesar 7% dari nilai PPN.
 - g. RIDWAN E. BATUBARA dengan harga/nilai jual Faktur Pajak TBTS sebesar 7% dari nilai PPN.

Adapun Perusahaan para pengguna Faktur Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (Faktur TBTS) ,baik pemesanannya maupun penjualannya melalui para sales tersebut adalah sebagai berikut antara lain :

1. PT. CAHAYA UTAMA BERLIAN
2. PT. PETRO ANDRAHA ARTHA
3. PT. SAMUDRA ETAM
4. PT. INDAH TIGA SAUDARA
5. PT. OCEAN PETRO ENERGY
6. PT. LAROS PETROLIUM
7. PT. ANGKASA KARYA ENERGY
8. PT. SINAR BACHAN KHATULISTIWA
9. PT. ANUGERAH FASA SAKTI
10. PT. BAYU PUTRA ENERGY
11. PT. ALFA BRANITAMA

Halaman 169 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. PT. BERKAH SOLO
13. PT. SAMUDERA JAYA ENERGY
14. PT. JAMBI TULO
15. PT. MITRA CENTRAL NIAGA
16. PT. MULTITALLY INDONESIA
17. PT. PHILIA CITRA SEJAHTERA
18. PT. BENDINASHA NIAGA INDUSTRI
19. PT. BERSUJUD BARA BESI
20. PT. MULIA BERKAH MAHABBAH
21. D L L .

- Bahwa proses penerbitan, dalam hal ini, yaitu proses jual beli antara saksi SEPI MUHARAM bersama sama dengan SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI alias IWAN dengan para perantara atau sales Faktur Pajak TBTS, dalam menerbitkan Faktur Pajak TBTS sehingga dapat digunakan oleh perusahaan pengguna (pembeli Faktur Pajak TBTS) tersebut, dilakukan dengan rangkaian sebagai berikut:
 - a. Para perusahaan pengguna (pembeli Faktur Pajak TBTS) memesan Faktur Pajak kepada para perantara atau sales Faktur Pajak TBTS, melalui email dan/atau Whatsapp, dan kemudian oleh para perantara atau sales Faktur Pajak TBTS, pesanan tersebut diteruskan/*forward* kepadasaksi SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI melalui Whatsapp;
 - b. Kemudian oleh saksi SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI, pesanan Faktur Pajak TBTS tersebut diteruskan/*forward* kepada saksi SUHERLAN alias ELAN alias EKI, untuk dibuatkan atau diupload Faktur Pajaknya;
 - c. Setelah Faktur Pajak selesai dibuat atau diupload, maka oleh SUHERLAN alias ELAN alias EKI, dikirim kepada TerdakwaSEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI melalui Whatsapp, untuk kemudian diteruskan/*forward* kepada para perantara atau sales Faktur Pajak TBTS, untuk diteruskan/*forward* lagi kepada para perusahaan pengguna (pembeli Faktur Pajak TBTS) tersebut.
 - d. Kemudian saksiSEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI meminta saksi DENI SUHERMAN alias OBAY untuk membuat Invoice dan/atau Surat Jalan, sebagai pelengkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen dari Faktur Pajak TBTS, untuk kemudian dikirimkan kepada para perusahaan pengguna (pembeli Faktur Pajak TBTS) tersebut.

- Bahwa rincian Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan oleh Terdakwa SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT bersama-sama dengan SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI saksi DENI SUHERMAN alias OBAY, saksi SUHERLAN alias ELAN alias EKI, DAVIES, melalui perusahaan PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA; PT GAMINDOTAMA PERKASA; PT SINAR ARTNO ASIA; PT BIMA BUMI MANDIRI; PT GEMA PULAU INTAN; PT CAKRA ABDI CEMERLANG; dan PT LAKSANA MEKAR SENTOSA, dengan melalui perantara LUKMANUL HAKIM, AGUS SUPRIYANTO, SANSAN SURYANA, RR. CANDRA W. YUNARTIAS, MALWINDAR dan RIDWAN E BATUBARA pada kurun waktu masa Agustus 2017 s.d. Juli 2019, adalah sebagai berikut:

1). Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA tahun 2017;

NO.	WAJIB PAJAK PENGGUNA	NPWP PENGGUNA	TOTAL
1	ADITYA ARYAPRAWIRA	013703558048000	623,300,000
2	AGUNG WIJAYA PUTRA	015951288517000	19,169,000
3	ARSA MEGA ENERGI	706663937734000	100,600,978
4	BAYU PATRA ENERGY	669067332503000	53,338,636
5	CV. AGUNG WIJAYA PUTRA	015951288517000	20,036,364
6	DINAR PUTRA MANDIRI	022929459009000	1,409,811,150
7	FAUZAN PUTRA PERKASA	211230909443000	5,744,800
8	GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI	315121251416000	1,052,028,000
9	GAPURA OCEAN LINE PALABUHANRATU	751202078405000	5,968,000
10	JAYA ENERGI PRIMA	033519224047000	120,413,300
11	KARIMATA ENERGI PERSADA	712064757012000	495,690,000
12	MAULANA SAMUDERA GEMILANG	315600361401000	101,460,000
13	MITRA SARANA SEJATI	711473793307000	122,000,000
14	OCEAN PETRO ENERGY	028697829012000	1,031,142,500
15	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	518,170,494
16	SUMBER KETAPANG MAKMUR ABADI	710542721703000	5,968,000
	TOTAL		5,684,841,222

PT GAMINDOTAMA PERKASA tahun 2017;

Halaman 171 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	WAJIB PAJAK PENGGUNA	NPWP PENGGUNA	Total
1	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	1,038,892,321
2	HARINCO KARYA SEJAHTERA	025808890432000	477,088,849
3	DUA SAHABAT BAJA	028999704031000	101,673,022
4	ELECOMINDO JAYAPRATAMA	015656713036000	40,240,000
5	MULTITALLY INDONESIA	025936881027000	510,407,597
			2,168,301,789

PT SINAR ARTNO ASIA Tahun 2018;

NO.	WAJIB PAJAK PENGGUNA	NPWP PENGGUNA	Total
1	ANUGRAH ABADI BARU	025665142027000	100,000,000
2	CATUR MANUNGGAL JAYA AGUNG	024020638504000	156,545,340
3	CV. SURYA MITRA BUANA	022675136445000	201,096,733
4	DINAR PUTRA MANDIRI	022929459009000	335,104,000
5	INDAH TIGA SAUDARA	313153942445000	226,636,361
6	MECHATAMA SINAR MULIA	734594930503000	531,929,091
7	OCEAN PETRO ENERGY	028697829012000	509,089,000
8	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	1,635,572,911
			3,695,973,436

PT BIMA BUMI MANDIRI tahun 2018;

No.	WAJIB PAJAK PENGGUNA	NPWP PENGGUNA	PPN
1	AGUNG WIJAYA PUTRA	015951288517000	30,400,000
2	ALISHA KARUNIA PERDANA	769926726721000	866,000,000
3	ANGKASA KARYA ENERGI	829224385505000	160,288,000
4	ANUGRAH FASHA SAKTI	832690010728000	80,550,000
5	ANUGRAH SEJAHTERA SENTOSA	315681775613000	520,875,000
6	BAYU PATRA ENERGY	669067332503000	192,163,636
7	BUMI GATAH PERMAI	863521100728000	3,936,170
8	CAHAYA UTAMA BERLIAN	750425977307000	284,475,000
9	CATUR MUKTI	013208657017000	129,381,818
10	ENERGI MITRA SEJAHTERA	859060139517000	30,400,000

Halaman 172 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11	INDAH TIGA SAUDARA	313153942445000	198,254,544
12	LAROS PETROLEUM	033292095419000	630,345,455
13	MANGGALA SURYA ENERGI	833190614005000	17,400,000
14	MUDAH SARANA ENERGI	663075422411000	12,000,000
15	SARANA	032867020733000	155,632,000
16	SENDANG AGUNG MANDIRI	858072739517000	24,000,000
17	SINAR BACAN KHATULISTIWA	312479538607000	900,449,999
18	VIAN RAMA PRATAMA	017972274016000	67,000,000
			6,634,051,622

PT GEMA PULAU INTAN Tahun 2018;

NO.	NPWP PENGGUNA	NAMA WAJIB PAJAK PENGGUNA	NILAI PPN
1	02.869.782-9-012.000	PT. OCEAN PETRO ENERGY	558,500,000
2	31.315.394-2-445.000	PT. INDAH TIGA SAUDARA	266,618,181
3	66.906.733-2-503.000	PT. BAYU PATRA ENERGY	204,927,272
4	72.413.138-8-624.000	PT. MITRA CENTRAL NIAGA	944,640,000
5	03.001.570-5-607.000	PT. SAHABAT SETIA JAYA	588,572,000
6	74.775.446-3-112.000	PT. PETRO ANDHARA ARTHA	470,795,000
7	02.213.861-4-437.001	PT. SAMUDRA ETAM ENERGI	406,000,001
8	82.922.438-5-505.000	PT. ANGKASA KARYA ENERGI	89,929,080
9	03.286.702-0-733.000	CV. SARANA	109,464,000
10	02.489.719-1-731.000	PT. TELADAN MAKMUR JAYA	210,240,000
11	01.845.962.8-027.000	PT. LANA BUANA JAYA	136,450,000

Halaman 173 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	02.213.861-4-437.001	PT. SAMUDRA ETAM ENERGI	325,960,000
13	83.269.001-0-728.000	PT. ANUGRAH FASHA SAKTI	191,800,000
14	75.042.597-7-307.000	PT. CAHAYA UTAMA BERLIAN	15,870,000
15	02.342.945-9-734.000	PT. PELITA PETROLIUM INDOASIA	258,400,000
16	84.095.119-8-446.000	PT. NAMIRA SELARAS MANDIRI	174,180,000
17	76.914.152-4-643.000	PT. WADI INTI KENCANA	93,091,200
18	76.340.343-3-951.000	PT. SINYUN KARYA ANUGRAH	74,090,909
19	86.264.543-9-517.000	PETRO MULYA ABADI	90,000,000
20	01.320.865.7-017.000	PT. CATUR MUKTI	40,909,091
21	82.803.424-9-601.000	PT. RAKHA PANCA MANDIRI	56,160,000
22	02.650.448-0-517.001	PT. YAVINDO SUMBER PERSADA	52,545,640
23	85.807.273-9-517.000	PT. SENDANG AGUNG MANDIRI	25,600,000
24	02.585.510-7-411.000	PT. PATRA ALAM RAYA	41,600,000
25	82.508.785-1-453.000	PT. SEKAR DJATI SELARAS	20,618,182
26	01.595.128.8-517.000	CV. AGUNG WIJAYA PUTRA	33,818,182
27	02.213.861-4-724.000	PT. SAMUDRA ETAM ENERGI	28,055,283
28	84.987.703-0-416.000	PT. ANDALAN PRATAMA INDONESIA	12,800,000
29	02.500.537-2-112.000	PT. IRSANI MANDIRI	11,250,000
30	03.278.613-9-012.000	PT. ALFA GRANITAMA	

Halaman 174 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			6,646,182
31	02.268.599-4-403.000	DWI PRIMA REZEKY	3,863,635
		JUMLAH	5,543,393,838

PT CAKRA ABDI CEMERLANG tahun 2018; dan

NO.	NPWP PENGGUNA	NAMA WAJIB PAJAK PENGGUNA	NILAI PPN
1	03.329.209-5-732.002	PT. LAROS PETROLEUM	640,000,000
2	02.869.782-9-012.000	PT. OCEAN PETRO ENERGY	660,250,000
3	31.315.394-2-445.000	PT. INDAH TIGA SAUDARA	663,545,453
4	66.906.733-2-503.000	PT. BAYU PATRA ENERGY	584,999,999
5	72.413.138-8-624.000	PT. MITRA CENTRAL NIAGA	88,800,000
6	02.213.861-4-724.000	PT. SAMUDRA ETAM ENERGI	140,000,000
7	82.922.438-5-505.000	PT. ANGKASA KARYA ENERGI	170,404,740
8	03.286.702-0-733.000	CV. SARANA	273,999,000
9	84.095.119-8-446.000	PT. NAMIRA SELARAS MANDIRI	51,825,000
10	81.038.974-2-734.000	BERSUJUD BARA BESI	85,454,545
11	71.133.372-4-731.000	PT. ADRIAN JAYA MANDIRI	127,770,000
12	76.914.152-4-643.000	PT. WADI INTI KENCANA	68,363,520
13	76.340.343-3-951.000	PT. SINYUN KARYA ANUGRAH	26,136,364
14	73.498.081-6-722.000	CV. MEGAH JAYA ABADI	129,400,000

Halaman 175 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



15	31.592.153-6-615.000	PT. SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA	101,000,000
16	85.906.013-9-517.000	PT. ENERGI MITRA SEJAHTERA	24,000,000
17	74.395.117-0-422.000	PT. SUPERCHEM PRIMA LESTARI	12,096,000
18	66.307.542-2-411.000	PT. MUDAH SARANA ENERGI	30,781,818
19	82.508.785-1-453.000	PT. SEKAR DJATI SELARAS	13,381,818
20	83.771.725-5-732.000	MULIA BERKAH MAHABBAH	15,454,546
JUMLAH			3,907,662,803

PT LAKSANA MEKAR SENTOSA Tahun 2018

NO.	NPWP PENGGUNA	NAMA WAJIB PAJAK PENGGUNA	NILAI PPN
1	74.775.446-3-112.000	PT. PETRO ANDHARA ARTHA	212,264,000
2	03.329.209.5-419.000	PT. LAROS PETROLEUM	360,000,000
3	72.685.744-4-721.000	CIPTA SARANA SINERGI	316,000,000
4	81.038.974-2-734.000	BERSUJUD BARA BESI	109,454,548
5	71.133.372.4-731.000	PT. ADRIAN JAYA MANDIRI	45,980,000
6	82.952.175-6-401.000	BENDI NASHA NIAGA INDUSTRI	98,944,000
JUMLAH			1,142,642,548

- Bahwa SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI, bersama-sama dengan timnya Terdakwa SUNARKO alias YUSUF SUPENDI alias MAHPUT juga berperan sebagai pihak lain atau orang yang turut serta dengan HENDRIK ABDUL ROHMAN alias HENDRIK ABD ROHMAN alias HENDRIK dalam menerbitkan Faktur Pajak TBTS sebagai

Halaman 176 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



perantara, yaitu dengan cara membeli Faktur Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya atau Faktur Pajak TBTS dibeli dari HENDRIK ABDUL ROHMAN alias HENDRIK SUTISNA dan dari ARIS SUDIRMAN, yaitu dari perusahaan penerbit sebagai berikut:

- PT ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA (didirikan oleh HENDRIK ABDUL ROHMAN alias HENDRIK SUTISNA dan Haji ARIS alias ARIS SUDIRMAN).
- PT PUSPA INDAH KARYA (didirikan oleh Haji ARIS alias ARIS SUDIRMAN).

Adapun Faktur Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya atau Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan PT. ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA dan PT. PUSPA INDAH KARYA yang dijumlahkan oleh SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI bersama-sama dengan timnya termasuk Terdakwa SUNARKO alias YUSUF SUPENDI alias MAHPUT dengan rincian adalah sebagai berikut:

- Faktur Pajak yang diterbitkan melalui PT ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA, dimana SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI bersama-sama dengan timnya termasuk Terdakwa SUNARKO alias YUSUF SUPENDI alias MAHPUT bertindak sebagai perantara atau sales sejak bulan Agustus s/d Oktober 2018 sebagai berikut:

PT ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA

NO.	WAJIB PAJAK PENGGUNA	NPWP PENGGUNA	NOMOR FAKTUR PAJAK	TGL FAKTUR	PPN PENERBIT
1	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	0100051831618800	22-Agu-18	57,317,500
2	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	0100051831618801	22-Agu-18	51,157,909
3	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	0100051831618802	23-Agu-18	52,325,000
4	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	0100051831618803	24-Agu-18	54,525,000
5	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	0100051831618804	25-Agu-18	58,000,000
6	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	0100051831618805	25-Agu-18	52,900,000
7	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	0100051831618806	27-Agu-18	53,500,000
8	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	0100051831618807	28-Agu-18	51,725,000

Halaman 177 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	0100051831618808	29-Agu-18	53,850,000
10	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	0100051831618809	30-Agu-18	59,750,000
11	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	0100051831618810	31-Agu-18	58,300,000
12	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	0100051864277273	25-Sep-18	38,750,000
13	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	0100051864277274	26-Sep-18	32,212,767
14	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	0100051864277275	27-Sep-18	42,550,000
15	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	0100051864277276	28-Sep-18	42,037,500
16	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	0100051864277277	29-Sep-18	39,750,000
17	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	0100051864277278	24-Sep-18	37,000,000
	PHILIA CITRA SEJAHTERA Total				835,650,676
18	MULTITALLY INDONESIA	025936881027000	0100051831618811	22-Agu-18	54,950,000
19	MULTITALLY INDONESIA	025936881027000	0100051831618812	23-Agu-18	58,850,000
20	MULTITALLY INDONESIA	025936881027000	0100051831618813	24-Agu-18	51,508,172
21	MULTITALLY INDONESIA	025936881027000	0100051831618814	25-Agu-18	56,250,000
22	MULTITALLY INDONESIA	025936881027000	0100051831618815	27-Agu-18	54,500,000
23	MULTITALLY INDONESIA	025936881027000	0100051831618816	28-Agu-18	56,000,000
24	MULTITALLY INDONESIA	025936881027000	0100051831618817	29-Agu-18	54,600,000
25	MULTITALLY INDONESIA	025936881027000	0100051831618818	31-Agu-18	55,000,000
26	MULTITALLY INDONESIA	025936881027000	0100051864277268	24-Sep-18	51,350,000
27	MULTITALLY INDONESIA	025936881027000	0100051864277269	25-Sep-18	49,981,460
28	MULTITALLY INDONESIA	025936881027000	0100051864277270	26-Sep-18	50,125,000
29	MULTITALLY INDONESIA	025936881027000	0100051864277271	27-Sep-18	49,625,000
30	MULTITALLY INDONESIA	025936881027000	0100051864277272	28-Sep-18	52,125,000

Halaman 178 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



				18	
31	MULTITALLY INDONESIA	025936881027000	0100051889448056	15-Okt-18	46,450,000
32	MULTITALLY INDONESIA	025936881027000	0100051889448057	17-Okt-18	46,119,994
33	MULTITALLY INDONESIA	025936881027000	0100051889448058	19-Okt-18	44,000,000
34	MULTITALLY INDONESIA	025936881027000	0100051889448059	22-Okt-18	42,600,000
35	MULTITALLY INDONESIA	025936881027000	0100051889448060	24-Okt-18	45,000,000
	MULTITALLY INDONESIA Total				919,034,626
	Grand Total				1,754,685,302

- b. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT PUSPA INDAH KARYA, dimana SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI bersama-sama dengan timnya termasuk Terdakwa SUNARKO alias YUSUF SUPENDI alias MAHPUT bertindak sebagai perantara atau sales sejak bulan Maret s/d Mei 2019;

PT PUSPA INDAH KARYA

NO.	WAJIB PAJAK PENGGUNA	NPWP PENGGUNA	NOMOR FAKTUR PAJAK	TGL FAKTUR	PPN PENERBIT
1	MITRA CENTRAL NIAGA	724131388624000	0100031936540924	12-Mar-19	74,000,000
2	MITRA CENTRAL NIAGA	724131388624000	0100031936540925	13-Mar-19	74,000,000
3	MITRA CENTRAL NIAGA	724131388624000	0100031936540926	14-Mar-19	74,000,000
4	MITRA CENTRAL NIAGA	724131388624000	0100031936540927	15-Mar-19	37,000,000
5	MITRA CENTRAL NIAGA	724131388624000	0100031936541997	01-Apr-19	71,000,000
6	MITRA CENTRAL NIAGA	724131388624000	0100031936541999	05-Apr-19	71,000,000
7	MITRA CENTRAL NIAGA	724131388624000	0100031936542000	09-Apr-19	71,000,000
8	MITRA CENTRAL NIAGA	724131388624000	0100031936542001	15-Apr-19	71,000,000
	MITRA CENTRAL NIAGA Total				543,000,000
1	ANGKASA KARYA ENERGI	829224385505000	0100031936540922	19-Feb-19	34,440,000
2	ANGKASA KARYA ENERGI	829224385505000	0100041907282650	06-Mei-19	63,291,000
	ANGKASA KARYA ENERGI Total				97,731,000
	Grand Total				640,731,000

- Bahwa perbuatan menerbitkan Faktur pajak TBTS baik yang yang diterbitkan /dijual yang dilakukan Terdakwa SUNARKO alias MAHPUT bersama-samadengan saksi SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI, , saksi, saksi DENI SUHERMAN alias OBAY, saksi

Halaman 179 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



ELAN SUHERLAN Als. ELAN dan DAVIS , begitu juga para perantarayaitusaksiLUKMANUL HAKIM, saksi AGUS SUPRIYANTO, saksi SANSAN SURYANA , saksi RR.CANDRA W. YUNARTIAS.(masing-masing diproses hukum dalam berkas perkara terpisah),dengan menggunakan perusahaan PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA; PT GAMINDOTAMA PERKASA; PT SINAR ARTNO ASIA; PT BIMA BUMI MANDIRI; PT GEMA PULAU INTAN; PT CAKRA ABDI CEMERLANG; PT LAKSANA MEKAR SENTOSA, PT ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA; dan PT PUSPA INDAH KARYA , yang telah dijual oleh para perantara dan telah digunakan oleh para pengguna adalah merupakan *Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (Faktur Pajak TBTS)* karena tidak ada transaksi dan pembayaran yang menyertainya atau dengan kata lain hanya jual beli PPN saja.

- Bahwa dalam melakukan perbuatan penerbitan Faktur Pajak TBTS oleh Terdakwa SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT bersama-sama dengan SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI saksi DENI SUHERMAN alias OBAY, saksi SUHERLAN alias ELAN alias EKI, dimana disepakati pembagian komisi atau keuntungan sebagai berikut:
 - e. Saksi SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI mendapatkan komisi sekurang-kurangnya sebesar selisih dari harga jual Faktur Pajak TBTS dikurangi dengan bagian atau jatah milik saksi DENI SUHERMAN alias OBAY dan saksi SUHERLAN alias ELAN dan Terdakwa SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT;
 - f. Saksi DENI SUHERMAN alias OBAY, mendapatkan komisi atau keuntungan sekurang-kurangnya sebesar 1% s.d. 2% dari nilai PPN dalam Faktur Pajak, untuk setiap Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan;
 - g. Saksi SUHERLAN alias ELAN alias EKI, mendapatkan komisi atau keuntungan sekurang-kurangnya sebesar sebagai berikut:
 - 3) sebesar 1,5% dari nilai PPN dalam Faktur Pajak atas tugas menginput atau mengupload Faktur Pajak; dan/atau
 - 4) sebesar 1,5% dari nilai PPN dalam Faktur Pajak atas penerbitan Faktur Pajak TBTS melalui PT BIMA BUMI MANDIRI, untuk setiap Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan;
 - h. Terdakwa SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT, mendapatkan komisi atau keuntungan sekurang-kurangnya sebesar sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Sebesar 0,5% dari nilai PPN dalam Faktur Pajak, untuk setiap Faktur Pajak TBTS yang diterbitkan; dan
 - 5) sebesar 0,5% s.d. 1% dari uang yang masuk di rekening, sebagai komisi atas jasa peminjaman rekening milik Terdakwa SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT, yang digunakan untuk menampung uang hasil penjualan Faktur Pajak TBTS, yaitu di rekening Bank BCA, Nomor Rekening: 2721774599, atas nama SUNARKO dan rekening Bank BCA, atas nama YUSUP SUPENDI; dan
 - 6) sebesar 1,5% s.d 2% dari nilai PPN dalam Faktur Pajak atas peran Terdakwa SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT sebagai Direktur Utama perusahaan di PT CAKRA ABDI CEMERLANG (menggunakan nama MAHPUT) dan PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA (menggunakan nama YUSUP SUPENDI).
- Bahwa atas penerbitan Faktur Pajak TBTS, yaitu atas proses jual beli Faktur Pajak TBTS antarasaksi SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI dengan para perantara atau sales Faktur Pajak TBTS, cara pembayaran atas jual beli Faktur Pajak TBTS tersebut dilakukan dengan rangkaian sebagai berikut:
- d) Para perusahaan pengguna (pembeli Faktur Pajak TBTS) akan mentransfer atau membayar secara cash (tunai) kepada para perantara atau sales Faktur Pajak TBTS;
 - e) Kemudian setelah para perantara atau sales Faktur Pajak TBTS mengambil keuntungan (fee) bagian mereka masing-masing, maka para perantara atau sales Faktur Pajak TBTS ini akan membayar atau menyerahkan uang penjualan Faktur Pajak TBTS kepada saksi SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI yang dilakukan dengan cara mentransfer langsung atau menyeret tunai ke rekening yang diberikan oleh saksi SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI, yaitu ke rekening atas nama sebagai berikut:
- 1) Rekening atas nama Terdakwa SUNARKO, di Bank BCA, nomor rekening: 2721774599; dan
 - 2) Rekening atas nama saksi YUSUP SUPENDI (SUNARKO) di Bank BCA, nomor rekening: 4140348398; dan
 - 3) Rekening atas nama saksi DENI SUHERMAN, di Bank BCA, nomor rekening: 3760377367; dan/atau

Halaman 181 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Rekening atas nama saksi SUHAERI, di Bank BCA, nomor rekening: 2831675472; dan/atau
- 5) Rekening atas nama SEPI MUHARAM, di Bank Mandiri, nomor rekening: 1310011580000; atas nama SEPI MUHARAM
- f) Kemudian setelah uang hasil penjualan Faktur Pajak TBTS yang merupakan satu rangkaian dari penerbitan Faktur Pajak TBTS tersebut masuk di beberapa rekening tersebut, maka saksi SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI kemudian melakukan penarikan atau pentransferan ke rekening milik saksi SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI sendiri, yaitu di Bank BCA, Nomor Rekening: 03760484716 atas nama saksi SEPI MUHARAM. Hal mana dilakukan oleh saksi SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI untuk menghindari adanya kecurigaan dari pihak Bank dan untuk menghindari adanya pelacakan dan penghindaran pengenaan pajak dan sebagai penanggung jawab pidana atas kasus penerbitan Faktur Pajak TBTS ini.
- Bahwa kemudian, setelah adanya uang masuk dari hasil penjualan Faktur Pajak TBTS yang merupakan satu kesatuan dari rangkaian proses penerbitan Faktur Pajak TBTS, saksi SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI kemudian membagi hasil uang penerbitan Faktur Pajak TBTS ini, kepada pihak-pihak yang turut serta dalam proses penerbitan Faktur Pajak TBTS, yaitu kepada saksi DENI SUHERMAN alias OBAY, saksi SUHERLAN alias ELAN alias EKI, dan saksi SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT, yaitu dengan cara sebagai berikut:
- d. Untuk komisi atau keuntungan milik DENI SUHERMAN alias OBAY, diberikan dalam bentuk cash tunai atau ditransfer ke rekening Bank BCA, Nomor Rekening: 3760377367, atas nama DENI SUHERMAN;
- e. Untuk komisi atau keuntungan milik SUHERLAN alias ELAN alias EKI, diberikan dalam bentuk cash tunai atau transfer ke rekening Bank BCA, Nomor Rekening: 2831583284, atas nama SUHERLAN; dan
- f. Untuk komisi atau keuntungan milik Terdakwa SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT, diberikan dalam bentuk cash tunai;
- Bahwa Terdakwa SUNARKO alias MAHPUT bersama-sama dengan SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI, saksi DENI SUHERMAN alias OBAY, saksi ELAN SUHERLAN Als. ELAN dan DAVIS

Halaman 182 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



begitu juga para perantara yaitu saksi LUKMANUL HAKIM, saksi AGUS SUPRIYANTO, saksi SANSAN SURYANA, saksi RR.CANDRA W. YUNARTIAS (masing-masing diproses hukum dalam berkas perkara terpisah), dalam melakukan penerbitan dan penjualan Faktur Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (Faktur TBTS) yang telah digunakan oleh Perusahaan para pengguna tersebut dilakukan secara berturut-turut sebagai perbuatan yang diteruskan yang dimulai pada bulan Agustus 2017 sampai dengan sekitar Mei 2019 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2017 dan 2019, bertempat antara lain di alamat perusahaan yaitu diantaranya di alamat perusahaan yaitu di Jl. Ujung Harapan, RT.06/RW.02, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi,

- Bahwa perbuatan Terdakwa SUNARKO alias MAHPUT bersama-sama dengan SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI, yaitu sebagai berikut:

11. Mendirikan dan membeli perusahaan dengan tujuan untuk menerbitkan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (Faktur TBTS) ;
12. Bahwa Terdakwa SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT diminta bantuannya oleh saksi SEPI MUHARAM dalam proses pendirian perusahaan, yang kemudian menjadikan Terdakwa SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT untuk menduduki jabatan sebagai Direktur Utama di PT CAKRA ABDI CEMERLANG, dengan menggunakan KTP atas nama MAHPUT
13. Mengadakan kesepakatan dan bekerjasama dengan saksi DENI SUHERMAN alias OBAY, saksi SUHERLAN alias ELAN alias EKI, dan Terdakwa SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT untuk bersama-sama, turut serta dalam proses penerbitan Faktur Pajak TBTS;
14. Menerima pesanan Faktur Pajak TBTS dari para perantara atau sales Faktur Pajak TBTS;
15. Meminta bantuan kepada saksi SUHERLAN alias ELAN untuk membuat/mengupload dan/atau menerbitkan Faktur Pajak TBTS, serta menerima Faktur Pajak TBTS yang telah dibuat/diupload oleh SUHERLAN alias ELAN;
16. Meminta bantuan kepada saksi DENI SUHERMAN alias OBAY untuk membuat invoice sebagai dokumen pelengkap dari Faktur Pajak TBTS;
17. Mengirim atau menyerahkan Faktur Pajak TBTS kepada para perantara atau sales Faktur Pajak TBTS;



18. Menerima pembayaran atas penerbitan dan/atau penjualan Faktur Pajak TBTS;

19. Sengaja menggunakan banyak rekening yang digunakan sebagai rekening penampungan uang hasil penjualan Faktur Pajak TBTS yang merupakan rangkaian dari menerbitkan Faktur Pajak TBTS;

20. Membagi uang keuntungan hasil penjualan Faktur Pajak TBTS; dan

- Menikmati keuntungan atas penerbitan dan/atau penjualan Faktur Pajak TBTS tersebut;

Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT bersama sama dengan SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI juga dengan para perantara dan para sales Faktur Pajak TBTS berupa menerbitkan maupun menjual-belian Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya (Faktur Pajak TBTS) telah menimbulkan Kerugian pada Pendapatan Negara dari Sektor Perpajakan yaitu sekurang-kurangnya sebesar Faktur Pajak TBTS yang telah diterbitkan dan/atau dijual melalui setidaknya perusahaan PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA; PT GAMINDOTAMA PERKASA; PT SINAR ARTNO ASIA; PT BIMA BUMI MANDIRI; PT GEMA PULAU INTAN; PT CAKRA ABDI CEMERLANG; PT LAKSANA MEKAR SENTOSA, PT ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA; dan PT PUSPA INDAH KARYA, yaitu sekurang-kurangnya sebesar Rp 31.172.283.560,- (tiga puluh satu milyar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA WP PENERBIT	PPN (Rp)
1	PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA	5.684.841.222
2	PT GAMINDOTAMA PERKASA	2.168.301.789
3	PT SINAR ARTNO ASIA	3.695.973.436
4	PT BIMA BUMI MANDIRI	6.634.051.622
5	PT GEMA PULAU INTAN	5.543.393.838
6	PT CAKRA ABDI CEMERLANG	3.907.662.803
7	PT LAKSANA MEKAR SENTOSA	1.142.642.548
8	PT ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA	1.754.685.302
9	PT PUSPA INDAH KARYA	640.731.000
JUMLAH PPN		31.172.283.560



Menimbang bahwa oleh karena menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya adalah merupakan salah satu sub unsur dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini juga telah terpenuhi secara keseluruhan ;

Ad. 3. Sebagai wakil kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal tersebut mengisyaratkan bahwa yang bisa dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan tidak terbatas pada Wajib Pajak, Wakil Wajib Pajak, Kuasa Wajib Pajak, Pegawai Wajib Pajak, Akuntan Publik, Konsultan Pajak, atau Pihak Lain tetapi juga terhadap mereka yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal tersebut dapatlah dikatakan tentang siapa saja orang yang dapat dikatakan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dan apakah Terdakwa dalam hal ini masuk kedalam salah satu kategori dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan diatas dimana Bahwa perbuatan Terdakwa SUNARKO alias MAHPUT Alias YUSUF SUPENDI Alias IWAN SETIAWAN bersama-sama dengan SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI, DENI SUHERMAN alias OBAY, dan ELAN SUHERLAN Als. ELAN begitu juga para perantara LUKMANUL HAKIM, AGUS SUPRIYANTO, SANSAN SURYANA, RR.CANDRA W. YUNARTIAS (masing-masing diproses hukum dalam berkas perkara terpisah), yaitu sebagai berikut:

1. Mendirikan dan membeli perusahaan dengan tujuan untuk menerbitkan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (Faktur TBTS) ;
2. Bahwa Terdakwa SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT diminta bantuannya oleh saksi SEPI MUHARAM dalam proses pendirian perusahaan, yang kemudian menjadikan Terdakwa SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT untuk menduduki jabatan sebagai Direktur Utama di PT CAKRA ABDI CEMERLANG, dengan menggunakan KTP atas nama MAHPUT
3. Mengadakan kesepakatan dan bekerjasama dengan saksi DENI SUHERMAN alias OBAY, saksi SUHERLAN alias ELAN alias EKI, dan

Halaman 185 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT untuk bersama-sama, turut serta dalam proses penerbitan Faktur Pajak TBTS;

4. Menerima pesanan Faktur Pajak TBTS dari para perantara atau sales Faktur Pajak TBTS;
5. Meminta bantuan kepada saksi SUHERLAN alias ELAN untuk membuat/mengupload dan/atau menerbitkan Faktur Pajak TBTS, serta menerima Faktur Pajak TBTS yang telah dibuat/diupload oleh SUHERLAN alias ELAN;
6. Meminta bantuan kepada saksi DENI SUHERMAN alias OBAY untuk membuat invoice sebagai dokumen pelengkap dari Faktur Pajak TBTS;
7. Mengirim atau menyerahkan Faktur Pajak TBTS kepada para perantara atau sales Faktur Pajak TBTS;
8. Menerima pembayaran atas penerbitan dan/atau penjualan Faktur Pajak TBTS;
9. Sengaja menggunakan banyak rekening yang digunakan sebagai rekening penampungan uang hasil penjualan Faktur Pajak TBTS yang merupakan rangkaian dari menerbitkan Faktur Pajak TBTS;
10. Membagi uang keuntungan hasil penjualan Faktur Pajak TBTS;
11. Menikmati keuntungan atas penerbitan dan/atau penjualan Faktur Pajak TBTS tersebut;

Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa SUNARKO alias YUSUP SUPENDI alias MAHPUT bersama sama dengan SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI juga dengan para perantara dan para sales Faktur Pajak TBTS berupa menerbitkan maupun menjual-belian Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya (Faktur Pajak TBTS) telah menimbulkan Kerugian pada Pendapatan Negara dari Sektor Perpajakan yaitu sekurang-kurangnya sebesar Faktur Pajak TBTS yang telah diterbitkan dan/atau dijual melalui setidaknya-tidaknya perusahaan PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA; PT GAMINDOTAMA PERKASA; PT SINAR ARTNO ASIA; PT BIMA BUMI MANDIRI; PT GEMA PULAU INTAN; PT CAKRA ABDI CEMERLANG; PT LAKSANA MEKAR SENTOSA, PT ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA; dan PT PUSPA INDAH KARYA, yaitu sekurang-kurangnya sebesar Rp 31.172.283.560,- (tiga puluh satu milyar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian tersebut jelas bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak bertindak secara sendiri akan tetapi ada beberapa

Halaman 186 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lainnya yang seharusnya ikut terlibat dalam tindak pidana ini baik itu sebagai perantara, maupun para pembantu Terdakwa yang juga jika dihubungkan dari fakta fakta selain para perantara dan para pembantu yang ikut andil sehingga terbitnya faktur pajak yang tidak berdasarkan dengan transaksi yang sebenarnya sehingga berpotensi merugikan keuangan negara, bahkan hal tersebut jika mengutip keterangan ahli di persidangan tentang pembetulan atas faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya oleh para PKP pengguna terlepas masalah adanya kerugian negara yang secara nyata berkurang karena pembetulan tersebut namun tidak mempengaruhi ancaman pidana dalam pasal 39 A tentang ketentuan umum tatacara perpajakan beserta undang undang penggantinya, sehingga dengan demikian peran para pengguna faktur pajak yang tidak berdasarkan dengan transaksi yang sebenarnya walaupun sudah dilakukan pembetulan tetap berpotensi sebagai orang yang turut melakukan ataupun orang yang menyuruh melakukan tindak pidana perpajakan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini juga telah terpenuhi ;

Ad. 4. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan diatas dimana Terdakwa SUNARKO alias MAHPUT Alias YUSUF SUPENDI Alias IWAN SETIAWAN bersama-sama dengan SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI, DENI SUHERMAN alias OBAY, dan ELAN SUHERLAN Als. ELAN begitu juga para perantara LUKMANUL HAKIM, AGUS SUPRIYANTO, SANSAN SURYANA , RR.CANDRA W. YUNARTIAS (masing-masing diproses hukum dalam berkas perkara terpisah), dalam melakukan penerbitan dan penjualan Faktur Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (Faktur TBTS) yang telah digunakan oleh Perusahaan para pengguna tersebut dilakukan secara berturut-turut sebagai perbuatan yang diteruskan yang dimulai pada bulan Agustus 2017 sampai dengan sekitar Mei 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2017 dan 2019, bertempat antara lain di alamat perusahaan yaitu diantaranya di alamat perusahaan yaitu di Jl. Ujung Harapan , RT.06/RW.02, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, Bahwa perbuatan Terdakwa bersama sama dengan saksi SEPI MUHARAM alias REFI SEBASTIAN alias REFFI alias BUDI alias CEPI dan para perantara dan para sales Faktur Pajak TBTS berupa menerbitkan maupun menjual-belian Faktur

Halaman 187 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya (Faktur Pajak TBTS) telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor perpajakan yaitu sekurang-kurangnya sebesar Faktur Pajak TBTS yang telah diterbitkan dan/atau dijual melalui setidaknya-tidaknya perusahaan PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA; PT GAMINDOTAMA PERKASA; PT SINAR ARTNO ASIA; PT BIMA BUMI MANDIRI; PT GEMA PULAU INTAN; PT CAKRA ABDI CEMERLANG; PT LAKSANA MEKAR SENTOSA, PT ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA; dan PT PUSPA INDAH KARYA, yaitu sekurang-kurangnya sebesar Rp 31.172.283.560,- (tiga puluh satu milyar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA tahun 2017;

NO.	WAJIB PAJAK PENGGUNA	NPWP PENGGUNA	TOTAL
1	ADITYA ARYAPRAWIRA	013703558048000	623,300,000
2	AGUNG WIJAYA PUTRA	015951288517000	19,169,000
3	ARSA MEGA ENERGI	706663937734000	100,600,978
4	BAYU PATRA ENERGY	669067332503000	53,338,636
5	CV. AGUNG WIJAYA PUTRA	015951288517000	20,036,364
6	DINAR PUTRA MANDIRI	022929459009000	1,409,811,150
7	FAUZAN PUTRA PERKASA	211230909443000	5,744,800
8	GANANI INDONESIA PETROLEUM ENERGI	315121251416000	1,052,028,000
9	GAPURA OCEAN LINE PALABUHANRATU	751202078405000	5,968,000
10	JAYA ENERGI PRIMA	033519224047000	120,413,300
11	KARIMATA ENERGI PERSADA	712064757012000	495,690,000
12	MAULANA SAMUDERA GEMILANG	315600361401000	101,460,000
13	MITRA SARANA SEJATI	711473793307000	122,000,000
14	OCEAN PETRO ENERGY	028697829012000	1,031,142,500
15	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	518,170,494
16	SUMBER KETAPANG MAKMUR ABADI	710542721703000	5,968,000
	TOTAL		5,684,841,222

PT GAMINDOTAMA PERKASA tahun 2017;

NO.	WAJIB PAJAK PENGGUNA	NPWP PENGGUNA	Total
1	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	1,038,892,321
2	HARINCO KARYA SEJAHTERA	025808890432000	477,088,849
3	DUA SAHABAT BAJA	028999704031000	101,673,022
4	ELECOMINDO JAYAPRATAMA	015656713036000	40,240,000

Halaman 188 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	MULTITALLY INDONESIA	025936881027000	510,407,597
			2,168,301,789

PT SINAR ARTNO ASIA Tahun 2018;

NO.	WAJIB PAJAK PENGGUNA	NPWP PENGGUNA	Total
1	ANUGRAH ABADI BARU	025665142027000	100,000,000
2	CATUR MANUNGAL JAYA AGUNG	024020638504000	156,545,340
3	CV. SURYA MITRA BUANA	022675136445000	201,096,733
4	DINAR PUTRA MANDIRI	022929459009000	335,104,000
5	INDAH TIGA SAUDARA	313153942445000	226,636,361
6	MECHATAMA SINAR MULIA	734594930503000	531,929,091
7	OCEAN PETRO ENERGY	028697829012000	509,089,000
8	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	1,635,572,911
			3,695,973,436

PT BIMA BUMI MANDIRI tahun 2018;

No.	WAJIB PAJAK PENGGUNA	NPWP PENGGUNA	PPN
1	AGUNG WIJAYA PUTRA	015951288517000	30,400,000
2	ALISHA KARUNIA PERDANA	769926726721000	866,000,000
3	ANGKASA KARYA ENERGI	829224385505000	160,288,000
4	ANUGRAH FASHA SAKTI	832690010728000	80,550,000
5	ANUGRAH SEJAHTERA SENTOSA	315681775613000	520,875,000
6	BAYU PATRA ENERGY	669067332503000	192,163,636
7	BUMI GATAH PERMAI	863521100728000	3,936,170
8	CAHAYA UTAMA BERLIAN	750425977307000	284,475,000
9	CATUR MUKTI	013208657017000	129,381,818
10	ENERGI MITRA SEJAHTERA	859060139517000	30,400,000
11	INDAH TIGA SAUDARA	313153942445000	198,254,544
12	LAROS PETROLEUM	033292095419000	630,345,455
13	MANGGALA SURYA ENERGI	833190614005000	17,400,000
14	MUDAH SARANA ENERGI	663075422411000	12,000,000
15	SARANA	032867020733000	155,632,000
16	SENDANG AGUNG MANDIRI	858072739517000	24,000,000
17	SINAR BACAN KHATULISTIWA	312479538607000	900,449,999
18	VIAN RAMA PRATAMA	017972274016000	67,000,000
			6,634,051,622

PT GEMA PULAU INTAN Tahun 2018;

Halaman 189 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	NPWP PENGGUNA	NAMA WAJIB PAJAK PENGGUNA	NILAI PPN
1	02.869.782-9-012.000	PT. OCEAN PETRO ENERGY	558,500,000
2	31.315.394-2-445.000	PT. INDAH TIGA SAUDARA	266,618,181
3	66.906.733-2-503.000	PT. BAYU PATRA ENERGY	204,927,272
4	72.413.138-8-624.000	PT. MITRA CENTRAL NIAGA	944,640,000
5	03.001.570-5-607.000	PT. SAHABAT SETIA JAYA	588,572,000
6	74.775.446-3-112.000	PT. PETRO ANDHARA ARTHA	470,795,000
7	02.213.861-4-437.001	PT. SAMUDRA ETAM ENERGI	406,000,001
8	82.922.438-5-505.000	PT. ANGKASA KARYA ENERGI	89,929,080
9	03.286.702-0-733.000	CV. SARANA	109,464,000
10	02.489.719-1-731.000	PT. TELADAN MAKMUR JAYA	210,240,000
11	01.845.962.8-027.000	PT. LANA BUANA JAYA	136,450,000
12	02.213.861-4-437.001	PT. SAMUDRA ETAM ENERGI	325,960,000
13	83.269.001-0-728.000	PT. ANUGRAH FASHA SAKTI	191,800,000
14	75.042.597-7-307.000	PT. CAHAYA UTAMA BERLIAN	15,870,000
15	02.342.945-9-734.000	PT. PELITA PETROLIUM INDOASIA	258,400,000
16	84.095.119-8-446.000	PT. NAMIRA SELARAS MANDIRI	174,180,000
17	76.914.152-4-643.000	PT. WADI INTI KENCANA	93,091,200
18	76.340.343-3-951.000	PT. SINYUN KARYA ANUGRAH	74,090,909
19	86.264.543-9-517.000	PETRO MULYA ABADI	90,000,000
20	01.320.865.7-017.000	PT. CATUR MUKTI	40,909,091
21	82.803.424-9-601.000	PT. RAKHA PANCA MANDIRI	56,160,000
22	02.650.448-0-517.001	PT. YAVINDO SUMBER PERSADA	52,545,640
23	85.807.273-9-517.000	PT. SENDANG AGUNG MANDIRI	25,600,000
24	02.585.510-7-411.000	PT. PATRA ALAM RAYA	41,600,000
25	82.508.785-1-453.000	PT. SEKAR DJATI SELARAS	20,618,182
26	01.595.128.8-517.000	CV. AGUNG WIJAYA PUTRA	33,818,182
27	02.213.861-4-724.000	PT. SAMUDRA ETAM ENERGI	28,055,283
28	84.987.703-0-416.000	PT. ANDALAN PRATAMA INDONESIA	12,800,000
29	02.500.537-2-112.000	PT. IRSANI MANDIRI	11,250,000
30	03.278.613-9-012.000	PT. ALFA GRANITAMA	6,646,182
31	02.268.599-4-403.000	DWI PRIMA REZEKY	3,863,635
JUMLAH			5,543,393,838

PT CAKRA ABDI CEMERLANG tahun 2018; dan

NO.	NPWP PENGGUNA	NAMA WAJIB PAJAK PENGGUNA	NILAI PPN
-----	---------------	---------------------------	-----------

Halaman 190 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	03.329.209-5-732.002	PT. LAROS PETROLEUM	640,000,000
2	02.869.782-9-012.000	PT. OCEAN PETRO ENERGY	660,250,000
3	31.315.394-2-445.000	PT. INDAH TIGA SAUDARA	663,545,453
4	66.906.733-2-503.000	PT. BAYU PATRA ENERGY	584,999,999
5	72.413.138-8-624.000	PT. MITRA CENTRAL NIAGA	88,800,000
6	02.213.861-4-724.000	PT. SAMUDRA ETAM ENERGI	140,000,000
7	82.922.438-5-505.000	PT. ANGKASA KARYA ENERGI	170,404,740
8	03.286.702-0-733.000	CV. SARANA	273,999,000
9	84.095.119-8-446.000	PT. NAMIRA SELARAS MANDIRI	51,825,000
10	81.038.974-2-734.000	BERSUJUD BARA BESI	85,454,545
11	71.133.372-4-731.000	PT. ADRIAN JAYA MANDIRI	127,770,000
12	76.914.152-4-643.000	PT. WADI INTI KENCANA	68,363,520
13	76.340.343-3-951.000	PT. SINYUN KARYA ANUGRAH	26,136,364
14	73.498.081-6-722.000	CV. MEGAH JAYA ABADI	129,400,000
15	31.592.153-6-615.000	PT. SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA	101,000,000
16	85.906.013-9-517.000	PT. ENERGI MITRA SEJAHTERA	24,000,000
17	74.395.117-0-422.000	PT. SUPERCHEM PRIMA LESTARI	12,096,000
18	66.307.542-2-411.000	PT. MUDAH SARANA ENERGI	30,781,818
19	82.508.785-1-453.000	PT. SEKAR DJATI SELARAS	13,381,818
20	83.771.725-5-732.000	MULIA BERKAH MAHABBAH	15,454,546
		JUMLAH	3,907,662,803

PT LAKSANA MEKAR SENTOSA Tahun 2018

NO.	NPWP PENGGUNA	NAMA WAJIB PAJAK PENGGUNA	NILAI PPN
1	74.775.446-3-112.000	PT. PETRO ANDHARA ARTHA	212,264,000
2	03.329.209-5-419.000	PT. LAROS PETROLEUM	360,000,000
3	72.685.744-4-721.000	CIPTA SARANA SINERGI	316,000,000
4	81.038.974-2-734.000	BERSUJUD BARA BESI	109,454,548
5	71.133.372-4-731.000	PT. ADRIAN JAYA MANDIRI	45,980,000
6	82.952.175-6-401.000	BENDI NASHA NIAGA INDUSTRI	98,944,000
		JUMLAH	1,142,642,548

Halaman 191 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



- V. faktur pajak TBTS yang telah dibeli oleh Terdakwa dimana Terdakwa sebagai perantara atas 2 (dua) perusahaan adalah sebagai berikut :

PT ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA

NO.	WAJIB PAJAK PENGGUNA	NPWP PENGGUNA	NOMOR FAKTUR PAJAK	TGL FAKTUR	PPN PENERBIT
1	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	0100051831618800	22-Agu-18	57,317,500
2	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	0100051831618801	22-Agu-18	51,157,909
3	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	0100051831618802	23-Agu-18	52,325,000
4	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	0100051831618803	24-Agu-18	54,525,000
5	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	0100051831618804	25-Agu-18	58,000,000
6	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	0100051831618805	25-Agu-18	52,900,000
7	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	0100051831618806	27-Agu-18	53,500,000
8	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	0100051831618807	28-Agu-18	51,725,000
9	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	0100051831618808	29-Agu-18	53,850,000
10	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	0100051831618809	30-Agu-18	59,750,000
11	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	0100051831618810	31-Agu-18	58,300,000
12	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	0100051864277273	25-Sep-18	38,750,000
13	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	0100051864277274	26-Sep-18	32,212,767
14	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	0100051864277275	27-Sep-18	42,550,000
15	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	0100051864277276	28-Sep-18	42,037,500
16	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	0100051864277277	29-Sep-18	39,750,000
17	PHILIA CITRA SEJAHTERA	018712711045000	0100051864277278	24-Sep-18	37,000,000
	PHILIA CITRA SEJAHTERA Total				835,650,676
18	MULTITALLY INDONESIA	025936881027000	0100051831618811	22-Agu-18	54,950,000
19	MULTITALLY INDONESIA	025936881027000	0100051831618812	23-Agu-	58,850,000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				18	
20	MULTITALLY INDONESIA	025936881027000	0100051831618813	24-Agu-18	51,508,172
21	MULTITALLY INDONESIA	025936881027000	0100051831618814	25-Agu-18	56,250,000
22	MULTITALLY INDONESIA	025936881027000	0100051831618815	27-Agu-18	54,500,000
23	MULTITALLY INDONESIA	025936881027000	0100051831618816	28-Agu-18	56,000,000
24	MULTITALLY INDONESIA	025936881027000	0100051831618817	29-Agu-18	54,600,000
25	MULTITALLY INDONESIA	025936881027000	0100051831618818	31-Agu-18	55,000,000
26	MULTITALLY INDONESIA	025936881027000	0100051864277268	24-Sep-18	51,350,000
27	MULTITALLY INDONESIA	025936881027000	0100051864277269	25-Sep-18	49,981,460
28	MULTITALLY INDONESIA	025936881027000	0100051864277270	26-Sep-18	50,125,000
29	MULTITALLY INDONESIA	025936881027000	0100051864277271	27-Sep-18	49,625,000
30	MULTITALLY INDONESIA	025936881027000	0100051864277272	28-Sep-18	52,125,000
31	MULTITALLY INDONESIA	025936881027000	0100051889448056	15-Okt-18	46,450,000
32	MULTITALLY INDONESIA	025936881027000	0100051889448057	17-Okt-18	46,119,994
33	MULTITALLY INDONESIA	025936881027000	0100051889448058	19-Okt-18	44,000,000
34	MULTITALLY INDONESIA	025936881027000	0100051889448059	22-Okt-18	42,600,000
35	MULTITALLY INDONESIA	025936881027000	0100051889448060	24-Okt-18	45,000,000
	MULTITALLY INDONESIA Total				919,034,626
	Grand Total				1,754,685,302

PT PUSPA INDAH KARYA

NO.	WAJIB PAJAK PENGGUNA	NPWP PENGGUNA	NOMOR FAKTUR PAJAK	TGL FAKTUR	PPN PENERBIT
1	MITRA CENTRAL NIAGA	724131388624000	0100031936540924	12-Mar-19	74,000,000
2	MITRA CENTRAL NIAGA	724131388624000	0100031936540925	13-Mar-19	74,000,000
3	MITRA CENTRAL NIAGA	724131388624000	0100031936540926	14-Mar-19	74,000,000

Halaman 193 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



4	MITRA CENTRAL NIAGA	724131388624000	0100031936540927	15-Mar-19	37,000,000
5	MITRA CENTRAL NIAGA	724131388624000	0100031936541997	01-Apr-19	71,000,000
6	MITRA CENTRAL NIAGA	724131388624000	0100031936541999	05-Apr-19	71,000,000
7	MITRA CENTRAL NIAGA	724131388624000	0100031936542000	09-Apr-19	71,000,000
8	MITRA CENTRAL NIAGA	724131388624000	0100031936542001	15-Apr-19	71,000,000
	MITRA CENTRAL NIAGA Total				543,000,000
1	ANGKASA KARYA ENERGI	829224385505000	0100031936540922	19-Feb-19	34,440,000
2	ANGKASA KARYA ENERGI	829224385505000	0100041907282650	06-Mei-19	63,291,000
	ANGKASA KARYA ENERGI Total				97,731,000
	Grand Total				640,731,000

- VI. Dengan Total faktur pajak TBTS yang telah diterbitkan oleh Terdakwa maupun yang telah dibeli oleh Terdakwa pada masa waktu Tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA WP PENERBIT	PPN (Rp)
1	PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA	5.684.841.222
2	PT GAMINDOTAMA PERKASA	2.168.301.789
3	PT SINAR ARTNO ASIA	3.695.973.436
4	PT BIMA BUMI MANDIRI	6.634.051.622
5	PT GEMA PULAU INTAN	5.543.393.838
6	PT CAKRA ABDICEMERLANG	3.907.662.803
7	PT LAKSANA MEKAR SENTOSA	1.142.642.548
8	PT ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA	1.754.685.302
9	PT PUSPA INDAH KARYA	640.731.000
JUMLAH		31.172.283.560

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian tersebut diatas jelas Terdakwa telah melakukan penerbitan faktur pajak tidak berdasarkan dengan transaksi yang sebenarnya dalam kurun waktu antara tahun 2017 sampai dengan 2019 yang antara perbuatan satu dengan yang lainnya berhubungan satu sama lain,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 39 A huruf a Jo Pasal 43 ayat (1) Undang Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2009 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG Jo Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan atau permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang hanya memohon keringan hukuman dan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat

Halaman 195 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan pidana oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda yang mana terhadap denda tersebut Penuntut Umum dalam tuntutananya juga memohon agar terhadap

Terdakwa apabila dalam waktu 1 (satu) bulan tidak membayar denda yang dijatuhkan maka terhadap harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar dendanya tersebut akan tetapi terhadap permohonan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, tidak diatur dalam undang-undang sebagaimana surat dakwaan Penuntut umum dan Penuntut Umum tidak mengajukan dasar permintaanya tersebut maka terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda dengan pidana pengganti kurungan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 196 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Kendaraan Merk Daihatsu Sigr Nopol B 2781 SYP Tahun Registrasi 2018 warna putih;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut masih dalam tanggungan jaminan Fidusia sebagaimana Surat Pemohonan Pengembalian barang bukti tertanggal 14 Januari 2020 yang diajukan oleh Onggang Napitu, SH., Radot Marulita Sihalo, SH., Louis Jauhari, SH., Hendri P. Sinaga, SH. Para Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Onggang Napitu And Partners, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 038/Pdt.ON-P/XI/2019 tertanggal 15 November 2019 untuk dan atas nama serta mewakili PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk. Serta telah melampirkan bukti Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W10.00727300.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 28-12-2018 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah DKI Jakarta dan bukti Perjanjian Pembiayaan No. 012418203265 dengan demikian bukti 1 (satu) unit Kenputih bukanlah milik Terdakwa namun masih milik PT ADIRA DINAMIKA MULTdaraan Merk Daihatsu Sigr Nopol B 2781 SYP Tahun Registrasi 2018 warna TI FINANCE, Tbk dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut umum yang mana barang bukti tersebut dirampas untuk negara dengan alasan kedudukan negara sebagai kreditur preferen namun hal tersebut menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut berlaku bagi harta milik Terdakwa, sedangkan Jaminan Fidusia juga mendapat Jaminan dari Negara, dikarenakan barang bukti tersebut disita dari Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- Fotocopy legalisir Faktur Pajak, Nomor: 010.005-18.44700973, tanggal 24 September 2018, dari PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI kepada PT SUPERCHEM PRIMA LESTARI, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy legalisir Faktur Pajak, Nomor: 010.005-18.44700974, tanggal 12 September 2018, dari PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI kepada PT SUPERCHEM PRIMA LESTARI, sebanyak 1 (satu) set;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir Faktur Pajak, Nomor: 010.003-19.19305669, tanggal 09 Januari 2019, dari PT CAKRA ABDI CEMERLANG kepada PT SUPERCHEM PRIMA LESTARI, sebanyak 1 (satu) set; dan
- Fotocopy legalisir Faktur Pajak, Nomor: 010.003-19.19305671, tanggal 14 Januari 2019, dari PT CAKRA ABDI CEMERLANG kepada PT SUPERCHEM PRIMA LESTARI, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, atas nama: PT INDAH TIGA SAUDARA, NPWP: 31315.394.2-445.000, Masa Agustus 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, atas nama: PT INDAH TIGA SAUDARA, NPWP: 31315.394.2-445.000, Masa September 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, atas nama: PT INDAH TIGA SAUDARA, NPWP: 31315.394.2-445.000, Masa Oktober 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, atas nama: PT INDAH TIGA SAUDARA, NPWP: 31315.394.2-445.000, Masa November 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, atas nama: PT INDAH TIGA SAUDARA, NPWP: 31315.394.2-445.000, Masa Desember 2018, sebanyak 1 (satu) set; dan
- Fotocopy SPT Masa PPN, atas nama: PT INDAH TIGA SAUDARA, NPWP: 31315.394.2-445.000, Masa Januari 2018, sebanyak 1 (satu) set.
- Fotocopy Faktur Pajak dari PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, NPWP: 85.147.990.7-435.000 kepada PT ANGKASA ENERGI, sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Fotocopy Faktur Pajak dari PT GEMA PULAU INTAN, NPWP: 86.122.861.7-435.000; kepada PT ANGKASA ENERGI, sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Fotocopy Faktur Pajak dari PT CAKRA ABDI CEMERLANG, NPWP: 86.122.698.3-435.000; kepada PT ANGKASA ENERGI, sebanyak 4 (empat) lembar;

Halaman 198 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Faktur Pajak dari PT BIMA BUMI MANDIRI, NPWP: 85.769.363.4-435.000; kepada PT ANGKASA ENERGI, sebanyak 4 (empat) lembar;
- Fotocopy Kwitansi, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak Nomor: 010.005-18.86729078, tanggal 10 Oktober 2018, dari PT. GEMA PULAU INTAN kepada CV. AGUNG WIJAYA PUTRA, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Kwitansi, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak Nomor: 010.006-18.36749072, tanggal 26 Desember 2018, dari PT. GEMA PULAU INTAN kepada PT. SENDANG AGUNG MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Kwitansi, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak Nomor: 010.006-18.36749073, tanggal 29 Desember 2018, dari PT. GEMA PULAU INTAN kepada PT. SENDANG AGUNG MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Kwitansi, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak Nomor: 010.005-18.76870366, tanggal 30 Desember 2018, dari PT. BIMA BUMI MANDIRI kepada PT. SENDANG AGUNG MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy legalisir SPT Masa PPN, Pembetulan ke:2, atas nama: PT MITRA CENTRAL NIAGA, NPWP: 72.413.138-8-624.000, Masa Oktober 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy legalisir SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT MITRA CENTRAL NIAGA, NPWP: 72.413.138-8-624.000, Masa Oktober 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy legalisir dokumen dari PT GEMA PULAU INTAN kepada PT MITRA CENTRAL NIAGA, sebanyak 13 (tiga belas) set;
- Fotocopy legalisir dokumen dari PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI kepada PT MITRA CENTRAL NIAGA, sebanyak 4 (empat) set;
- Fotocopy legalisir Faktur Pajak dari PT GEMA PULAU INTAN, NPWP: 86.122.861.7-435.000 kepada PT MITRA CENTRAL NIAGA, NPWP: 72.413.138-8-624.000, sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 199 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir Faktur Pajak dari PT LAKSANA MEKAR SENTOSA, NPWP: 86.443.244.8-435.000 kepada PT MITRA CENTRAL NIAGA, NPWP: 72.413.138-8-624.000, sebanyak 1 (satu) lembar;
- Fotocopy legalisir Faktur Pajak dari PT CAKRA ABDI CEMERLANG, NPWP: 86.122.698.3-435.000 kepada PT MITRA CENTRAL NIAGA, NPWP: 72.413.138-8-624.000, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy legalisir Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, dari KPP Pratama Pasuruan tanggal 27 Mei 2019, Surat Tanggapan atas Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dari PT MITRA CENTRAL NIAGA tanggal 20 Juni 2019, Surat Undangan Konseling Kewajiban Perpajakan dari KPP Pratama Pasuruan tanggal 25 Juni 2019, dan Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Kepada Wajib Pajak, tanggal 28 Juni 2019, sebanyak 1 (satu) set.
- Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa Januari 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa Februari 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa Maret 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa April 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan ke:2, atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa Mei 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan ke:2, atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa Juni 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan ke:1, atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa Juli 2018, sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 200 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa Agustus 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa September 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa Oktober 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa November 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa Desember 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT BERSUJUD BARA BESI, NPWP: 81.038.974.2-734.000, Masa Desember 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT BERSUJUD BARA BESI, NPWP: 81.038.974.2-734.000, Masa Januari 2019, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Kwitansi, Surat Jalan, Invoice, Faktur Pajak, Purchase Order, dari PT CAKRA ABDI CEMERLANG, NPWP: 86.122.698.3-435.000 kepada PT BERSUJUD BARA BESI, NPWP: 81.038.974.2-734.000, sebanyak 5 (lima) set;
- Fotocopy Kwitansi, Surat Jalan, Invoice, Faktur Pajak, Purchase Order, dari LAKSANA MEKAR SENTOSA, NPWP: 86.443.244.8-435.000 kepada PT BERSUJUD BARA BESI, NPWP: 81.038.974.2-734.000, sebanyak 8 (delapan) set;
- Fotocopy Rekening Koran, Bank Mandiri, Nomor Rekening: 0310077838384, atas nama PT BERSUJUD BARA BESI, sebanyak 1 (satu) lembar.

Halaman 201 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA, NPWP: 31.592.153.6-615.000, Masa Oktober 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan ke:1, atas nama: PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA, NPWP: 31.592.153.6-615.000, Masa Oktober 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan ke:2, atas nama: PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA, NPWP: 31.592.153.6-615.000, Masa Oktober 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Kwitansi, Invoice, Faktur Pajak Nomor: 010.005-18.86751735 tanggal 16 Oktober 2019, dari PT CAKRA ABDI CEMERLANG, NPWP: 86.122.698.3-435.000, kepada PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA, NPWP: 31.592.153.6-615.000, dan Surat Jalan, sebanyak 1 (satu) set.
- Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
- Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PT ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA, sebanyak 1 (satu) set;
- Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PT. ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
- Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PT BIMA BUMI MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
- Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PT CAKRA ABDI CEMERLANG, sebanyak 1 (satu) set;
- Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PT GEMA PULAU INTAN, sebanyak 1 (satu) set;
- Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PT LAKSANA MEKAR SENTOSA, sebanyak 1 (satu) set;
- Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, Nomor:01, tanggal 3 Agustus 2018, sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 202 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA, Nomor:03, tanggal 5 Juni 2014, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI, Nomor:02, tanggal 3 September 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BIMA BUMI MANDIRI, Nomor:07, tanggal 13 Agustus 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. CAKRA ABDI CEMERLANG, Nomor:05, tanggal 28 September 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. GEMA PULAU INTAN, Nomor:04, tanggal 24 September 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. LAKSANA MEKAR SENTOSA, Nomor:04, tanggal 6 November 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, Nomor:32, tanggal 4 Oktober 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Print out (cetakan) legalisir Data Penerbitan Faktur Pajak (PKPM) dari Wajib Pajak PT. BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, NPWP: 85.147.990.7-435.000; PT. ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA, NPWP: 70.385.005.7-435.000; PT. ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI, NPWP: 85.896.009.9-435.000; PT. BIMA BUMI MANDIRI, NPWP: 85.769.363.4-435.000; PT. CAKRA ABDI CEMERLANG, NPWP: 86.122.698.3-435.000; PT. GEMA PULAU INTAN, NPWP: 86.122.861.7-435.000; PT. LAKSANA MEKAR SENTOSA, NPWP: 86.443.244.8-435.000; PT. CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, NPWP: 86.022.824.6-435.000.
- Fotocopy Bukti Penerimaan Elektronik dan Bukti Penerimaan Negara, atas nama PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 4 (empat) set;

Halaman 203 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan ke:1, Masa November 2018, atas nama PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan ke:1, Masa Desember 2018, atas nama PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan ke:1, Masa Januari 2019, atas nama PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan ke:1, Masa Februari 2019, atas nama PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan ke:1, Masa Maret 2019, atas nama PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) set;
- Printout Faktur Pajak, Nomor: 010.005-18.86729146, tanggal 10 Desember 2018, dari PT GEMA PULAU INTAN, NPWP: 86.122.861.7-435.000 kepada PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) lembar;
- Printout Faktur Pajak, Nomor: 010.005-18.76870372, tanggal 30 Desember 2018, dari PT. BIMA BUMI MANDIRI, NPWP: 85.769.363.4-435.000 kepada PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) lembar;
- Printout Faktur Pajak, Nomor: 010.002-19.86344168, tanggal 03 Januari 2019, dari PT. BIMA BUMI MANDIRI, NPWP: 85.769.363.4-435.000 kepada PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) lembar;
- Printout Faktur Pajak, Nomor: 010.002-19.86344173, tanggal 15 Januari 2019, dari PT. BIMA BUMI MANDIRI, NPWP: 85.769.363.4-435.000 kepada PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) lembar;
- Printout Faktur Pajak, Nomor: 010.002-19.86605042, tanggal 05 Februari 2019, dari PT GEMA PULAU INTAN, NPWP: 86.122.861.7-435.000 kepada PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 204 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Printout Faktur Pajak, Nomor: 010.002-19.86344185, tanggal 02 Maret 2019, dari PT. BIMA BUMI MANDIRI, NPWP: 85.769.363.4-435.000 kepada PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) lembar;
- Printout Faktur Pajak, Nomor: 010.002-19.86344194, tanggal 03 Maret 2019, dari PT. BIMA BUMI MANDIRI, NPWP: 85.769.363.4-435.000 kepada PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) lembar;
- Fotocopy Faktur Pajak dari PT GEMA PULAU INTAN, NPWP: 86.122.861.7-435.000, sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Asli print-out PURCHASE ORDER, dari PT NURBAKA MEGAH kepada PT MULIA KARYA SINERGIA (Contact Person: Ibu CANDRA), sebanyak 5 (lima) lembar;
- Fotocopy print-out Rekening Koran PT NURBAKA MEGAH, No.rek: 1310015271796, Bank Mandiri, sebanyak 4 (empat) lembar;
- Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, Nomor:01, tanggal 3 Agustus 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA, Nomor:03, tanggal 5 Juni 2014, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI, Nomor:02, tanggal 3 September 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. CAKRA ABDI CEMERLANG, Nomor:05, tanggal 28 September 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. GEMA PULAU INTAN, Nomor:04, tanggal 24 September 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. LAKSANA MEKAR SENTOSA, Nomor:04, tanggal 6 November 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, Nomor:32, tanggal 4 Oktober 2018, sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 205 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Print out Mutasi Rekening, Bank BJB, Cabang: KCP Pemkab Bekasi, atas nama: PT CAKRA ABADI CEMERLANG, Nomor Rekening: 0090515713001, sebanyak 1 (satu) set;
- Print out Mutasi Rekening, Bank BJB, Cabang: KCP Pemkab Bekasi, atas nama: PT GEMA PULAU INTAN, Nomor Rekening: 0090539507001, sebanyak 1 (satu) set;
- Print out Mutasi Rekening, Bank BJB, Cabang: KCP Pemkab Bekasi, atas nama: BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, Nomor Rekening: 0089617529001, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Rekening Bank BRI, KCP Babelan, atas nama SUBUR A, Nomor Rekening: 079901036274533, sebanyak 1 (satu) set.
- Fotokopi Legalisir Akta Pendirian PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n MENTARI CAHAYA NUSANTARA, sebanyak 1 (satu) set;
- Printout SPT Masa PPN an PT GEMA PULAU INTAN, PT CAKRA ABADI CEMERLANG, PT ILHAMINDO PUTRA MANDIRI; PT CAHAY TIGA GEMILANG INDONESIA; PT BAHTERA SUKSEJAYA MANDIRI; PT ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA; PT BIMA BUMI MANDIRI sebanyak 7 (tujuh) set;
- Fotokopi Legalisir Akta Pendirian PT GAMINDOTAMA SUKSES, sebanyak 1 (satu) set; -
- Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PT GAMINDOTAMA SUKSES, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi Legalisir Akta Pendirian PT SINAR ARTNO ASIA, sebanyak 1 (satu) set;
- Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n SINAR ARTNO ASIA, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi Legalisir Akta Pendirian PT PUSPA INDAH KARYA, sebanyak 1 (satu) set;
- Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PT PUSPA INDAH KARYA, sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 206 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Jalan, Invoice dan Faktur Pajak dari PT GEMA PULAU INTAN kepada PT SAHABAT SETIA JAYA tanggal 215 Oktober 2018 dan 2 Oktober 2018 sebanyak 2 (dua) set;
- 2. Asli Surat Jalan, Invoice dan Faktur Pajak dari PT BIMA BUMI MANDIRI kepada PT SAHABAT SETIA JAYA tanggal 5 November 2018 sebanyak 1 (satu) set ;
- 1 (satu) set print out validasi rekening Tabungan Mandiri dengan nomor rekening 1310011580000 atas nama SEPI MUHARAM, Periode 1 Januari 2013 s.d. 1 Juni 2019;
- 1 (satu) set print out validasi rekening Tabungan Mandiri dengan nomor rekening 1310011580000 atas nama SEPI MUHARAM, Periode 1 Januari 2019 s.d. 30 Juni 2019.
- Rekening BCA nomor 03760484716 a.n. SEPI MUHARAM periode tahun 2017 s.d 2019;
- Rekening BCA 2721774599 a.n. SUNARKO periode tahun 2017 s.d 2019
- Rekening BCA 4140348398 a.n. YUSUP SUPENDI periode tahun 2017 s.d 2019;
- Rekening BCA 3760377367 a.n. DENI SUHERMAN periode tahun 2017 s.d 2019;
- Rekening BCA 02831675472 a.n. SUHAERI periode tahun 2019;
- Rekening BCA nomor 06825116153 a.n. HENDRIK ABDUL ROHMAN periode tahun 2017 s.d 2019;
- Rekening BCA nomor 02830880863 a.n. R TONY SOPIAN periode tahun 2019;
- Rekening BCA nomor 03760282641 a.n. RIDWAN TAUFAN periode tahun 2018 s.d 2019;

yang mana terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara atas nama Terdakwa Suherlan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Suherlan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat untuk menambah pendapatan negara dari sector pajak ;

Halaman 207 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 39 A huruf a Jo Pasal 43 ayat (1) Undang Undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2009 tentang PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN MENJADI UNDANG-UNDANG Jo Pasal 64 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sunarko alias Yusuf Supendi alias Mahfut alias Iwan Setiawan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**bersama sama dengan sengaja menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya secara terus menerus sebagai perbuatan berlanjut**", sebagaimana Surat Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 62.344.567.120,00,- (enam puluh dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh tujuh seratus dua puluh rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar di ganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kendaraan Merk Daihatsu Siga Nopol B 2781 SYP Tahun Registrasi 2018 warna putih;

Halaman 208 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Dikembalikan kepada Terdakwa Sunarko;

- Fotocopy legalisir Faktur Pajak, Nomor: 010.005-18.44700973, tanggal 24 September 2018, dari PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI kepada PT SUPERCHEM PRIMA LESTARI, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy legalisir Faktur Pajak, Nomor: 010.005-18.44700974, tanggal 12 September 2018, dari PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI kepada PT SUPERCHEM PRIMA LESTARI, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy legalisir Faktur Pajak, Nomor: 010.003-19.19305669, tanggal 09 Januari 2019, dari PT CAKRA ABDICEMERLANG kepada PT SUPERCHEM PRIMA LESTARI, sebanyak 1 (satu) set; dan
- Fotocopy legalisir Faktur Pajak, Nomor: 010.003-19.19305671, tanggal 14 Januari 2019, dari PT CAKRA ABDICEMERLANG kepada PT SUPERCHEM PRIMA LESTARI, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, atas nama: PT INDAH TIGA SAUDARA, NPWP: 31315.394.2-445.000, Masa Agustus 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, atas nama: PT INDAH TIGA SAUDARA, NPWP: 31315.394.2-445.000, Masa September 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, atas nama: PT INDAH TIGA SAUDARA, NPWP: 31315.394.2-445.000, Masa Oktober 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, atas nama: PT INDAH TIGA SAUDARA, NPWP: 31315.394.2-445.000, Masa November 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, atas nama: PT INDAH TIGA SAUDARA, NPWP: 31315.394.2-445.000, Masa Desember 2018, sebanyak 1 (satu) set; dan
- Fotocopy SPT Masa PPN, atas nama: PT INDAH TIGA SAUDARA, NPWP: 31315.394.2-445.000, Masa Januari 2018, sebanyak 1 (satu) set.

Halaman 209 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Faktur Pajak dari PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, NPWP: 85.147.990.7-435.000 kepada PT ANGKASA ENERGI, sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Fotocopy Faktur Pajak dari PT GEMA PULAU INTAN, NPWP: 86.122.861.7-435.000; kepada PT ANGKASA ENERGI, sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Fotocopy Faktur Pajak dari PT CAKRA ABDI CEMERLANG, NPWP: 86.122.698.3-435.000; kepada PT ANGKASA ENERGI, sebanyak 4 (empat) lembar;
- Fotocopy Faktur Pajak dari PT BIMA BUMI MANDIRI, NPWP: 85.769.363.4-435.000; kepada PT ANGKASA ENERGI, sebanyak 4 (empat) lembar;
- Fotocopy Kwitansi, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak Nomor: 010.005-18.86729078, tanggal 10 Oktober 2018, dari PT. GEMA PULAU INTAN kepada CV. AGUNG WIJAYA PUTRA, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Kwitansi, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak Nomor: 010.006-18.36749072, tanggal 26 Desember 2018, dari PT. GEMA PULAU INTAN kepada PT. SENDANG AGUNG MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Kwitansi, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak Nomor: 010.006-18.36749073, tanggal 29 Desember 2018, dari PT. GEMA PULAU INTAN kepada PT. SENDANG AGUNG MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Kwitansi, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak Nomor: 010.005-18.76870366, tanggal 30 Desember 2018, dari PT. BIMA BUMI MANDIRI kepada PT. SENDANG AGUNG MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy legalisir SPT Masa PPN, Pembetulan ke:2, atas nama: PT MITRA CENTRAL NIAGA, NPWP: 72.413.138-8-624.000, Masa Oktober 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy legalisir SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT MITRA CENTRAL NIAGA, NPWP: 72.413.138-8-624.000, Masa Oktober 2018, sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 210 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy legalisir dokumen dari PT GEMA PULAU INTAN kepada PT MITRA CENTRAL NIAGA, sebanyak 13 (tiga belas) set;
- Fotocopy legalisir dokumen dari PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI kepada PT MITRA CENTRAL NIAGA, sebanyak 4 (empat) set;
- Fotocopy legalisir Faktur Pajak dari PT GEMA PULAU INTAN, NPWP: 86.122.861.7-435.000 kepada PT MITRA CENTRAL NIAGA, NPWP: 72.413.138-8-624.000, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy legalisir Faktur Pajak dari PT LAKSANA MEKAR SENTOSA, NPWP: 86.443.244.8-435.000 kepada PT MITRA CENTRAL NIAGA, NPWP: 72.413.138-8-624.000, sebanyak 1 (satu) lembar;
- Fotocopy legalisir Faktur Pajak dari PT CAKRA ABDI CEMERLANG, NPWP: 86.122.698.3-435.000 kepada PT MITRA CENTRAL NIAGA, NPWP: 72.413.138-8-624.000, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy legalisir Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, dari KPP Pratama Pasuruan tanggal 27 Mei 2019, Surat Tanggapan atas Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dari PT MITRA CENTRAL NIAGA tanggal 20 Juni 2019, Surat Undangan Konseling Kewajiban Perpajakan dari KPP Pratama Pasuruan tanggal 25 Juni 2019, dan Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan Kepada Wajib Pajak, tanggal 28 Juni 2019, sebanyak 1 (satu) set.
- Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa Januari 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa Februari 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa Maret 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa April 2018, sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 211 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan ke:2, atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa Mei 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan ke:2, atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa Juni 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan ke:1, atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa Juli 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa Agustus 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa September 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa Oktober 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa November 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT BAYU PATRA ENERGY, NPWP: 66.906.733.2-503.000, Masa Desember 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT BERSUJUD BARA BESI, NPWP: 81.038.974.2-734.000, Masa Desember 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT BERSUJUD BARA BESI, NPWP: 81.038.974.2-734.000, Masa Januari 2019, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Kwitansi, Surat Jalan, Invoice, Faktur Pajak, Purchase Order, dari PT CAKRA ABDI CEMERLANG, NPWP: 86.122.698.3-435.000 kepada PT BERSUJUD BARA BESI, NPWP: 81.038.974.2-734.000, sebanyak 5 (lima) set;

Halaman 212 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Kwitansi, Surat Jalan, Invoice, Faktur Pajak, Purchase Order, dari LAKSANA MEKAR SENTOSA, NPWP: 86.443.244.8-435.000 kepada PT BERSUJUD BARA BESI, NPWP: 81.038.974.2-734.000, sebanyak 8 (delapan) set;
- Fotocopy Rekening Koran, Bank Mandiri, Nomor Rekening: 0310077838384, atas nama PT BERSUJUD BARA BESI, sebanyak 1 (satu) lembar.
- Fotocopy SPT Masa PPN, Normal (Pembetulan ke:0), atas nama: PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA, NPWP: 31.592.153.6-615.000, Masa Oktober 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan ke:1, atas nama: PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA, NPWP: 31.592.153.6-615.000, Masa Oktober 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan ke:2, atas nama: PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA, NPWP: 31.592.153.6-615.000, Masa Oktober 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Kwitansi, Invoice, Faktur Pajak Nomor: 010.005-18.86751735 tanggal 16 Oktober 2019, dari PT CAKRA ABDI CEMERLANG, NPWP: 86.122.698.3-435.000, kepada PT SINAR ABADI PETROLINDO SEJAHTERA, NPWP: 31.592.153.6-615.000, dan Surat Jalan, sebanyak 1 (satu) set.
- Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
- Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PT ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA, sebanyak 1 (satu) set;
- Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PT. ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
- Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PT BIMA BUMI MANDIRI, sebanyak 1 (satu) set;
- Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PT CAKRA ABDI CEMERLANG, sebanyak 1 (satu) set;
- Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PT GEMA PULAU INTAN, sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 213 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PT LAKSANA MEKAR SENTOSA, sebanyak 1 (satu) set;
- Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, Nomor:01, tanggal 3 Agustus 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA, Nomor:03, tanggal 5 Juni 2014, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI, Nomor:02, tanggal 3 September 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BIMA BUMI MANDIRI, Nomor:07, tanggal 13 Agustus 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. CAKRA ABDI CEMERLANG, Nomor:05, tanggal 28 September 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. GEMA PULAU INTAN, Nomor:04, tanggal 24 September 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. LAKSANA MEKAR SENTOSA, Nomor:04, tanggal 6 November 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, Nomor:32, tanggal 4 Oktober 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Print out (cetakan) legalisir Data Penerbitan Faktur Pajak (PKPM) dari Wajib Pajak PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, NPWP: 85.147.990.7-435.000; PT ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA, NPWP: 70.385.005.7-435.000; PT ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI, NPWP: 85.896.009.9-435.000; PT BIMA BUMI MANDIRI, NPWP: 85.769.363.4-435.000; PT CAKRA ABDI CEMERLANG, NPWP:

Halaman 214 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86.122.698.3-435.000; PT GEMA PULAU INTAN, NPWP: 86.122.861.7-435.000; PT LAKSANA MEKAR SENTOSA, NPWP: 86.443.244.8-435.000; PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, NPWP: 86.022.824.6-435.000.

- Fotocopy Bukti Penerimaan Elektronik dan Bukti Penerimaan Negara, atas nama PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 4 (empat) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan ke:1, Masa November 2018, atas nama PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan ke:1, Masa Desember 2018, atas nama PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan ke:1, Masa Januari 2019, atas nama PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan ke:1, Masa Februari 2019, atas nama PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy SPT Masa PPN, Pembetulan ke:1, Masa Maret 2019, atas nama PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) set;
- Printout Faktur Pajak, Nomor: 010.005-18.86729146, tanggal 10 Desember 2018, dari PT GEMA PULAU INTAN, NPWP: 86.122.861.7-435.000 kepada PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) lembar;
- Printout Faktur Pajak, Nomor: 010.005-18.76870372, tanggal 30 Desember 2018, dari PT. BIMA BUMI MANDIRI, NPWP: 85.769.363.4-435.000 kepada PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) lembar;
- Printout Faktur Pajak, Nomor: 010.002-19.86344168, tanggal 03 Januari 2019, dari PT. BIMA BUMI MANDIRI, NPWP: 85.769.363.4-435.000 kepada PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 215 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Printout Faktur Pajak, Nomor: 010.002-19.86344173, tanggal 15 Januari 2019, dari PT. BIMA BUMI MANDIRI, NPWP: 85.769.363.4-435.000 kepada PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) lembar;
- Printout Faktur Pajak, Nomor: 010.002-19.86605042, tanggal 05 Februari 2019, dari PT GEMA PULAU INTAN, NPWP: 86.122.861.7-435.000 kepada PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) lembar;
- Printout Faktur Pajak, Nomor: 010.002-19.86344185, tanggal 02 Maret 2019, dari PT. BIMA BUMI MANDIRI, NPWP: 85.769.363.4-435.000 kepada PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) lembar;
- Printout Faktur Pajak, Nomor: 010.002-19.86344194, tanggal 03 Maret 2019, dari PT. BIMA BUMI MANDIRI, NPWP: 85.769.363.4-435.000 kepada PT. CATUR MUKTI, NPWP: 01.320.865.7-017.000, sebanyak 1 (satu) lembar;
- Fotocopy Faktur Pajak dari PT GEMA PULAU INTAN, NPWP: 86.122.861.7-435.000, sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Asli print-out PURCHASE ORDER, dari PT NURBAKA MEGAH kepada PT MULIA KARYA SINERGIA (Contact Person: Ibu CANDRA), sebanyak 5 (lima) lembar;
- Fotocopy print-out Rekening Koran PT NURBAKA MEGAH, No.rek: 1310015271796, Bank Mandiri, sebanyak 4 (empat) lembar;
- Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, Nomor:01, tanggal 3 Agustus 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA, Nomor:03, tanggal 5 Juni 2014, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ILHAMNINDO PUTRA MANDIRI, Nomor:02, tanggal 3 September 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. CAKRA ABDI CEMERLANG, Nomor:05, tanggal 28 September 2018, sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 216 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. GEMA PULAU INTAN, Nomor:04, tanggal 24 September 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. LAKSANA MEKAR SENTOSA, Nomor:04, tanggal 6 November 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA, Nomor:32, tanggal 4 Oktober 2018, sebanyak 1 (satu) set;
- Print out Mutasi Rekening, Bank BJB, Cabang: KCP Pemkab Bekasi, atas nama: PT CAKRA ABADI CEMERLANG, Nomor Rekening: 0090515713001, sebanyak 1 (satu) set;
- Print out Mutasi Rekening, Bank BJB, Cabang: KCP Pemkab Bekasi, atas nama: PT GEMA PULAU INTAN, Nomor Rekening: 0090539507001, sebanyak 1 (satu) set;
- Print out Mutasi Rekening, Bank BJB, Cabang: KCP Pemkab Bekasi, atas nama: BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI, Nomor Rekening: 0089617529001, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotocopy Rekening Bank BRI, KCP Babelan, atas nama SUBUR A, Nomor Rekening: 079901036274533, sebanyak 1 (satu) set.
- Fotokopi Legalisir Akta Pendirian PT MENTARI CAHAYA NUSANTARA, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n MENTARI CAHAYA NUSANTARA, sebanyak 1 (satu) set;
- Printout SPT Masa PPN an PT GEMA PULAU INTAN, PT CAKRA ABADI CEMERLANG, PT ILHAMINDO PUTRA MANDIRI; PT CAHAYA TIGA GEMILANG INDONESIA; PT BAHTERA SUKSESJAYA MANDIRI; PT ALAM SEJAHTERA INDAH ASIA; PT BIMA BUMI MANDIRI sebanyak 7 (tujuh) set;
- Fotokopi Legalisir Akta Pendirian PT GAMINDOTAMA SUKSES, sebanyak 1 (satu) set; -
- Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PT GAMINDOTAMA SUKSES, sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 217 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Legalisir Akta Pendirian PT SINAR ARTNO ASIA, sebanyak 1 (satu) set;
- Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n SINAR ARTNO ASIA, sebanyak 1 (satu) set;
- Fotokopi Legalisir Akta Pendirian PT PUSPA INDAH KARYA, sebanyak 1 (satu) set;
- Asli Berkas Pendaftaran Wajib Pajak / Pengukuhan PKP, a.n PT PUSPA INDAH KARYA, sebanyak 1 (satu) set;
- Asli Surat Jalan, Invoice dan Faktur Pajak dari PT GEMA PULAU INTAN kepada PT SAHABAT SETIA JAYA tanggal 215 Oktober 2018 dan 2 Oktober 2018 sebanyak 2 (dua) set;
- 2. Asli Surat Jalan, Invoice dan Faktur Pajak dari PT BIMA BUMI MANDIRI kepada PT SAHABAT SETIA JAYA tanggal 5 November 2018 sebanyak 1 (satu) set ;
- 1 (satu) set print out validasi rekening Tabungan Mandiri dengan nomor rekening 1310011580000 atas nama SEPI MUHARAM, Periode 1 Januari 2013 s.d. 1 Juni 2019;
- 1 (satu) set print out validasi rekening Tabungan Mandiri dengan nomor rekening 1310011580000 atas nama SEPI MUHARAM, Periode 1 Januari 2019 s.d. 30 Juni 2019.
- Rekening BCA nomor 03760484716 a.n. SEPI MUHARAM periode tahun 2017 s.d 2019;
- Rekening BCA 2721774599 a.n. SUNARKO periode tahun 2017 s.d 2019
- Rekening BCA 4140348398 a.n. YUSUP SUPENDI periode tahun 2017 s.d 2019;
- Rekening BCA 3760377367 a.n. DENI SUHERMAN periode tahun 2017 s.d 2019;
- Rekening BCA 02831675472 a.n. SUHAERI periode tahun 2019;
- Rekening BCA nomor 06825116153 a.n. HENDRIK ABDUL ROHMAN periode tahun 2017 s.d 2019;
- Rekening BCA nomor 02830880863 a.n. R TONY SOPIAN periode tahun 2019;
- Rekening BCA nomor 03760282641 a.n. RIDWAN TAUFAN periode tahun 2018 s.d 2019

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu Suherlan;

Halaman 218 dari 219 Putusan Nomor 594/Pid.B/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020 oleh Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chandra Ramadhani, S.H. M.H., dan Ahmad Faisal M, SH.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Selasa, tanggal 4 Februari 2020 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Evi Setia Permana, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Heddy H Senjaya, SH. M.Hum Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, S.H., M.H.

Muhammad Nafis, S.H.

Ahmad Faisal M, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Evi Setia Permana, S.H.